PROSPEKTUS

OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	:	1 – 5 Juli 2024	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	10 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	8 Juli 2024	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	11 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

EAGLE HIGH PLANTATIONS

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Entitas Anak

KANTOR PUSAT
Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910
Tel: (021) 8665 8828
Website: www.eaglehighplantations.com
Email: corsec@eaglehighplantations.com

KANTOR CABANG:
Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 4 Kantor Cabang yang berlokasi di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Jayapura.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Juli 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP II DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT Kustodian Sentral Efek Indonesia DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT. HARGA CPO SAAT INI DIPENGARUHI OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA, TINGKAT PRODUKSI MINYAK NABATI LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMUMNYA; DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-SEKTOR BARU SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG BERDAMPAK TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
idA-
(*Single A Minus*)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* dan kesanggupan terbaik (*best effort*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

KB Valbury Sekuritas

PT KB Valbury Sekuritas

trimegah SECURITIES

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 021/BOD/EHP/IV/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations di atas, Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi pada BEI berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi No. S-05011/BEI.PP1/05-2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2. tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUP2SK. Selanjutnya, penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DEFINISI DAN SINGKATAN ..... **ii**
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ..... **xii**
RINGKASAN ..... **xiii**
I. PENAWARAN UMUM **1**
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM **10**
III. PERNYATAAN UTANG **12**
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING **32**
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN **36**
VI. FAKTOR RISIKO **50**
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN **54**
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA **55**
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 55
B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5% 93
C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 96
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 97
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 103
F. TATA KELOLA PERUSAHAAN *(GOOD CORPORATE GOVERNANCE/ "GCG")* 104
G. SUMBER DAYA MANUSIA 118
H. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 122
I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK 123
J. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 153
IX. PERPAJAKAN **164**
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI **166**
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL **167**
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT **170**
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI **183**
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI **188**
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM **189**
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN **215**

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu hubungan dengan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan.
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat kontrak dengan Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Bank Kustodian : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

BNRI : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

Bunga Obligasi	:	Berarti bunga Obligasi per tahun dari Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek atau BEI	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
CPO	:	Berarti *Crude Palm Oi*l atau Minyak Kelapa Sawit.
Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek, Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen-dokumen lainnya, serta semua perubahan, penambahan dan/atau pembaruannya dalam rangka yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
DPS	:	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	:	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Emisi	:	Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan atau dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Entitas Anak	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Entitas Asosiasi	:	Berarti perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas tersebut.
FFB atau TBS	:	Berarti *Fresh Fruit Bunc*h atau Tandan Buah Segar**.**
Force Majeure	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru hara di Indonesia, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Gagal Bayar	:	Berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor, sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorius Calendar* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	:	Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jumlah Terutang	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)	:	Berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini yang didasarkan pada komitmen Penjamin Emisi Efek untuk berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 kepada Masyarakat pada pasar perdana sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Konfirmasi Tertulis	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT KB Valbury Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Obligasi	:	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pemegang Obligasi	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat Efek	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pasar Modal.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal (*Bookbuilding*)	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi yang ditawarkan sesuai Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam UUPM, POJK No. 36/2014, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Pengakuan Utang	:	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang No. 103 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta.
Penjamin Emisi Obligasi: atau Penjamin Emisi Efek		Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pihak-pihak lain (apabila ada) yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Peraturan No.IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 7/ POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/ POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Peraturan OJK No. 9/ POJK.04/2018	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/ POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/ POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 19/ POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
Peraturan OJK No. 20/ POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 23/ POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 30/ POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/ POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/ POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 36/ POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/ POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) sebagaimana dimuat dalam dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 19 tanggal 19 April 2024 yang dibuat di hadapan Desty Haninditia S.H., M.Kn., Notaris pengganti Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-040/ OBL/KSEI/0424 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti Perjanjian Penjaminan yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 21 tanggal 19 April 2024 *juncto* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 29 tanggal 17 Mei 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Desty Haninditia S.H., M.Kn., Notaris pengganti Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 36 tanggal 11 Juni 2024 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 101 tanggal 27 Juni 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan	:	Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 20 tanggal 19 April 2024 dan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 28 tanggal 17 Mei 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Desty Haninditia S.H., M.Kn., Notaris pengganti Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 35 tanggal 11 Juni 2024 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan No. 100 tanggal 27 Juni 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	:	Berarti Akta Pernyataan No. 22 tanggal 19 April 2024 dan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Obligasi No. 30 tanggal 17 Mei 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Desty Haninditia S.H., M.Kn., Notaris pengganti Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, serta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Obligasi No. 37 tanggal 11 Juni 2024 dan Akta Addendum III dan Penyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Obligasi No. 102 tanggal 27 Juni 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK dengan Surat No. 021/BOD/EHP/IV/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	:	Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu: a. pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.
Perseroan atau EHP	:	Berarti PT Eagle High Plantations Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek		Surat persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh BEI sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sehubungan dengan permohonan pencatatan Obligasi Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia terhadap Obligasi sebagaimana ternyata dalam Surat No. S-05011/BEI.PP1/05-2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT).
Pokok Obligasi	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM, Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015, dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Efek, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	:	Berarti satuan pemesanan pembelian atau perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Suara	:	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Tanggal Emisi	:	Berarti Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu pada tanggal distribusi efek secara elektronik.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Penjatahan	:	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi kepada Pemegang Obligasi yaitu tanggal 8 Juli 2024.
Utang	:	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
UUP2SK	:	Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
UUPM	:	Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
UUPT	:	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Jakarta.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ADS	:	PT Adhyaksa Dharmasatya
BHL	:	PT Bumihutani Lestari
BLP	:	PT Bumilanggeng Perdanatrada
EHP	:	PT Eagle High Plantations Tbk
GEH	:	Green Eagle Holdings Pte. Ltd.
GES	:	Green Eagle Singapore Pte. Ltd.
FIC	:	FIC Properties SDN BHD
JMS	:	PT Jaya Mandiri Sukses
MAJ	:	PT Manunggal Adi Jaya
PLS	:	PT Pesonalintas Surasejati
RCI	:	PT Rajawali Capital International
SGA	:	PT Singaland Asetama
SMS	:	PT Satria Manunggal Sejahtera
STP	:	PT Suryabumi Tunggal Perkasa
VMA	:	PT Varia Mitra Andalan

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci serta laporan keuangan dan penjelasannya, pendapat-pendapat, pemeriksaan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "PT Bumi Perdana Prima International" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13 tanggal 6 November 2000, yang dibuat dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.TH.2000 tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002 tanggal 12 September 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk. No. 61 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0444896 tanggal 7 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151874.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 September 2021 ("**Akta No. 61/2021**") *juncto* Akta No. 2/2023 telah disesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan IX.J.1"); (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2017; (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Industri dan Pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
   - memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
   - memasarkan hasil industri minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
   - melakukan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.
b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan profil usia perkebunan yang menarik. Per tanggal 31 Desember 2023, seluruh tanaman perseroan merupakan tanaman menghasilkan dengan rata-rata usia tanaman sekitar 16 tahun dan sebagian besar tanaman kelapa sawit Perseroan dalam usia prima untuk menghasilkan produksi yang optimum pada beberapa tahun ke depan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, membudidayakan dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit serta mengekstraksi CPO dan PK.

Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki dua puluh empat anak usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas tanah dengan total luas area sekitar 87.022 hektar. Lokasi perkebunan Perseroan tersebar pada 6 provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Timur tertanam sekitar 24%,

Kalimantan Selatan tertanam sekitar 26%, Kalimantan Tengah tertanam sekitar 31%, Kalimantan Barat tertanam sekitar 4%, Sumatera Barat tertanam sekitar 2% dan Papua tertanam sekitar 13%.

Perkebunan Perseroan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena sebagian besar kebun merupakan satu hamparan sawit yang menyatu sehingga menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.
Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas berupa 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas pengolahan TBS sebesar 370 ton per jam atau sekitar 2.220.000 ton per tahun, 4 bulking dan tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas total sebesar 94.000 ton.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya, Perseroan memanfaatkan sisa hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan/atau produk turunannya menjadi sumber energi terbarukan menggunakan limbah hasil pengolahan.

Prospek Usaha

***Demand* yang Terus Meningkat**

Konsumsi minyak sawit menjadi peringkat pertama pada tahun 2023.

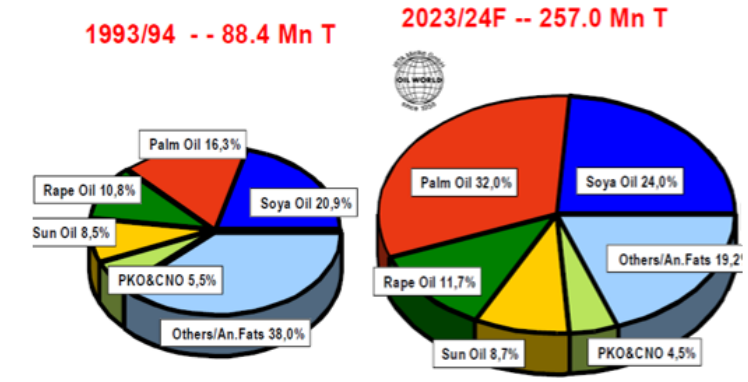

Sumber: Oil World

Disamping itu, terjadi pertumbuhan penduduk pada negara - negara konsumen terbesar CPO dunia, yaitu India, Cina, Pakistan dan Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan pada konsumsi bahan pangan, energi dan kebutuhan sehari-hari.

Grafik Pertumbuhan Penduduk Negara Konsumen Terbesar CPO

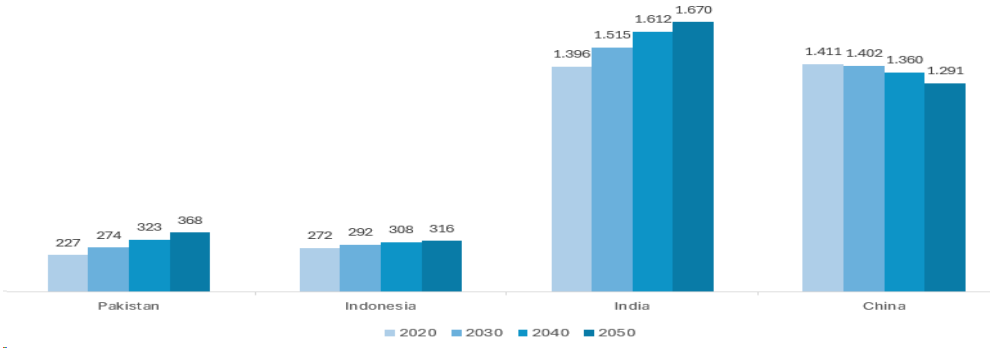

Sumber: World Bank

Dari sisi export minyak nabati pada grafik dibawah, dapat dilihat bahwa ekspor minyak sawit adalah yang tertinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Ekspor Minyak Nabati Dunia

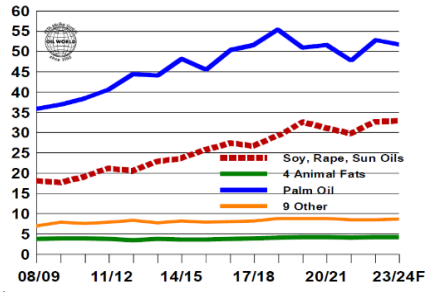

Sumber: Oil World

Konsumsi Biofuel Dunia

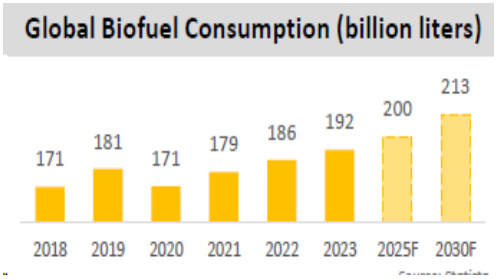

Sumber: Statista

Konsumsi biofuel dunia juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, konsumsi biofuel sebesar 192 juta liter dan diperkirakan mencapai 213 juta liter pada tahun 2030.

Sejak berakhirnya pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2021, dari tahun 2022 hingga saat ini prospek usaha sawit cukup baik dimana harga CPO stabil dan cukup tinggi. Konsumsi akan terus meningkat yang disebabkan peningkatan konsumsi biodiesel, oleochemical dan makanan.

Supply yang Terus Menurun

Terjadi penurunan *supply* minyak sawit yang dikarenakan turunnya produktivitas di Indonesia dan Malaysia sebagai 2 produsen CPO terbesar yang mendominasi 84% produksi CPO dunia. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya program *replanting* atau penanaman kembali dimana sebesar 30% perkebunan kelapa sawit di Malaysia telah berusia 19 tahun, penanaman baru yang sangat lambat, kekurangan tenaga kerja, peningkatan biaya produksi serta tantangan keberlanjutan dan sertifikasi.

Penurunan Produktivitas CPO yield/hektar

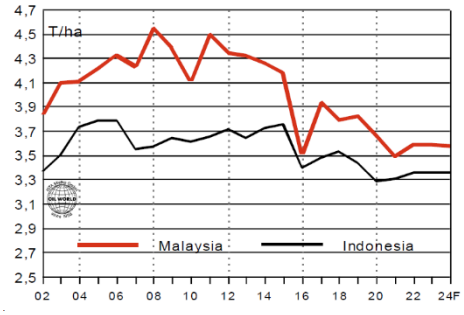

Sumber: Oil World

Produksi Negara Penghasil Sawit Stagnan

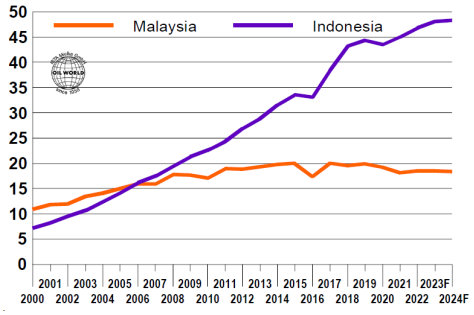

Sumber: Oil World

Produksi tahun 2023 meningkat disebabkan oleh harga CPO yang tinggi yang kemudian mendorong industri untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini.

Produksi CPO Global

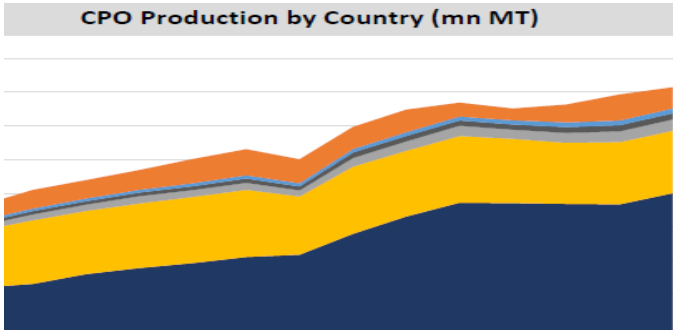

Sumber: Council of Palm Oil Producing Countries

Produksi sawit di Indonesia diperkirakan akan menurun setelah tahun 2023 dikarenakan usia tanaman sawit yang semakin tua dan Indonesia dihadapkan pada moratorium pembukaan lahan baru sawit dan peremajaan sawit rakyat yang tidak berjalan dengan lancar.

Harga CPO pada tahun 2024 diperkirakan akan stabil pada kisaran USD 850/MT – USD 900/MT yang disebabkan beberapa faktor berikut:

1. Perkiraan penurunan hasil produksi FFB karena usia perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia sudah tua;
2. Dampak dari fenomena cuaca El-Nino Indonesia dan Malaysia;
3. Permintaan yang terus tumbuh untuk produksi biodiesel menyusul instruksi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi B35; dan
4. Potensi eskalasi harga minyak mentah akibat ketegangan geopolitik yang berkelanjutan di Eropa dan Timur Tengah.

Secara keseluruhan, jumlah produksi CPO Indonesia pada tahun 2023 mencapai 50 juta ton, atau meningkat sebesar 7,15% YoY dari 46,7 juta ton. Sementara produksi PK mencapai 4,8 juta ton, atau meningkat sebesar 5,7% YoY dari 4,5 juta ton. Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit memperkirakan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara kontributor utama minyak kelapa sawit di pasar global, akan mencapai sekitar 70 juta ton mulai dari tahun 2024. Permintaan sektor hulu terhadap CPO diproyeksikan akan terus meningkat, didorong oleh permintaan konsumsi yang meningkat, minat yang meningkat dalam pengolahan CPO menjadi minyak goreng, biofuel, energi, dan aplikasi kosmetik. Pemanfaatan yang semakin luas dari biofuel sebagai pengganti yang layak untuk minyak bumi dianggap sebagai pendekatan yang bertanggung jawab secara lingkungan terhadap konsumsi bahan bakar. Pangsa pasar penggunaan minyak kelapa sawit utamanya digunakan untuk minyak goreng yang berkontribusi signifikan mencapai 69,5% dan kemudian diikuti oleh penggunaan untuk bahan biodiesel dan pelumas sebesar 14,5%, seiring dengan meningkatnya penerapan minyak kelapa sawit dalam program campuran untuk bahan bakar minyak kendaraan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Riwayat Singkat Perseroan dapat dibaca pada Bab VIII Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024
Target Obligasi Berkelanjutan	:	Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), di mana Pokok Obligasi sebesar Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh *(full commitment),* Sisa dari Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Harga Penawaran	:	100% dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
Tingkat Bunga Obligasi	:	9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	:	Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi	:	Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Efek	:	$_{id}$A- (*Single A Minus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi ("*sinking fund*")	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Hak-hak Pemegang Obligasi	:	Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")	:	RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
Wali Amanat	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk.
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi yang Ditawarkan dapat dibaca pada Bab I Prospektus ini.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk:

1. Sekitar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman dari fasilitas kredit di lembaga keuangan bukan bank dan biaya-biaya terkait yang timbul dari pelunasan fasilitas tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kreditur	:	PT Chandra Sakti Utama Leasing
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	:	Tidak Terafiliasi
Jumlah Fasilitas Kredit **(untuk Perseroan dan 6 Entitas Anak Perseroan)**[1)]	:	Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah)
Posisi Jumlah Pinjaman (per 31 Desember 2023)	:	Rp216.703.450.000,- (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)
Posisi Jumlah Pinjaman (per 31 Maret 2024)		Rp209.777.000.000,- (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)
Jumlah Pembayaran Pinjaman **(khusus bagian Perseroan)**	:	Sekitar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah)
Sisa Jumlah Pinjaman Setelah Pembayaran Pinjaman	:	Rp164.777.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)
Tingkat Bunga	:	15% (lima belas persen) per tahun
Jangka Waktu Pinjaman	:	1 Tahun
Jatuh Tempo	:	31 Juli 2024
Penggunaan Pinjaman	:	Modal kerja

Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	:	Pelunasan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau pelunasan dipercepat (tidak terdapat sanksi apabila pelunasan dipercepat).
Sumber dana untuk pembayaran bunga/ denda	:	Kas internal Perseroan
Nomor dan tanggal perjanjian	:	Akta Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang Dengan Jaminan (*Factoring With Recourse*) No. 01 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dihadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum IX Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Anjak Piutang (*Factoring With Recourse*) No. 87 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta

1) Jumlah fasilitas kredit merupakan fasilitas revolving dan dapat diperpanjang

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian CPO dan FFB dari pihak ketiga pada kuartal III dan IV tahun 2024.

Keterangan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dibaca pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada saat Prospektus diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**5.000.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	7.561.205.714	756.120.571.400,-	23,98
4. Henderi	8.000.000	800.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01
6. Saham treasuri	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	**31.525.291.000**	**3.152.529.100.000,-**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**18.474.709.000**	**1.847.470.900.000,-**	

Keterangan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan Perseroan dapat dibaca pada Bab VIII Prospektus ini.

5. DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Global Network Limited*), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	1.300.009	1.883.769
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.883.501	10.339.799
Jumlah Aset	**10.183.510**	**12.223.568**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.513.085	3.394.292
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.478.875	6.779.633
Jumlah Liabilitas	**7.991.960**	**10.173.925**
Jumlah Ekuitas	**2.191.550**	**2.049.643**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan	4.204.612	4.574.124
EBITDA	1.120.933	1.100.616
Laba Kotor	1.057.146	1.031.456
Laba Tahun Berjalan	159.970	12.635

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	(8,1)	55,7
EBITDA	1,8	37,2
Laba Kotor	2,5	65,0
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	1.166,1	n/a*
Aset	(16,7)	1,5
Liabilitas	(21,4)	1,9
Ekuitas	6,9	(0,4)
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset	1,6	0,1
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas	7,3	0,6
EBITDA / Pendapatan	26,7	24,1
Laba Kotor / Pendapatan	25,1	22,5
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan	3,8	0,3
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah aset lancar/ liabilitas lancar	0,4	0,6
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	3,6	5,0
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	0,8	0,8
Debt Service Coverage Ratio	0,5	0,5
*Interest Coverage Ratio***	2,0	1,9
*Interest-bearing Debt to Equity Ratio****	2,3	3,5

**Untuk periode yang sama pada 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan*
***Interest Coverage Ratio = EBITDA/ beban bunga dan keuangan*
****Interest-bearing Debt to Equity Ratio = Jumlah utang berbunga (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas*

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	633.062	514.295
Arus Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(132.208)	(200.463)
Arus Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(582.375)	(308.563)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(81.521)	5.269
Kas dan Bank Awal Tahun	108.876	103.577
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	23	30
Kas dan Bank Akhir Tahun	**27.378**	**108.876**

Keterangan lebih lengkap mengenai Data Keuangan Perseroan dapat dibaca pada Bab IV Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Fluktuasi Harga Minyak Kelapa Sawit. Harga CPO saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penawaran dan permintaan CPO dan minyak nabati lainnya, tingkat produksi minyak nabati lainnya, harga dari minyak nabati lainnya, penggunaan biofuel dan harga bahan bakar fosil serta kondisi perubahan iklim dan pengaruh alam lainnya, perkembangan ekonomi global pada umumnya dan permintaan dari sektor-sektor baru seperti biofuel. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah produksi dan permintaan terhadap CPO itu sendiri yang berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) dan harga CPO secara global.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut:

A. Risiko Perubahan Iklim
B. Risiko Hama dan Penyakit
C. Risiko Persaingan atas Perolehan Lahan di Indonesia
D. Risiko Kewajiban Memenuhi Peraturan Perundangan Industri
E. Risiko Perubahan Teknologi
F. Risiko Persaingan usaha
G. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

C. RISIKO UMUM

Perseroan juga tidak lepas pada risiko eksternal yang berlaku umum terkait dengan sektor usaha yang dijalankan. Risiko tersebut antara lain:

1. Risiko Kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial
2. Risiko Suku Bunga
3. Risiko Kekurangan Tenaga Kerja
4. Risiko Bencana Alam
5. Risiko Otonomi Daerah

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dibaca pada Bab VI Prospektus ini.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Entitas anak signifikan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Pendirian	Status Operasional	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
1.	BLP	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	15 November 1989	Beroperasi	99,99%	2007
2.	BHL	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	1 Maret 1991	Beroperasi	99,99%	2007
3.	JMS	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	28 Mei 2004	Beroperasi	95,00%	2014
4.	STP	Jakarta	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	11 September 1997	Beroperasi	95,00%	2014

Keterangan lebih lengkap Keterangan Mengenai Entitas Anak Perseroan dapat dibaca pada Bab VIII Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Entitas Anak

KANTOR PUSAT
Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910
Tel: (021) 8665 8828
Website: www.eaglehighplantations.com
Email: corsec@eaglehighplantations.com

KANTOR CABANG:
Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 4 Kantor Cabang yang berlokasi di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Jayapura.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Juli 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI :
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
$_{id}$A-
(*Single A Minus*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT. HARGA CPO SAAT INI DIPENGARUHI OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA, TINGKAT PRODUKSI MINYAK NABATI LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMUMNYA; DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-SEKTOR BARU SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG BERDAMPAK TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
b. Telah menjadi Perseroan atau perusahan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik No. 342/IV/2024/LSK/MSId tertanggal 19 April 2024 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 19 April 2024 yang telah ditandatangani Perseroan.
d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA- (*Single A minus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

"Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Juli 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal
1.	10 Oktober 2024
2.	10 Januari 2025
3.	10 April 2025
4.	20 Juli 2025

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

Berdasarkan pernyataan Perseroan yang berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

Obligasi didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi adalah 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-501/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

$_{id}$A-
(*Single A Minus*)

Hasil pemeringkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode 16 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Yang Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Menjamin atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun dengan nominal diatas 20% dari nilai aset perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum penerbitan Obligasi;
   b. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi, kecuali:
      i. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Nilai Pokok Obligasi, serta Denda (apabila ada).
      ii. Salah satu bidang usaha perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
   c. Menjual atau melakukan pengalihan atas aset Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang berjumlah seluruhnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva secara konsolidasi, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali: (i) penjualan aset tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari atau (ii) penjualan atas aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang sudah tidak dapat digunakan lagi.
   d. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan.
   e. Menerbitkan surat utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi ini (punya hak preferen terhadap agunan khusus yang diberikan dalam rangka penerbitan Obligasi).
   f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
   g. Memberikan kredit dan/atau pinjaman kepada pihak lain, kecuali:
      i. pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak sehubungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak sehari-hari; atau
      ii. pinjaman kepada Direksi dan Karyawan Perseroan.

a. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diajukan dan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Permohonan Persetujuan tersebut tidak akan ditolak atau ditunda tanpa alasan yang wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan dari Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan Perseroan tersebut, dan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Wali Amanat tidak memberikan tanggapannya maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan oleh Wali Amanat;
   c. Apabila Wali Amanat memerlukan dokumen tambahan dari Perseroan dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, maka Wali Amanat akan mengajukan permintaan dokumen tambahan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Perseroan. Dalam hal ini maka ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan persetujuan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu yang diatur dalam ayat 2 butir b Pasal ini tidak berlaku.
   d. Perseroan wajib untuk memberikan secara lengkap dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh Wali Amanat berdasarkan ayat 2 butir c Pasal ini; dan
   e. Setelah Wali Amanat menerima dokumen tambahan secara lengkap, maka Wali Amanat wajib memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap permohonan Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya dokumen tambahan secara lengkap, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

b. Perseroan berkewajiban untuk:
   a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang terkait dengan Obligasi;
   b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds)* sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
   c. Apabila setelah tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ayat 3 butir b Pasal ini, maka Perseroan wajib membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga jumlah yang terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
   d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin apabila izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, atau mempertahankan keabsahan dan keberlakuan dari Perjanjian Perwaliamanatan ini;
   e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan, usaha dan transaksi yang dilakukan Perseroan;
   f. Menjaga dan mempertahankan berdasarkan Laporan Keuangan akhir tahun bulan Desember (audited) Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat:
      Interest Coverage Ratio (ICR) minimal 1,5x (satu koma lima kali). *ICR* adalah perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga dan keuangan. Beban bunga dan keuangan adalah beban bunga dan keuangan terkait pinjaman bank, non-bank dan liabilitas sewa. EBITDA adalah laba bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi.
   g. Menyerahkan kepada Wali Amanat, salinan laporan-laporan yang diminta dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Obligasi, termasuk tidak terbatas penyerahan:
      i. laporan keuangan tahunan konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku terakhir.

ii. laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek atau paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

iii. rincian setiap perkara litigasi, arbitrase atau administratif yang material (yang dapat memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini) yang sedang berlangsung (jika ada), akan berlangsung atau sedang ditunda yang melibatkan Perseroan, segera setelah Perseroan mengetahui hal ini;

h. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;

i. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan, manajemen dan bisnis yang baik dan anggaran dasarnya;

j. Wajib mematuhi seluruh hukum yang berlaku terhadap Perseroan dan peraturan yang diwajibkan oleh otoritas atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dan mengikat Perseroan;

k. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;

l. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.

m. Emiten wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi penggantian Wali Amanat dan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui:
   a) situs web Emiten dan;
   b) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional, paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI. sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku
2. Apabila pada tanggal pembayaran imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.1 Perjanjian Perwaliamanatan ini, ternyata Emiten lalai melakukan pembayaran, maka Emiten wajib membayar jumlah yang wajib dibayar tersebut ditambah denda sebesar 1% (satu persen). Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat sampai dengan pelunasan efektif kewajiban-kewajiban pembayaran imbalan jasa tersebut, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
3. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai, apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

a. Emiten lalai membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Emiten atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Emiten untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
c. Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Emiten oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
d. Emiten lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Dokumen Emisi (selain Pasal 9.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan); atau
e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Emiten dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Emiten tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Emiten tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Emiten dan/atau pengelolaan Emiten secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
g. Emiten berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :

a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20;
b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atau suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian
c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor 20; dan
e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IKHTISAR EFEK BERSIFAT UTANG

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat Efek bersifat utang yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang yang telah diterbitkan Perseroan.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Divisi Treasury
Grup Kustodian dan Wali Amanat
Gedung T Tower Lantai 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Tel: (021) 26966553,
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id
Untuk perhatian : Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk:

1. Sekitar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman dari fasilitas kredit di lembaga keuangan bukan bank dan biaya-biaya terkait yang timbul dari pelunasan fasilitas tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kreditur	:	PT Chandra Sakti Utama Leasing
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	:	Tidak Terafiliasi
Jumlah Fasilitas Kredit **(untuk Perseroan dan 6 Entitas Anak Perseroan)**[1)]	:	Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah)
Posisi Jumlah Pinjaman (per 31 Desember 2023)	:	Rp216.703.450.000,- (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)
Posisi Jumlah Pinjaman (per 31 Maret 2024)		Rp209.777.000.000,- (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)
Jumlah Pembayaran Pinjaman **(khusus bagian Perseroan)**	:	Sekitar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah)
Sisa Jumlah Pinjaman Setelah Pembayaran Pinjaman	:	Rp164.777.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)
Tingkat Bunga	:	15% (lima belas persen) per tahun
Jangka Waktu Pinjaman	:	1 Tahun
Jatuh Tempo	:	31 Juli 2024
Penggunaan Pinjaman	:	Modal kerja
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	:	Pelunasan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau pelunasan dipercepat (tidak terdapat sanksi apabila pelunasan dipercepat).
Sumber dana untuk pembayaran bunga/ denda	:	Kas internal Perseroan
Nomor dan tanggal perjanjian	:	Akta Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang Dengan Jaminan (*Factoring With Recourse*) No. 01 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dihadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum IX Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Anjak Piutang (*Factoring With Recourse*) No. 87 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta

1) Jumlah fasilitas kredit merupakan fasilitas revolving dan dapat diperpanjang

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian CPO dan FFB dari pihak ketiga pada kuartal III dan IV tahun 2024.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya guna membiayai rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I untuk modal kerja berupa pembelian CPO dan FFB tidak akan melibatkan pihak terafiliasi Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"); dan
2. memperoleh persetujuan RUPO;

serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum („**POJK No. 30/2015**"). Dalam hal terdapat dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK 30/2015.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 6,069% (enam koma nol enam sembilan persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terdiri dari:

• Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:		
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*)	:	0,450%
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*)	:	0,150%
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*)	:	0,150%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:		
- Biaya jasa Akuntan Publik	:	0,855%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	:	2,658%
- Biaya jasa Notaris	:	0,237%
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:		
- Biaya jasa Wali Amanat	:	0,247%
- Biaya jasa Pemeringkat Efek	:	0,383%
• Biaya lain-lain terdiri dari: biaya pungutan OJK, biaya pencatatan di BEI, percetakan, iklan, dan biaya audit penjatahan	:	0,939%

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp7.991.960 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp3.513.085 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp4.478.875 juta.

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Global Network Limited*), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	393.718	442.100
Utang usaha		
Pihak berelasi	6.962	3.531
Pihak ketiga	697.933	711.759
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	261.657	400.934
Uang muka diterima - pihak ketiga	124.242	241.040
Utang pajak	242.754	238.135
Beban akrual	103.110	225.311
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	1.122.593	641.300
Liabilitas sewa	58.725	42.535
Utang lembaga keuangan bukan bank	6.469	4.893
Liabilitas jangka pendek lain-lain	494.922	442.754
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.513.085	3.394.292
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	20.859	32.034
Liabiitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	3.019.033	5.446.485
Liabilitas sewa	48.950	76.286
Utang lembaga keuangan bukan bank	196.853	4.598
Liabilitas pajak tangguhan	711.730	711.730
Uang muka setoran modal	220.000	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain	261.450	288.500
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.478.875	6.779.633
JUMLAH LIABILITAS	**7.991.960**	**10.173.925**

1. Utang Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Utang bank jangka pendek	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	181.618
PT Bank Permata Tbk	142.100
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70.000

Keterangan	2023
Jumlah	393.718
Utang bank jangka panjang	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.953.918
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.104.357
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.072.821
PT Bank DBS Indonesia	52.639
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	26.666
PT Bank Raya Indonesia Tbk	16.667
Subjumlah	4.227.068
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(85.442)
Jumlah utang bank jangka panjang	**4.141.626**
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.122.593
Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**3.019.033**

Seluruh utang bank Perseroan diperoleh dari pihak ketiga. Berikut penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Utang bank jangka Panjang	
PT Bumihutani Lestari (BHL)	
Fasilitas Kredit Refinancing	**591.405**
Fasilitas Kredit Modal Kerja	**14.731**
PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)	
Fasilitas Kredit Refinancing	**526.968**
Fasilitas Kredit Modal Kerja	**9.178**
PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)	
Fasilitas Kredit Refinancing	**391.120**
Fasilitas Kredit Modal Kerja	**3.955**
PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)	
Fasilitas Kredit Refinancing	**248.034**
Fasilitas Kredit Modal Kerja	**12.193**
PT Multikarya Sawit Prima (MSP)	
Fasilitas Kredit Refinancing	**149.600**
Fasilitas Kredit Modal Kerja	**6.734**
Subjumlah	**1.953.918**

PT Bumihutani Lestari (BHL)

Pada tanggal 10 September 2015, BHL memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit refinancing untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 650.475 juta dengan jatuh tempo pada 25 November 2028.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, BHL juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 43.431 juta dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)

Pada tanggal 10 September 2015, BLP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit refinancing untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 612.638 juta dengan jatuh tempo pada 25 November 2028.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, BLP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 9.178 juta dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)

Pada tanggal 10 September 2015, ADS memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit refinancing untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 419.570 juta dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, ADS juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 28.554 juta dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

Pada tanggal 10 September 2015, SMS memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit refinancing untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 248.984 juta dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, SMS juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 13.228 juta dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

Pada tanggal 10 September 2015, MSP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit refinancing untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 151.900 juta dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2031.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, MSP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 6.969 juta dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa Persediaan berupa pupuk dan pestisida, suku cadang, bahan bakar dan oli, dan persediaan lainnya, *Letter of Undertaking*, jaminan pengganti sementara berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU), *Corporate Guarantee* dan *Cross Collateral*.

Pinjaman dari BNI mencakup persyaratan yang membatasi hak peminjam tanpa persetujuan tertulis dari BNI, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya, menjadi penjamin, melakukan merger/akuisisi, mengubah status hukum, menjual/menjaminkan aset yang dibiayai BNI, menyatakan pailit, menggadaikan saham, menarik modal, melunasi utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi yang telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi kecuali apabila rasio keuangan telah terpenuhi. Disamping itu, peminjam diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio lebih dari 1x*
- *Debt service coverage ratio lebih dari 1x*
- *Debt to Equity ratio maksimal 2,6x*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BLP, BHL, ADS dan MSP telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2023 perusahaan telah mendapatkan waiver dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terkait pemenuhan rasio keuangan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Utang bank jangka Pendek	
PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)	
Kredit agunan surat berharga non-revolving	70.000
Utang bank jangka Panjang	
PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)	
Kredit investasi Kebun Non-Revolving	722.000
PT Tandan Sawita Papua (TSP)	
Kredit Investasi	382.357
Subjumlah	1.104.357
Jumlah	**1.174.357**

PT Tandan Sawita Papua (TSP)

Pada tanggal 4 Juni 2013, TSP memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi untuk perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 dengan jumlah maksimum Rp 316.575 juta untuk perkebunan kelapa sawit dan Rp 67.282 juta untuk pabrik kelapa sawit dengan jatuh tempo 30 September 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas investasi adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit, abrik kelapa sawit, infrastruktur (sarana & prasarana) & bangunan milik TSP yang terletak di Desa Yetti, Papua; aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit milik PT Jaya Mandiri Sukses yang terletak di Kutai, Kalimantan Timur; serta saham TSP yang dimiliki oleh Perseroan.

TSP diwajibkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:
- *Leverage ratio kurang dari 3x*
- *Self financing ratio lebih dari 35%*
- *Debt service coverage ratio lebih dari 1x*
- *Positive total networth*

TSP juga diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan TSP untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Lain, kecuali untuk transaksi yang wajar; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; membagi dividen dan menurunkan hutang pemegang saham kecuali financial covenant masih terpenuhi baik sebelum maupun setelah pembagian dividen, serta kewajiban finansial kepada Bank Mandiri dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, TSP telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)

Pada tanggal 22 Maret 2019, JMS memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi untuk perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 dengan jumlah maksimum Rp 1.000.000 juta dengan jatuh tempo 9 Desember 2026.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit investasi adalah tingkat bunga referensi bank.

Atas fasilitas Kredit Investasi ini, JMS diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan JMS untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; membagi dividen kecuali financial covenant masih terpenuhi baik sebelum maupun setelah pembagian dividen; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Lain, kecuali untuk transaksi yang wajar; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan JMS kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Bank Mandiri dapat dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Angunan Surat Berharga pada tanggal 27 Maret 2019, JMS memperoleh fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000 juta untuk pembangunan pabrik kelapa sawit. Bunga atas fasilitas ini sebesar 1,25% per tahun. Fasilitas pinjaman telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit agunan surat berharga *non-revolving* adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa 9 (sembilan) lembar bilyet Deposito yang diterbitkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nilai nominal sebesar Rp 150.000 juta milik JMS.

Atas fasilitas KASB ini, JMS diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan JMS untuk mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Bank Mandiri dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, JMS telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas kredit ini telah dilunasi dengan deposito yang dijaminkan sebesar Rp 150.000 juta.

JMS diwajibkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

- *Positive operating cash flow*
- *Debt to equity kurang dari 3x*
- *Debt service coverage ratio lebih dari 1x*
- *Positive total networth*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, JMS telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2023 JMS telah mendapatkan waiver dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait pemenuhan rasio keuangan.

PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Angunan Surat Berharga tanggal 14 September 2021, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000 juta untuk pembiayaan operasional Perseroan. Bunga atas fasilitas ini sebesar 1% per tahun. Fasilitas pinjaman telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 9 Desember 2026.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit agunan surat berharga non-revolving adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa bilyet Deposito yang diterbitkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nilai nominal sebesar Rp70.000 juta.

Atas fasilitas KASB ini, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan untuk mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Bank Mandiri dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Utang bank jangan panjang	
PT Singaland Asetama (SGA)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	363.327
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	434.671
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	255.143
PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	19.680
Subjumlah	**1.072.821**

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 Desember 2015, STP memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi STP. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 566.871 juta dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, infrastruktur (sarana dan prasarana), dan bangunan milik STP yang terletak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama PT Pesonalintas Surasejati, PT Singaland Asetama, PT Karyapratama Agrisejahtera, Perseroan, dan PT Bumihutani Lestari.

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Pada tanggal 22 Desember 2015, PLS memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi PLS. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 337.093 juta dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, infrastruktur (sarana dan prasarana), dan bangunan milik PLS yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama, PT Singaland Asetama, PT Karyapratama Agrisejahtera, Perseroan, PT Bumihutani Lestari, dan PT Suryabumi Tunggal Perkasa.

PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)

Pada tanggal 22 Desember 2015, KAPAG memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi KAPAG. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 28.880 juta dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit milik KAPAG yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan; serta berlaku cross-collateral

dengan perjanjian kredit atas nama PT Singaland Asetama, PT Pesonalintas Surasejati, Perseroan, PT Bumihutani Lestari dan PT Suryabumi Tunggal Perkasa.

PT Singaland Asetama (SGA)

Pada tanggal 22 Desember 2015, SGA memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi SGA. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 479.027 juta dan jatuh tempo pada 31 Desember 2029.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah, perkebunan kelapa sawit beserta bangunan, fasilitas, infrastrukturnya dan fasilitas CPO bulking milik SGA yang terletak di Batu Licin, Kalimantan Selatan; serta berlaku cross-collateral dengan perjanjian kredit atas nama PT Pesonalintas Surasejati, PT Suryabumi Tunggal Perkasa, PT Karyapratama Agrisejahtera, Perseroan, dan PT Bumihutani Lestari.

Peminjam wajib mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

- *Debt equity ratio kurang dari sama dengan 3x*
- *Interest coverage ratio lebih dari sama dengan 1x*

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi sebagian besar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank. Pada tanggal 31 Desember 2023, STP dan SGA telah menerima Waiver dari BRI terkait pemenuhan rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan telah mematuhi sebagian besar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank. Pada tanggal 31 Desember 2022, PLS dan STP telah menerima *Waiver* dari BRI terkait pemenuhan rasio keuangan.

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Utang bank jangka panjang	
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	
Fasilitas termloan	52.639
Subjumlah	**52.639**

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 November 2017, STP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas-fasilitas kredit dalam bentuk *uncommitted omnibus facility* (Fasilitas Omnibus). Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, dan terakhir pada tanggal 12 Januari 2021 dengan maksimum Rp 396.000 juta dengan jatuh tempo 30 Juni 2024.

Atas fasilitas Kredit ini, STP diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya STP tidak diperkenankan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian harta kepada pihak ketiga manapun; STP dilarang mengubah jenis usaha secara material; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit; mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga; menyetujui suatu perjanjian yang menguntungkan Direksi, Komisaris debitur; menyetujui terjadinya pengeluaran modal.

STP wajib mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

- *Debt service coverage ratio sekurang-kurangnya 1,0x pada setiap semester dengan periode pengujian mulai semester I tahun 2022.*

- *Gearing ratio sebesar-besarnya 4x pada setiap triwulan.*
- *Rajawali Grup sebagai pemegang kontrol manajemen dan sebagai pemegang saham mayoritas STP baik secara langsung dan tidak langsung pada setiap saat.*

Perjanjian ini dibuat tanpa pemberian jaminan atau agunan kepada Bank.

Berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut, STP diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, STP telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Bank J-Trust Indonesia (Tbk)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Utang bank jangka pendek	
PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)	
Fasilitas Non-Revolving	59.500
Fasilitas Back to Back - Revolving	50.000
Fasilitas Revolving Basis	42.118
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	
Fasilitas on Revolving	30.000
Subjumlah	181.618
Utang bank jangka Panjang	
PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)	
Fasilitas Revolving	26.666
Subjumlah	26.666
Jumlah	**208.284**

PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)

Fasilitas kredit yang diterima Perseroan dan Entitas Anak dari PT Bank J-Trust Indonesia (Tbk) adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Februari 2022, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan (KAP), dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000 juta. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 22 Februari 2023 dan akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2024.

   Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

2. Pada tanggal 7 Juni 2023, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Kredit Atas Permintaan 2 (KAP 2), dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 40.000 juta dan Rp 77.000 juta. Fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2024.

   Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

3. Pada tanggal 22 September 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan (KAP), dengan jumlah maksimum sebesar Rp 60.000 juta. Perjanjian pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 15 September 2024.

   Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang)

Seluruh pinjaman Perseroan tersebut dijamin secara *cross collateral* dengan aset berupa tanah yang terletak di DKI Jakarta, deposito berjangka milik Perseroan sebesar Rp 60.000 juta dan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan Perseroan untuk mengubah anggaran dasar, termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Perseroan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; melakukan pembagian dividen, melakukan pembubaran, penggabungan usaha, maupun peleburan dengan perusahaan lain, serta kewajiban finansial kepada Bank J Trust Indonesia dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 Oktober 2021, STP memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan *Back to Back* (KAP BTB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 25 Oktober 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka milik STP sebesar Rp 30.000 juta.

STP diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan STP untuk mengubah anggaran dasar, termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban STP; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan STP kepada pihak lain; melakukan pembagian dividen, melakukan pembubaran, penggabungan usaha, maupun peleburan dengan perusahaan lain, serta kewajiban finansial kepada PT J Trust Indonesia dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, STP telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Bank Raya Indonesia Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Utang bank jangka Panjang	
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	
Kredit Modal Kerja Non-revolving	9.667
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)	
Kredit Modal Kerja Non-revolving	7.000
Subjumlah	**16.667**

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Pada tanggal 20 Juni 2017, PLS memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 21.000 juta. Pada tanggal 17 Juni 2022, PLS memperoleh fasilitas yang semula adalah Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) diubah menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja – Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) dengan jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja non-revolving adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 20 Juni 2017, STP memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja - Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 29.000 juta. Pada tanggal 17 Juni 2022, STP memperoleh fasilitas yang semula adalah Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) diubah menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja – Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) dengan jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja non-revolving adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik PLS. Agunan tersebut berlaku *cross collateral* untuk seluruh fasilitas kredit atas nama PT Suryabumi Tunggal Perkasa, PT Pesonalintas Surasejati dan Koperasi Perkebunan Rukmana Sari.

Pinjaman dari bank mencakup persyaratan yang mewajibkan debitur untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

- *Minimal Debt Equity Ratio (DER) kurang dari 4x*
- *Minimal Interest Coverage Ration (ICR) 1,5x*
- *Minimal Current Ratio (CR) 1,5x*
- *Berkomiten untuk melakukan perbaikan kualitas produktivitas baik kebun kelapa sawit maupun pabrik minyak kelapa sawit.*
- *Apabila poin diatas tidak terpenuhi maka debitur menyetujui untuk dilakukan review suku bunga.*

Debitur juga diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; melakukan merger, akuisisi, penjualan aktiva tetap yang telah dijaminkan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain; mengajukan permohonan pernyataan pailit atau PKPU; menyewakan aset yang diagunkan pada Bank; membayar atau melunasi hutang pemegang saham sampai dengan kredit lunas. Debitur juga wajib melakukan sebagian besar transaksi keuangan melalui PT Bank Raya Indonesia Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, PLS dan STP telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Bank Permata Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Utang bank jangka pendek	
PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)	
Fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah	142.100

PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perseroan, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 196.000 juta. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 19 Februari 2024. Tingkat bagi hasil adalah tingkat nisbah bagi hasil referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening giro deposito atas nama PT Rajawali Corpora sampai dengan Rp 200.000 juta.

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya untuk menyampaikan laporan keuangan internal kuartalan maksimal 90 hari dan laporan keuangan tahunan

auditan maksimal 180 hari sejak pelaporan; menjadi penjamin terhadap hutang dagang pihak lain, kecuali hutang datang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga: yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva ("Pembatasan") atau dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

2. Utang Usaha

Akun ini terutama merupakan utang atas pembelian produk kelapa sawit, pupuk dan peralatan perkebunan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Berdasarkan pemasok	
Pihak berelasi – Rupiah	
PT Netto Cyber Indonesia	3.535
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	3.427
Subjumlah	6.962
Pihak ketiga – Rupiah	
PT Agrimas Utama Indonesia	228.931
PT Goautama Sinarbatuah	65.615
Koperasi Kumai Hulu Seberang	13.510
PT Indopalma Agro Persada	13.469
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	8.954
Koperasi Sawit Agung Baya (KLIA)	8.311
CV Sinar Cahaya Mulia	7.891
Regar	7.467
Koperasi Keham Lestari (GHRA)	7.360
PT Arjuna Utama Sawit	6.132
PT United Shipping Indonesia	5.556
Koperasi Jaminan Masa Depan Sejahtera	4.813
PT Wong Akeh Utama	2.208
PT Sari Anjir Serapat	3.348
CV Janur	3.246
Lain-lain (masing-masing, kurang dari Rp5.000)	310.409
Subjumlah	697.220
Pihak ketiga – Dolar Amerika Serikat	
Boilermech Sdn Bhd	713
Subjumlah	713
Subjumlah pihak ketiga	697.933
Jumlah	**704.895**
Belum jatuh tempo	211.469
Jatuh tempo	
Dibawah 30 hari	176.224
31 – 60 hari	140.979
61 – 90 hari	105.734
Diatas 90 hari	70.489
Jumlah	**704.895**

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

3. Uang Muka Diterima – Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
PT Tapian Nadenggan	59.940
PT Sinarmas Agro Resources dan Technology Tbk	40.375
PT Sari Dumai Sejati	18.680
PT Sinar Jaya Inti Mulia	964
PT Binasawit Abadi Pratama	598
PT Kutai Refinery Nusantara	316
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp2.000)	3.369
Jumlah	**124.242**

4. Beban Akrual

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Gaji dan upah	**55.328**
Bonus dan tunjangan	**24.715**
Beban bunga	**9.420**
Biaya jasa profesional	**7.900**
Jamsostek	**5.747**
Jumlah	**103.110**

5. Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Pajak penghasilan:	
Pajak kini	17.201
Pasal 21	56.773
Pasal 22	7.914
Pasal 23	20.465
Pajak pertambahan nilai	79.627
Pajak bumi dan bangunan	38.514
Lain-lain	22.260
Jumlah	**242.754**

Pada tahun 31 Desember 2023, Perseroan dan Entitas Anak memperoleh Surat Ketetapan Pajak Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdiri dari Pajak Kini, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4(2), Pasal 25, Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dengan total Rp22.260 juta.

6. Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek – Pihak ketiga (Rupiah)	
PT Chandra Sakti Utama Leasing	216.704
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	27.953
PT Globalindo Multi Finance	17.000
Subjumlah	261.657
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang – Pihak ketiga (Rupiah)	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	197.900
PT Astra Credit Companies	2.134
PT Toyota Astra Finance	1.454
PT Chandra Sakti Utama Leasing	1.050
PT Dipo Star Finance	605
PT Mandiri Tunas Finance	604
Subjumlah	203.747
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(425)
Jumlah utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	**203.322**
Bagian utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	6.469
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**196.853**

Penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas	Saldo Akhir 2023	Fasilitas	Jatuh Tempo	Jaminan	Tingkat Margin Per Tahun
Lembaga Pembuiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)					
MAJ	197.900	Fasilitas pembiayaan Syariah Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqisah dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp203.000	31/12/2028	*Letter of Undertaking* dari Perseroan, garansi Perseroan, tanah, perkebunan kelapa sawit, dan saham	10,00%
Jumlah	**197.900**				
PT Chandra Sakti Utama Leasing					
Perseroan	66.874	Fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dengan jaminan, maksimal sebesar Rp220.000 pada tanggal 31 Desember 2023.	31/07/2024	Piutang usaha dan persediaan.	15,00%
STP	61.888				
BHL	87.942				
Jumlah	**216.704**				
PT Radana Baskhara Finance					
Perseroan	27.953	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan maksimal sebesar Rp35.000	23/06/2025	Tanah dan bangunan	13,00%
PT Globalindo Multi Finance					

Entitas	Saldo Akhir 2023	Fasilitas	Jatuh Tempo	Jaminan	Tingkat Margin Per Tahun
ADS	17.000	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan maksimal sebesar Rp17.000	31/12/2024	Piutang usaha	16,00%
PT Astra Credit Companies					
JMS	755	Fasilitas pembiyaan pembelian dengan pembayaran scara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2.734	01/09/2024	Kendaraan dan alat berat	9,90%
STP	1.379	Fasilitas pembiayaan pembeliaan dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp4.524	22/10/2024	Kendaraan dan alat berat	9,90%
Jumlah	**2.134**				
PT Toyota Astra Finance					
TSP	291	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp376	31/02/2026	Kendaraan dan alat berat	11,39%
BLP	198	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp205	13/11/2026	Kendaraan dan alat berat	8,57%
BHL	198	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp205	13/11/2026	Kendaraan dan alat berat	8,57%
JMS	194	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp200	26/11/2026	Kendaraan dan alat berat	8,57%
PLS	191	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp197	27/11/2026	Kendaraan dan alat berat	8,57%
SGA	191	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp197	27/11/2026	Kendaraan dan alat berat	8,57%
STP	191	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp197	27/11/2026	Kendaraan dan alat berat	8,57%
Jumlah	**1.454**				

Entitas	Saldo Akhir 2023	Fasilitas	Jatuh Tempo	Jaminan	Tingkat Margin Per Tahun
PT Chandri Sakti Utama Leasing					
JMS	287	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.092	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat	15,00%
SGA	94	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp359	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat	15,00%
STP	188	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp715	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat	15,00%
MAJ	96	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp366	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat	15,00%
BHL	385	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.469	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat	15,00%
Jumlah	**1.050**				
PT Dipo Star Finance					
JMS	315	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2.734	01/09/2024	Kendaraan dan alat berat	10,50%
BLP	290	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp792	31/12/2024	Kendaraan dan alat berat	10,50%
Jumlah	**605**				
PT Mandiri Tunas Finance					
JMS	604	Fasilitas pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp623	03/11/2026	Kendaraan dan alat berat	7,28%

Fasilitas ini memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dan termasuk diantaranya rasio keuangan yang harus dipenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi syarat dan kondisi fasilitas pembiayaan yang ditetapkan.

Marjin keuntungan dapat direviu setiap saat sesuai kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jumlah beban bagi hasil untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 atas fasilitas pembiayaan syariah ini sebesar Rp23.684 juta.

Jumlah beban bunga dan keuangan sebesar Rp48.524 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 atas fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dan pembiayaan pembelian kendaraan.

7. Liabilitas Sewa

Nilai tunai pembayaran sewa pembiayaan minimum masa datang (*future minimum lease payments*) dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
a. Analisa jatuh tempo:	
< 1 tahun	66.294
1 – 2 tahun	35.495
2 – 3 tahun	16.605
Jumlah	118.394
Dikurangi bagian bunga	(10.719)
Jumlah nilai tunai	**107.675**
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	58.725
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun - bersih	**48.950**
b. Berdasarkan pesewa	
PT Shinhan Indo Finance	29.712
PT Surya Artha Nusantara Finance	21.496
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	21.086
PT Dipo Star Finance	16.661
PT ORIX Indonesia Finance	7.293
PT Chandra Sakti Utama Leasing	6.637
PT Astra Sedaya Finance	3.228
PT BRI Multifinance Indonesia	1.562
Jumlah	**107.675**

Tingkat suku bunga per tahun sewa pembiayaan ini untuk tahun 2023 adalah sebesar 9 – 15%.

Beban bunga liabilitas sewa adalah sebesar Rp11.115 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

8. Uang Muka Setoran Modal

Berdasarkan perjanjian uang muka setoran modal tanggal 9 Juni 2021, antara Perseroan dengan RCI, dimana RCI akan memberikan fasilitas uang muka setoran modal sebesar Rp170.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2022, RCI menambah uang setoran modal sebesar Rp50.000 juta.

9. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185(b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja 2/2022) pada tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan berlakunya Perppu ini, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perppu Cipta Kerja 2/2022 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh KKA Herman Budi Purwanto, aktuaris independen, tertanggal 29 Januari 2024.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 688 pada tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait dengan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Biaya jasa:	
Biaya jasa lalu	(77)
Biaya jasa kini	2.077
Beban bunga neto	1.589
Subtotal biaya manfaat pasti	3.589
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	3.589
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	2.094
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(6.019)
Penjualan anak perusahaan	1.597
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(2.328)
Jumlah	**1.261**

Pada tahun 2023, beban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam akun “Beban Umum dan Administrasi” dalam laba rugi.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2023
Saldo awal tahun	32.034
Biaya jasa lalu	(77)
Biaya jasa kini	2.077
Beban bunga neto	1.589
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	2.094
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(6.019)
Entitas anak dijual	(3.334)
Pembayaran manfaat	(7.505)
Jumlah	**20.859**

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan berkurang sebesar Rp1.349 juta (meningkat sebesar Rp1.483 juta).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan naik sebesar Rp1.484 juta (turun sebesar Rp1.374 juta).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan kerja jangka panjang mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk menghitung imbalan kerja jangka panjang:

Usia pensiun normal	:	60 tahun
Tingkat kenaikan gaji	:	5% per tahun
Tingkat bunga diskonto	:	7,20% - 7,44% per tahun
Tingkat pengunduran diri	:	15% per tahun sampai dengan 54 tahun

10. Liabilitas Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	1 Januari 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain	Penjualan Entitas Anak	31 Desember 2023
Perseroan					
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					
Imbalan pasca kerja	3	2	(3)	-	2
Klaim mutu	67	(67)	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.240	(93)	-	-	3.147
Rugi fiskal	716.167	12.811	-	-	728.978
Koreksi negatif penjualan anak	(6.427)	6.427	-	-	-
Liabilitas sewa	-	25	-	-	25
Penyusutan dan amortisasi	(4.964)	375	-	-	(4.589)
Jumlah	708.086	19.480	(3)	-	727.563
Entitas Anak					
Aset pajak tangguhan	670.111	265.296	(509)	(230.268)	704.630
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)				(711.730)
Jumlah	(41.619)	265.296	(509)	(230.268)	(7.100)
Aset pajak tangguhan	1.378.197	284.776	(512)	(230.268)	1.432.193
Liabilitas pajak tangguhan	**(711.730)**	**-**	**-**	**-**	**(711.730)**

11. Liabilitas dan Kontinjensi

Perseroan dan Entitas anak menerapkan beberapa program plasma, dimana biaya pengembangan perkebunan plasma dibiayai oleh fasilitas kredit yang diberikan oleh bank yang ditunjuk untuk petani melalui koperasi setempat sebagai perwakilan dari petani. Saldo pinjaman bank yang diberikan oleh bank untuk petani dan dijamin oleh masing-masing Entitas anak pada akhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Jumlah fasilitas	709.560
Jumlah utang dari petani plasma	448.702

12. Kewajiban Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu 3 (Tiga) Bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Prospektus ini adalah sebesar Rp 178.238 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	68.750
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.350
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	500
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	6.667
PT Surya Artha Nusantara Finance	3.602
PT Shinhan Indo Finance	4.478
PT Mandiri Tunas Finance	58
PT Astra Credit Companies	1.409
PT Toyota Astra Finance	277
PT Dipo Star Finance	3.694
PT Chandra Sakti Utama Leasing	2.074
PT ORIX Indonesia Finance	1.186
PT BRI Multifinance Indonesia	193
Jumlah	**178.238**

Pembayaran seluruh kewajiban ini akan dilakukan menggunakan dana kas internal Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SERTA SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Global Network Limited*), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	27.378	108.876
Piutang usaha	32.137	41.005
Piutang plasma	334.925	314.222
Piutang lain-lain	10.008	13.553
Persediaan	214.132	484.150
Pajak dibayar dimuka	64.951	86.849
Biaya dibayar dimuka	119.427	129.240
Uang muka kepada pemasok - pihak ketiga	126.236	165.711
Aset biologis	286.700	292.957
Aset lancar lain-lain	84.115	247.206
Jumlah Aset Lancar	1.300.009	1. 883.769
Aset Tidak Lancar		
Tanaman produktif		
Tanaman menghasilkan	2.942.089	3.944.232
Tanaman belum menghasilkan	18.923	16.815
Pembibitan	75.137	66.585
Aset tetap	3.198.863	3.487.975
Goodwill dan aset tak berwujud lainnya - bersih	960.589	981.327
Aset pajak tangguhan	1.432.193	1.378.197
Aset tidak lancar lainnya	255.707	464.668
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.883.501	10.339.799
JUMLAH ASET	**10.183.510**	**12.223.568**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	393.718	442.100
Utang usaha		
Pihak berelasi	6.962	3.531
Pihak ketiga	697.933	711.759
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	261.657	400.934
Uang muka diterima - pihak ketiga	124.242	241.040
Utang pajak	242.754	238.135
Beban akrual	103.110	225.311
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Utang bank	1.122.593	641.300
Liabilitas sewa	58.725	42.535
Utang lembanga keuangan bukan bank	6.469	4.893
Liabilitas jangka pendek lain-lain	494.922	442.754
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.513.085	3.394.292
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	20.859	32.034
Liabiitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	3.019.033	5.446.485
Liabilitas sewa	48.950	76.286
Utang lembaga keuangan bukan bank	196.853	4.598
Liabilitas pajak tangguhan	711.730	711.730
Uang muka setoran modal	220.000	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain	261.450	288.500
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.478.875	6.779.633
JUMLAH LIABILITAS	**7.991.960**	**10.173.925**
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham		
Modal dasar - 50.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor - 31.525.291.000 saham	3.152.529	3.152.529
Saham treasuri - 402.922.800 saham dan 223.631.400 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	(40.292)	(22.363)
Tambahan modal disetor	4.015.083	4.007.764
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(241.141)	(241.141)
Rugi komprehensif lain	(373.981)	(366.528)
Defisit	(4.329.883)	(4.506.908)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	2.182.315	2.023.353
Kepentingan Non-pengendali	9.235	26.290
Jumlah Ekuitas	2.191.550	2.049.643
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**10.183.510**	**12.223.568**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	(8,1)	55,7
EBITDA	1,8	37,2
Laba Kotor	2,5	65,0
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	1.166,1	n/a*
Aset	(16,7)	1,5
Liabilitas	(21,4)	1,9
Ekuitas	6,9	(0,4)
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset	1,6	0,1
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas	7,3	0,6
EBITDA / Pendapatan	26,7	24,1
Laba Kotor / Pendapatan	25,1	22,5
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan	3,8	0,3
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah aset lancar/ liabilitas lancar	0,4	0,6
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	3,6	5,0
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	0,8	0,8
Debt Service Coverage Ratio	0,5	0,5
*Interest Coverage Ratio***	2,0	1,9
*Interest-bearing Debt to Equity Ratio****	2,3	3,5

**Untuk periode yang sama pada 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan*
***Interest Coverage Ratio = EBITDA/ beban bunga dan keuangan*
****Interest-bearing Debt to Equity Ratio = Jumlah utang berbunga (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas*

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Desember	
		2023	2022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Current Ratio	Minimal 1x	0,4x	0,6x
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	0,5x	0,5x
Debt to Equity Ratio	Maksimal 2,6x	3,6x	5,0x
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	0,5x	0,5x
Debt to Equity Ratio	Maksimal 3x	3,6x	5,0x
PT Bank Raya Indonesia Tbk			
Current Ratio	Minimal 1,5x	0,4x	0,6x
Interest Coverage Ratio	Minimal 1,5x	2,0x	1,9x
Debt to Equity Ratio	Maksimal 4x	3,6x	5,0x
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Debt to Equity Ratio	Maksimal 3x	3,6x	5,0x
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	0,5x	0,5x
Self-financing Ratio	Minimal 35%	65%	43%
Operating Cash Flow	Positif	Positif	Positif
Total networth	Positif	Positif	Positif
PT Bank DBS Indonesia			
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	0,5x	0,5x
Gearing Ratio	Maksimal 4x	3,6x	5,0x

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan Entitas anak telah mematuhi sebagian besar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjan jian kredit, kecuali beberapa rasio keuangan entitas anak. Perseroan dan Entitas Anak telah menerima surat persetujuan *waiver.*

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Global Network Limited), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/ AU.1/01/0155-2/1/VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Tahun 2023 merupakan tahun pembuktian bagi Perseroan karena berhasil menaklukkan berbagai tantangan global dan dinamika perekonomian nasional. Fenomena El-Nino yang berkepanjangan, peningkatan suhu yang ekstrem, perubahan pola hujan yang tidak terduga memberikan dampak penurunan pasokan buah di beberapa negara produsen kelapa sawit, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi operasional Perseroan, namun berkat konsistensi Perseroan dalam penerapan praktik agronomi yang baik dan mengoptimalkan umur perkebunan yang sedang prima, Perseroan berhasil menghadapi dan beradaptasi dengan semua tantangan yang ada.

Positioned for Excellence-led Growth

Meski sebagian besar tren produksi di perkebunan sawit mengalami penurunan, namun Perseroan berhasil mempertahankan produktivitas dengan menjaga produksi tetap stabil serta volume penjualan CPO dan PK mengalami peningkatan. Volume Penjualan CPO tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,64%, naik dari 335.028 MT menjadi 347.227 MT YoY, sedangkan penjualan PK meningkat sebesar 5,38% dari 59.455 MT menjadi 62.653 MT dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Tak hanya itu, EHP juga berhasil mencatatkan peningkatan yield FFB per hektar sebesar 34%.

Dari aspek keuangan, pencapaian pada kuartal IV tahun 2023 tercatat searah dengan target pertumbuhan *double digit* yang sudah menjadi tradisi tahunan Perseroan. EHP berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp159,97 miliar. *Gross Profit Margin* dan *Operating Margin* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 11,49% dan 15,78% meskipun pendapatan mengalami penurunan sebesar 8,08% yang disebabkan karena penurunan rata-rata harga pasar CPO dan PK yang signifikan di Kuartal III-2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perolehan tersebut merupakan hasil dari peningkatan produktivitas tanaman karena penerapan praktik agronomi yang baik serta efisiensi biaya yang berhasil dipertahankan oleh Perseroan. Lebih spesifik dalam hal efisiensi, Perseroan berhasil dalam strategi pengurangan pinjaman bank dan lembaga keuangan bukan bank sebanyak 27,64% sehingga berdampak pada pengurangan beban bunga sebesar 3%.

Tahun 2023 juga mencatat rekam jejak EHP dalam melakukan ekspansi bisnis. Pada bulan Agustus, Perseroan telah melakukan groundbreaking PKS baru berkapasitas 30 ton per jam di perkebunan Kalimantan Timur. Proses pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu 15-18 bulan sebelum dapat beroperasi secara komersial. PKS ini akan menjadi katalis pengembangan kapasitas pengolahan EHP yang saat ini telah mengoperasikan 6 PKS di Kalimantan dan 1 PKS di Papua dengan total kapasitas pengolahan 370 ton per jam.

Komitmen terhadap Keberlanjutan

Tahun 2023 juga menyoroti komitmen EHP terhadap aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola/ Environmental, Social, and Governance (ESG). Melalui berbagai inisiatif, Perseroan terus memperkuat praktik agronomi yang berkelanjutan, menjaga ekosistem lingkungan tempat EHP beroperasi, dan memperluas program-program sosial yang memberdayakan masyarakat lokal. Seluruhnya berjalan dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sebagaimana tercermin pada keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan sertifikasi yang dimiliki melalui perolehan tambahan 1 (satu) sertifikasi RSPO dan 2 (dua) sertifikasi ISPO, sehingga Perseroan kini memiliki 2 (dua) sertifikasi RSPO dan 8 (delapan) Sertifikasi ISPO. Disamping itu EHP juga berhasil meningkatkan skor SPOTT sebesar 4,3%. Pencapaian tersebut menjadi manifestasi komitmen EHP dalam upaya mengintegrasikan keberlanjutan pada seluruh kegiatan bisnisnya.

Untuk kinerja aspek lingkungan, Perseroan dapat mengurangi emisi sebesar 3,7% di sepanjang tahun 2023. Perseroan juga terus mengaktualisasikan inisiatif perlindungan habitat, menerapkan pengendalian hama terpadu, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengelola limbah dengan bertanggung jawab.

Adapun dalam penerapan kinerja sosial, Perseroan secara konsisten melaksanakan sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat lokal. Fokus program yang dilakukan oleh Perseroan terdiri dari 4 aspek yaitu pengembangan masyarakat, kepedulian dan perlindungan lingkungan hidup, pembangunan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur, serta kepedulian sosial. Melalui berbagai program yang diaktualisasikan, Perseroan berupaya untuk menjadi mitra yang positif bagi komunitas di sekitar wilayah operasional. Perseroan juga memastikan lingkungan kerja yang kondusif, setara, dan aman bagi seluruh karyawan dengan mewujudkan *zero fatality* dan mencatat 14.195 jam pelatihan, meningkat 554% dari tahun sebelumnya.

Sinergi dan Integrasi untuk Keberlanjutan

Untuk mewujudkan keberlanjutan dalam skala yang lebih besar, Perseroan menyadari bahwa sinergi merupakan kunci utama keberlanjutan. Agar sinergi menjadi optimal dan memberikan dampak keberlanjutan yang nyata, EHP telah menjalin sinergi dengan entitas anak PT ABM Investama Tbk (ABMM) dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sukadamai yang telah resmi beroperasi pada tahun 2020. Kerjasama sinergis dengan salah satu pionir perusahaan bidang energi baru dan terbarukan (EBT) ini membuahkan perolehan Piagam Aditama untuk kategori Kinerja Pengembang Pembangkit Tenaga Listrik Bioenergi pada ajang penghargaan Subroto 2023 (Subroto Award) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perolehan ini menegaskan komitmen dalam penerapan tata kelola yang baik, optimalisasi kinerja Pembangkit listrik ramah lingkungan dan reduksi emisi gas rumah kaca, hingga pengelolaan K3 dan lingkungan hidup secara *excellent*.

Melanjutkan prestasi tersebut, Perseroan juga berencana melakukan pengembangan PLTBg berkapasitas 2,1 hingga 2,4 Mega Watt (MW) di wilayah operasional PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP), Kalimantan Tengah. Output listrik dari PLTBg lini pendapatan baru akan digunakan untuk fasilitas karyawan, pabrik pengelohan kelapa sawit dan operasional Kernel Crushing Plant (KCP). Pembangunan KCP ini akan dimulai di tahun 2024 dan akan menjadi lini pendapatan baru untuk EHP. KCP yang menggunakan energi terbarukan ini akan mengelola kernel sawit asal kebun EHP sendiri. Dengan demikian, Perseroan dapat meningkatkan kinerja finansialnya seraya menjaga komitmen keberlanjutan terhadap aspek ESG dan teknologi.

Secara keseluruhan, Perseroan menganggarkan alokasi belanja modal atau capital expenditure (Capex) sebesar Rp300 miliar untuk rencana bisnis tahun 2024. Dana Capex tahun mendatang difokuskan untuk

pembangunan mill extension di Kalimantan Timur, KCP, dan pembangunan PLTBg yang diharapkan dapat menambah hilirisasi green project sebagai bentuk komitmen EHP terhadap ESG.

Dalam mencapai setiap target keberlanjutan yang telah ditetapkan, Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan risiko, baik risiko ekonomi dan risiko ESG. Risiko-risiko tersebut menjadi tantangan bagi Perseroan untuk menyusun strategi terintegrasi guna mencapai target bisnis yang sejalan dengan pencapaian kinerja ESG. Tantangan tentu akan selalu membayangi langkah kita. Namun, dengan strategi yang tepat dan komitmen yang tidak berubah terhadap kualitas dan keberlanjutan, Perseroan memandang masa depan dengan optimis. Perseroan berkomitmen untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan terus memperkuat kontribusi bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. ANALISA LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	1.300.009	1.883.769
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.883.501	10.339.799
Jumlah Aset	**10.183.510**	**12.223.568**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.513.085	3.394.292
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.478.875	6.779.633
Jumlah Liabilitas	**7.991.960**	**10.173.925**
Jumlah Ekuitas	**2.191.550**	**2.049.643**

Jumlah Aset

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp10.183.510 juta, menurun Rp2.040.058 juta dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.223.568 juta. Penurunan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 disebabkan oleh penurunan jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar masing-masing sebesar Rp583.760 juta dan Rp1.456.298 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Aset Lancar

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp1.300.009 juta, menurun Rp583.760 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.883.769 juta. Faktor utama penurunan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 seiring dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional yang telah dilakukan melalui upaya meningkatkan perputaran penjualan sehingga jumlah persediaan dan piutang usaha Perseroan menurun, serta hanya menjaga jumlah nilai persediaan minimum. Dengan demikian, Perseroan dapat mengurangi kebutuhan modal kerja yang tinggi. Penurunan persediaan barang jadi Perseroan disebabkan oleh keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan efektivitas rantai pasokan persediaan barang jadi sekaligus untuk mitigasi risiko penurunan kualitas CPO.

Atas beberapa upaya tersebut di atas, Perseroan mencatatkan efisiensi kebutuhan modal kerja pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercermin dari jumlah persediaan, aset lancar lain-lain, dan uang muka kepada pemasok pihak ketiga yang masing-masing menurun Rp270.018 juta, Rp163.091 juta, dan Rp39.475 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp8.883.501 juta, menurun sebesar Rp1.456.298 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.339.799 juta. Penurunan jumlah aset tidak lancar seiring dengan penurunan liabilitas tidak lancar sebesar Rp2.300.758 juta karena Perseroan melakukan rasionalisasi aset.

Jumlah Liabilitas

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp7.991.960 juta, menurun sebesar Rp2.181.965 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.173.925. Penurunan jumlah liabilitas Perseroan disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.300.758 juta sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp3.513.085 juta, meningkat sebesar Rp118.793 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.394.292 juta. Kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan disebabkan oleh peningkatan bagian liabilitas jangka panjang dari utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp481.293 juta. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Liabilitas Jangka Panjang

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp4.478.875 juta, menurun sebesar Rp2.300.758 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.779.633 juta. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang merupakan komitmen Perseroan untuk mencapai tingkat *leverage* yang lebih sehat. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi kewajiban liabilitas jangka panjangnya.

Jumlah Ekuitas

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp2.191.550 juta, meningkat sebesar Rp141.907 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.049.643 juta. Peningkatan jumlah ekuitas Perseroan utamanya disebabkan oleh peningkatan profitabilitas operasional Perseroan pada tahun 2023.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan	4.204.612	4.574.124
Laba Kotor	1.057.146	1.031.456
Laba Tahun Berjalan	159.970	12.635

Pendapatan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp4.204.612 juta, menurun sebesar Rp369.512 juta dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.574.124 juta. Penurunan pendapatan Perseroan disebabkan oleh menurunnya harga jual rata-rata CPO sebesar Rp1.077 per kilogram, atau -8,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp12.092 per kilogram untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp11.015 per kilogram untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Walaupun demikian, volume penjualan CPO Perseroan mengalami peningkatan sebanyak 12.975 ton, dari sebanyak 334.252 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 347.227 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan volume penjualan dengan menerapkan strategi penjualan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempertahankan kinerja pendapatan Perseroan di tengah penurunan harga jual rata-rata CPO di pasar.

Laba Kotor

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp1.057.146 juta, meningkat sebesar Rp25.690 juta atau 2,49% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.031.456 juta. Kenaikan laba kotor Perseroan disebabkan oleh menurunnya komponen biaya pembelian tandan buah segar pada beban pokok penjualan sebesar Rp432.146 juta, dari sebesar Rp1.472.851 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp1.040.705 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penurunan biaya pembelian tandan buah segar didukung oleh peningkatan pertumbuhan *fresh fruit bunch* (FFB) *yield*/ Ha (imbal hasil tandan buah segar per hektar) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 34,0% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta upaya Perseroan yang menerapkan strategi efisiensi dalam aktivitas operasionalnya. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan Perseroan meliputi manajemen pembelian tandan buah segar secara tepat sesuai kebutuhan produksi dan menjaga nilai pembelian tandan buah segar tetap kompetitif dan menguntungkan.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp159.970 juta, meningkat sebesar Rp147.335 juta atau 1.166,1% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.635 juta. Kenaikan laba tahun berjalan Perseroan seiring dengan menurunnya komponen beban penjualan pada beban usaha sebesar Rp25.181 juta, dari Rp157.900 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp132.719 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Volume penjualan CPO Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan, namun Perseroan mencatatkan penurunan beban penjualan pada periode yang sama, kondisi ini mencerminkan bahwa upaya efisiensi yang dilakukan Perseroan tetap efektif dalam upayanya untuk meningkatkan profitabilitas.

Perseroan mencatatkan manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp284.123 juta, meningkat Rp156.588 juta dibandingkan jumlah manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp127.565 juta.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Current Ratio (x)	0,4	0,6
Total Liabilitas / Total Aset (x)	0,8	0,8
Total Liabilitas / Total Ekuitas (x)	3,6	5,0
Return on Asset (ROA) (%)	1,6	0,1
Return on Equity (ROE) (%)	7,3	0,6

a. Rasio Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini terdiri *Current Ratio*. *Current Ratio* didapat dengan membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar.

Current ratio Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,4x dan 0,6x. Penurunan *current ratio* tersebut seiring dengan upaya manajemen persediaan dan manajemen arus kas yang telah dilakukan Perseroan guna meningkatkan efisiensi modal kerja yang diperlukan untuk melakukan aktivitas operasional.

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo menggunakan sumber pendanaan yang dimiliki. Dalam menghitung rasio solvabilitas, terdapat rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio liabilitas terhadap jumlah aset dan rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas.

Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,8x dan 0,8x. Tingkat rasio liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan stabil pada kedua periode tersebut disebabkan oleh strategi Perseroan yang telah melunasi sebagian pinjaman yang jatuh tempo menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari penjualan entitas anak dan hasil usaha Perseroan.

Rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 3,6x dan 5,0x. Penurunan tingkat rasio tersebut seiring dengan upaya Perseroan melunasi pinjaman dan melakukan manajemen arus kas sebagai strategi dalam memastikan ketersediaan pendanaan untuk pembayaran pinjaman yang akan jatuh tempo.

c. Rasio Profitabilitas

Tingkat pengembalian aset (*Return on Asset*) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari seluruh aset yang dimiliki. Tingkat pengembalian aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 1,6% dan 0,1%. Rasio tersebut meningkat seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan yang dihasilkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagaimana dijelaskan pada bagian laba tahun berjalan di atas. Adapun kenaikan tingkat pengembalian aset menggambarkan Perseroan semakin efektif dan efisien dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki sebagai dampak dari implementasi strategi efisiensi, manajemen persediaan dan manajemen arus kas yang telah dilakukan Perseroan.

Tingkat pengembalian ekuitas (*Return on Equity*) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari seluruh ekuitas yang dimiliki. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 7,3% dan 0,6%. Rasio tersebut meningkat seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan yang dihasilkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagaimana dijelaskan pada bagian laba tahun berjalan di atas. Adapun kenaikan tingkat pengembalian ekuitas menggambarkan Perseroan semakin efisien dalam memanfaatkan struktur permodalan melalui upaya pelunasan sebagian pinjaman dari utang bank yang telah jatuh tempo, sehingga berdampak pada penurunan beban bunga dan keuangan yang kemudian meningkatkan laba tahun berjalan Perseroan.

3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	633.062	514.295
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(132.208)	(200.463)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(582.375)	(308.563)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Bank	(81.521)	5.269
Kas dan Bank Awal Tahun	108.876	103.577
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	23	30
Kas dan Bank Akhir Tahun	**27.378**	**108.876**

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp633.062 juta, meningkat sebesar Rp118.767 juta dibandingkan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp514.295 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp744.751 juta menjadi Rp2.166.528 juta pada 31 Desember 2023 dari sebelumnya sebesar Rp2.911.279 juta pada 31 Desember 2022. Kenaikan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sejalan dengan aktivitas operasional Perseroan yang lebih efisien.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp132.208 juta, menurun sebesar Rp68.255 juta dibandingkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp200.463 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan ke kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp150.000 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Walaupun demikian, Perseroan tetap melakukan belanja modal untuk perolehan aset tetap sebesar Rp279.043 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, meningkat Rp100.334 juta dari sebelumnya sebesar Rp178.709 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp582.375 juta, meningkat sebesar Rp273.812 juta dibandingkan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp308.563 juta. Penurunan tersebut seiring dengan pembayaran pinjaman dari utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank yang telah jatuh tempo yang telah dipenuhi Perseroan melalui dana internal sebagai upaya untuk mengurangi beban bunga dan mencapai tingkat *leverage* yang lebih sehat.

POLA ARUS KAS DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN SIKLUS BISNIS PERSEROAN

Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

4 . LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan utama Perseroan atas likuiditas adalah untuk membiayai operasional, modal kerja, belanja modal, dan pembayaran utang bank jangka pendek. Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan fasilitas kredit bank, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan memiliki kas dan setara kas sekitar Rp. 27.378 juta. Perseroan juga memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan dalam bentuk saham treasuri Perseroan sejumlah 402.922.800 saham yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham (*buyback*) pada tahun 2022 dan 2023.

Sumber pendanaan Perseroan yang utama diperoleh dari kegiatan operasional berupa penjualan minyak kelapa sawit ("CPO"), inti sawit ("PK"), dan Tandan Buah Segar ("TBS") dengan sistem kontrak kepada pembeli utama yang telah menjalin kerja sama cukup lama dan rekam jejak yang baik dengan Perseroan. Pembeli biasanya melakukan pembayaran di muka sekitar 80% dari harga penjualan atau sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, penerimaan tersebut merupakan sumber likuiditas internal Perseroan. Selain itu, likuiditas eksternal didapatkan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perseroan menerapkan kebijakan keuangan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan pengembangan usaha. Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyelarasan waktu antara sumber pendanaan dengan piutang pihak ketiga.

Sumber pendanaan Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan tahun 2022 seluruhnya berasal dari hasil operasional Perseroan. Penggunaan dana yang utama adalah untuk menurunkan fasilitas pembiayaan dari bank dan untuk mendanai seluruh kebutuhan biaya operasional, modal kerja serta belanja modal Perseroan.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas utama perseroan berasal dari kegiatan operasional, tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas perseroan. Penerbitan obligasi akan memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam rangka memenuhi rencana belanja modal dan untuk penurunan pokok dan biaya pinjaman jangka pendek.

Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup, penerbitan obligasi akan memperkuat struktur pendanaan perseroan untuk belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Jika terdapat ketidakcukupan dalam modal kerja, perseroan akan mengupayakan penyesuaian belanja aktiva atau modal kerja hanya untuk aktivitas prioritas sebelum melalui penambahan fasilitas kredit modal kerja dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.

5. SEGMEN OPERASI

Pendapatan Perseroan berdasarkan produk terdiri dari: Minyak kelapa sawit, Inti kernel dan Tandan buah segar. Tabel dibawah menunjukkan porsi pendapatan perseroan jika dibandingkan dengan total pendapatan pertahun untuk periode yang berakhir untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			
	2023	%	2022	%
Minyak Kelapa Sawit	3.811.517	90,65	3.994.035	87,32
Inti Kernel	322.805	7,68	446.514	9,76
Tandan Buah Segar	70.290	1,67	133.575	2,92
Jumlah	**4.204.612**	**100,00**	**4.574.124**	**100,00**

Penjualan yang melebihi dari 20% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berasal dari Minyak kelapa sawit yang masing-masing berkontribusi sebesar 78,81% dan 87,32% atas total pendapatan Perseroan.

6. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

7. MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas Perseroan dan Entitas anak terpengaruh oleh berbagai risiko keuangan seperti risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perseroan beserta Entitas Anak berusaha untuk meminimalkan efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengawasan kebijakan manajemen risiko Perseroan. Departemen Manajemen Risiko melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Direksi Perseroan secara berkala.

Kebijakan manajemen risiko Perseroan disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang seharusnya, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan. Perseroan, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajibannya.

Risiko Pasar

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Entitas Anak terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai esposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam mata yang asing yang nilainya tidak material sebagaimana telah diungkapkan pada laporan keuangan.

Manajemen telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 1% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp2, terutama diakibatkan kerugian/keuntungan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan dan Entitas Anak mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terkait risiko suku bunga:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Liabilitas	
	Bunga Mengambang	
	Utang Bank Jangka Pendek	Utang Bank Jangka Panjang
Suku Bunga(%)	8,50 – 10,50	8,50 – 10,50
≤ 1 tahun	393.718	1.122.593
1 – 2 tahun		697.427
2 – 3 tahun		1.027.100
3 – 5 tahun		976.068
>5 tahun		403.880
Jumlah	**393.718**	**4.227.068**
Biaya transaksi		(85.442)
Nilai tercatat	**393.718**	**4.141.626**

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika suku bunga atas pinjaman yang didenominasikan dalam Rupiah lebih tinggi/rendah 1% dan variabel lain dianggap tetap, rugi sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp51.943 juta, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

c. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak terkait risiko harga pasar terutama berasal dari harga komoditas pada tingkat yang minimum. Perseroan dan Entitas Anak melakukan kontrak pembelian dan penjualan dengan harga yang telah disetujui dan dibayar uang muka. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat eksposur risiko harga yang signifikan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektabilitas piutang secara berkala untuk meminimalisasi jumlah piutang tak tertagih.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Kas dan bank	26.282
Piutang usaha	32.137
Piutang lain-lain	10.008
Aset lancar lain-lain	84.115
Asset tidak lancar lainnya	97.315
Total	**249.857**

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal untuk ekspansi lahan dan penanaman baru kelapa sawit.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keunagan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dikelompokan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	≤ 1 Tahun	1 – 2 Tahun	2 – 3 Tahun	3 – 5 Tahun	> 5 Tahun
Liabilitas yang diukur pada biaya amortisasi					
Utang bank jangka pendek	393.718	-	-	-	-
Utang Lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	261.657	-	-	-	-
Utang usaha	704.895	-	-	-	-
Beban akrual	103.110	-	-	-	-
Liabilitas jangka pendek lain-lain	494.922	-	-	-	-
Utang bank jangka panjang	1.122.593	697.427	1.027.100	976.068	403.880
Utang Lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	6.469	15.741	28.637	152.900	-
Liabilitas sewa	58.725	33.018	15.932	-	-
Uang muka setoran modal	-	220.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang lain-lain	-	200.000	61.450	-	-
Total	**3.146.089**	**1.166.186**	**1.133.119**	**1.128.968**	**403.880**

Risiko Harga Komoditas

Harga komoditas pertanian dipengaruhi oleh faktor-faktor tak terduga, seperti cuaca, kebijakan Pemerintah, perubahan dalam permintaan global dan pasokan di pasar.

Selama kegiatan usahanya, nilai penjualan terbuka dan kontrak pembelian dan persediaan komoditas pertanian berubah sejalan dengan pergerakan harga dari komoditas yang mendasarinya. Perseroan dan Entitas Anak tidak terlibat dalam pembelian ke depan dan kontrak penjualan untuk tujuan spekulasi.

Kenaikan atau penurunan 1% digunakan ketika melaporkan risiko harga komoditas internal untuk personil karyawan kunci dan mewakili penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada harga komoditas.

Jika kenaikan atau penurunan harga komoditas sebesar 1% dan semua variabel lainnya tetap konstan, penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 akan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp42.046.

Jika kenaikan atau penurunan harga komoditas sebesar 1% dan semua variabel lainnya tetap konstan, keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 akan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp2.867.

Risiko Lain-lain

Informasi berikut menjelaskan mengenai risiko-risiko material yang menurut Perseroan dan Entitas Anak dapat berpengaruh terhadap hasil operasi dimasa depan, kondisi keuangan dan yang kemungkinan dapat menyebabkan perbedaan yang material dari ekspektasi saat ini dan berpotensi memiliki pengaruh yang kurang baik.

Faktor eksternal:

Industri perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal diluar kendali dari Perseroan dan Entitas Anak misalnya perubahan peraturan dan kerangka hukum, gerakan sosial dan lingkungan, cuaca dan perubahan iklim, termasuk juga kondisi bisnis dan ekonomi. Keadaan sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi secara signifikan harga komoditas dan terutama harga minyak sawit dari Perseroan dan Entitas Anak. Meski manajemen memiliki harapan positif yang kuat terhadap masa depan dari industri kelapa sawit dengan kondisi yang kurang menentu, pengaruh dari penurunan performa ekonomi secara global dapat membawa dampak kurang baik terhadap operasi Perseroan dan Entitas Anak, kondisi keuangan dan kesempatan, sebagai contoh potensi penurunan nilai, penurunan pendapatan dan biaya yang lebih tinggi. Untuk menanggapi situasi ini, Perseroan dan Entitas Anak secara hati-hati menganalisa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kurang baik tersebut.

Faktor internal:

Faktor internal yang dianggap oleh Perseroan dan Entitas Anak memiliki pengaruh signifikan adalah efisiensi produksi dan pengembangan perkebunan Perseroan dan Entitas Anak.

Menanggapi resiko yang berkaitan dengan operasional, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan langkah-langkah berikut:
- Memperkuat pengendalian terhadap aktivitas penanaman, perawatan dan pemanenan di setiap kebun.
- Mengawasi perubahan faktor-faktor eksternal seperti cuaca, aktivitas sosial dan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap operasi Perseroan dan Entitas Anak dan melakukan langkah-langkah yang tepat terhadap perubahan tersebut.
- Mengawasi dan mengendalikan secara berkelanjutan kebun-kebun baru dan yang telah ada dengan melakukan pemetaan secara rutin dan penilaian atas area tertanam.

Berdasarkan pemetaan dan pengkajian yang sedang berlangsung dengan menggunakan teknologi terkini atas area tertanam dari setiap kebun, saat ini Perseroan dan Entitas Anak mencatat area tertanam sebesar 74.745 hektar. Proses pemetaan dan pengkajian saat ini masih terus berlangsung atas seluruh area tertanam.

8. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

9. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Harga jual pada sektor industri komoditas kelapa sawit memilki pergerakan fluktuasi harga yang dapat dipicu oleh berbagai faktor penyebab dimana faktor utama seperti ketidakseimbangan antara tingkat pasokan dengan permintaan, dan juga pergerakan harga dari produk substitusi. Selain itu harga CPO juga dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pengaruh alam lainnya, perkembangan ekonomi global, harga bahan bakar fosil, permintaan dari sektor baru seperti biofuel, pemberlakuan bea cukai di negara

tujuan ekspor dan juga hambatan perdagangan dari negara-negara importir seperti kampanye negatif dalam penggunaan CPO.

Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara secara aktif untuk terlibat di pasar komoditas sehingga mendapatkan tren industri terkini untuk melakukan analisa dan strategi kebijakan atas faktor-faktor yang mungkin akan berdampak untuk saat ini maupun berberapa tahun ke depan. Perseroan memiliki standar ketentuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas risiko serta strategi mitigasi untuk dampak perubahan harga terhadap pendapatan perseroan. Salah satu cara perseroan dalam memitigasi dampak penurunan harga diantaranya perseroan melakukan negosiasi dengan penjual agar menggunakan acuan harga tetap (*fixed price selling*). Dari segi efisiensi biaya, perseroan mengupayakan pengurangan biaya non-operasional maupun operasional. Cara lainnya dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh hal yang bersifat non-controllable seperti penurunan harga CPO, perseroan fokus pada hal yang bersifat controllable seperti peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, efisiensi biaya penjualan, biaya umum dan administratif, dan biaya bunga bank sehingga omset pendapatan perseroan dapat terus tumbuh dan mengurangi dampak negatif tersebut.

Regulasi Pemerintah yang mendukung komoditas kelapa sawit seperti pembatasan ekspor CPO dan penggunaan Biodiesel membantu pelaku bisnis atau perseroan dalam memitigasi risiko akibat fluktuasi perubahan harga komoditas kepala sawit.

10 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK)

a. Diterapkan pada tahun 2023

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan” tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah “signifikan” menjadi “material” dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material”;
- Amendemen PSAK 16: “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”;
- Amendemen PSAK 46: “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Penerapan dari amandemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

b. Standar Akuntansi yang telah terbit namun belum berlaku efektif

Amandemen dan interpretasi berikut telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan” terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang; dan
- Amendemen PSAK 73: “Sewa” terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Amendemen dan penyesuian tahunan standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan” terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- PSAK 74 “Kontrak Asuransi”; dan
- Amandemen PSAK 74 “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif”.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan Entitas Anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerapan PSAK tersebut pada laporan keuangan konsolidasian.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Di tahun 2023, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan bisnis Perseroan.

Sejak Tahun 2019, pemerintah telah menerapkan kebijakan biodiesel menggunakan campuran atau kandungan dari minyak kelapa sawit dan telah dimulai sejak tahun 2019 sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada tahun 2023, pemerintah telah menetapkan untuk meningkatkan kandungan biodiesel menjadi 35% yang disebut B-35 melalui kebijakan pemerintah No.19.K/EK.05/DJE/2023 tanggal 31 Juli 2023. Pada Tahun 2024 direncanakan bahwa kandungan biodiesel tersebut akan ditingkatkan menjadi 40% yang disebut B-40.

Hal ini merupakan sentimen positif bagi industri kelapa sawit di Indonesia dalam hal mitigasi risiko fluktuasi harga komoditas minyak kelap sawit dunia. Dengan peningkatan program biodiesel tersebut, permintaan minyak kelapa sawit di dalam negeri diharapkan akan semakin meningkat.

12. INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada letter of credit; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.). Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Fluktuasi Harga Minyak Kelapa Sawit

Risiko utama yang sangat mempengaruhi kelangsungan usaha bisnis kelapa sawit adalah fluktuasi harga pasar. Harga CPO saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penawaran dan permintaan CPO dan minyak nabati lainnya, tingkat produksi minyak nabati lainnya, harga dari minyak nabati lainnya, penggunaan biofuel dan harga bahan bakar fosil.

Selain itu harga CPO juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perubahan iklim dan pengaruh alam lainnya, perkembangan ekonomi global pada umumnya; dan permintaan dari sektor-sektor baru seperti biofuel. Fluktuasi harga CPO ini juga dapat mempengaruhi jumlah produksi dan permintaan terhadap CPO itu sendiri sehingga berdampak terhadap harga TBS dan harga CPO secara global.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut:

1. Risiko Perubahan Iklim

Jumlah TBS yang dipanen sebagian tergantung pada tingkat curah hujan. Daerah-daerah dimana perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak terletak beberapa terdampak oleh perubahan cuaca, umumnya mengakibatkan jumlah TBS yang dipanen lebih banyak pada saat musim hujan dan lebih sedikit pada saat musim kemarau. Curah hujan yang kurang akan menyebabkan tanaman kelapa sawit hanya dapat menghasilkan bunga yang sedikit dan oleh karena itu lebih sedikit TBS dan menghambat pembuahan tanaman kelapa sawit yang efektif, dimana hal ini akan menyebabkan berkurangnya panen TBS dan dapat menunda jadwal pemupukan. Sebagai contoh, perkebunan dapat dipengaruhi oleh curah hujan yang berlebihan atau kurang, masing-masing sebagai akibat dari fenomena El-Nino dan La-Nina.

Pada tahun 2023, fenomena cuaca El-Nino terjadi selama bulan Juli sampai September, akan tetapi hal ini tidak berdampak besar terhadap produktivitas Perseroan pada tahun tersebut. Berdasarkan analisis Perseroan bahwa fenomena El-Nino hanya berpengaruh terhadap beberapa hal, meliputi:

- Keterlambatan pematangan buah dikarenakan kurangnya asupan air pada tanaman.
- Bobot tandan lebih rendah karena kandungan air di dalam buah juga rendah.

2. Risiko Hama dan Penyakit

Serangga hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit serta menyebabkan penurunan produksi. Secara umum serangan hama dapat menurunkan produksi sampai 70% dan di waktu yang bersamaan dengan serangan penyakit maka kerusakan bisa mencapai 100%. Kerugian lain yang ditimbulkan adalah oleh serangan

hama dan penyakit adalah bertambahnya biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk memulihkan kondisi tanaman.

3. Risiko Persaingan atas Perolehan Lahan di Indonesia

Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan penuh atas seluruh tanah dan pemberian hak atas tanah. Hak Guna Usaha ("HGU") adalah hak untuk menggunakan tanah milik negara dengan peruntukan diantaranya jenis usaha perkebunan, perikanan, atau pertanian, dengan luas minimal 5 hektar, dengan jangka waktu maksimal 35 tahun, yang dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun, dan diperbaharui setelah masa perpanjangan tersebut berakhir. Risiko penundaan proses peningkatan lahan menjadi HGU yang sering terjadi adalah karena sifat hukum pertanahan Indonesia terus berkembang namun proses administrasi yang tidak seragam dan efisien, sehingga memunculkan isu sengketa atas proses pembebasan lahan. Jangka waktu penundaan tersebut mungkin dapat melebihi masa berlaku dari Ijin Lokasi terkait, dan jika terjadi, dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengkonversi area lahan yang dibebaskan/ diakuisisi di bawah Ijin Lokasi menjadi Hak Guna Usaha.

Selain proses peningkatan HGU, pemerintah Indonesia juga sejak tahun 2018 telah menetapkan moratorium pada kebun kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (INPRES) no. 8/2018 untuk mencegah deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta produksi emisi karbon. Selama moratorium, pemerintah akan menata kembali perizinan perkebunan kelapa sawit, menata ulang perkebunan sawit, terutama perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan. Hal tersebut menjadi risiko bagi perseroan karena dapat menjadi hambatan untuk penanaman atau pengembangan area perkebunan selama moratorium tersebut belum di cabut.

4. Risiko Kewajiban Memenuhi Peraturan Perundangan Industri

Perseroan dan Entitas Anak wajib mematuhi berbagai macam undang-undang dan peraturan yang mendukung praktik operasi lingkungan dan sosial. Perhatian utama atas lingkungan berkaitan dengan pembuangan limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit serta cara untuk mendapatkan lahan untuk pembangunan perkebunan.

Bisnis perkebunan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak juga wajib untuk mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan untuk lingkungan sekitar dan kehutanan. Perhatian utama Perseroan dan Entitas Anak adalah kemungkinan terjadinya konflik dengan masyarakat lokal disekitar perkebunan Perseroan dan Entitas Anak. Setiap pelanggaran lingkungan atau kegagalan untuk mematuhi peraturan yang diterapkan sekarang maupun dimasa yang akan datang dapat mengakibatkan pengenaan denda, perusakan, sanksi pidana atau perdata, biaya perbaikan atau penundaan atau penghentian operasi Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan teknologi untuk mengembangkan dan mempertahankan daya saing dalam industri. Perseroan telah bersiap dan mengembangkan teknologi dalam kegiatan operasi Perseroan dan Entitas Anak pada saat pandemi yang mendorong Perseroan untuk melakukan percepatan dalam mengembangkan serta mengimplementasikan digitalisasi di seluruh fungsi organisasi, mulai dari operasional, keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain yang mana seluruhnya telah terintegrasi pada satu sistem di kantor pusat.

Dalam proses implementasi ini, terdapat risiko bahwa karyawan Perseroan dan Entitas Anak mungkin kurang terampil atau kurang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai terkait perubahan teknologi, sehingga dapat berdampak pada kinerja operasional yang tidak mencapai produktivitas secara optimal.

Selain itu, teknologi yang saat ini diterapkan oleh Perseroan dan Entitas Anak dapat berubah dengan cepat, yang dapat mengakibatkan risiko ketertinggalan teknologi yang digunakan. Implementasi teknologi yang tidak optimal juga menjadi risiko bagi Perseroan dan Entitas Anak, di mana hal tersebut justru dapat menambah biaya dibandingkan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

6. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan dan Entitas Anak bersaing dengan sejumlah besar perusahaan di pasar lokal. Perseroan dan Entitas Anak umumnya bersaing dari sisi harga dan kualitas produk. Persaingan di industri kelapa sawit juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti biaya produksi, ketersediaan tenaga kerja, tingkat rendemen dan ketersediaan logistik.

7. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari adanya gugatan hukum yang dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Apabila gugatan hukum tidak dapat diselesaikan dengan penggugat maka risiko tersebut dapat merugikan Perseroan dan Entitas Anak.

A. RISIKO UMUM

Perseroan juga tidak lepas pada risiko eksternal yang berlaku umum terkait dengan sektor usaha yang dijalankan. Risiko tersebut antara lain:

1. Risiko Kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial

Globalisasi telah memberikan dampak atau pengaruh pada kondisi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Ketidakpastian yang timbul dari peperangan, potensi ancaman terorisme dan wabah penyakit menular dapat menyebabkan konsumen untuk mengambil pendekatan secara hati-hati terhadap pengeluaran dan konsumsi.

Disamping itu, gejolak sosial politik diantara masyarakat Indonesia akan berdampak terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa dan menimbulkan keresahan sosial yang dapat berdampak negatif langsung maupun tidak langsung pada kondisi keuangan, hasil usaha dan industri di Indonesia.

Beragam peristiwa-peristiwa politik di Indonesia pada umumnya adalah masalah pengurangan subsidi BBM, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti korupsi, desentralisasi dan pemberian otonomi daerah. Sebagai reaksi atas penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, terjadi berbagai kegiatan unjuk rasa yang mengakibatkan iklim politik di Indonesia memanas.

2. Risiko Suku Bunga

Pergerakan suku bunga menjadi risiko yang tidak bisa dihindari oleh Perseroan dan Entitas Anak karena memiliki pinjaman dari beberapa kreditur (bank dan lembaga keuangan non bank). Risiko suku bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi ekonomi lokal dan dunia, inflasi, ketidakstabilan politik, dan lain-lain yang seluruhnya diluar kendali Perseroan. Pergerakan suku bunga tentunya akan memberikan dampak bagi Perseroan dan Entitas Anak khususnya untuk pinjaman dengan suku bunga mengambang karena akan berdampak pada peningkatan beban bunga Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Kekurangan Tenaga Kerja

Kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak masih padat karya dan sangat bergantung pada tenaga kerja. Saat ini Indonesia sedang mengalami perkembangan dalam perekonomian sehingga banyak tenaga kerja berkompetisi untuk bekerja di lokasi industrial. Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk menarik tenaga kerja karena lokasi perkebunan yang terletak dikawasan pedalaman (*remote area*).

4. Risiko Bencana Alam

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aktivitas vulkanik yang paling aktif di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di pertemuan tiga lempengan, sehingga wilayah Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa dan tsunami atau gelombang air

pasang. Selain kejadian alam tersebut di atas, hujan deras dapat juga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

Tidak ada kepastian juga bahwa bencana geologis maupun meteorologis tidak akan terus berpengaruh terhadap perkekonomian Indonesia. Gempa yang besar, atau gangguan geologis lainnya maupun bencana alam yang berhubungan dengan iklim pada suatu kota yang berpenduduk pada dan pusat-pusat finansial dapat mengganggu ekonomi Indonesia dan mempengaruhi kepercayaan investor, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Otonomi Daerah

Pemerintah Daerah tertentu telah menempatkan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi, yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan retribusi ditetapkan oleh pemerintah pusat Indonesia. Kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di lokasi pemerintahan daerah yang berbeda, adanya tambahan pembatasan, pajak atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah setempat dimana kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak berada, pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 12 Juni 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Global Network Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang di tandatangani oleh Maria Leckzinska dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0155 yang dalam laporannya No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "PT Bumi Perdana Prima International" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13 tanggal 6 November 2000, yang dibuat dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.TH.2000 tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002 tanggal 12 September 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Pada tanggal 27 Oktober 2009, Perseroan mencatatkan sebanyak 1.211.009.000 (satu miliar dua ratus sebelas juta sembilan ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp666.054.950.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ("Penawaran Umum Perdana").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantations Tbk. No. 2 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0062468 tanggal 11 Mei 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 ("Akta No. 2/2023").

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk. No. 61 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0444896 tanggal 7 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151874.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 September 2021 ("Akta No. 61/2021") *juncto* Akta No. 2/2023 telah disesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan IX.J.1"); (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2017; (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Industri dan Pertanian.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
   - memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
   - memasarkan hasil industri minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
   - melakukan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.
b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

Adapun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam bidang perkebunan kelapa sawit, memproduksi dan memasarkan CPO dan inti sawit.

VISI DAN MISI PERSEROAN

Visi:

"*Menjadi perusahaan perkebunan pilihan yang dinamis dengan reputasi unggul dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan*"

Misi:

Menuju pertumbuhan, keunggulan dan posisi terdepan dalam bisnis sawit, melalui:

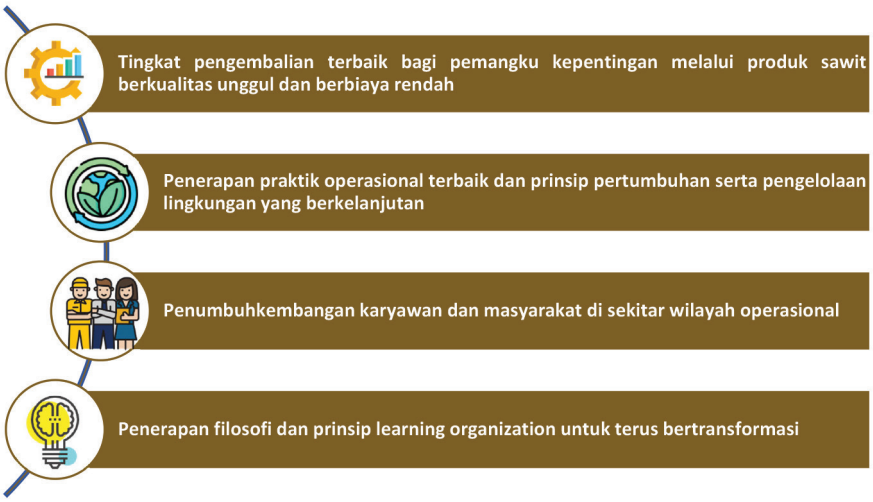

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tabel di bawah ini menguraikan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan dan Entitas Anak sejak didirikan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

Tahun	Keterangan
2009	BWPT tercatat di IDX
2012	Dimiliki oleh Rajawali & Louis Dreufuss
2015	Rajawali Corpora mengakuisisi BWPT dan meraih ISPO pertama
2018	Penambahan PKS di Papua dan ISPO 35%
2019	Meraih RSPO pertama
2021	Melakukan Rasionalisasi Aset
2022	EHP mencapai *turn around* dan mencatat pendapatan *all-time high*
2023	Luasan tanam sebesar 87.000 Ha dan 7 PKS setelah rasionalisasi aset, Mencapai RSPO 28% dan ISPO 40%
2024	Mencapai RSPO 43%

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2022

Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2024

Sebagaimana termaktub dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham tertanggal 31 Mei 2024, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**5.000.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	7.561.205.714	756.120.571.400,-	23,98
4. Henderi	8.000.000	800.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01
6. Saham tresuri	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	**31.525.291.000**	**3.152.529.100.000,-**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**18.474.709.000**	**1.847.470.900.000,-**	

4. PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan yang telah aktif melaksanakan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Industri Pengolahan		
1.	Keputusan Bupati Kotawaringin No. 525.26/242/EK/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan atas nama PT BW Plantation sebagaimana diubah dengan Persetujuan Bupati Kotwaringin Timur No. 525/002/EK tanggal 14 Januari 2016 tentang Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan PT Eagle High Plantations	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Izin ini berlaku sehubungan dengan kegiatan pengolahan yang berlokasi di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Timur dengan detail sebagai berikut: Bahan Baku Utama : TBS Kelapa Sawit Kapasitas Pabrik : 60 ton/jam Jenis hasil olahan: CPO (*Crude Palm Oil*/ Minyak Sawit dan Inti Sawit)
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik		

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
2.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah No. 570/47/ESDM-IO/IV/DPMPTSP-2019 tanggal 15 April 2024 tentang Izin Operasi Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri atas nama PT Eagle High Plantations	5 tahun **Catatan:** Berdasarkan Surat No. 003/BOD/EHP/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Usaha Penyediaan Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) Atas Nama Perseroan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cq Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini Perseroan sedang dalam proses permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) atas nama Perseroan.	Izin operasi penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atas 5 unit PLTU dan PLTD
3.	Sertifikat Laik Operasi No. IU5.O.30.171.6201.0000.20 tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Surveyor Indonesia	23-12-2025	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Bedaun Perseroan, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
4.	Sertifikat Laik Operasi No. IU4.O.30.171.6201.0000.20 tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Surveyor Indonesia	23-12-2025	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Bedaun Perseroan, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
5.	Sertifikat Laik Operasi No. IU6.O.30.111.6201.0000.20 tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Surveyor Indonesia	23-12-2025	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Bedaun Perseroan, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Terminal		

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
6.	Surat No. A.431/AL.308/DJPL tanggal 10 Mei 2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Izin Pengoperasian TUKS PT Eagle High Plantation Tbk. di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai	10-05-2024 **Catatan**: Berdasarkan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) Dan Lemak Nabati PT Eagle High Plantations, Tbk. Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan tanggal 28 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai, saat ini Perseroan sedang dalam proses untuk perpanjangan izin operasi atas TUKS dimana proses ini baru dapat dilanjutkan setelah Perseroan dapat melakukan perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada anggaran dasar Perseroan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir guna melakukan perubahan pada sistem OSS milik Perseroan.	-
7.	Surat No. PMKU.IDKUM.1223.000001 tanggal 11 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai	11-12-2024	Perseroan tercatat sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha bongkar muat

Izin dan Dokumen sehubungan dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
8.	Surat Izin Pembuangan Limbah Cair No. 660/1686/DLH.4/IPLCD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019	31-07-2024	Sebagaimana termaktub dalam Surat / EXT/EHP/II/2023 yang telah diterima pada tanggal 28 Februari 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, saat ini Perseroan sedang dalam proses pengajuan persetujuan lingkungan guna memenuhi Surat S.1806 tanggal 1 Juli 2022 perihal Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke dalam Persetujuan Lingkungan yang ditujukan ke seluruh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan proses pengintegrasian izin pembuangan limbah cair yang akan habis masa berlakunya pada 31 Juli 2024 dengan persetujuan lingkungan yang sedang diproses oleh Perseroan, maka Perseroan kembali menyampaikan Surat No. 09/EXT/ EHP/IV/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Permohonan Pengintegrasian Rincian Teknis LB3, Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Domestik ke Persetujuan Lingkungan (PKPLH) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat.
	Izin dan Dokumen sehubungan dengan Lingkungan Hidup		
9.	Addendum Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan BLP dan Perseroan untuk kebun yang berlokasi di Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dengan luas lahan sebesar 9.501,12 Hektar dan kapasitas pabrik sebesar 60 Ton TBS/Jam	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha dan tidak terdapat perubahan	Dokumen ini telah disahkan di bawah No. 660/89/BLH/III/d/2016 tanggal 22 Februari 2016 oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 660/05/BLH/I/2016 tentang Izin Lingkungan Addendum Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Perluasan Areal Dari 560 Hektar menjadi 9.501,12 Hektar dan Pengingkatan Kapasitas Produksi Dari 45 Ton TBS/Jam menjadi 60 Ton TBS/ Jam Di Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha dan tidak terdapat perubahan	Perseroan menggunakan dokumen lingkungan bersama-sama dengan BLP, hal ini mengingat Surat No. 660/91/ Bpdl-II.2/III/2008, tanggal 3 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan bahwa letak lokasi pabrik pengolahan Perseroan berada di dalam lokasi perkebunan BLP.

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
11.	Surat Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPA) No. 503/14/SIPA/DS-DPMPTSP/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 untuk lokasi Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	s/d 01-08-2023 *Catatan: Berdasarkan bukti Daftar Simak Kelengkapan Permohonan Izin Pengusahaan SDA No. 012/BOD/EHP/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan SIPA dimana instansi terkait masih dalam tahap verifikasi teknis atas dokumen neraca air yang telah disampaikan Perseroan kepada instansi terkait sebagaimana dibuktikan dengan surat elektronik tanggal 15 Juni 2024 yang ditujukan kepada Perseroan.*	-
	Izin dan Dokumen sehubungan dengan Bangunan		
12.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat No. 647/68/PUD tentang Izin Mendirikan Bangunan Bagi Perusahaan Industri	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan kawasan industri
13.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 03/SIB/II/PUD/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan dermaga
	Izin dan Dokumen Operasional Perseroan Lainnya		
14.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120310110629 tanggal 2 November 2018 sebagaimana diubah pada perubahan ke-3 tanggal 6 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	NIB Perseroan untuk Nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): (i) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*); (ii) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit; (iii) Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, (iv) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit; (v) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit, dengan Kode KBLI: 10432; 10433; 10434; 10435; 10436, dan berstatus Penanaman Modal Asing. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Produsen (API-P).
15.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.882.908.5-054.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
16.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-65/PKP/KPP.070803/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang diterbitkan oleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
17.	Sertifikat No. MUTU-ISPO/118 sehubungan dengan Penerapat Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System - ISPO)	26-06-2028	-

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

A. PERJANJIAN KREDIT YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Fasilitas Kredit No. 19 tanggal 7 September 2021, yang dibuat di hadapan Haji Zamri, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan: a. Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 172/ PK.BG/GBD-JAK/ IX/2021 tanggal 20 September 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup; b. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 35 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; c. Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit No. 045/JTRUST-AGR/ LBS-JKT/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat di bawah tangan; d. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 12 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; e. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 146 tanggal 22 September 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;	1. PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)	1. KAB: s/d 23-12-2025 2. KAP 1: 12 bulan sejak tanggal efektif kredit dan jangka waktu fasilitas kredit sesuai jadwal angsuran disetujui 3. KAP 2: 12 bulan sejak tanggal efektif fasilitas ini 4. BG: 60 bulan sejak tanggal efektif tersedianya BG	Pemberian Fasilitas Kredit dengan rincian sebagai berikut: 1. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (“KAB”) dengan sifat *Non-Revolving Basis* dan *Un-Committed* sebesar Rp50.000.000.000,- 2. Fasilitas Kredit Atas Permintaan (“KAP 1”) bersifat Fasilitas Langsung dan bersifat *On Revolving Basis* dan *Un-Committed* sebesar Rp77.000.000.000,- (plafond fasilitas diblokir sebesar Rp40.000.000.000,-) dana akan dilakukan pembukaan blokir sebesar penurunan porsi pokok fasilitas KAB bertahap setiap enam bulan sampai dengan fasilitas KAB lunas 3. KAP 2 bersifat Fasilitas Langsung dan bersifat *On Revolving Basis* dan *Un-Committed* sebesar Rp60.000.000.000,- 4. Fasititas Kredit Modal Kerja - Bank Garansi (“BG”) bersifat Fasilitas Tidak Langsung dan bersifat *On Revolving Basis* dan *Un-Committed* sebesar Rp182.000.000.000,- dalam bentuk *Custom Bond*. Tujuan Penggunaan Fasilitas: Fasilitas KAB, KAP 1, dan KAP 2 digunakan untuk modal Kerja, sedangkan Fasilitas BG digunakan untuk pembayaran tagihan sehubungan dengan kewajiban fiscal SSS dan PCS pada masa periode kewajiban fiscal tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Bunga: KAB dan KAP 1 sebesar 10,5% per annum KAP 2 sebesar 10,25 Jaminan: 1. Sebidang tanah kosong yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Selong, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1074, 1075, 1077, 1078, 8036, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 897, 898, yang kesemuanya terdaftar atas nama PETER SONDAKH, seluas 3.024 M? (tiga ribu dua puluh empat meter persegi), yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 04276/2021.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	f. Perubahan Perjanjian Fasilias Kredit No. 053/ JTRUST-AGR/ LBS/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup			2. Deposito Beriangka (*Time Deposit*) atas nama Debitur pada Bank sebagai berikut: No. Rekening: 3200641301, 3200641318, 3200641332, 3200641349 No. Bilyet: AF 058701, AF 058702, AF 058703, AF 058704 Mata Uang: IDR Nominal: Rp12.500.000.000,- berikut segala perpanjangan, perubahan serta tambahannya, yang telah diikat secara gadai sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Gadai Deposito Nomor 36 tanggal 22 Februari 2022. 3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Selong, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076, 900, 899, 916, 837 dan 1033, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 900, 803 dan 899 atas nama PETER SONDAKH yang akan dikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 2.418.655.431,- (dua miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu empatratus tiga puluh satu Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Tanggungan 03253/2023. Jaminan di atas tersebut turut silang menjamin (*Cross Collateral* atas seluruh fasilitas BG, KAP, BTB, KAP 1, KAB dan KAP 2). 4. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 169, 170, 171, 172, 173 dan 174, seluas 973 Hektar tanggal berakhirnya hak 4 Desember 2053 yang akan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp. 75.000.000.000, - (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*): Hingga seluruh kewaiiban Debitur berdasarkan pada atau terkait dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini telah dinvatakan lunas oleh Bank secara tertulis, Debitur tidak diperkenankan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis dari Bank terlebih dahulu untuk (kecuali yang sudah ada sebelum ditandatanganinya akta ini): 1. Selama kredit belum lunas Debitur tidak diperkenankan untuk menambah nilai investasi pada perusahan lain; 2. Melakukan perubahan anggaran dasar termasuk didalamnya perubahan susunan pemegang saham, pengurus dan permodalan Debitur; 3. Meminjam-pakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang-barang yang dijaminkan pada Bank, dengan cara apapun kepada pihak lain;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				4. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas *leasing* dari pihak lain atau mengadakan suatu utang atau kewajiban apapun juga yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank; 5. Menjual, menyewakan, mentranster, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/ mengagunkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur dengan cara bagaimanapun jugadan kepada pihak manapun juga (kecuali meniaminkan/ mengagunkannya kepada Bank) yanq dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Debitur kepada Bank; 6. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan miliknya untuk kepentingan pihak lain; 7. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur; 8. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha / merger dan atau peleburan / konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari asset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya; 9. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan atau pemegang saham pengendali Debitur terbuka (kecuali BUMN): 10. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya; 11. Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 12. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari.
2.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. CRO.KP/373/ KASB/2019 tanggal 20 September 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. CRO. KP/373/KASB/2019 yang dibuat di bawah tangan	1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank”) 2. Perseroan (“Debitur”)	20-09-2023 s/d 19-09-2024	Pemberian Fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga dengan jumlah fasilitas Rp150.000.000.000,-. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk membiayai kebutuhan operasional usaha Debitur. Bunga: 1% per tahun di atas suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar efektif setiap bulan. Jaminan: Deposito berjangka yang bersifat *Auto Rollover* (ARO) atas nama afiliasi Debitur.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
3.	Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. 0337/KKS/AMD/III/2023/CG5 tanggal 14 Maret 2023 junctis Perubahan Kedua Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan (Ketentuan Khusus) No. 0346/KKS/AMD/II/2024/CG5 tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 0345/SKUS/AMD/II/2024/CG5 tanggal 15 Februari 2024	1. PT Bank Permata Tbk ("Bank") 2. Perseroan ("Nasabah")	19-02-2024 s/d 19-02-2025	Pemberian Fasilitas Kredit Modal Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Non Aset bersifat *Uncomitted* dimana Bank melakukan penyertaan sebesar Rp196.000.000.000,- dengan limit berdasarkan nilai jaminan Deposito Berjangka yang ditempatkan dengan limit setinggi-tingginya 98% dari nilai deposito per penarikan. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk pembiayaan modal kerja. Tingkat bagi hasil akan ditentukan pada saat pencairan dengan *spread* setara ekuivalen rate 1% per tahun (*fixed* selama jangka waktu pembiayaan). Besar indikasi tingkat bagi hasil dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya. Jaminan: *Time deposito* atas nama PT Rajawali Corpora dengan nilai penjaminan sebesar Rp200.000.000.000,- dimana penetapan rate deposito ditentukan ketika dana akan ditempatkan. Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*): Nasabah wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dalam hal Nasabah melakukan tindakan yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, antara lain yaitu: 1. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka kegiatan sehari-hari; 2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari; 3. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan; 4. Menjual, menyewakan, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan sebagai harta kekayaan Nasabah dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Nasabah kepada Bank; 5. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas berupa apapun juga atau fasilitas *leasing* dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang mempengaruhi kemampuan pembayaran Nasabah kepada Bank atau yang melebihi 10% dari nilai aktiva (baik dari satu atau beberapa hutang kepada pihak lain yang diperhitungkan secara akumulatif); 6. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
4.	Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 049/PFPA-DBSI/III/1-2/2021 tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana yang telah diubah dengan: a. Syarat - Syarat dan Ketentuan - Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 048/STC-DBSI/III/1-2/2021 tanggal 30 Maret 2021; b. Perubahan Ketiga atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 141/PFPA-DBSI/V/1-2/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; c. Perubahan Keempat atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 357/PDPA-DBSI/XII/1-2/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Bank DBS Indonesia ("Bank"); 2. Perseroan 3. BHL; 4. PLS; 5. STP. (secara bersama-sama disebut "Nasabah").	01-04-2021 s/d 30-06-2024 *Catatan:* *Pelunasan kewajiban masing-masing Nasabah kepada Kreditur akan menggunakan dana dari kas internal masing-masing Nasabah*.	Pemberian Fasilitas *Commited Amortizing Loan* ("Fasilitas ATL") dengan jumlah maksimum hingga sebesar Rp376.000.000.000.000,- dan jumlah terutang per tanggal 28 Desember 2023 adalah sebesar Rp70.186.000.000,- yang hanya dapat digunakan oleh EHP, BHL, PLS dan STP. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk konversi dari pinjaman jangka pendek Nasabah berupa pinjaman Fasilitas Omnibus yang terdiri dari sub-fasilitas APF dan sub-fasilitas RCF menjadi pinjaman jangka panjang dalam jangka waktu 3 tahun pinjaman dengan cicilan 36 bulan. Bunga: Tingkat bunga minimum sebesar *fund transfer pricing* ("FTP") dari Bank ditambah 4% per tahun dengan jangka waktu bunga maksimum 1 bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu Bunga yang bersangkutan. Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*): Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan untuk: 1. Menjaminkan seluruh atau setiap bagian substansial dari harta Nasabah kepada Pihak ketiga manapun kecuali (i) harta yang telah dijaminkan sebelum penandatanganan Perjanjian ini dan telah diberitahukan kepada Bank sebelumnya; dan (ji) penjaminan harta yang timbul dalam rangka operasional normal sehari-hari Nasabah dan/atau timbul oleh karena ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku atau Perjanjian ini; 2. Mengubah jenis usaha Nasabah secara material 3. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran; 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga; 5. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi; 6. Komisaris atau pemegang saham Nasabah atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya; 7. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal, tetapi tidak termasuk belanja modal yang terukur untuk kebutuhan pengembangan usaha; 8. Memindahtangankan sebagian besar aset (major asset) atau aset penting (material asset)atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga, yang dapat menyebabkan akibat yang signifikan terhadap bisnis operas Nasabah atau secara signifikan mengubah kemampuan Nasabah untuk menghasilkan pendapatan; 9. Menerima kredit dan/atau piniaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya untuk jangka panjang yang melebihi 20% (dua puluh) persen dari total asset Perseroan; 10. Melakukan divestasi dikemudian hari.

B. PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DITERIMA OLEH ENTITAS ANAK

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Entitas Anak telah mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit dari para krediturnya, yaitu sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/KI/2019 Akta No. 20 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") 2. JMS ("Debitur")	22-03-2019 s/d 31-12-2026	Fasilitas Kredit Non Revolving sebesar Rp1.000.000.000.000,- Tujuan Penggunaan Fasilitas: Membiayai aset Debitur berupa kebun kelapa sawit seluas 14.665,75 Ha di atas SHGU No. 13 yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, No. 157 sampai dengan No. 168 yang terletak di Desa Kayu Batu, Muara Leka, Lebak Mantan dan Lebak Cilong, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, termasuk di dalamnya Pabrik Kelapa Sawit beserta mesin dan peralatan berikut sarana dan prasarana yang ada di atasnya maupun yang akan ada dan fasilitas bulking Crude Palm Oil (CPO) seluas 5,23 Ha di atas SHGB No. 01 sampai dengan No. 03 yang terletak di Desa Sembeban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berikut sarana dan prasarana yang ada di atasnya maupun yang akan ada, termasuk di dalamnya untuk pelunasan hutang Debitur kepada kreditur lain selain Bank, pengembangan perusahaan, pengembangan group usaha dan untuk keperluan capex serta kebutuhan lainnya. Bunga: 10,25% per annum Jaminan: Agunan fixed asset atas nama Debitur berupa: 1. SHGU No. 13/Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 5.073,92 Ha dan seluas 727,32 Ha berikut seluruh aset yang ada di atasnya berupa kebun kelapa sawit, bangunan, sarana dan prasarana baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 903/HGU/2009 tanggal 18 Juni 2009, terletak di Desa Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Desa Perian. Atas sebidang tanah tersebut telah dipasang/diikat Hak Tanggungan sebagai berikut: a. HT I (Pertama) sebesar Rp365.000.000.000 berdasarkan SHT Peringkat I (Pertama) No. 407/2010 tanggal 14 Agustus 2010; b. HT II (Kedua) sebesar Rp148.588.000.000 berdasarkan SHT Peringkat II (Kedua) No. 663/2010 tanggal 8 November 2010; c. HT III (Ketiga) sebesar Rp120.000.000.000 berdasarkan SHT Peringkat III (Ketiga) No. 01094/2016 tanggal 29 November 2016; Atas HT Peringkat I (Pertama), Peringkat II (Kedua) dan Peringkat III (Ketiga) akan dilakukan roya di BPN setempat dan apabila pengurusan roya telah selesai kemudian akan dilakukan pengikatan Hak

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai pengikatan sebesar Rp680.951.000.000 melalui penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan dilanjutkan pengurusan APHT dan pendaftaran ke BPN setempat. 2. 12 bidang tanah seluas ±8.864,51 Ha berikut bangunan, pabrik kelapa sawit dengan kapasitas olah 60 ton TBS/jam serta sarana dan prasarana baik yang telah ada maupun yang akan ada yang berada di atas tanah-tanah sebagaimana diuraikan di bawah ini: a. Sebidang tanah SHGU No. 157/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 49.287.000 m2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Kayu Batu; b. Sebidang tanah SHGU No. 158/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 851.600 m2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Muara Leka; c. Sebidang tanah SHGU No. 159/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 394.300 m2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Muara Leka; d. Sebidang tanah SHGU No. 160/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 394.300 m^2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Mura Wis, Kelurahan Lebak Mantan; e. Sebidang tanah SHGU Nomor 161/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 61.200 m^2, terletas di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutal Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Muara Leka; f. Sebidang tanah SHGU No. 162/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 5.218.700 m2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Muara Leka; g. Sebidang tanah SHGU No. 163/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 17.714.800 m2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Kayu Batu; h. Sebidang tanah SHGU Nomor 164/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 137.400 m2 terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Muara Leka

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				i. Sebidang tanah SHGU No. 165/ Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 44.400 m2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Muara Leka; j. Sebidang tanah SHGU No. 166/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 233.500 m2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Muara Leka; k. Sebidang tanah SHGU No. 167/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 314.900 m^2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Muntai, Kelurahan Muara Leka; l. Sebidang tanah SHGU No. 168/ Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 1.128.500 m^2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara WIs, Kelurahan Lebak Cilong; Atas 12 bidang tanah tersebut telah dipasang/ diikat Hak Tanggungan sebagai berikut: a. Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp120.000.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1042/2013 tanggal 3 Oktober 2013; b. Hak Tanggungan II sebesar Rp297.469.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 01130/2013 tanggal 24 November 2013. Atas Hak Tanggungan ini dipergunakan untuk menjamin Fasilitas Kredit yang diterima oleh PT Tandan Papua Sawit; c. Hak Tanggungan III (Ketiga) sebesar Rp280.000.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 0699/2014 tanggal 22 Juli 2014; d. Hak Tanggungan IV (Keempat) sebesar Rp253.311.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No. 00735/2015 tanggal 8 September 2015; e. Hak Tanggungan V (Kelima) sebesar Rp250.000.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No. 01085/2016 tanggal 29 November 2016;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Atas Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), Peringkat III (Ketiga) dan Peringkat V (Kelima) akan dilakukan roya di BPN setempat dan apabila pengurusan roya telah selesai kemudian akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat VI (Keenam) dengan nilai pengikatan sebesar Rp992.735.000.000 melalui penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan dilanjutkan pengurusan APHT dan pendaftaran ke BPN Setempat; 3. 3 bidang tanah seluas 52.340 m^2, berikut bulking CPO, bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang berada di atas tanah-tanah tersebut, sebagaimana diuraian di bawah ini: a. Sebidang tanah SHGB No. 1 /Kelurahan Sembemban, seluas 16.310 m^2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Wis, Kelurahan Sembemban; b. Sebidang tanah SHGB No. 2/Kelurahan Sembemban, seluas 17.750 m2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Wis, Kelurahan Sembemban; c. Sebidang tanah SHGB No. 3/Kelurahan Sembemban, seluas 18.280 m2, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Wis, Kelurahan Sembemban; Atas 3 bidang tanah tersebut telah dipasang/ diikat Hak Tanggungan sebagai berikut: a. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp20.000.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 00363/2016 tanggal 30 Maret 2016; b. Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp30.000.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 01088/2016 tanggal 29 November 2016 Atas Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dan Peringkat II (Kedua) akan dilakukan roya di BPN setempat dan apabila pengurusan roya telah selesai kemudian akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai pengikatan sebesar Rp36.061.979.000 melalui penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan dilanjutkan pengurusan APHT dan pendaftaran ke BPN Setempat.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*): Selama seluruh jumlah terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham perusahaan yang dapat menyebabkan perubahan *ultimate majority shareholder* (dalam hal ini Perseroan); 2. Membagi dividen, kecuali apabila *financial covenant* terpenuhi baik sebelum maupun setelah pembagian dividen, cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas rencana pembagian dividen dimaksud; 3. Memindahtangankan barang jaminan; 4. Melakukan transaksi dengan seseorang dan/atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya maupun grup usaha, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada; 5. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; 6. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank atau lembaga keuangan lain; 7. Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 8. Menjaminkan seluruh asset milik Debitur (termasuk di dalamnya atas asset yang merupakan jaminan fasilitas kredit di Bank maupun asset yang bukan jaminan) untuk menjadi jaminan atas fasilitas kredit di bank/lembaga keuangan lain.
2.	Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Transaksional Khusus No. 59 tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana telah diubah dengan: a. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 04 tanggal 8 Mei 2018; b. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 27 tanggal 28 Juni 2018;	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”) 2. STP (“Debitur”)	01-09-2019 s/d 31-12-2027	Pemberian Fasilitas Kredit Transaksional Khusus dengan jumlah fasilitas Rp562.371.172.000,-. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk restrukturisasi atas nama Debitur di Bank. Bunga: 8,50% per tahun. Jaminan: Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga, dan segala biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada Debitur dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini, maka dengan ini Debitur memberikan/menyerahkan jaminan kepada Bank sebagaimana tersebut di bawah ini: 1.a. Tanah dan perkebunan kelapa sawit di lahan Hak Guna Usaha seluas 5.005,33 Ha beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada dengan bukti kepemilikan tanah-tanah berupa: - Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 150 seluas 1.295.500 m^2 tertulis atas nama STP, Berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	c. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 15 tanggal 30 November 2020; seluruhnya dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.			- Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 151 seluas 2.869.900 m^2, tertulis atas nama STP Berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; - Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 152 seluas 41.576.300 m^2, tertulis atas nama STP Berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Desa Perian, Recamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; ketiga bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp218.142.000.000, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 00365/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan akan diikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp55.060.000.000; b. Tanah dan perkebunan kelapa sawit di lahan yang masih proses sertifikasi Hak Guna Usaha seluas 1.905,3 Ha beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dengan bukti kepemilikan tanah berupa: - Izin Lokasi No. 590/525.29/007/A.P tanggal 24 April 2014, tertulis atas nama STP, terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Kuntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang setelah proses pensertifikatannya selesai akan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp158.437.000.000; c. Tanah, pabrik kelapa sawit dan bangunan lain diatas lahan Hak Guna Bangunan seluas 145.600 m^2 baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dengan bukti kepemilikan tanah berupa: - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01, seluas 145.600 m^2, tertulis atas nama STP, terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp196.593.000.000, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 180/2016 tanggal 14 Maret 2016; Untuk menjamin pelunasan hutang Debitur, maka berlaku *cross collateral* dengan perjanjian kredit atas nama masing-masing perusahaan group dengan rincian agunan yang diagunkan (No. 2 sampai dengan No. 6) sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				2.a. Tanah dan perkebunan kelapa sawit di lahan Hak Guna Usaha seluas 1.751,80 Ha beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada termasuk PMKS kapasitas 45 ton/jam, dengan bukti kepemilikan tanah berupa: Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00079, seluas 1.751,80 Ha, tertulis atas nama PLS, Berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir, Gunung Batu Besar dan Magalau Hilir Kecamatan Sampanahan, Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp366.297.000.000, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 00073/2016 tanggal 01 Maret 2016; - Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp41.938.000.000, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 00296/2018 tanggal 21 Juni 2018; b. Tanah dan perkebunan kelapa sawit di lahan yang masih proses sertifikasi Hak Guna Usaha seluas 903,38 Ha beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dengan bukti kepemilikan tanah berupa, tertulis atas nama PLS, terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir dan Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Desa Magalau Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah proses pensertifikatannya selesai akan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp80.092.000.000; 3. Tanah dan perkebunan kelapa sawit di lahan Hak Guna Usaha seluas 6.787,94 Ha beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dengan bukti kepemilikan tanah-tanah sebagai berikut: a. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16, seluas 5.790,94 Ha, tertulis atas nama SGA, berkedudukan di Banjarmasin, terletak di Desa Sukadamai, Guntung, Batu Karang dan Mentewe, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. b. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22, seluas 997 Ha tertulis atas nama SGA, berkedudukan di Banjarmasin, terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; kedua bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp880.598.000.000, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 00417/2016 tanggal 23 Mei 2016;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				c. Tanah dan bangunan bulking station dengan bukti kepemilikan tanah yaitu sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01005, seluas 30.161 m^2, tertulis atas nama SGA, terletak di Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp70.125.000.000, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 265/2015 tanggal 14 April 2016; 4. Tanah perkebunan kelapa sawit di lahan Hak Guna Usaha seluas 1.806 Ha beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dengan bukti kepemilikan tanah-tanah sebagai berikut: a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 38 ,seluas 110 Ha, tertulis atas nama KAPAG, terletak di Desa Magalau Hulu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 39 seluas 183 Ha tertulis atas nama KAPAG, terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; c. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 40, seluas 120 Ha, tertulis atas nama KAPAG, terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; d. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 41, seluas 155 Ha tertulis atas nama KAPAG, terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; e. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 60, seluas 638 Ha, tertulis atas nama KAPAG, terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; f. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 61, seluas 600 Ha, tertulis atas nama KAPAG, terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, keenam bidang tanah tersebut telah dibebani dengan: a Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp147.378.000.000 sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 00133/2016 tanggal 4 April 2016; b. Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp13.710.000.000, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 00295/2018 tanggal 21 Juni 2018;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				5. Tanah, Dermaga dan Bulking CPO diatas tanah seluas 18.496 m^2 dengan bukti kepemilikan tanah berupa: - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0007/ Kumai Hulu, seluas 18.496 m^2, tertulis atas nama Perseroan, terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp4.028.000.000 sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 0690/2018 tanggal 23 Agustus 2018; 6. Tanah, Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton dan perumahan di atas tanah seluas 645.200 m^2, dengan bukti kepemilikan tanah berupa: - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01/ Sei Bedaun, seluas 64,52 Ha tertulis atas nama Perseroan, terletak di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp136.923.000.000 sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 0689/2018 tanggal 23 Agustus 2018; 7. Sebidang tanah seluas 8.635 m^2, sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01/Kabupaten Katingan, tertulis atas nama BHL, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapnya, yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) sebesar Rp730.121.335.000; 8. Sebidang tanah seluas 4.210,998 Ha, sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha No. 40/Kabupaten Kotawaringin Timur, tertulis atas nama BHL, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapnya, yang terletak di Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) sebesar Rp356.055.697.000; 9. Sebidang tanah seluas 275.855 m^2, sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02/Kabupaten Katingan, tertulis atas nama BLH, berikut bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), bangunan perumahan karyawan dan sarana pelengkap di atasnya, yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp109.468.805.000 sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				10. sebidang tanah seluas 11.709 m^2, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Desa Pundu, tertulis atas nama BLH, berikut bangunan, dermaga/jetty, gudang, bulking, peralatan dan mesin-mesin, yang terletak di Desa Pundu, Kecamatan Campaga Huku, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp11.561.163.000 sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan No. 00092/2020 tanggal 27 Januari 2020, Jaminan No. 7 sampai dengan No. 10 untuk menjamin fasilitas kredit yang telah dan/atau akan diterima oleh Debitur dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*): Sepanjang seluruh kewajiban Debitur kepada Bank belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun investasi pinjaman jangka panjang kepada pihak lain; 2. Membagi keuntungan atau pembayaran cash dividen, kecuali memenuhi DER yang dipersyaratkan; 3. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pihak istimewa/pemegang saham sebelum fasilitas hutang di Bank lunas, kecuali penurunan yang berasal dari pencairan Kredit Transaksional Khusus Bank; 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang tidak dijaminkan di Bank kepada pihak lain; 5. Memperolen pinjaman investasi atau kredit investasi baru dari pihak lain; 6. Melakukan merger, akuisisi dan atau penjualan aset perusahaan Debitur, Go Public, dan membubarkan perusahaan; 7. Melakukan penjualan fixed aset perusahaan dengan nilai di atas Rp10.000.000.000 per transaksi atau kumulatif dalam 1 tahun; 8. Melakukan pengubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya, kecuali perubahan anggaran dasar yang diwajibkan oleh atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Memberikan piutang kepada pemegang saham; 10. Memberikan piutang afiliasi kepada sister company kecuali antara SGA, PLS, KAPAG, dan MAJ; 11. Membayar (baik sebagian atau seluruh) bunga atau pokok utang pemegang saham/subordinary loans sebelum seluruh hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu, kecuali memenuhi DER yang dipersyaratkan; 12. Menyewakan aktiva yang telah diagunkan ke Bank; 13. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari Debitur sendiri; 14. menggunakan cashflow bagi kepentingan sister company, holding-company, maupuhn kegiatan usaha lain di luar aktivitas kebun.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
3.	Akta Perjanjian Foreign-Exchange Line No. 60 tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”) 2. STP (“Debitur”)	22-12-2015 s/d 22-12-2025	Pemberian Fasilitas Foreign Exchange Line dengan fasilitas Today (TOD), Tomorrow (TOM), Spot, Forward FX, Swap FX, Cross Currency Swap dan Interest Rate Swap dan XF Option dengan jumlah maksimum hingga sebesar USD6.000.000,-. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk transaksi valas dan derivative.
4.	Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. 193/PK.CWL/GBD-JAK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dengan: a. Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. 211/PK.CWL/GBD-JAK/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021; b. Perubahan (Addendum) Perjanjian Fasilitas Kredit No. 188/PK-CWL/CPB-JKT/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022; c. Perubahan (Addendum) Perjanjian Fasilitas Kredit No. 199/JTRUST-AGR/LBS-JKT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023; seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	1. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (”Bank); 2. STP (”Debitur”).	25-10-2023 s/d 25-10-2024	Pemberian Fasilitas Langsung On Revolving Basis Uncommitted dengan jumlah maksimum hingga sebesar Rp30.000.000.000,-. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Bunga: 4,5% per annum. Jaminan: Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terutang atas Fasilitas tersebut di atas, Debitur wajib memberikan jaminan kepada Bank berupa Deposito Berjangka (Time Deposit) atas nama Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk, minimal sebesar Rp30.000.000.000 yang akan diikat secara gadai. Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*): Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan untuk: Hingga seluruh kewajiban Debitur berdasarkan pada atau terkait dengan Perjanjian Kredit telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis, Debitur tidak diperkenankan, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu untuk: 1. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya perubahan susunan pemegang saham, pengurus dan permodalan perusahaan; 2. Meminjampakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan (barang-barang yang dijaminkan pada Bank dengan cara apapun kepada pihak lain; 3. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apa pun juga atau leasing dari pihak lain atau menagadakan suatu hutang atau kewaiiban apa pun juga yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban kepada Debitur; 4. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, meniaminkan/mengangungkan sebagian besar atau selurun harta kekayaan debitur dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran nasabah kepada Bank;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				5. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan miliknya untuk kepentingan pihak lain; 6. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apa pun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur; 7. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/ merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perusahan lainnya; 8. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang sanam perseroan tertutup dan atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN); 9. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya; 10. Bertindak sebagai peminjam terhadap hutang pihak lain kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 11. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari.
5.	Akta Perubahan Atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan: i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 37 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; ii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 38 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“Kreditur”); 2. BHL; 3. BLP; 4. ADS; 5. PCS; 6. SMS; 7. MSP; (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Debitur”)	s/d 25-11-2028	Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp650.475.000.000,-. Tujuan penggunaan kredit oleh BHL adalah untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit seluas ± 11.303 Ha dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Bulking CPO milik BHL yang terletak di Desa Mirah Klanaman, Desa Makmur dan Tumbang Sanak, Desa Pandu, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penggunaan kredit oleh BLP adalah untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa saawit ± 8.782 Ha milik BLP yang terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut: Bunga: 8,50% per tahun. Jaminan: Untuk menjamin pembayaran lunas hutang yang timbul, Debitur dengan ini memberikan dan/atau mengupayakan untuk memberikan jaminan berupa: 1. BHL: a. 2 bidang tanah seluas 12.846 Ha sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (“**SHGU**”) No. 01 dan No. 40 atas nama BHL berikut tanaman perkebunan kelapa sawit dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Desa Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	iii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65 Kredit Investasi Maksimum Rp650.475.000.000,- tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.			- SHGU No. 01 dalam proses pengikatan Hak Tanggungan sebesar Rp730.121.330.000,- (termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas fasilitas Group Usaha di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai penjaminan sebesar Rp150.000.000.000,-; dan - SHGU No. 40 yang telah dijaminkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 738/2020 tanggal 3 Desember 2020 dengan nilai penjaminan sebesar Rp356.055.700.000,-; b. Sebidang tanah seluas 275.855 m^2 sesuai dengan SHGU No. 02 atas nama BHL berikut bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), bangunan perumahan karyawan dan sarana pelengkap di atasnya serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas 60 ton TBS / jam, yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dijaminkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020, yang bersifat *cross collateral* untuk seluruh perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp109.468.810.000,-; c. Sebidang tanah seluas 11.709 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02 atas nama BHL berikut bangunan dan sarana pelengkap di atasnya yang mendukung operasional bulking CPO, yang terletak di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dijaminkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan II No. 92/2020 tanggal 27 Januari 2020, yang bersifat cross collateral untuk seluruh perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp11.561.160.000,-; d. Persediaan BHL Cfm. Laporan Keuangan Home Statement 30 September 2022 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00630612.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021; e. Piutang BHL Cfm. Laporan Keuangan Home Statement 30 September 2022 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00630661. AH.05.02.Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp80.961.320.000,-;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				2. BLP: a. 2 bidang tanah seluas 8.876,6 Ha sesuai dengan SHGU No. 13 dan SHGU No. 40 keduanya atas nama BLP berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya, yang terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dijaminkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan IV No. 0150/2020 tanggal 12 Maret 2022, yang bersifat cross collateral untuk seluruh perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp875.198.000.000,-; b. Persediaan BLP Cfm. Laporan Keuangan Home Statement 30 September 2022 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00627840.AH.05.02.Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.448.510.000,-; c. Piutang BLP Cfm. Laporan Keuangan Home Statement 30 September 2022 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00628118. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp515.116.410.000,-; 3. ADS: a. Sebidang tanah seluas 5.465,80 Ha sesuai dengan SHGU No. 39 atas nama ADS berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan perkebunan, bangunan perkebunan kelapa sawit, bangunan PKS dan sarana pelengkap di atasnya serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas produksi 30 ton TBS / jam yang terletak di Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dijaminkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan III No. 406 tanggal 2 Maret 2020, yang bersifat cross collateral untuk seluruh perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp570.504.000.000,-; b. Persediaan ADS Cfm. Laporan Keuangan Home Statement 30 September 2020 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00623405.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp12.798.770.000,-; c. Piutang ADS Cfm. Laporan Keuangan Home Statement 30 September 2022 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00618530. AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 11 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp30.702.110.000,-;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				4. SMS: a. Sebidang tanah seluas tertanam 3.266 Ha atas nama SMS berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya, yang terletak di Desa Tebing Karang, nusa Pandau, Sungai Pinang, Tanjung Arak, Nanga Man, Palempai Jaya dan Nanga Ella, Kecamatan Nanga Pinoh, Pinoh Utara, dan Ella Hillir, Kabupaten Melawai Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan SHGU No. 63, SHGU No. 64 s/d No. 97, yang seluruhnya telah dijaminkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 00098/2020 tanggal 7 September 2020, yang bersifat cross collateral untuk seluruh perusahaan, dengan nilai penjaminan Rp395.374.000.000,-; b. Persediaan SMS Cfm. Laporan Keuangan Home Statement 30 September 2022 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan nilai Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00628930.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.494.070.000,-; c. Piutang SMS Cfm. Laporan Keuangan Home Statement 30 September 2022 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00629026.AH.05.02. Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp923.726.370.000,-; 5. MSP: a. Sebidang tanah seluas 6.527,40 Ha sesuai dengan SHGU No. 15 atas nama MSP berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya yang terletak di Desa/Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat yang telah dijaminkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No. 00113/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang bersifat cross collateral untuk seluruh perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp299.528.000.000,-; b. Piutang MSP Cfm. Laporan Keuangan 30 September 2022 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00623801.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp606.250.000,-; c. Persediaan MSP Cfm. Laporan Keuangan Home Statement 30 September 2022 yang telah dijaminkan secara fidusia dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. W10.00623528.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp347.900.000,-;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				6. Koperasi Bedaun Maju Bersama: Sebidang tanah seluas 1.256,47 Ha atas nama Koperasi Bedaun Maju Bersama berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak di atasnya, yang terletak di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I setelah sertifikat terbit senilai *outstanding* fasilitas kreditnya pada saat itu; 7. *Letter of Undertaking* atas nama Perseroan yang akan menjamin fasilitas kredit sindikasi; 8. Akta *Corporate Guarantee* atas nama PT Rajawali Corpora. Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*): Selama Fasilitas kredit masih berlangsung dan hutang belum dinyatakan lunas oleh Kreditur, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur terlebih dahulu, masing-masing Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengadakan penggabungan usaha (*merger*) atau konsolidasi dengan perusahaan lain; 2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga; 3. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain; 4. Mengijinkan pihak lain menggunakan perusahaan Debitur untuk kegiatan usaha pihak lain tersebut; 5. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan/menjual resipis saham perusahaan; 6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi Fasilitas Kredit Kreditur (*Sub-Ordinated Loan*); 7. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman perusahaan afiliasi yang telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Kreditur (*Sub-Ordinate Loan*); 8. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya; 9. Meningkatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada Kreditur) kepada pihak lain; 10. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dibiayai oleh Kreditur dan/atau dijaminkan kepada Kreditur; 11. Menggunakan dana yang berasal dari Fasilitas Kredit untuk tujuan diluar bidang usaha perusahaan;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				12. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak lain; 13. Mengubah bidang usaha; 14. Melakukan *interfinancing* antar grup usaha, kecuali jika hal tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan grup; 15. Memindahtangankan dan/atau menyewakan perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain; 16. Membayar kembali pinjaman kepada pemegang saham maupun pihak afiliasi, kecuali atas hutang-hutang atau tagihan-tagihan yang timbul karena transaksi perdagangan sehubungan dengan kegiatan operasional usaha pemegang saham dengan perusahaan; 17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar; 18. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Debitur dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur; 19. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Debitur dan mengancam keberlangsungan usaha Debitur; 20. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; 21. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan dokumen transaksi kepada pihak lain.

C. PERJANJIAN PEMBIAYAAN PERSEROAN

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang Dengan Jaminan (Factoring With Recourse) No. 01 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dihadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Addendum IX Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Anjang Piutang (Factoring With Recourse) No. 87 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta	1. PT Chandra Sakti Utama Leasing ("Factor"); 2. Perseroan; 3. STP; 4. BHL; 5. JMS; 6. PLS; 7. SGA; 8. ADS; (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Klien")	s/d 31-07-2024	Fasilitas pembiayaan dengan sifat *revolving* dengan limit sebesar Rp220.000.000.000,- Tujuan Penggunaan Fasilitas: Pembiayaan diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan aktivitas usaha Klien yang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan dengan berdasarkan pengalihan piutang yang dimiliki oleh Klien yang timbul dari adanya transaksi dengan customer yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dengan cara factoring with recourse (*undisclosed*). Jaminan: Untuk menjamin pembayaran lunas hutang yang timbul, Debitur dengan ini memberikan dan/atau mengupayakan untuk memberikan jaminan berupa: 1. *Letter* of Undertaking yang diterbitkan oleh dan ditandatangani pejabat yang berwenang dari Perseroan; 2. Jaminan pembiayaan dari PT Asuransi Sinarmas sebesar Rp132.000.000.000,- berupa Surety Bond;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				3. Jaminan berupa inventaris dari Crude Palm Oil yang dimiliki oleh: a. JMS berupa minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) sejumlah 4.000.000 kg dengan harga Rp9.500,- per kg sehingga nilai penjaminan senilai Rp38.000.000.000,-; b. Perseroan berupa minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) sejumlah 3.500.000 kg dengan harga Rp9.500,- per kg sehingga nilai penjaminan senilai Rp33.250.000.000,-; c. BHL berupa minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) sejumlah 4.000.000 kg dengan harga Rp9.500,- per kg sehingga nilai penjaminan senilai Rp38.000.000.000,-; d. ADS berupa minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) sejumlah 1.000.000 kg dengan harga Rp9.500,- per kg sehingga nilai penjaminan senilai Rp9.500.000.000,-; e. TSP berupa minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) sejumlah 1.700.000 kg dengan harga Rp9.500,- per kg sehingga nilai penjaminan senilai Rp16.150.000.000,-; f. STP berupa minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) sejumlah 1.500.000 kg dengan harga Rp9.500,- per kg sehingga nilai penjaminan senilai Rp14.250.000.000,-; g. PLS berupa berupa minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) sejumlah 1.400.000 kg dengan harga Rp9.500,- per kg sehingga nilai penjaminan senilai Rp13.300.000.000,-. Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*): Hingga seluruh kewaiiban Debitur berdasarkan pada atau terkait dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini telah dinvatakan lunas oleh Bank secara tertulis, Debitur tidak diperkenankan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis dari Bank terlebih dahulu untuk (kecuali yang sudah ada sebelum ditandatanganinya akta ini): 1. Memindahtangankan Jaminan kepada pihak lain. Klien dapat mengganti Jaminan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani hak jaminan; 2. Mengubah bentuk atau konstruksi Jaminan yang mengakibatkan berkurangnya nilai Jaminan; 3. Menggunakan dan/atau memanfaatkan Jaminan tersebut untuk suatu kegiatan yang melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum; 4. Melakukan penggantian pengurus dan pemegang saham; 5. Membagikan dividen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Factor.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Modal Usaha No. 36 tanggal 23 Juni 2023 *junctis* Akta Amandemen Atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Modal Usaha No. 15 tanggal 25 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Bayu Nirwana Sari, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dan Surat No. 206/SRT-MKT-HO/RBF/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Surat Tanggapan Permohonan Waiver an. PT Eagle High Plantations Tbk. (PT EHP)	1.PT Radana Bhaskara Finance Tbk ("Kreditur"); 2. Perseroan ("Debitur")	2 tahun	Fasilitas Pembiayaan yang diberikan dalam rangka memenuhi aktivitas usaha Debitur yang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan tagihan yang diserahkan kepada Kreditur . Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*): Selama jangka waktu perjanjian ini, Debitur dilarang untuk: 1. melakukan perubahan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dan/atau pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*). 2. melakukan perubahan kegiatan usaha, maksud, dan tujuan usaha perseroan Debitur. 3. melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan/atau modal disetor. 4. menggadaikan atau membebankan atau menjadikan jaminan atas saham Debitur pada pihak lain. 5. melakukan penggabungan/merger atau konsolidasi. menyatakan pailit, mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melakukan likuidasi atau upaya pemberesan. 6. melakukan perikatan atau perjanjian dengan pihak- lain yang berdampak secara material terhadap Debitur dan/atau mempengaruhi kemampuan membayar kepada Kreditur. 7. melakukan kegiatan usaha atau transaksi dengan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau- pihak terkait Debitur yang bukan merupakan transaksi yang wajar (*non arm's - length*). 8. memberikan pinjaman kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Debitur. 9. menjual, mengalihkan, dan/atau dengan cara lain melepaskan Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan Tambahan. 10. Membebankan jaminan dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Kreditur terhadap obyek pembiayaan. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur, Debitur dilarang 1. melakukan akuisisi atau investasi; 2. memperoleh pinjaman baru dari pihak lain; 3. melakukan perubahan anggaran dasar selain perubahan kegiatan usaha, maksud, dan tujuan usaha serta pengurangan permodalan; 4. menjual, membebankan, atau melepaskan sebagian besar asset Debitur kepada pihak lain, atau menjadi penjamin (borg) bagi pihak lain; 5. mengeluarkan saham-saham baru, hak opsi, waran, atau instrumen-instrumen sejenis lainnya.
3.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) No. 235222300392 tanggal 26 September 2023	1.PT Shinhan Indo Finance ("SIF") 2. Perseroan ("Debitur")	36 bulan	Pembiayaan untuk membeli Massey Ferguson 5709 ES sebanyak 1 unit dengan nilai Rp515.040.000,-

D. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN LAINNYA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Kerjasama No. 226/SPK/SLS-ELP/IX/2023 tanggal 15 September 2023	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. PT Semesta Langgeng Sentosa ("Pihak Kedua")	15-09-2022 s/d 15-09-2024	Pihak Pertama yang menghasilkan limbah B3 dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 dengan jenis oli bekas, aki bekas, filter bekas, majun bekas, kemasan bekas dengan pembayaran yang diatur dalam perjanjian.
2.	Perjanjian Pengangkutan Barang No. 001/TRANS/EHP-SPK-AG/PK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. UD Anita Group ("Pihak Kedua")	02-01-2024 s/d 31-12-2024	Pihak Kedua dengan ini menyediakan jasa pengangkutan Palm Kernel kepada Pihak Pertama dari EHP Mil ke Dermaga Jetty Serimbang.
3.	Perjanjian Pengangkutan Barang No. 001/TRANS/EHP-SPK-BS/CPO/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. CV Berkat Sekumpul ("Pihak Kedua")	02-01-2024 s/d 31-12-2024	Pihak Kedua dengan ini menyediakan jasa pengangkutan Crude Palm Oil kepada Pihak Pertama dari EHP Mil ke Dermaga Jetty Serimbang.
4.	Perjanjian Pengangkutan Barang No. 003/TRANS/EHP-SPK-HP/CPO/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. CV Hosana Perkasa ("Pihak Kedua")	23-10-2023 s/d 22-10-2024	Pihak Kedua dengan ini menyediakan jasa pengangkutan Crude Palm Oil kepada Pihak Pertama dari EHP Mil ke Dermaga Jetty Serimbang.
5.	Perjanjian Layanan Seat Management No. 160/VELO/KT-MS/DI/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022	1. Perseroan ("Pelanggan") 2. PT Nettocyber Indonesia ("Velo")	48 bulan	Pelanggan membutuhkan layanan Seat Management dengan spesifikasi dan alokasi untuk pengiriman sesuai dengan kebutuhannya. Velo akan memperisapkan dan menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak serta dukungan teknis untuk kebutuhan pelanggan. Nilai perjanjian: Rp303.839.583,- per bulan
6.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar ("TBS") Kelapa Sawit No. 001/EHP-KTHB/TBS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 *juncto* Addendum Pertama Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar ("TBS") Kelapa Sawit No. 001/EHP-KTHB/TBS/V/2023 tanggal 31 Mei 2024	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. Kelompok Tani Harapan Benua ("Pihak Kedua")	01-06-2023 s/d 31-05-2025	Pihak Pertama bermaksud membeli Tandan Buah Segar ("**TBS**") milik Pihak Kedua. Harga TBS mengikuti harga komersial pasar yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
7.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar ("TBS") Kelapa Sawit No. 010/EHP-PT Sekawan Artha Niaga/ TBS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 *juncto* Addendum Pertama Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar ("TBS") Kelapa Sawit No. 010/EHP-PT Sekawan Artha Niaga/ TBS/V/2023 tanggal 31 Mei 2024	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. PT Sekawan Artha Niaga ("Pihak Kedua")	01-06-2023 s/d 31-05-2025	Pihak Pertama bermaksud membeli TBS milik Pihak Kedua. Harga TBS mengikuti harga komersial pasar yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.
8.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar ("TBS") Kelapa Sawit No. 009/EHP-UD Anita Group/ TBS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 *juncto* Addendum Pertama Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar ("TBS") Kelapa Sawit No. 009/EHP-UD ANITA Group/ TBS/V/2023 tanggal 31 Mei 2024	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. UD Anita Group ("Pihak Kedua")	01-06-2023 s/d 31-05-2025	Pihak Pertama bermaksud membeli TBS milik Pihak Kedua. Harga TBS mengikuti harga komersial pasar yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.

E. PERJANJIAN SEWA MENYEWA DAN PINJAM PAKAI RUANGAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Pihak Pemberi Sewa/ Pihak Pertama	Pihak Penyewa/Pihak Kedua	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
1.	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	Perseroan	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2022/ VIII-T0-004 tanggal 27 Oktober 2022	Ruang sewa di Rajawali Place yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. B-4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta lantai 28 dengan luas 142,47 m^2 Nilai perjanjian: Rp79.070.850,- per triwulan	01-09-2022 s/d 31-08-2027	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2.	Perseroan	SMS	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.	Pihak Pemberi Sewa/ Pihak Pertama	Pihak Penyewa/Pihak Kedua	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
3.	Perseroan	BHL	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4.	Perseroan	ISA	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
5.	Perseroan	MSP	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
6.	Perseroan	PSR	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua.	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
7.	Perseroan	SKS	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
8.	Perseroan	TSP	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.	Pihak Pemberi Sewa/ Pihak Pertama	Pihak Penyewa/Pihak Kedua	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
9.	Perseroan	MAJ	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
10.	Perseroan	PLS	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
11.	Perseroan	SHM	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
12.	Perseroan	SGSS	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
13.	Perseroan	PAK	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.	Pihak Pemberi Sewa/ Pihak Pertama	Pihak Penyewa/Pihak Kedua	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan Sengketa
14.	Perseroan	HUM	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
15.	Perseroan	IPS	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
16.	Perseroan	SPN	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat dudukan dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	30-01-2022 s/d 31-08-2027	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Sepanjang pengetahuan Perseroan, seluruh transaksi di atas telah diselesaikan dengan wajar. Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak dan tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

A. TANAH-TANAH YANG DIMILIKI

Hak Guna Bangunan

No.	Sertifikat HGB			Luas (M^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga				
1.	0007	11-12-2013	24-09-2036	18.496	Desa : Kurnai Hulu Kecamatan : Kumai Kabupaten: Kotawaringin Barat Provinsi : Kalimantan Tengah	Perseroan	Sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2.	01	27-08-2002	26-08-2032	64,52	Desa : Bukit Mulia Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut Provinsi : Selatan	Perseroan	Sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

B. KENDARAAN BERMOTOR

No.	Merk/ Type	No. Polisi	Tahun	Asuransi			
				Nama Penanggung	No. Polis	Masa Pertang-Gungan	Nilai Premi (Rp)
1.	Suzuki AV 1414F	B 1077 BYR	2014	PT Lippo General Insurance Tbk.	1802212400162	31-01-2024 s/d 31-01-2025	31.050.470,25
2.	Toyota Fortuner 2.7	B1371 PLO	2011				
3.	Toyota Camry 2.5	B1452 PAE	2012				
4.	Kijang Innova 2.4	B 1927 DFB	2021				
5.	Mitsubishi Triton L 200	KH 8109 GJ	2011				
6.	Mitsubishi Dump Truck	KH 8390 GK	2014				

C. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki merek-merek yang telah memperoleh sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Merek	Merek	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	IDM000612646	”Mata Rajawali”	Perseroan	11-05-2016	s/d 11-05-2026
2.	IDM000612552	“EAGLE HIGH PLANTATIONS”	Perseroan	11-05-2026	s/d 11-05-2026

D. SAHAM-SAHAM DALAM PERUSAHAAN

Perseroan memiliki saham-saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (RUPIAH/USD)	PERSENTASE (%)
1.	BLP	602.499.999 @Rp1.000,-	602.499.999.000	99,99
2.	ADS	199.717.999 @Rp1.000,-	199.717.999.000	99,99
3.	SMS	239.434 @Rp1.000.000,-	239.434.000.000	41,49
4.	PLS	319.200 @Rp1.000.000,-	319.200.000.000	95,00
5.	SGA	123.500 @Rp1.000.000,-	123.500.000.000	95,00
6.	JMS	817.000 @Rp500.000,-	408.500.000.000	95,00
7.	MAJ	723.841 @Rp500.000,-	361.920.500.000	95,00
8.	STP	513.000 @Rp500.000,-	256.500.000.000	95,00
9.	VMA	350263.266.700 @Rp1.000,-	263.266.700.000	37,61
10.	TSP	99.750 @Rp1.000.000,-	99.750.000.000	7,19
11.	GEH	184.578.314 @USD 1	USD184,578,314	100,00

7. PERJANJIAN ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertang-gung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertang-gungan	Masa Berlaku
1.	0101-0901-24-000104	PT Avrist General Insurance	Perseroan	*Public Liability*	Seluruh operasi dari tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada kantor dan/ atau aktivitas lain sehubungan dengan bisnis tertanggung.	Rp15.000.000.000.,-	31-01-2024 s/d 31-01-2025

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertang-gung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertang-gungan	Masa Berlaku
2.	10109052400140	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.	Perseroan beserta anak perusahaan atau perusahaan afiliasi	*Contractor's Plant & Marchinery*	Wilayah Indonesia	Rp891.000.000,- untuk 1 (satu unit) dengan detail sebagaimana diatur dalam polis	31-01-2024 s/d 31-01-2025
3.	990123002413	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. dan beberapa penangung lainnya	Perseroan beserta anak perusahaan atau perusahaan afiliasi	*1. Building* *2. Machineries & Equipment*	Seluruh operasi dari tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada kantor dan/ atau aktivitas lain sehubungan dengan bisnis tertanggung yang terletak di: 1. Rajawali Place 2. EHPM, DS Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	*Machineries & Equipment* untuk lokasi Rajawali Place: Rp3.820.220.864. Building untuk lokasi di EHPM: Rp138.740.973.258. *Machineries & Equipment* untuk lokasi EHPM: Rp2.678.500.000..	31-01-2023 s/d 31-07-2024
4.	1802212400162	PT Lippo General Insurance	Perseroan	Asuransi Kendaraan Bermotor	6 kendaraan bermotor milik Perseroan	Rp1.375.000.000,-	31-01-2024 s/d 31-01-2025

Sehubungan dengan asuransi-asuransi atas aset Perseroan sebagaimana dijabarkan di atas, Perseroan meyakini bahwa asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%

1. PT RAJAWALI CAPITAL INTERNASIONAL

PT Rajawali Capital International ("**RCI**") adalah pemilik/pemegang 11.886.121.516 saham dalam Perseroan atau mewakili 37,7% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Riwayat Singkat

RCI didirikan dengan nama "PT Rajawali Capital International" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas "PT Rajawali Capital International" No. 29 tanggal 11 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Mohamad Abror, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-10.01.1816.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 12 Februari 2014 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. 05697 tanggal 12 Februari 2014.

Perubahan anggaran dasar RCI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Rajawali Capital International No. 58 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat di hadapan oleh Emmy Halim S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") di bawah No AHU-AH.01.03-157578 tanggal 18 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0255483.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2019 ("Akta No. 58/2023"), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar RCI.

Maksud dan Tujuan RCI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar RCI sebagaimana termaktub akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Rajawali Capital International No. 95 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham di bawah Surat Keputusannya No. AHU-0075170. AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 serta didaftarkan dalam dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229337.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, maksud dan tujuan RCI ialah berusaha dalam bidang:

a. Konstruksi;
b. Perdagangan;
c. Industri Pengolahan;
d. Pengangkutan dan Pergudangan;
e. Pertanian;
f. Pertambangan dan Penggalian;
g. Informasi dan Komunikasi;
h. Aktivitas Profesional;
i. Aktivitas Jasa Keuangan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 58/2023**,** struktur permodalan dan susunan pemegang saham RCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.500.000**	**8.500.000.000.000,-**	
Pemegang Saham:			
1. PT Rajawali Corpora	1.277.340	1.277.340.000.000,-	20,92
2. PT Rajawali Kapital Internasional	4.827.113	4.827.113.000.000,-	79,08
Modal Ditempatkan dan Disetor	**6.104.453**	**6.104.453.000.000,-**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**2.395.547**	**2.395.547.000.000,-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Rajawali Capital International No. 29 tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database SABH di bawah No. AHUAH.01.03-0072244 tanggal 02 Februari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0022381.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 02 Februari 2022 , susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Yaya Winarno Junardy
Komisaris : Jap Johanes

Direksi:
Direktur Utama : Peter Sondakh
Direktur : Abed Nego
Direktur : Rizki Indrakusuma
Direktur : Kenneth Ronald Kennedy Crichton

2. FIC PROPERTIES SDN BHD

FIC Properties SDN BHD ("**FIC**") adalah pemilik/pemegang 11.664.357.670 saham dalam Perseroan atau mewakili 37% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Riwayat Singkat

FIC merupakan badan hukum Malaysia yang didirikan pada tanggal 31 Juli 2013 dengan Syarikat No.1056622 U dimana FIC memiliki telah memiliki anggaran dasar *Articles of Association* of FIC tanggal 31 Juli 2013.

Maksud dan Tujuan FCI

Sebagaimana termaktub pada *Notice of Resolution* FIC tanggal 4 Januari 2016 *juncto Notice of Resolution* FIC tanggal 22 Maret 2016, maksud dan tujuan dari FIC adalah:

a. Untuk menjalankan bisnis perusahaan *holding* investasi dan untuk tujuan itu mengakuisisi dan memegang baik atas nama perusahaan atau atas nama nominee saham, saham, surat utang, saham surat hutang, obligasi, surat utang, kewajiban-kewajiban dan surat berharga dan semua derivatifnya yang diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan mana pun yang didirikan atau menjalankan bisnis dan surat utang, saham surat utang, obligasi, surat utang, obligasi dan surat berharga dan semua derivatifnya yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah, penguasa berdaulat, komisaris, badan atau otoritas publik, tertinggi , tanggungan, kota, lokal atau di bagian mana pun di dunia.
b. Untuk memperoleh, melepaskan, menangani atau berinvestasi dalam mata uang asing dan menukarkannya serta melakukan transaksi derivatif termasuk perjanjian pertukaran mata uang atau suku bunga, *swap*, *caps*, *collar*, *floor*, *forward*, *credit default swaps*, perjanjian lindung nilai atau perjanjian derivatif lainnya atau perjanjian derivatif lainnya atau perjanjian-perjanjian serupa dengan hal-hal tersebut di atas dan pengaturan apa pun untuk agunan atau jaminan lainnya sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan instrumen keuangan lainnya dalam bentuk apa pun untuk perdagangan, investasi, atau tujuan lainnya.
c. Untuk melaksanakan dan menegakkan semua hak dan kekuasaan yang diberikan oleh atau sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut, kewajiban saham atau surat berharga lainnya termasuk tanpa mengurangi sifat umum dari semua hak veto atau kendali yang mungkin diberikan berdasarkan kepemilikan oleh perusahaan sejumlah proporsi khusus dari jumlah yang dikeluarkan atau jumlah nominalnya dan untuk memberikan jasa manajerial dan pengawasan eksekutif lainnya dan konsultan untuk atau sehubungan dengan perusahaan mana pun.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebagaimana termaktub pada Summary of Share Capital yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, modal dari FIC adalah 1.000.000 Ringgit dimana seluruhnya dipegang oleh Federal Land Development Authority.

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub pada bagian Directors/Officers yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, susunan pengurus FIC adalah:

Direksi:

Direktur	: Mahadzir Bin Mustafa
Direktur	: Raja Faridah Binti Raja Ahmad

C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

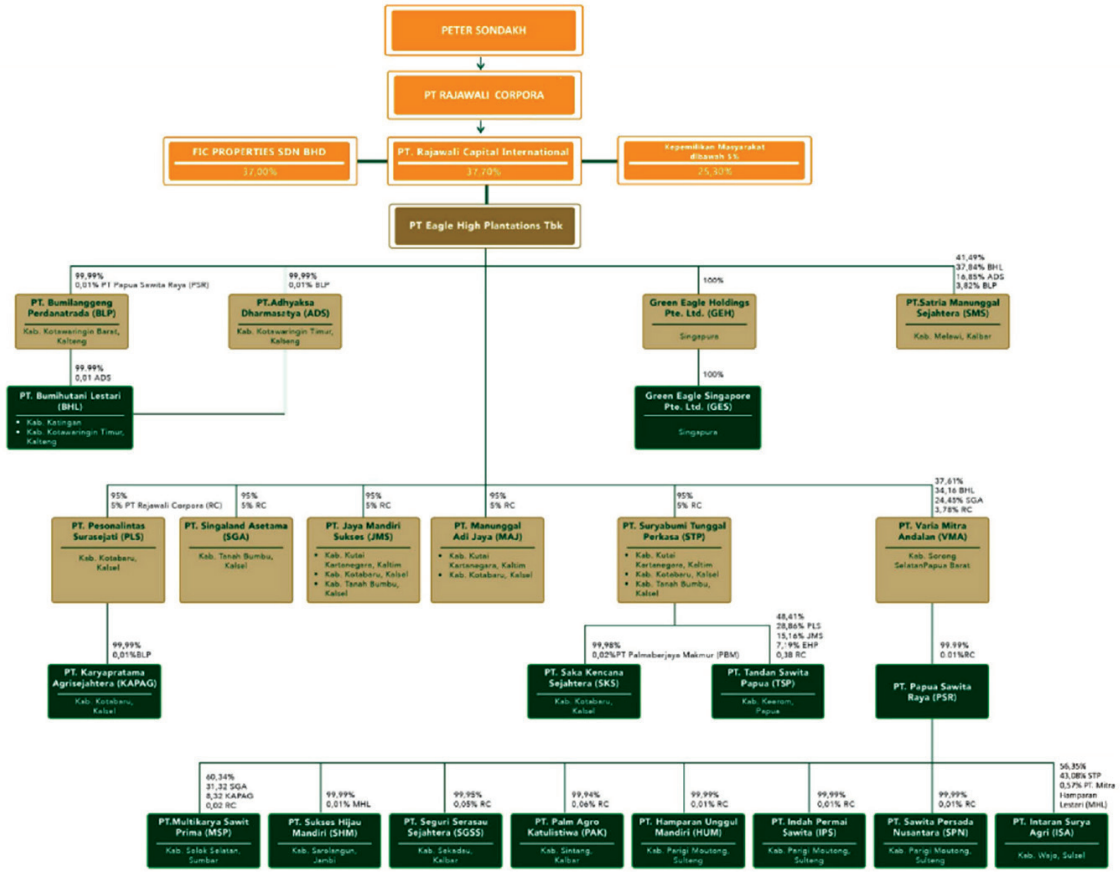

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Peter Sondakh yang memiliki 37,70% saham dalam Perseroan dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Rajawali Capital International merupakan Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4.b Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana termaktub dalam Informasi Penyampaian Data Perseroan tanggal 13 November 2023, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Peter Sondakh.

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantation No. 2 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0116320 tanggal 11 Mei 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Abed Nego
Komisaris Independen	:	Yohanes Wahyu Saronto
Komisaris	:	Mohammad Prianto Madelar

Direksi

Direktur Utama	:	Henderi
Direktur	:	Andrew Haryono
Direktur	:	Yeoh Lean Khai

HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan Di Atas 5% yaitu:

Nama	Perseroan	RCI	FIC
Abed Nego	KU	D	-
Yohanes Wahyu Saronto	KI	-	-
Mohammad Prianto Madelar	K	-	-
Henderi	DU	-	-
Andrew Haryono	D	-	-
Yeoh Lean Khai	D	-	-

Keterangan:
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama
D : Direktur

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Para pemegang saham melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dalam RUPS. Mengacu pada mandat RUPS tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga menganalisa informasi mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari perusahaan sejenis dengan industri dan skala usaha Perseroan.

Struktur remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen tetap meliputi gaji pokok sedangkan komponen variable meliputi bonus serta insentif termasuk yang bersifat jangka panjang. Struktur remunerasi ditinjau setiap tahunnya dengan berpedoman pada tingkat inflasi, evaluasi kinerja serta kondisi keuangan Perseroan.

Tidak ada kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kehadirannya di rapat Direksi atau Dewan Komisaris. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir bagi Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan Direksi.

Penunjukan dan pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan telah memenuhi ketentuan mengenai pembatasan rangkap jabatan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat dari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Abed Nego, Komisaris Utama

Usia : 49 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIIE IBII, Jakarta pada tahun 1996 dan gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2023 – saat ini	Komisaris Utama Perseroan
2019 – saat ini	Komisaris Utama PT Fortune Indonesia Tbk
2016 – saat ini	Komisaris PT Archi Indonesia Tbk
2017 – saat ini	*Managing Director* (CFO) PT Rajawali Corpora
2003 – 2017	*Director of Finance* PT Rajawali Corpora
2001 – 2003	*Investment Banking Manager* PT Danareksa
1996 – 1999	Senior Auditor PricewaterhouseCoopers

Mohammad Prianto Madelar, Komisaris

Usia : 51 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau memperoleh gelar Magister Hukum tahun 2011 dan Sarjana Hukum tahun 1996 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2023 – saat ini	Komisaris Perseroan
2022 – saat ini	*Legal Consultant* PT Rajawali Corpora
2006 – 2021	Direktur (*Legal Counselor*) PT Rajawali Corpora
2004 – 2006	*Founding & Senior Partner* Radjiman Billitea Madelar Law Firm
2001 – 2004	*Partner* Assegaf Hamzah & Partner (AHP) Law Firm
1996 – 2001	*Senior Associate* Lubis Ganie Surowidjojo (LGS) Law Firm

Yohanes Wahyu Saronto, Komisaris Independen

Usia : 75 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau memperoleh gelar dari AKABRI Kepolisian pada tahun 1971, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1977, SESPIM Polri pada tahun 1985, mendalami masalah manajemen strategik, mengikuti pendidikan dan latihan di dalam dan luar negeri di bidang Intelijen serta Lemhanas pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2017. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga memiliki berbagai pengalaman, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2017 - saat ini	Komisaris Independen Perseroan
2007 - 2011	Dewan Analis Stratejik Badan Intelijen Negara (BIN)
2002	Deputy Contra Intel Badan Intelijen Negara (BIN)
2001 - 2002	Kapolda Daerah Istimewa Yogywakarta
2000	Dir Intelpam POLRI
1999	Kadis Pam POLRI

DIREKSI

Henderi, Direktur Utama

Usia : 51 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta tahun 2001 dan gelar MBA dari Jakarta Institute of Management tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022. Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga pernah menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2022 – saat ini	Direktur Utama Perseroan
2017 – 2022	Direktur Perseroan
2015 – 2017	Eksekutif Manajemen Perseroan
2011 – 2015	*Chief Operating Officer* Green Eagle Group
2009 – 2011	*Vice President Marketing & Infrastructure* PT Rajawali Plantations Group
2007 – 2008	*Chief Financial Officer* PT Rajawali Plantations Group
2004 – 2007	*Assistance Vice President Finance* PT SMART Tbk
1999 – 2003	*Senior Manager* PT TEAC Electronics Indonesia
1996 – 1998	*Supervisor* PT Antilope Madju Puri Indah
1994 – 1996	*Senior Auditor* Arthur Andersen
1993 – 1994	*Junior Auditor* Johan Malonda & Co.

Andrew Haryono, Direktur

Usia : 44 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau memperoleh gelar Master di bidang Akuntansi Profesional dan Bachelor of Business Administration dari The University of Texas di Austin, Amerika Serikat pada tahun 2001. Beliau juga merupakan Akuntan Publik Terdaftar.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, atara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2020 – saat ini	Direktur Perseroan
2019 – 2020	Eksekutif Manajemen Perseroan
2017 – 2019	Komisaris Perseroan
2015 – saat ini	Direktur Green Eagle Holding Pte. Ltd.
2015 – saat ini	Direktur Green Eagle Singapore Pte. Ltd.
2011 – 2019	*Chief of Staff to Chairman/CEO* dan Malaysia *Country Chief Representative* Rajawali Corpora
2010 – 2011	*Financial Controller* Microsoft Indonesia
2007 – 2010	*Financial Controller* Dell Singapura
2001 – 2006	*Advanced Financial Analyst* Electronic Data System/ Hewlett Packard Amerika Serikat

Yeoh Lean Khai, Direktur

Usia : 58 Tahun

Kewarganegaraan : Malaysia

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Murdoch University, Western Australia tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, atara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2015 – 2021	Eksekutif Manajemen Perseroan
2011 – 2014	*Deputy Chief Financial Officer* Green Eagle Group
2010 – 2011	*Deputy Chief Financial Officer* PT Louis Dreyfus Commodities Indonesia
2008 – 2009	*Chief Financial Officer* Shanghai Hutchison Co. Ltd.
2007 – 2008	*Chief Financial Officer* Lippo Commercial Consulting Co.
1993 – 2007	*Finance and Admin Manager* Kerry Group
1991 – 1993	*Internal Audit Executive* Universal Furniture Limited

Manajemen Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

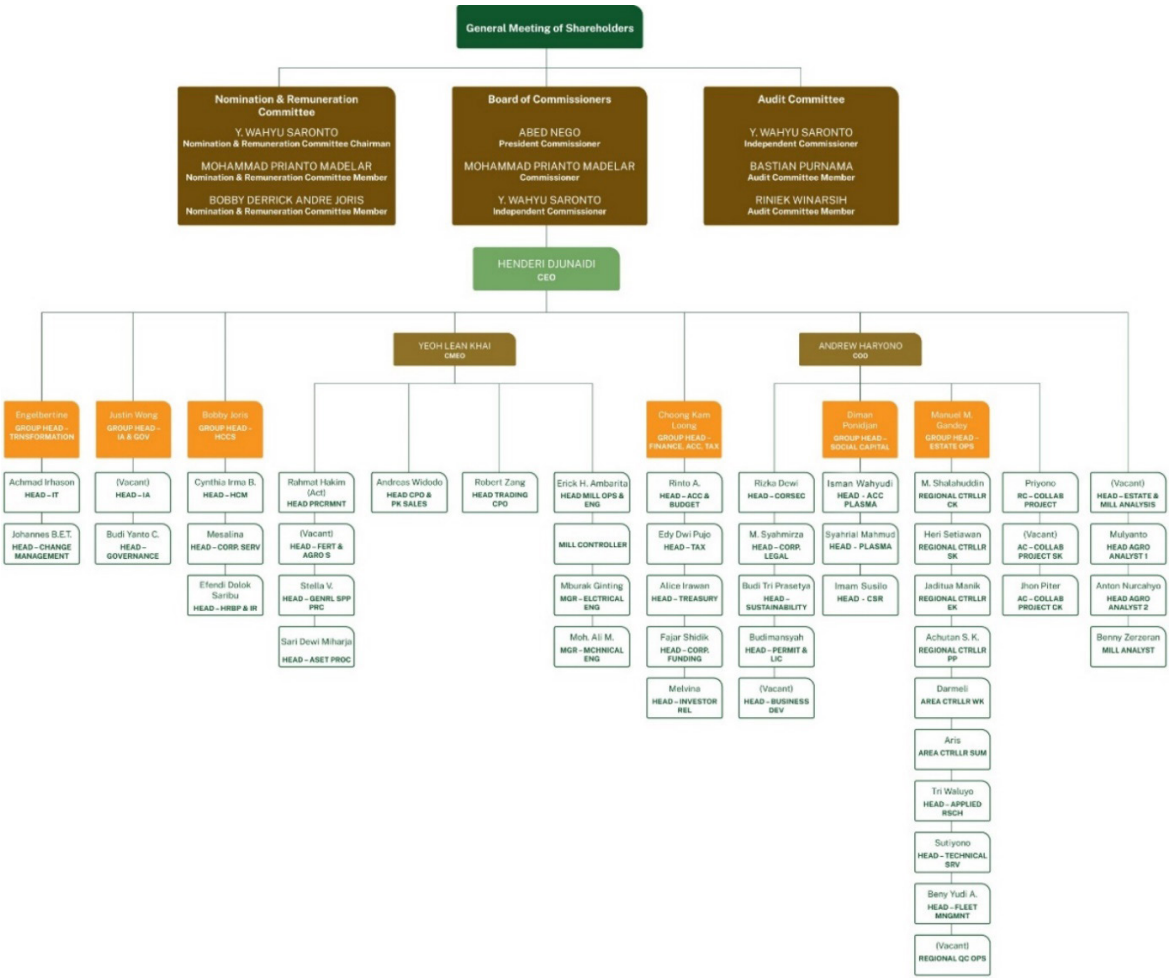

F. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*/ "GCG")

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen Perseroan untuk menjalankan *GCG* diantaranya dengan menyediakan sarana keterbukaan informasi melalui website, buku tahunan dan keterbukaan informasi lainnya, serta program-program pelatihan untuk mendukung pelaksanaan GCG.

Perseroan melandasi struktur tata kelola perusahaan pada tiga prinsip dasar berikut:

a. Transparansi
Perseroan menerapkan transparansi di seluruh kegiatan operasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini dituangkan dalam bentuk pelaporan berkala seputar perkembangan bisnis Perseroan kepada pemerintah dan investor. Perseroan juga menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan, operasional dan aspek penting lainnya dalam kegiatan bisnis Perseroan.

b. Akuntabilitas
Akuntabilitas Perseroan dijaga melalui pembentukan struktur organisasi dan alur kerja yang tepat untuk mendukung setiap divisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efisien. Setiap divisi bertanggung jawab kepada pihak manajemen yang kemudian menyusun laporan usaha dan laporan keuangan yang selanjutnya diperiksa oleh Dewan Komisaris dan Kantor Akuntan Publik.

c. Tanggung Jawab
Melalui struktur tata kelola yang baik, Perseroan memastikan bahwa kegiatan operasional dan kegiatan usaha dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan membawa manfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan Perseroan.

Struktur Tata Kelola

Untuk mengimplementasikan GCG secara sistematis dan kondusif, Perseroan memiliki organ-organ yang memiliki peran, tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:

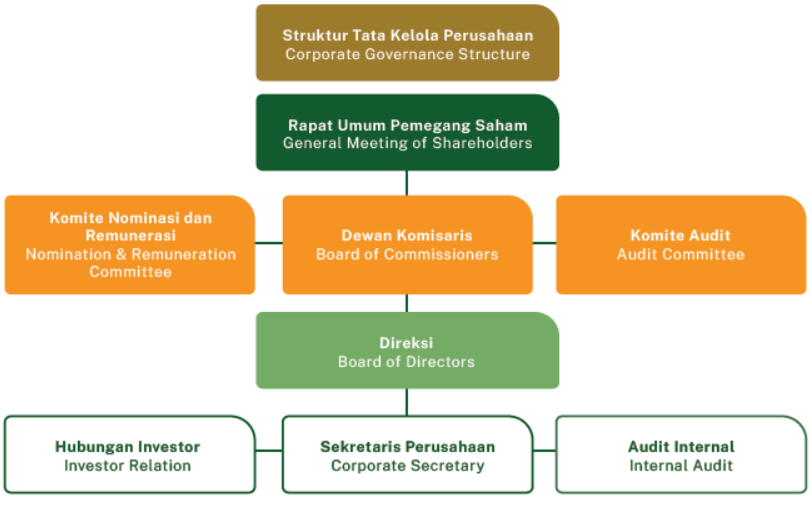

1. Dewan Komisaris

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar pada setiap akhir tahun buku.
6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi berdasarkan Pasal 30 ayat (6) dan (7) anggaran dasar berlaku mutatis mutandis bagi Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan mengacu pada ketentuan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak menerima semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah mengadakan 7 (Tujuh) kali rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 dan 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris selama periode Januari – Maret 2024, dengan daftar hadir sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris	
		Januari – Maret 2024	Sepanjang tahun 2023
Abed Nego	Komisaris Utama	2	7
Mohammad Prianto Madelar	Komisaris	1	4
Yohanes Wahyu Saronto	Komisaris Independen	2	7

2. Direksi

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar, Direksi akan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada anggaran dasar, Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini apabila dapat membuktikan:
   i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin;
   c. Mempertanggungkan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak maupun barang bergerak milik Perseroan;
   d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
   e. Menjual, mengalihkian, memindahkan atau melepaskan barang tidak bergerak maupun barang bergerak atau hak atas suatu Perusahaan, dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% jumlah kekayaan bersih.
10. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum Direksi bertanggung jawab memimpin dan mengelola Perseroan untuk mencapai objektif atau strategi bisnis yang telah ditetapkan dan memastikan aset Perseroan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pemegang saham.

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan mempertimbangkan kebutuhan internal dan ekternal agar dapat mencapai visi dan misi Perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:
- Bertanggung jawab atas keseluruhan operasi Perseroan dan memastikan profitabilitas Perseroan.
- Bertanggung jawab mengelola strategi, kebijakan, dan prosedur keuangan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan dan standar keuangan dan akuntansi untuk menjamin ketersediaan dan pemanfaatan dana untuk mendukung bisnis
- Bertanggung jawab dalam mengarahkan pelaksanaan strategi dan kebijakan terkait riset dan teknologi, inovasi, dan keberlanjutan dalam rangka mendukung penerapan praktik tata kelola terbaik dan berkelanjutan dalam bisnis Perseroan.
- Bertanggung jawab mengarahkan pelaksanaan strategi, kebijakan, dan program sumber daya manusia untuk membangun organisasi, sumber daya manusia, dan praktik-praktik yang efektif dalam mencapai tujuan Perseroan.
- Bertanggung jawab menetapkan tujuan komprehensif untuk kinerja dan pertumbuhan operasional, memimpin dan memotivasi tim profesional lapangan dalam penerapan praktik agronomi yang baik, mengikuti tren perkembangan terbaru dalam industri, mengadopsi teknologi terbaru agar dapat efektif dan efisien.
- Bertanggung jawab mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif keberlanjutan yang meningkatkan

kinerja lingkungan dan sosial perusahaan serta mengelola rantai pasokan dan logistik Perseroan.
- Bertanggung jawab merencanakan dan mengelola penjualan produk-produk Perseroan serta pembelian barang-barang strategis pendukung bisnis sesuai dengan rencana dan sasaran jangka pendek serta jangka panjang Perseroan.

Rapat Direksi

Berdasarkan Notulen Rapat Direksi, Direksi telah mengadakan 22 (dua puluh dua) kali rapat Direksi sepanjang tahun 2023 dan 5 (lima) kali rapat Direksi selama periode Januari – Maret 2024, dengan daftar hadir sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Direksi	
		Januari – Maret 2024	Sepanjang tahun 2023
Henderi	Direktur Utama	5	22
Andrew Haryono	Direktur	5	22
Yeoh Lean Khai	Direktur	5	22

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Anggota Direksi

Tidak terdapat pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk Anggota Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengadakan 7 (Tujuh) kali rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan daftar hadir sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	
		Januari – Maret 2024	Sepanjang tahun 2023
Abed Nego	Komisaris Utama	2	7
Mohammad Prianto Madelar	Komisaris	1	4
Yohanes Wahyu Saronto	Komisaris Independen	2	7
Henderi	Direktur Utama	2	7
Andrew Haryono	Direktur	2	7
Yeoh Lean Khai	Direktur	2	7

3. Remunerasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Perseroan memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk gaji, tunjangan dan bonus sebesar Rp23,62 miliar di tahun 2023 dan Rp. 21,21 miliar di tahun 2022. Adapun kebijakan remunerasi telah diatur dalam Peraturan Perusahaan.

4. Sekretaris Perusahaan

Perseroan memiliki sekretaris perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan Nomor: 007/SK-Dir/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, Perseroan telah menunjuk Rizka Dewi Sulistyorini sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan telah disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 010/BWPT/Corsec/II/2024 tanggal 16 Februari 2024. Berikut merupakan profil singkat dari sekretaris perusahaan:

Nama	:	Rizka Dewi Sulistyorini
Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Riwayat Pendidikan	:	Rizka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Merdeka, Malang pada tahun 2000. Saat ini Rizka sedang menempuh pendidikan Sarjana dan Magister Hukum di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
Riwayat Jabatan	:	Rizka memiliki pengalaman selama 4 tahun dibidang layanan pelanggan dalam bisnis perbankan dan pemasaran, serta 17 tahun berpengalaman dibidang perizinan, pengembangan bisnis dan regulasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Rizka telah berhasil mengembangkan peluang lahan baru dan mendapatkan perijinan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Rizka aktif terlibat dalam keanggotaan pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Alamat	:	Rajawali Place Lt. 28 Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4 Jakarta 12910
Nomor Telepon	:	(021) 8665 8828
E-mail	:	corsec@eaglehighplantations.com

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan terdiri dari:

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
2. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*).
3. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
4. Memastikan adanya koordinasi antara internal Perseroan dengan staf Pemegang Saham dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Membantu Sekretaris Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas seperti pengaturan jadwal rapat dengan pihak internal/eksternal. Pertemuan dengan auditor dan konsultan eksternal, serta mendampingi Direksi dalam berkomunikasi dengan pihak luar.
6. Membangun komunikasi dengan pihak luar Perseroan secara terpadu dalam satu bahasa sehingga tidak menimbulkan kerancuan yang dapat mempengaruhi kinerja dan citra Perseroan.
7. Menjalankan fungsi Corporate Relationship, Corporate Communication, Corporate Documentaion, Corporate Legal.
8. Memastikan pengelolaan *Community Relation*, *Media Relation* dan *Institution/Governmental Relation* secara efektif dan efisien bagi Perseroan dan pemangku kepentingan.
9. Memastikan penyusunan dan pencapaian target Rencana Jangka Panjang Perseroan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan di lingkungan Sekretaris Perusahaan.
10. Memastikan penetapan kebijakan bidang hukum dan kesekretariatan, hubungan masyarakat, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, kemitraan dan bina lingkungan serta perwakilan Jakarta.
11. Memastikan pengelolaan dan pendistribusian data/informasi/laporan mengenai bidang yang menjadi tanggung jawabnya baik untuk kepentingan internal maupun eksternal Perseroan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Memastikan pengelolaan dan inovasi di lingkungan Sekretaris Perusahaan untuk mendukung kegiatan inovasi Perseroan.
13. Memastikan pengelolaan kegiatan bidang GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Sekretaris Perusahaan

Tidak terdapat pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk Sekretaris Perusahaan

5. Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, sehingga Komite Audit wajib bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (yang sekarang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. KEP-642/BL/2012 yang telah diperbarui pada tahun 2015 melalui Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang memuat antara lain tugas, tanggung jawab serta wewenang, komposisi, struktur, persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan serta masa tugas Komite Audit. Masa jabatan Komite Audit Perseroan berlaku terhitung sejak tangal ditetapkan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya atas hal-hal yang terkait dengan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi *Corporate Governance*. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit memiliki unsur yang terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya bukan pengurus, karyawan maupun pemegang saham Perseroan. Komite Audit diwajibkan memiliki latar belakang keuangan dan/atau akuntansi serta memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berlaku.

Masa tugas anggota Komite Audit diatur yaitu tidak lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Adapun Komposisi keanggotaan Komite Audit terhitung sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 002/BOC/Int/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	:	Yohanes Wahyu Saronto
Anggota	:	Riniek Winarsih
Anggota	:	Bastian Purnama

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mengacu pada informasi yang diperoleh dari laporan

direksi, jajaran manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal dengan melakukan evaluasi terutama pada penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal, pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pengawasan tindak lanjut, aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi, menelaah pelaksanaan kebijikan tata kelola perusahaan yang baik, serta memonitor perkembangan kegiatan operasional Perseroan dan entitas anak dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Singkat Komite Audit

Yohanes Wahyu Saronto,
Komisaris merangkap Ketua Komite Audit.

Beliau memperoleh gelar dari AKABRI Kepolisian pada tahun 1971, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1977, SESPIM Polri pada tahun 1985, mendalami masalah manajemen strategik, mengikuti pendidikan dan latihan di dalam dan luar negeri di bidang Intelijen serta Lemhanas pada tahun 2002.

Sebelumnya beliau menjabat posisi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Kepala Dinas Pengamanan Polri, Direktur Intelijen Polri, Kepala Daerah Kepolisian serta sejumlah posisi di BIN (Badan Intelijen Negara). Saat ini sebagai anggota DAS (Dewan Analis Stratejik) di BIN dan mengajar di beberapa Pendidikan dan Pelatihan profesi. Dalam mengemban profesinya telah memperoleh penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.

Riniek Winarsih,
Anggota Komite Audit

Beliau adalah warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Beliau adalah seorang profesional dan praktisi akuntansi dan keuangan dengan pengalaman kerja lebih dari 25 tahun. Sebelum bergabung sebagai anggota komite audit, Riniek adalah audit partner pada kantor akuntan publik yang merupakan anggota dari Deloitte South East Asia Cluster sampai dengan awal tahun 2020 dengan pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai auditor dari berbagai industri dan perusahaaan terbuka (Tbk) dan juga sebagai konsultan. Industri perusahaan yang pernah diaudit antara lain bergerak di bidang perkebunan, retail, perhotelan dan institusi keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, broker dealer dan asuransi. Riniek juga mengikuti program pertukaran kerja yang dikenal sebagai “Global Development Program” pada Deloitte Mclean di Amerika Serikat selama hampir 2 tahun dimana dia ditugaskan dalam audit perusahaan pabrikan, retail dan institusi keuangan. Riniek terdaftar sebagai Akuntan Publik Bersertifikat di Indonesia, juga bersertifikasi sebagai Akuntan Syariah, Bank Indonesia dan di OJK sebagai Akuntan Publik untuk Perusahaan Publik. Beliau mendapat gelar Sarjana dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1989.

Bastian Purnama,
Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1956, seorang profesional dan praktisi akuntansi, keuangan, pasar modal dan perbankan dengan pengalaman kerja lebih dari 35 tahun.

Saat ini mengemban jabatan sebagai Industry Expert Advisory Board di Center for Risk Management Studies-Industry Expert Advisory Board Member Capital Market. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Danareksa Investment dan PT Danareksa Sekuritas pada tahun 1996-2004, Komisaris, Audit Komite dan Direktur Utama di PT Bursa Efek Surabaya pada tahun 2004-2007 dan menjabat sebagai Direktur Information Technology di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009, Komisaris Independen, Komite Audit dan Komite Remunerasi di Bank Amar Indonesia Tbk pada tahun 2009-2014 dan Komite Audit di PT Onix Capital Tbk di tahun 2010-2020.

Mendapat gelar Sarjana dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1984, Chartered Accountant (The Indonesian Institute of Accountants), juga memiliki beberapa sertifikat yaitu, Certificate in Risk Management dari Badan Sertifikasi Manajemen Resiko, Sertifikat Manajer Investasi dari Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK), sertifikat Wakil Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK).

Rapat Komite Audit

Untuk periode Januari hingga Desember 2023, Komite Audit telah mengadakan pertemuan sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan selama periode Januari – Maret 2024, Komite Audit telah mengadakan pertemuan sebanyak 1 (satu) kali. Aktivitas yang dibahas dalam pertemuan tersebut Komite Audit meliputi penelaahan atas rencana, pelaksanaan, pelaporan kegiatan audit internal serta tindak lanjut atas temuan audit internal serta mempelajari laporan keuangan.

Nama	Jabatan	Data Tingkat Kehadiran	
		Januari – Maret 2024	Sepanjang tahun 2023
Yohanes Wahyu Saronto	Ketua	100%	100%
Riniek Winarsih	Anggota	100%	100%
Bastian Purnama*	Anggota	100%	0%

**) Mulai menjabat pada 1 Januari 2024*

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit dan Komite Audit Internal

1. Menelaah dan berdiskusi dengan Manajemen mengenai laporan keuangan konsolidasi Perseroan setiap kuartal.
2. Menelaah dan berdiskusi dengan auditor internal Perseroan mengenai aktivitas audit selama tahun 2023 dan rencana audit internal tahun 2024.
3. Menelaah temuan-temuan penting dari auditor internal dan memonitor rekomendasi mereka.
4. Menelaah dan berdiskusi dengan auditor independen Mirawati Sensi Idris mengenai hasil audit atas laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023.
5. Menelaah dan berdiskusi dengan Manajemen mengenai manajemen risiko Perseroan.
6. Menelaah dan berdiskusi dengan Manajemen mengenai kepatuhan Perseroan pada hukum dan peraturan.
7. Menelaah kinerja operasional yang telah dicapai manajemen Perseroan selama tahun 2023.

6. Unit Audit Internal

Unit Audit Internal (UAI) merupakan suatu bagian integral dalam Perseroan yang memiliki fungsi dalam memberikan jasa audit secara independen dan objektif, dan juga memberikan masukan yang bersifat konstruktif dan konsultatif kepada manajemen guna meningkatkan nilai tambah, untuk mengamankan aset juga untuk meningkatkan efisiensi dari pada sistem operasional Perseroan, sistem pengendalian internal dan manajemen resiko.

Wong Kieng Chang,
Kepala Unit Audit Internal

Struktur Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut:
- Unit Audit Internal secara struktural dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal
- Kepala Unit Audit Internal ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh Direktur Utama Perseroan setelah disetujui oleh Komisaris.
- Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung dan independen kepada Direktur Utama Perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit serta rencana pengembangan kemampuan dan ketrampilan auditor berdasarkan *risk-based audit* sejalan dengan pencapaian visi, misi dan strategi Perseroan secara umum. Dengan cara mengadakan training setiap Kuartal.
2. Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan melaporkan realisasi kegiatan audit (operasional, compliance dan fraud) kepada Manajemen dengan tembusan kepada Direktur lain sesuai dengan

tingkatan informasi.
3. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian internal, termasuk melaporkan/ merekomendasikan kemungkinan untuk melakukan peningkatan pada proses tersebut.
4. Melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal.
5. Melakukan koordinasi kegiatan Unit Audit Internal dengan unit-unit kerja lain di PT Eagle High Plantations Tbk. dan pihak auditor eksternal berdasarkan penugasan manajemen.
6. Memberikan bantuan berupa masukan dalam penyempurnaan sistem, prosedur dan kebijakan yang diperlukan bagi tercapainya efisiensi dan keefektifan kegiatan dan pengendalian internal sehingga selaras dengan misi dan tujuan serta strategi Perseroan.
7. Menyusun dan memperbaharui program audit quality development dan pengembangan sumber daya manusia untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit dari tim audit guna menjaga kualitasnya dan menghasilkan auditor yang profesional.
8. Menyelenggarakan administrasi untuk mendukung tertib administrasi dan pelaporan kegiatan Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal (*Charter Audit Internal*) tanggal 31 Januari 2018.

7. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Eagle High Plantations Tbk No. 001/ KOM/ EHP/ II/ 23 tertanggal 9 Mei 2023, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, adalah sebagai berikut berikut:

Ketua Komite	:	Yohanes Wahyu Saronto
Anggota	:	Mohammad Prianto Madelar
Anggota	:	Bobby Derrick Andre Joris

Profil Singkat Komite Nominasi dan Remunerasi

Yohanes Wahyu Saronto,
Komisaris merangkap Ketua Komite Nominasi & Remunerasi.

Beliau memperoleh gelar dari AKABRI Kepolisian pada tahun 1971, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1977, SESPIM Polri pada tahun 1985, mendalami masalah manajemen strategik, mengikuti pendidikan dan latihan di dalam dan luar negeri di bidang Intelijen serta Lemhanas pada tahun 2002.

Sebelumnya beliau menjabat posisi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Kepala Dinas Pengamanan Polri, Direktur Intelijen Polri, Kepala Daerah Kepolisian serta sejumlah posisi di BIN (Badan Intelijen Negara). Saat ini sebagai anggota DAS (Dewan Analis Stratejik) di BIN dan mengajar di beberapa Pendidikan dan Pelatihan profesi. Dalam mengemban profesinya telah memperoleh penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.

Mohammad Prianto Madelar,
Komisaris merangkap anggota Komite Nominasi & Remunerasi.

Beliau memperoleh gelar Magister Hukum dan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Beliau memulai karier profesionalnya di Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo dan Firma Hukum Assegaf Hamzah & Partner, lalu pada tahun 2004-2006 menjadi Founding & Senior Partner di Firma

Hukum Radjiman Billitea Madelar. Beliau bergabung di PT Rajawali Corpora selama 2006-2021 dengan jabatan terakhir sebagai Director-Legal Counselor dan saat ini menjabat sebagai Legal Consultant.

Bobby Derrick Andre Joris

Kepala Human Capital & Corporate Services (HCCS) merangkap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan No. 61 Tanggal 30 Agustus 2021 dan Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2021.

Beliau adalah warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1968. Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 28 tahun di berbagai sektor seperti pulp & paper, tekstil dan perbankan termasuk 16 tahun di perkebunan sawit. Awal karir beliau sebagai Export Document Supervisor di Bank Korea Commercial Surya, lalu bekerja di PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills (Asia Pulp & Paper) dan kemudian bergabung dengan PT Argo Pantes Tbk.

Pada pertengahan 2007, beliau memutuskan untuk bergabung dengan Rajawali Group, diawali dengan menjadi bagian dalam Papua Project sebagai Procurement Manager, lalu menjabat sebagai CSR & Plasma Senior Manager di Rajawali Plantations. Pada tahun 2011-2015 menjabat sebagai CSR Head di Green Eagle Group. Pada awal tahun 2015, beliau bergabung dengan PT Eagle High Plantations Tbk sebagai CSR Head sebelum dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Human Capital & Corporate Services pada tahun 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1993 dan Post Graduate in Commerce, Economic Development University of Wollongong Australia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Ruang lingkup Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup tugas, tanggung jawab serta wewenang, komposisi, struktur, persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan, serta masa tugas. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawabnya adalah:

A. Fungsi Nominasi
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
      a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
      b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi,
      c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
   4. Melakukan penelaahan dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS.

B. Fungsi Remunerasi
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
      b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
      c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja.

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris termasuk kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Komite juga membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dan rekomendasi pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Komite juga memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Komite juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama periode Januari – Desember 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan selama periode Januari – Maret 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan pertemuan sebanyak 1 (satu) kali.

Nama	Jabatan	Data Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	
		2024	2023
Yohanes Wahyu Saronto	Ketua	100%	100%
Mohammad Prianto Madelar*	Anggota	100%	75%
Bobby Derrick Andre Joris	Anggota	100%	100%

**) Mulai menjabat pada 8 Mei 2023*

Sistem Pengendalian Internal

Dalam menyusun kerangka kerja pengendalian internal yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control Integrated Framework*.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan telah membantu dan memastikan kesesuaian pengendalian keuangan dan operasional Perseroan. Sehingga, penerapan sistem pengendalian internal ini memberikan efektivitas dalam pengelolaan Perseroan. Evaluasi atas sistem pengendalian internal Perseroan dikelola oleh Komite Audit, yang di antaranya berupa rekomendasi hasil audit internal dan eksternal. Keduanya menjadi masukan berharga bagi manajemen dalam menyempurnakan sistem pengendalian internal. Hingga saat ini, Perseroan menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada sudah cukup baik.

8. Manajemen Risiko

Praktik pengelolaan risiko di Perseroan mengacu pada pedoman standar penerapan manajemen risiko yang mencakup: pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko; proses identif ikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

i. Profil dan Mitigasi Risiko

Penjelasan mengenai profil risiko dan pelaksanaan mitigasi risiko, sebagai berikut:

Jenis Risiko	Keterangan	Mitigasi
Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian	Kondisi perekonomian global dan nasional yang berubah, berdampak terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli masyarakat, nilai tukar mata uang asing, tingkat suku bunga, likuiditas, perencanaan strategis, harga jual dan perluasan lahan, sehingga mempengaruhi kinerja operasional.	Melakukan identifikasi dampak kondisi ekonomi terhadap sektor industri Perseroan serta aspek lainnya yang mempengaruhi kinerja. Guna menekan risiko nilai tukar mata uang asing, Perseroan menyediakan pendanaan dalam bentuk Rupiah. Perseroan menjalin hubungan dengan sejumlah lembaga keuangan dan bank-bank terkemuka guna mendapatkan suku bunga terbaik. Perseroan juga menjaga kinerja kredit dan secara teratur menginformasikan kinerja operasional Perseroan kepada bank penyandang dana sehingga profil risiko dan bunga pinjaman yang ditawarkan kepada Perseroan dapat tetap terjaga. Perseroan mengatasi fluktuasi harga jual dengan cara menjaga tingkat persediaan agar tetap rendah dan mempercepat siklus penjualan agar Perseroan dapat menetapkan harga sesuai dengan harga rata-rata pasar.
Risiko Operasional, Perencanaan dan Pengawasan	Perseroan mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia, penggunaan kapasitas dan sumber daya yang tidak optimal, praktik pengadaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pelaporan manajemen dan operasi, keandalan dan ketersediaan layanan Teknologi Informasi.	Perseroan memitigasi risiko ketersediaan sumber daya manusia dengan mengembangkan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan talent pool dan menarik pekerja yang kompeten, memberikan kesempatan pelatihan untuk mempertahankan karyawan kompeten yang ada dan menarik talenta baru. Untuk risiko operasional, perencanaan dan pengawasan lainnya, perusahaan melakukan pemantauan rutin untuk mengidentifikasi area inefisiensi dan menerapkan praktik manajemen yang ramping, berinvestasi dalam teknologi dan perangkat lunak manajemen sumber daya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mengembangkan metrik kinerja yang jelas dan mengadakan tinjauan rutin untuk melacak kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengembangkan hubungan yang kuat dengan pemasok yang bereputasi dan membangun kemitraan jangka panjang untuk memastikan pasokan yang berkualitas dan konsisten, melakukan audit keselamatan secara teratur dan menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi, menerapkan prosedur pelaporan yang terstandarisasi, berinvestasi pada sistem manajemen data dan perangkat lunak yang andal untuk menyederhanakan pelaporan, berinvestasi dalam pemeliharaan rutin dan peningkatan infrastruktur IT.

ii. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial

Hubungan Masyarakat

Salah satu langkah yang ditempuh dalam upaya mencapai pertumbuhan berkelanjutan sesuai dengan komitmen Perseroan adalah implementasi sejumlah program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Perseroan melibatkan masyarakat di sekitar area kebun dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program-program ini, yang mencakup pemberdayaan masyarakat, kegiatan pembinaan lingkungan, respons darurat terhadap bencana, dan kegiatan filantropi. Dengan melakukan ini, Perseroan berharap dapat terus berkembang secara harmonis bersama masyarakat dan lingkungan.

Tahun 2023 menjadi momentum bagi Perseroan untuk terus meneguhkan komitmennya dalam pelaksanaan Program CSR Perusahaan serta mendukung pencapaian 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam wujud komitmennya, Perseroan secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan CSR yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat lokal.

Program CSR yang Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Fokus program CSR yang dilakukan oleh Perseroan terdiri dari 4 aspek yaitu Pengembangan Masyarakat, Kepedulian dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur, dan Kepedulian Sosial. Lebih lanjut, seluruh program CSR Perseroan yang telah dilakukan dapat sejalan dan memberikan kontribusi terhadap TPB.

Pengembangan Masyarakat
- Pertanian: budidaya tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan semusim), tanaman buah-buahan tahunan, dan tanaman industri perkebunan (kebun kelapa sawit plasma).
- Peternakan, terdiri dari peternakan unggas (ayam dan itik), ruminansia kecil (kambing dan babi) serta ruminansia besar (sapi).
- Perikanan air tawar, terdiri dari perikanan air deras, kolam dan keramba, serta perikanan tangkap.
- Industri rumah tangga, pengrajin kerupuk ikan dan gandum, pengrajin anyaman rotan, ukiran kayu.
- Kegiatan usaha lainnya: kegiatan usaha daur ulang.

Kepedulian dan perlindungan lingkungan hidup
- Program pengelolaan dan usaha daur ulang sampah.
- Pengadaan air bersih ke seluruh rumah karyawan.
- Pemeliharaan jaringan sarana air bersih.
- Pelibatan masyarakat dalam penanaman untuk restorasi mangrove dan gambut.

Pembangunan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur
- Pemeliharaan jalan, saluran drainase, jembatan, dan gorong-gorong.
- Perbaikan >1.608 rumah karyawan di sepanjang tahun 2023.
- Perbaikan fasilitas umum yang mencakup tempat ibadah, fasilitas kesehatan, tempat penitipan anak, dan sekolah, dan sarana air bersih untuk MCK (Mandi Cuci Kakus).
- Penyediaan layanan jaringan Listrik

Kepedulian sosial
- Kesehatan: pemeliharaan sarana air bersih, imunisasi (bekerja sama dengan Puskesmas), perbaikan gizi anak, pengadaan unit ambulans.
- Pendidikan: beasiswa, pengadaan sarana belajar di ruang kelas, sarana internet, bus sekolah, bantuan honorarium tenaga pendidik.
- Keagamaan: pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah, memfasilitasi kegiatan dan upacara keagamaan.
- Olahraga: bantuan alat olahraga, perbaikan sarana olahraga, partisipasi dalam event olahraga.
- Seni dan budaya: bantuan peralatan musik dan tari tradisional, memfasilitasi upacara dan kegiatan adat pembinaan kelompok seni/budaya lokal.
- Bencana alam: bantuan kepada korban bencana alam.

iii. Kinerja Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk mengelola lingkungan dan berupaya untuk selalu menerapkan praktik bisnis yang meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Komitmen ini diwujudkan dengan membuat Kebijakan Keberlanjutan yang ditinjau secara berkala yang mencakup semua aktivitas operasional Perseroan dan semua pemasok pihak ketiga, serta mematuhi seluruh aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan aspek lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik lokal, nasional dan internasional. Perseroan melakukan perhitungan konsumsi air dan energi yang digunakan, emisi yang dihasilkan, serta mengelola efluen, mendaur ulang limbah, dan melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia, melarang penggunaan parakuat, melarang pestisida kelas 1A dan 1B menurut *World Health Organization* (WHO), dan bahan kimia yang tercantum dalam Konvensi Stockholm dan Konvensi Rotterdam, kecuali dalam kejadian luar biasa yang dapat terjadi dalam kasus ketika penggunaannya telah divalidasi oleh proses uji tuntas atau ketika diizinkan oleh otoritas pemerintah selama wabah.

Perseroan berkomitmen tidak melakukan pengembangan di lahan gambut. Komitmen ini sejalan dengan peraturan dan Prinsip dan Kriteria *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (P&C RSPO) tanggal 15 November 2018 yang melarang pengembangan dan mengamanatkan pengelolaan lahan gambut

secara berkelanjutan. Perseroan mengimplementasikan praktik pengelolaan terbaik (*Best Management Practice* atau ”BMP”) atau praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices* atau ”GAP”) untuk tanah dan gambut di seluruh area operasi. Perseroan mengelola tanaman kelapa sawit yang tertanam di gambut sesuai ketentuan peraturan pemerintah dan panduan Praktik Pengelolaan Terbaik yang dikeluarkan RSPO. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik kelapa sawit tanpa membakar lahan. Hilangnya hutan dan perubahan penggunaan lahan berpotensi memberikan dampak terhadap iklim lokal dan regional. Perseroan menyadari bahwa risiko ini terkait dengan aktivitas bisnis yang dijalankan, terutama potensi terjadinya kebakaran hutan. Terkait hal ini, Perseroan telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (*Zero Burning Policy*) termasuk dalam perluasan maupun penanaman kembali (*replanting*).

Perseroan juga meminimalisasi dampak terhadap lingkungan dengan mengoptimalisasi konsumsi energi dalam seluruh operasi bisnisnya. Perseroan secara konsisten berupaya untuk menanamkan dan memelihara budaya hemat energi melalui berbagai implementasi kebijakan, inisiatif dan inovasi berkelanjutan. Perseroan secara aktif mengupayakan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Pada tahun 2023, Perseroan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perseroan telah menerima sertifikasi RSPO, *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan sertifikat *Public Disclosure Program for Environmental Compliance* (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam industri kelapa sawit yang menunjukkan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Perseroan telah mengikuti standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh institusi nasional dan internasional.

Inisiatif Perlindungan Habitat

Perseroan menginisiasi program untuk meningkatkan ekosistem rawa gambut dan hutan bakau dengan mengintegrasikan restorasi dan rehabilitasi dengan perlindungan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan melalui aksi kolaboratif, yaitu Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut (Proyek Konservasi Rimba Raya) dan Restorasi Ekosistem Mangrove di Kampung Dumaring.

1. **Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut**
   Rimba Raya Biodiversity Reserve (RRBR) didirikan untuk melindungi sekitar 65.000 hektar hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah. Sebelum diresmikan sebagai cagar alam, sebagian besar atau seluas 47.237 hektar dari hutan ini ditargetkan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kini, RRBR dikelola sebagai Konsesi Restorasi Ekosistem, dimana Perseroan berpartisipasi dalam menyediakan pembiayaan untuk program rehabilitasi lahan gambut. Mengingat kedekatan lokasi proyek dengan Perseroan, diharapkan dapat tercipta kemitraan jangka panjang yang bersifat kolaboratif, sehingga mendorong pengembangan kapasitas internal Perseroan untuk melindungi kawasan NKT dengan lebih baik.

   Tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah rehabilitasi habitat di 1.500 hektar lahan gambut yang saat ini tidak berhutan atau terdegradasi melalui penanaman pohon. Hal ini akan menghasilkan habitat yang lebih baik bagi flora dan fauna yang terancam punah, peluang mata pencaharian bagi masyarakat setempat, dan penyangga lingkungan bagi Taman Nasional Tanjung Puting. Proyek ini memberdayakan tenaga ahli lokal dalam bidang penanaman pohon untuk memastikan bahwa hanya pohon asli yang ditanam di area tersebut. Proyek ini juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam kegiatan penanaman pohon di konsesi tersebut. Selain itu, proyek ini memberikan dukungan finansial berupa modal dan keterampilan teknis dengan cara mengajarkan masyarakat cara menghasilkan bibit berkualitas tinggi, memproduksi bibit, serta cara menanam dan merawat pohon.

   Saat ini, proyek yang didanai oleh Perseroan ini telah berhasil menanam 24.000 bibit pohon yang terdiri dari 14.000 bibit spesies asli di Tatah Ji (Belangiran dan Bintuka) seluas 35 hektar dan 10.000 bibit spesies Pohon Serbaguna di Natai seluas 25 hektar dengan 87% tingkat kelangsungan hidup. Kegiatan patroli rutin juga turut dilakukan baik dari patroli rutin RRC, patroli bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), dan patroli gabungan bersama TNI, POLRI, dan TPNP.

2. Restorasi Ekosistem Mangrove di Kampung Dumaring

Program ini adalah kolaborasi multi-pihak, yang diinisiasi oleh Perseroan dan terletak di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan ini merupakan bagian dari lanskap karst Sangkulirang-Mangkalihat yang terkenal, lanskap unik yang telah terdaftar dalam daftar tentatif UNESCO untuk dinominasikan sebagai Situs Warisan Dunia. Namun sejak tahun 1988, luas kawasan hutan bakau di kawasan ini menyusut dari 127,7 hektar (28,6% luas mangrove) menjadi hanya 42,6 hektar (9,5% luas mangrove) pada tahun 2021. Situasi yang menakutkan ini akan menyebabkan banjir, intrusi air laut, penetrasi air laut, dan kondisi menakutkan lainnya bagi desa dan penduduk desa. Kehilangan mangrove berarti kehilangan mata pencaharian, ketahanan pangan, pertahanan pesisir dan salah satu penyimpan karbon paling efisien dan penting di planet ini.

Dengan tujuan utama meningkatkan ekosistem hutan bakau dan pesisir, Perseroan menginisiasi program Restorasi dan Rehabilitasi Mangrove Desa Dumaring seluas 477 hektar melalui aksi kolaborasi yang efektif dengan pemerintah setempat dan masyarakat lokal untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi mangrove, sekaligus menjaga dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Program dirancang untuk masa 25 tahun dan sudah dimulai pada Juli 2022. Berbagai pihak terlibat dalam pengelolaan program tersebut, terutama adalah Perseroan sebagai penyedia dana, PT Gagas Dinamiga Aksenta (Aksenta) yang bertindak sebagai Pengelola dan Pelaksana Program, KPH Berau Pantai, Pemerintah Kampung Dumaring, dan Lembaga Pengelola Mangrove Dumaring. Selain pihak yang menjalankan Program, terdapat pihak lain yang juga terlibat, terutama masyarakat Kampung Dumaring sebagai penerima manfaat Program (*beneficiaries*), institusi pemerintahan dan instansi sektoral seperti Kecamatan Talisayan, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membawahi secara teknis mengenai pengelolaan mangrove dan pantai.

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Untuk mengusung semangat menjadi perusahaan perkebunan pilihan yang dinamis dengan reputasi unggul dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, EHP mengelola SDM dengan optimal melalui pengelolaan yang efektif. Oleh karena itu, perencanaan penempatan, penetapan tugas dan tanggung jawab, peningkatan kuantitas dan kualitas, seluruhnya direncanakan secara matang agar selaras dengan visi, misi, dan strategi Perseroan. SDM yang profesional dan tangguh merupakan aset berharga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan. Pengelolaan SDM Perseroan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan serta mendorong karyawan untuk bersikap positif, saling menghargai, optimis agar terbangun komitmen dan loyalitas yang kuat sehingga diharapkan dapat menciptakan situasi kerja yang kondusif dan produktif.

Pendekatan Manajemen

Pada tahun 2023, EHP mencatat 14.195 jam pelatihan yang diselenggarakan dan diikuti oleh 835 karyawan dari berbagai tingkat jabatan sebagai peserta. Angka ini meningkat 554% dari tahun sebelumnya. Informasi lebih lanjut tentang pencapaian untuk program SDM dapat dilihat pada penjabaran masing-masing sub bab terkait SDM.

Kebijakan dan Komitmen
- Kebijakan QHSSE
- Kebijakan Safety Management System
- Roadmap pemberdayaan masyarakat
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- Kebijakan Human Rights Penanggung Jawab, Evaluasi Kinerja, dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Departemen HCCS, Departemen Sosial Capital (Plasma CSR) dan Departemen Sustainability, bertanggung jawab atas kinerja sosial Perseroan. Seluruh capaian dan progres kinerja aspek sosial

dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen Perseroan maupun pemangku kepentingan secara berkala.

Lingkungan Kerja yang Setara dan Aman

Perseroan senantiasa berupaya menyediakan lingkungan bekerja yang layak dan aman untuk seluruh SDM-nya. Pengelolaan yang dilakukan tentunya berjalan dengan memperhatikan kesetaraan dan sikap nondiskriminatif. Setiap insan EHP memiliki hak yang sama untuk mengikuti pengembangan karier dan kompetensi, mendapatkan penilaian kinerja yang transparan, kebebasan berserikat serta menerima remunerasi tanpa memandang perbedaan gender, suku, ras, agama ataupun golongan. Seluruh hak diberikan secara adil dan objektif. Upaya ini telah dimulai sejak proses rekrutmen dan seleksi dilakukan.

Untuk menciptakan ekosistem SDM yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen. Proses yang efektif akan selalu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, sekaligus meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Pada implementasinya, EHP telah menyusun tahapan rekrutmen yang prosedural dan komprehensif untuk menjaring talenta-talenta kompeten, unggul, andal, dan tangguh dengan memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan oleh setiap jabatan serta struktur organisasi terkait. Pada tahun 2023, Perseroan melakukan rekrutmen sebanyak 178 staff untuk menempati beberapa posisi di Perseroan.

Perseroan juga berkomitmen untuk membuka dan menyediakan peluang kesempatan kerja bagi penduduk lokal, yaitu masyarakat yang berdomisili di wilayah dalam provinsi tempat wilayah operasi entitas anak. Pada akhir tahun 2023, jumlah karyawan lokal yang bekerja sebagai staff sebanyak 12% dan 52,23% sebagai karyawan non-staff. Selain karyawan Perseroan, terdapat pekerja lainnya yaitu pekerja kontraktor/ pemasok dengan mayoritas adalah penduduk lokal. Komposisi mitra kerja lokal ini sejalan dengan kebijakan kami untuk mendorong kontraktor/pemasok mempekerjakan penduduk lokal.

Keberagaman dan Kesetaraan

Penetapan komposisi karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Dalam prosesnya, Perseroan senantiasa mengedepankan aspek keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal ini terlihat pada komposisi demografi yang beragam. Dalam hal ini, Perseroan juga memperhatikan kesetaraan dan mendorong karyawan wanita untuk dapat berkontribusi besar.

Melalui keberagaman komposisi, masing-masing individu dapat menciptakan organisasi yang kaya akan perspektif sehingga akan tercermin pada aspek operasional dan bisnis yang semakin berkembang dan inovatif. Melalui keberagaman pada posisi top management, Perseroan juga berupaya untuk mempertajam objektivitas dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan secara keseluruhan.

Untuk mencegah diskriminasi terkait gender, Perseroan senantiasa menghimbau seluruh insan EHP untuk menghindari diskriminasi atau *harassment*. Langkah konkret yang dilakukan Perseroan dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi tentang keberagaman dan kesetaraan secara berkala, mengirimkan perwakilan untuk mendapatkan pelatihan serta mengadakan pelatihan secara berkala di seluruh entitas Perseroan dan menjalankan program yang berhubungan dengan keberagaman dan kesetaraan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Saat ini dan di masa yang akan datang, keunggulan kompetitif telah menjadi kebutuhan bagi setiap entitas bisnis. Salah satu penentu untuk dapat berkompetisi adalah kesiapan dalam membangun dan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti memiliki bakat dengan standar kompetensi tinggi di bidangnya masing-masing dan memiliki karakter yang dapat bersaing di tingkat global.

Perseroan mendukung setiap SDM untuk mencapai target individu yang ditetapkan sehingga dapat terus mengembangkan karirnya sesuai dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki. Pengembangan yang

dilakukan di berbagai level memiliki ragam tujuan, diantaranya dalam rangka memperoleh sertifikasi, meningkatkan kemampuan teknis, maupun pengenalan, dan pendalaman terhadap nilai-nilai utama Perseroan. Untuk itu, Perseroan secara rutin meningkatkan kapasitas karyawan melalui pelatihan, dan sertifikasi - sertifikasi, dan in-house training.

Penetapan program pengembangan kompetensi di tahun berjalan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan rencana kerja Perseroan secara keseluruhan.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

a. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Pendidikan	2023			2022		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
S2	4	19	23	4	14	18
S1	6	651	657	5	642	647
Diploma	5	190	195	3	197	200
SMA	95	3.199	3.294	102	3.440	3.542
SMP	18	2.136	2.154	20	2.512	2.532
SD	9	10.113	10.122	10	10.745	10.755
Jumlah	**137**	**16.308**	**16.445**	**144**	**17.550**	**17.694**

b. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang jabatan

Jabatan	2023			2022		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Executive Directors dan Head of Divisions	6	11	17	7	9	16
General Manager	-	24	24	-	26	26
Senior Manager	-	29	29	-	29	29
Manager	1	109	110	-	108	108
Supervisor	1	96	97	1	104	105
Senior Staff	4	242	246	7	277	284
Staff	4	174	178	-	143	143
Non Staff	121	15.623	15.744	129	16.854	16.983
Jumlah	**137**	**16.308**	**16.445**	**144**	**17.550**	**17.694**

c. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Usia	2023			2022		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
> 50	11	1.081	1.092	11	1.223	1.234
46 – 50	13	1.806	1.819	13	2.038	2.051
41 – 45	19	2.670	2.689	18	2.890	2.908
36 – 40	20	2.730	2.750	22	3.055	3.077
31 – 35	29	2.729	2.758	30	3.005	3.035
26 – 30	32	2.405	2.437	35	2.630	2.665
20 - 25	13	2.512	2.525	15	2.545	2.560
< 20	-	375	375	-	164	164
Jumlah	**137**	**16.308**	**16.445**	**144**	**17.550**	**17.694**

d. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Lokasi	2023			2022		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Kalimantan Tengah	131	5.200	5.331	137	5.030	5.167
Kalimantan Selatan	-	4.695	4.695	-	4.741	4.741
Kalimantan Timur	-	3.865	3.865	-	3.610	3.610
Kalimantan Barat	-	444	444	-	2.299	2.299
Papua	-	1.719	1.719	-	1.409	1.409
Sumatera	-	242	242	-	301	301
Kalimantan Barat	6	444	444	7	160	167
Jumlah	**137**	**16.308**	**16.445**	**144**	**17.550**	**17.694**

e. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status karyawan

Status	2023			2022		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Tetap	129	7.074	7.203	129	6365	6.494
Kontrak	8	9.234	9.242	15	11185	11.200
Jumlah	**137**	**16.308**	**16.445**	**144**	**17.550**	**17.694**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, belum terdapat karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Serikat Pekerja

No.	Entitas Anak	Nama Serikat Pekerja
1	Adhyaksa Dharmasatya	Serikat Buruh Indonesia Mandiri (SBIM) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
2	Manunggal Adi Jaya Kalsel	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI
3	Manunggal Adi Jaya Kaltim	Federasi Buruh Indonesia (FBI)
4	Bumilanggeng Perdanatrada	PUK.SPPP-SPSI PT.BUMILANGGENG PERDANATRADA
5	Eagle High Plantation Mill	PUK.SPPP-SPSI PT.EAGLE HIGH PLANTATION (EHP-MILL)
6	Bumihutani Lestari	Serikat Buruh Indonesia Mandiri (SBIM) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
7	Suryabumi Tunggal Perkasa Kalsel	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI
8	Suryabumi Tunggal Perkasa Kaltim	Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo)
9	Pesonalintas Surasejati	FSP-BUN RAJAWALI
10	Singaland Asetama	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
11	Karyapratama Agrisejahtera	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI
12	Jaya Mandiri Sukses Kalsel	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI
13	Jaya Mandiri Sukses Kaltim	Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo)
14	Saka Kencana Sejahtera	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat 1 (satu) tenaga kerja asing di Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku Paspor	Masa Berlaku KITAS
Yeoh Lean Khai	Malaysia	Direktur Marketing	B.3/004234/PK.04.01/I/2024 berlaku hingga 28-02-2025	10-11-2024	10-02-2025

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai salah satu unsur penghargaan atas konstribusi karyawan. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan ditunjukkan dengan melakukan penyesuaian gaji karyawan secara berkala pada awal tahun sesuai dengan nilai pasar, serta secara otomastis memenuhi kewajiban upah minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Perseroan menerapkan sistem pengupahan yang mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak membedakan sistem pengupahan berdasarkan gender, baik pria dan wanita memiliki yang hak yang setara. Perseroan berkomitmen dan memastikan bahwa seluruh karyawan baik di kantor pusat maupun entitas anak telah menerima upah minimum sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan mengikuti status kepegawaian, tingkat jabatan dan masa kerja.

Komponen gaji karyawan terdiri dari beberapa komponen yaitu gaji pokok, fasilitas transportasi, tunjangan jabatan, insentif kebun, insentif kehadiran, insentif hasil produksi, uang makan dan Tunjangan Hari Raya. Pengaturan pemberian komponen gaji tersebut berdasarkan golongan karyawan, lokasi kerja dan unit bisnisnya. Selain itu, Perseroan juga memberikan bonus tahunan berdasarkan hasil kinerja perseroan bagi karyawan level staf.

Perseroan memberikan fasilitas kesehatan tambahan diluar BPJS Kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, kacamata, keluarga berencana (KB), persalinan, dan general check up. Untuk karyawan yang berlokasi di kebun disediakan klinik kesehatan. Selain itu, Perseroan memberikan tambahin asuransi yaitu jaminan risiko kecelakaan diri berupa asuransi kecelakaan diri untuk staff. Untuk karyawan yang berada di site kebun, Perseroan menyediakan fasilitas perumahan termasuk air, listrik dan peralatan rumah tangga, serta mobil atau motor operasional untuk level Asisten ke atas.

Perusahaan membangun fasilitas umum untuk sarana Pendidikan, sarana ibadah (masjid dan gereja), sarana olahraga dan tempat penitipan anak. Perusahaan memfasilitasi pendirian Koperasi Karyawan dan warung serba ada untuk memenuhi kebutuhan harian karyawan.

Per 31 Desember 2023, sarana kesejahteraan untuk karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Rumah Staff	Rumah Non Staff	Tempat Penitipan Anak	Warung Serba Ada	Sekolah	Tempat Ibadah		Fasilitas Olahraga	Klinik
Pintu	Pintu				Masjid & Musholla	Gereja		
366	7.601	59	58	24	52	23	72	29

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, belum terdapat perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau Dewan Komisaris dan Direksi.

H. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi

secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Kontribusi Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian 31 Desember 2023	Kontribusi Total Pendapatan Entitas Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian 31 Desember 2023
1.	BLP	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	15 November 1989	99,99%	2007	18,6%	31,1%
2.	BHL	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	1 Maret 1991	99,99%	2007	12,8%	19,8%
3.	JMS	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	28 Mei 2004	95,00%	2014	14,0%	26,2%
4.	STP	Jakarta	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	11 September 1997	95,00%	2014	17,5%	31,9%

1. PT BUMILANGGENG PERDANATRADA

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Bumilanggeng Perdanatrada ("BLP") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. BLP didirikan dengan nama "PT Bumilanggeng Perdanatrada" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Bumi Langgeng Perdanatrada No. 27 tanggal 15 November 1989 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4515.HT.01.01.TH.92 tanggal 30 Mei 1992 serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1772/1992 tanggal 9 Juli 1992 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4115 Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI")No. 69 tanggal 28 Agustus 1992 ("Akta Pendirian BLP").

Anggaran dasar BLP telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar BLP terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumilanggeng Perdanatrada No. 17 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-000017.

AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000496.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 ("Akta No. 17/2022").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BLP sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/2022, maksud dan tujuan BLP ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BLP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Pertanian:
   - Perkebunan buah kelapa sawit (01262);
     Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
   - Jasa pengolahan lahan (01611);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar
     balas jasa (*fee*) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
   - Jasa pemupukan lahan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma (01612);
     Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
   - Jasa pemanenan (01613);
     Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
   - Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara (01614);
     Kelompok ini mencakup usaha penyemprotan dan penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu.
   - Jasa penunjang pertanian lainnya (01619);
     Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305.
   - Jasa pasca panen (01630);
     Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam- macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah- buahan.
   - Pemilihan benih tanaman untuk pengembiakan (01640);
     Kelompok ini mencakup sema kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.

b. Industri:
   - Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (10431);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
   - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) (10432);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil*/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini

dipakai oleh industri lain.

- Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433);
  Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi
  minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit *stearin* (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434);
  Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435);
  Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi miyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- Industri pemisahan/fraksi minyak murni inti kelapa sawit (10436);
  Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan miyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).

c. Perdagangan:
   - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
   - Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produl sejenis lainnya.
   - Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
   - Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (46652);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.

d. Penangkutan dan Pergudangan:
   - Angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
     Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
   - Angkutan bermotor untuk barang khusus (49432);
     Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, ING dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
   - Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132);
     Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
     Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang

dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- Angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141);
  Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus (50142);
  Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (5022);
  Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkulan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
- Pergudangan dan penyimpanan (52101);
  Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumilanggeng Perdanatrada No. 21 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Oktober 2023 No. AHU-0066160.AH.01.02.TAHUN 2023 dan diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0134938 tanggal 30 Oktober 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216790.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Oktober 2023 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham BLP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**602.500.000**	**602.500.000.000**	
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	602.499.999	602.499.999.000	99,99
2. PT Papua Sawit Raya	1	1.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor	**602.500.000**	**602.500.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	**-**

Susunan Pengurus dan Pengawas BLP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumilanggeng Perdanatrada No. 32 tanggal 30 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0139513 tanggal 13 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0131820.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BLP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Muhamad Alfan Baharudin

Direktur : Mohammad Shalahuddin

Komisaris

Komisaris Utama : Haji Arfan Sani

Perizinan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
	Izin dan Dokumen Material Operasional		
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120307652477 tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-3 tanggal 6 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	NIB telah berstatus efektif dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.342.760.4-073.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Mada Dua Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-396/KT/KPP.0413/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Mada Dua Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-163/PKP/KPP.0413/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Mada Dua Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Perkebunan		
5.	Izin Usaha Perkebunan tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-4 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin Usaha Perkebunan atas kebun yang berlokasi di Desa Sekonyer, Kelurahan Sungai Sekonyer, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik		
6.	Surat Keterangan Pelaporan No. 570.2341/ESDM-SKP/IV/DESDM-2023 tanggal 8 September 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pelaporan untuk PTLD sebanyak 4 unit
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup		

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
7.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 660/05/ BLH/I/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Izin Lingkungan Addendum Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Perluasan Areal dari 560 Ha menjadi 9.501,12 Ha dan Peningkatan Kapasitas Produksi dari 45 Ton TBS/Jam menjadi 60 Ton TBS/Jam di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	-
8.	Addendum Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan BLP dan Perseroan untuk kebun yang berlokasi di Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dengan luas lahan sebesar 9.501,12 Hektar dan kapasitas pabrik sebesar 60 Ton TBS/Jam	-	-
9.	Surat Dinas Lingkungan Hidup No. 660/538/DLH.3/ IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen PT Bumilanggeng Perdanatrada	5 tahun	-
10.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat No. 503/004/LH/DPMPTSP.D tanggal 13 Maret 2020 tentang Izin Pembuangan Air Limbah kepada PT Bumilanggeng Perdanatrada	5 tahun	-

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah aset lancar	504.458	747.629
Jumlah aset tidak lancar	1.386.489	2.008.059
Jumlah Aset	**1.890.947**	**2.755.687**
Jumlah liabilitas jangka pendek	726.316	751.557
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.011.101	1.854.451
Jumlah Liabilitas	**1.737.417**	**2.606.008**
Jumlah Ekuitas	**153.530**	**149.679**

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penjualan	1.265.037	1.581.954
Laba Kotor	271.830	392.135
Laba Bersih Sebelum Pajak*	(80.877)	98.445
Laba Bersih Tahun Berjalan	(32.270)	61.109

**Terdapat kerugian divestasi anak usaha sebesar Rp 116.962 juta yang merupakan transaksi non-kas*

2. PT BUMIHUTANI LESTARI

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Bumihutani Lestari ("BHL") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. BHL didirikan dengan nama "PT Bumihutani Lestari" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 1 Maret 1991 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-3719.HT.01.01-Th 94 tanggal 28 Februari 1994 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3491 BNRI No. 25 tanggal 25 Maret 2008 ("Akta Pendirian BHL").
Anggaran dasar BHL telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar BHL terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumihutani Lestari No.07 tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033808.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU.AH.01.03-0078511 tanggal 15 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0112213.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 ("Akta No. 07/2023").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BHL sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumihutani Lestari No. 16 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001379.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0004370.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023, maksud dan tujuan BHL ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BHL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Pertanian:
   - Perkebunan buah kelapa sawit (01262);
     Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
   - Jasa pengolahan lahan (01611);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar
     balas jasa (*fee*) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
   - Jasa pemupukan lahan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma (01612);
     Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
   - Jasa pemanenan (01613);
     Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
   - Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara (01614);
     Kelompok ini mencakup usaha penyemprotan dan penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu.
   - Jasa penunjang pertanian lainnya (01619);
     Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305.

- Jasa pasca panen (01630);
  Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam- macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah- buahan.
- Pemilihan benih tanaman untuk pengembiakan (01640);
  Kelompok ini mencakup sema kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.

b. Industri:
- Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (10431);
  Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) (10432);
  Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil*/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433);
  Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi
  minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit *stearin* (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434);
  Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435);
  Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi miyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- Industri pemisahan/fraksi minyak murni inti kelapa sawit (10436);
  Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan miyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).

c. Perdagangan:
- Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202);
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produl sejenis lainnya.
- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319);
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (46652);
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.

d. Penangkutan dan Pergudangan:
   - Angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
     Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
   - Angkutan bermotor untuk barang khusus (49432);
     Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, ING dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
   - Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132);
     Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
     Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
   - Angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141);
     Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
   - Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus (50142);
     Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
   - Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (5022);
     Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkulan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
   - Pergudangan dan penyimpanan (52101);
     Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumihutani Lestari No. 08 tanggal 21 November 2023 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0189652 tanggal 27 November 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0239241.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 27 November 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BHL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**325.300.062**	**325.300.062.000**	
Pemegang Saham:			
1. BLP	325.300.061	325.300.061.000	99,99
2. ADS	1	1.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor	**325.300.062**	**325.300.062.000**	**100**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	**-**

Susunan Pengurus dan Pengawas BHL

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumihutani Lestari No. 31 tanggal 30 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0139552 tanggal 13 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0131905.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BHL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Muhamad Alfan Baharudin

Direktur : Jhon Piter Simamora

Komisaris

Komisaris Utama : Haji Arfan Sani

Perizinan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
	Izin dan Dokumen Material Operasional		
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120213160078 tanggal 7 November 2018 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-1 tanggal 7 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	NIB telah berstatus efektif dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.541.920.3-073.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Perkebunan		
3.	Izin Usaha Perkebunan tanggal 7 November 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ke-2 tanggal 4 April 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin Usaha Perkebunan atas kebun yang berlokasi di Kelurahan Jemaras, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
4.	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 692/ Menhutbun-VII/2000 tanggal 21 Juni 2000, yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan atas kebun yang berlokasi di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Izin Usaha Industri tanggal 7 November 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ke-2 tanggal 4 April 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin Usaha Industri atas perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kelurahan Jemaras, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Terminal Khusus		
6.	Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. BXXXIV.129/PU.60 tanggal 16 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Pembangunan Kepada PT Bumihutani Lestari Untuk Membangun Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati di Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin pembangunan terminal khusus perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah
7.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.455 Tahun 2010 tanggal 2 November 2010 tentang Pemberian Izin Operasi kepada PT Bumihutani Lestari untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati di Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin operasi terminal khusus perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
8.	Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. BX-115/PP008 tanggal 11 April 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati PT Bumihutani Lestari di Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	10 tahun	Izin operasi terminal khusus perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik		
9.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PB-UMKU: 812021316007800010002 tanggal 2 April 2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	3 tahun	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk PLTBm dan PLTD sebanyak 5 unit
10.	Sertifikat Laik Operasi No. JG1.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Sertifikat Laik Operasi No. JG6.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
12.	Sertifikat Laik Operasi No. JG7.O.30.111.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga uap sehubungan dengan PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
13.	Sertifikat Laik Operasi No. JG8.O.30.111.6206.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga uap sehubungan dengan PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Sertifikat Laik Operasi No. JF2.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Sertifikat Laik Operasi No. JF3.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
16.	Sertifikat Laik Operasi No. JF4.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga uap sehubungan dengan PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
17.	Sertifikat Laik Operasi No. JF5.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel untuk PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
18.	Sertifikat Laik Operasi No. JF6.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel untuk PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
19.	Sertifikat Laik Operasi No. JF7.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel untuk PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
20.	Sertifikat Laik Operasi No. JF8.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
21.	Sertifikat Laik Operasi No. JF9.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	01-02-2026	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit litstrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup		
22.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 397 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT Bumihutani Lestari di Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	-
23.	Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 08/SP/UKL/UPL/BPDL/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Persetujuan UKL-UPL Pembangunan Pelabukan Khusus Regional dan Fasilitas Penunjangnya PT Bumihutani Lestari	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	-
24.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan No. 503/034/Sek-LH/B3/DPM-PTSP/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan atas nama PT Bumihutani Lestari lokasi Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah	5 tahun *Catatan: BHL telah mengajukan permohonan perpanjangan atas izin tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Surat BHL No. 01/SST-EX/LB3/KALTENG/IX/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Permohonan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 PT Bumihutani Lestari.* *Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BHL telah menyusun rincian teknis kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan menyampaikan permohonan persetujuan atas rincian teknis tersebut kepada Dinas Lingkungan Kalimantan Tengah sebagaimana dibuktikan dengan Surat BHL No. 007/SUS-BHL/LB3/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun atas nama PT Bumihutani Lestari.*	-

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
25.	Surat Keputusan No. 168 Tahun 2008 tanggal 3 September 2018 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Yang Telah Diolah Melalui Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) PT Bumihutani Lestari	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	-
26.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1142/KPTS/M/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada PT Bumihutani Lestari untuk Kegiatan Usaha Industri Kelapa Sawit di Sungai Sebamban Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah	5 tahun	-
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Bangunan		
27.	Surat Keputusan Camat Cempaga No. 648.2/29/ Trantib/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa kantor perkebunan
28.	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 642/303/UPT/CK-PU/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa dermaga penampungan minyak sawit dan fasilitas pelengkap lainnya
29.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan No. 05-11-6209-237-07 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa pabrik pengelolaan minyak sawit

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah aset lancar	325.031	352.725
Jumlah aset tidak lancar	973.545	1.055.362
Jumlah Aset	**1.298.577**	**1.408.088**
Jumlah liabilitas jangka pendek	459.110	378.543
Jumlah liabilitas jangka panjang	603.242	720.422
Jumlah Liabilitas	**1.062.353**	**1.098.964**
Jumlah Ekuitas	**236.224**	**309.123**

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penjualan	831.709	781.607
Laba Kotor	154.747	185.536
Laba Bersih Sebelum Pajak*	(84.908)	57.188
Laba Bersih Tahun Berjalan	(74.056)	39.484

**Terdapat kerugian divestasi anak usaha sebesar Rp 90.338 juta yang merupakan transaksi non-kas*

3. PT JAYA MANDIRI SUKSES

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Jaya Mandiri Sukses ("JMS") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. JMS didirikan dengan nama "PT Jaya Mandiri Sukses" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Jaya Mandiri Sukses No. 53 tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Pengganti dari Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-17331 HT.01.01-TH.2004 tanggal 12 Juli 2004 serta telah didaftarkan berdasarkan Daftar Perseroan No. 1737/BH/09.05/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 ("Akta Pendirian JMS").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar JMS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 18 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0092798.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0257639.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022, maksud dan tujuan JMS ialah berusaha dalam bidang:

a. Pertanian;
b. Industri;
c. Perdagangan;
d. Pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, JMS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Pertanian:
   - Perkebunan buah kelapa sawit (01262);
     Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
   - Jasa pengolahan lahan (01611);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
   - Jasa pemupukan lahan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma (01612);
     Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
   - Jasa pemanenan (01613);
     Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
   - Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara (01614);
     Kelompok ini mencakup usaha penyemprotan dan penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu.
   - Jasa penunjang pertanian lainnya (01619);
     Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305.
   - Jasa pasca panen (01630);
     Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam- macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah- buahan.

- Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan (01640);
  Kelompok ini mencakup sema kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.

b. Industri:
   - Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (10431);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
   - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) (10432);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil*/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
   - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433);
     Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit *stearin* (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
   - Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434);
     Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
   - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435);
     Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi miyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
   - Industri pemisahan/fraksi minyak murni inti kelapa sawit (10436);
     Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan miyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).

c. Perdagangan:
   - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
   - Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produl sejenis lainnya.
   - Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
   - Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (46652);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.

d. Pengangkutan dan Pergudangan:
   - Angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
     Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
   - Angkutan bermotor untuk barang khusus (49432);
     Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang

yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, ING dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

- Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132);
  Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
- Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
  Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- Angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141);
  Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus (50142);
  Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (50222);
  Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
- Pergudangan dan penyimpanan (52101);
  Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 59 tanggal 17 November 2017, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0192113 tanggal 17 November 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**860.000**	**430.000.000.000**	
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	817.000	408.500.000.000	95,00
2. PT Rajawali Corpora	43.000	21.500.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**860.000**	**430.000.000.000**	**100,00**

Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	**-**

Susunan Pengurus dan Pengawas JMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 11 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat oleh Arfan Sani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0138803 tanggal 12 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0130432.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris JMS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Arfan Sani
Direktur	:	Jaditua Manik
Direktur	:	Priyono

Komisaris

Komisaris Utama	:	Muhamad Alfan Baharudin

Perizinan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
	Izin dan Dokumen Material Operasional		
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120010082043 tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana diubah pada perubahan ke-1 tanggal 6 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	NIB telah berstatus efektif dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.354.536.1-058.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-540/KT/KPP.041103/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-429/PKP/KPP.041103/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang diterbitkan oleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Perkebunan		
5.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT Jaya Mandiri Sukses	Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya	Izin usaha perkebunan untuk pengelolahan atas kebun yang berlokasi di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
6.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 525.26/001/ IUP-B/DPMPTSP tanggal 5 Juli 2017 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Jaya Mandiri Sukses	Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya	Izin usaha perkebunan untuk budidaya atas kebun yang berlokasi di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
7.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Jaya Mandiri Sukses	30 tahun	Izin usaha perkebunan untuk budidaya atas kebun yang berlokasi di Desa Lebak Cilong, Lebak Mantan, Sebemban, Kecamatan Muara Wis dan Desa Muara Leka, Perian, Kayu Batu, Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
8.	Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/274/KUM/2011 tanggal 21 Desember 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Jaya Mandiri Sukses di Kabupaten Kotabaru	Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan kewajiban untuk pendaftaran ulang setiap 10 tahun *)	Izin usaha perkebunan atas kebun yang berlokasi di Desa Batu Lasung, Desa Banua Lawas, Desa Mankirana dan desa Lalapin Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabgaru, Desa/Kelurahan Cantung Kiri Hilir, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
9.	Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 35 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit A.N. PT Jaya Mandiri Sukses	Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan kewajiban untuk pendaftaran ulang setiap 3 tahun *)	Izin usaha perkebunan atas kebun yang berlokasi di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Terminal Khusus		
10.	Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. A.206/AL.308/ DJPL tanggal 22 Februari 2021 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial/ Operasional Terminal Khusus Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Jaya Mandiri Sukses di Desa Sembeban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	5 tahun	Izin komersial atau opersaional Terminal Khusus (Tersus) untuk mengoperasikan Terminal Khusus Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit JMS di Desa Sebemban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik		
11.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri PB-UMKU: 81200100820430005001 tanggal 29 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.	-	-
12.	Sertifikat Laik Operasi No. DID.1.S.29.307.6402.23 tanggal 7 November 2023, yang diterbitkan oleh PT Energi Solusi Borneo	07-11-2028	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
13.	Sertifikat Laik Operasi No. EAX.1.S.29.307.6402.23 tanggal 27 November 2023, yang diterbitkan oleh PT Energi Solusi Borneo	27-11-2028	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
14.	Sertifikat Laik Operasi No. GE.7.S.29.307.6402.23 tanggal 29 Desember 2023, yang diterbitkan oleh PT Energi Solusi Borneo	29-12-2028	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
15.	Sertifikat Laik Operasi No. EQ4.1.S.DJ.320.6402.23 tanggal 30 November 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	30-11-2028	Sertifikat laik operasi untuk untuk pembangkit listrik tenaga biomassa di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
16.	Sertifikat Laik Operasi No. EQ2.1.S.DJ.320.6402.23 tanggal 30 November 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	30-11-2028	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga biomassa di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup		
17.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/09/ AMDAL/PERKEBUNAN/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Jaya Mandiri Sukses di Desa Lebak Cilong, Lebak Mantan, Sebemban, Kecamatan Muara Wis dan Desa Muara Leka, Kayu Batu, Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	-
18.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/27/ AMDAL/PABRIK-KOMPOSTING/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dan Komposing Seluas ± 14,9 Ha PT Jaya Mandiri Sukses di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
19.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/28/ AMDAL/PEL-SUS/XI/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kelayakan Lingkungan PT Jaya Mandiri Sukses Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Khusus serta Fasilitas Penunjang Seluas ± 6 Ha di Dusun Kuyung, Desa Sembeban, Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-
20.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/02/ KOMPEDAL-KUKAR/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 2.296,17 Ha oleh PT Jaya Mandiri Sukses di Desa Perian dan Desa Muara Leka Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	-	-
21.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.4/066/ TPS-LB3/DPMPTSP tanggal 21 Mei 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3) PT Jaya Mandiri Sukses di Desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	21-05-2023 *Catatan: hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses permohonan uji kelayakan lingkungan hidup*	-
22.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.4/067/ TPS-LB3/DPMPTSP tanggal 21 Mei 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3) PT Jaya Mandiri Sukses di Muara Leka Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	21-05-2023 *Catatan: hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses permohonan uji kelayakan lingkungan hidup*	-
23.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/80/ B-II/BLHD/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 370 Hektar kepada PT Jaya Mandiri Sukses di Desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	-
24.	Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) No. 503/2.5-9/DPMPTSP/IX/2021 tanggal 9 September 2021 untuk lokasi Danau Pualam Estate Kabupaten Tanah Bumbu dan Berlian Estate Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan	08-09-2024	-
25.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 85/KPTS/M/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perseroan Terbatas Jaya Mandiri Sukses di Kolam Tampungan Tadah Hujan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk Usaha Industri Kelapa Sawit untuk lokasi Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	5 tahun	-
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Bangunan		
26.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 647/109/ BP2T tanggal 26 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa bunker

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
27.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 647/110/ BP2T tanggal 26 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa bunker
28.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/097/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa main process
29.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/068/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
30.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/114/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa pos jaga
31.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/115/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa pagar harmonika
32.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/116/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa *power house*
33.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/117/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa CPO Tank 5000 T
34.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/118/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa *unloading sheed*
35.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/119/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa kantor
36.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/120/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah jembatan timbang
37.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/121/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa gudang kamel
38.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/122/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa jembatan timbang
39.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/123/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah karyawan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
40.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/124/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa *jetty*
41.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/125/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah askep
42.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/126/IMB/BP2T/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah karyawan
43.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-03/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah manajer
44.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-04/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah askep
45.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-05/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah asisten
46.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-06/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah karyawan
47.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-07/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa kantor
48.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-08/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa gudang
49.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-09/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa gudang
50.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-10/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa bengkel
51.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-11/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah manajer
52.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-12/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah askep
53.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-13/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah asisten

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
54.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-14/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah karyawan
55.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-15/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa kantor
56.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-17/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa gedung
57.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-18/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa bengkel
58.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-19/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah manajer
59.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-20/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah asisten
60.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-21/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah karyawan
61.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-22/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa kantor
62.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-23/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa gedung
63.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-24/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa gedung
64.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-25/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa bengkel
65.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-26/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah manajer
66.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-27/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah asisten
67.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-27/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah asisten
68.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-28/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa kantor

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
69.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-29/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa gudang
70.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-30/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa gudang
71.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-31/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa bengkel
72.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-32/IMB/BP2T/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa *long house*
73.	Keputusan Walikota Samarinda No. 596/DPPK-KS/ Pr.B/V/2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa rumah toko sebanyak 36 unit
74.	Surat Izin WaliKota Banjarbaru No. 503.229/ KP2T/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa kantor
75.	Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 640/1533/PEMB-IMB/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Henderi selaku Direktur PT Jaya Mandiri Sukses	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa fasilitas pendukung perkebunan

Catatan:

*) *Berdasarkan Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu No. 525/112/Bun.1/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Pendaftaran Ulang IUP, JMS dan SGA tidak wajib melakukan pendaftaran ulang IUP dan IUP dari JMS dan SGA berlaku selama JMS dan SGA masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.*

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah aset lancar	354.587	580.324
Jumlah aset tidak lancar	1.068.438	1.232.737
Jumlah Aset	**1.423.025**	**1.813.061**
Jumlah liabilitas jangka pendek	472.195	541.260
Jumlah liabilitas jangka panjang	595.126	774.539
Jumlah Liabilitas	**1.067.321**	**1.315.799**
Jumlah Ekuitas	**355.704**	**497.261**

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penjualan	1.101.623	1.042.602
Laba Kotor	390.210	345.266
Laba Bersih Sebelum Pajak*	(177.476)	162.922
Laba Bersih Tahun Berjalan	(142.708)	122.300

**Terdapat kerugian divestasi anak usaha sebesar Rp 384.705 juta yang merupakan transaksi non-kas*

4. PT SURYABUMI TUNGGAL PERKASA

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Suryabumi Tunggal Perkasa ("STP") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. STP didirikan dengan nama " PT Suryabumi Tunggal Perkasa" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 76 tanggal 11 September 1997 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4281.HT.01.01-Th 98 tanggal 27 April 1998 serta telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1627/BH.09.04/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4902 BNRI No.40 tanggal 18 Mei 2007 ("Akta Pendirian STP").

Anggaran dasar STP telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar STP terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 21 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0093277.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Desember 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU.AH.01.09-0090058 tanggal 23 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0258984.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 ("Akta No. 21/2022").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar STP sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 21 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0093277.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0258984.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, maksud dan tujuan STP ialah berusaha dalam bidang:

a. Pertanian;
b. Industri;
c. Perdagangan;
d. Pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, STP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Pertanian:
   - Perkebunan buah kelapa sawit (01262);
     Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
   - Jasa pengolahan lahan (01611);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
   - Jasa pemupukan lahan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma (01612);
     Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
   - Jasa pemanenan (01613);
     Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
   - Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara (01614);
     Kelompok ini mencakup usaha penyemprotan dan penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu.
   - Jasa penunjang pertanian lainnya (01619);
     Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan penyiraman serta penyediaan

alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305.

- Jasa pasca panen (01630);
  Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam- macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah- buahan.
- Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan (01640);
  Kelompok ini mencakup sema kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.

b. Industri:
   - Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (10431);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
   - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) (10432);
     Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil*/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
   - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433);
     Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit *stearin* (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
   - Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434);
     Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
   - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435);
     Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi miyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
   - Industri pemisahan/fraksi minyak murni inti kelapa sawit (10436);
     Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan miyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).

c. Perdagangan:
   - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
   - Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produk sejenis lainnya.
   - Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319);
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.

- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (46652);
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.

d. Pengangkutan dan Pergudangan:
   - Angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
     Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
   - Angkutan bermotor untuk barang khusus (49432);
     Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, ING dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
   - Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132);
     Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
     Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
   - Angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141);
     Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
   - Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus (50142);
     Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
   - Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (50222);
     Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
   - Pergudangan dan penyimpanan (52101);
     Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 19 tanggal 17 November 2017, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0192142 tanggal 17 November 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham STP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**540.000**	**270.000.000.000**	
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	513.000	256.500.000.000	95,00
2. PT Rajawali Corpora	27.000	13.500.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**540.000**	**270.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	**-**

Susunan Pengurus dan Pengawas STP

Berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 16 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat oleh Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.09-0139081 tanggal 12 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0130985.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris STP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Arfan Sani
Direktur : Ebin Simanungsong
Direktur : Jaditua Manik

Komisaris

Komisaris Utama : Muhamad Alfan Baharudin

Perizinan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
	Izin dan Dokumen Material Operasional		
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120318042333 tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana diubah pada perubahan ke-7 tanggal 1 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	NIB telah berstatus efektif dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.824.231.3-056.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-542/KT/KPP.041103/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-431/ PKP/KPP.041103/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang diterbitkan oleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Perkebunan		
5.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/54/ SK-DISBUN KUKAR/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Suryabumi Tunggal Perkasa	30 tahun	Izin usaha perkebunan atas kebun yang berlokasi di Desa Lebak Mantan, Sebemban, Paundana, Kayu Batu, Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis
6.	Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 327 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Pabrik Pengolah Kelapa Sawit kepada PT Suryabumi Tunggal Perkasa	Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya	Izin usaha perkebunan atas kebun yang berlokasi di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup		
7.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 160 Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit di Dusun Puanda, Desa Kayu Batu, Desa Muara Leka, Desa Perian, dan Desa Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai, Desa Lebak Cilong, dan Desa Lebak Mantan, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	-
8.	Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) No. 503/2.5-10/DPMPTSP/IX/2021 tanggal 9 September 2021 untuk lokasi Waduk Batu Bulan Mill Kabupaten Tanah Bumbu, Waduk Intan Estate dan Merah Delima Estate Kabupaten Kotabaru	08-09-2024	-
9.	Surat Dinas Lingkungan Hidup No. B/667/3431/ DLH-PPKLH/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Limbah yang memberikan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah	-	-
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Bangunan		
10.	Surat Izin Bupati Kutai Kartanegara No. 647/07/ PEMB-IMB/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kantor, Perumahan dan Gudang Beserta Fasilitas Pendukung Perkebunan Kelapa Sawit PT Suryabumi Tunggal Perkasa	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Izin mendirikan bangunan berupa bangunan kantor, perumahan, beserta fasilitas pendukung perkebunan kelapa sawit

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah aset lancar	224.782	180.428
Jumlah aset tidak lancar	1.022.744	1.450.918
Jumlah Aset	**1.247.526**	**1.631.346**

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah liabilitas jangka pendek	695.833	741.784
Jumlah liabilitas jangka panjang	361.680	534.078
Jumlah Liabilitas	**1.057.513**	**1.275.862**
Jumlah Ekuitas	**190.013**	**355.484**

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penjualan	1.080.058	1.031.440
Laba Kotor	209.566	114.372
Laba Bersih Sebelum Pajak*	(219.264)	5.043
Laba Bersih Tahun Berjalan	(166.056)	(205)

**Terdapat kerugian divestasi anak usaha sebesar Rp 289.322 juta yang merupakan transaksi non-kas*

J. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan didirikan pada tanggal 6 November 2000. Pada tanggal 27 Oktober 2009, saham Perseroan telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan kode saham BWPT. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan Pasal 3 dijelaskan bahwa perseroan memiliki maksud dan tujuan dalam bidang industri dan pertanian, dengan melaksanakan kegiatan usaha antara lain (1) memproduksi minyak kelapa sawit (*crude palm oil/ "*CPO") dan inti sawit (*palm kernel oil/ "*PK") (2) memasarkan hasil industri CPO dan PK (3) melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan profil usia perkebunan yang menarik. Per tanggal 31 Desember 2023, seluruh tanaman perseroan merupakan tanaman menghasilkan dengan rata-rata usia tanaman sekitar 16 tahun dan sebagian besar tanaman kelapa sawit Perseroan dalam usia prima untuk menghasilkan produksi yang optimum pada beberapa tahun ke depan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, membudidayakan dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit serta mengekstraksi CPO dan PK.

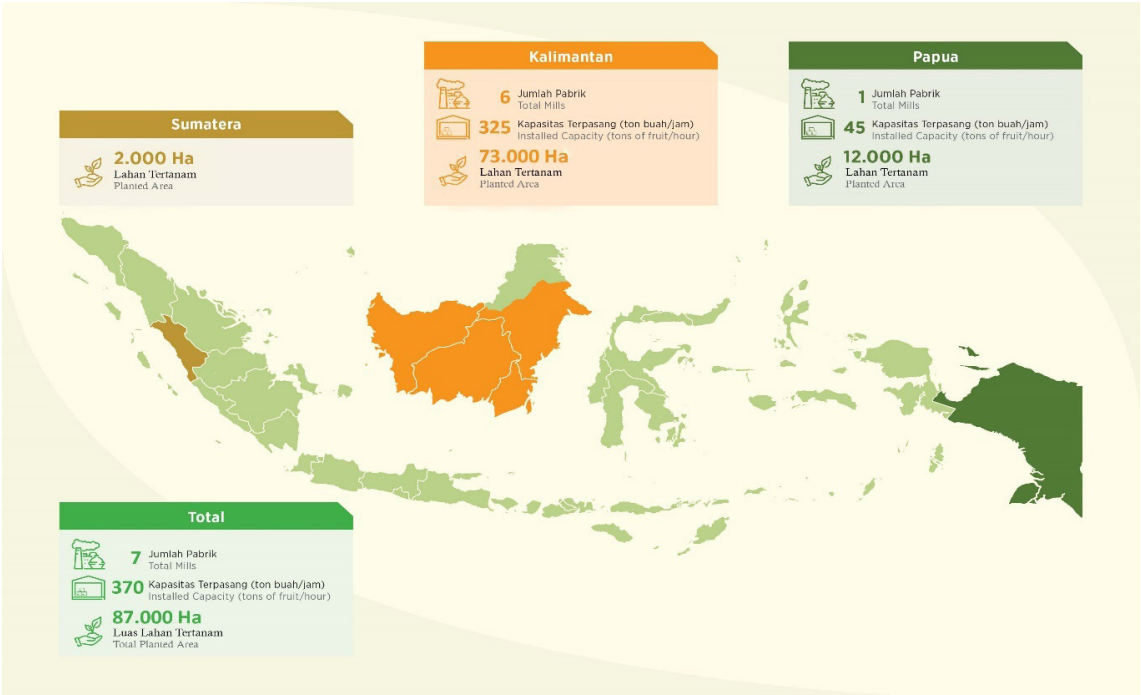

Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki dua puluh empat anak usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas tanah dengan total luas area sekitar 87.022 hektar. Lokasi perkebunan Perseroan tersebar pada 6 provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Timur tertanam sekitar 24%, Kalimantan Selatan tertanam sekitar 26%, Kalimantan Tengah tertanam sekitar 31%, Kalimantan Barat tertanam sekitar 4%, Sumatera Barat tertanam sekitar 2% dan Papua tertanam sekitar 13%.

Perkebunan Perseroan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena sebagian besar kebun merupakan satu hamparan sawit yang menyatu sehingga menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas berupa 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas pengolahan TBS sebesar 370 ton per jam atau sekitar 2.220.000 ton per tahun, 4 bulking dan tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas total sebesar 94.000 ton.

Dalam rangka mengoptimalisasi sumber daya, Perseroan memanfaatkan sisa hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan/atau produk turunannya menjadi sumber energi terbarukan menggunakan limbah hasil pengolahan.

Produk Perseroan

Produk utama Perseroan adalah TBS, CPO dan PK yang mana sebagian dari produk Perseroan tersebut telah tersertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sehingga dapat ditelusuri sumber pasokan (*traceability*) serta dalam proses usahanya Perseroan telah memperhatikan praktik agronomi yang berkelanjutan (*sustainable*). Pada tahun 2023, Perseroan berhasil mencapai peringkat 27 dengan skor 75,9% dalam penilaian *Sustainability Policy Transparency Toolkit* (SPOTT) dari total 100 produsen, pengolah dan pedagang minyak.

Selain itu, Perseroan juga berhasil memperoleh sertifikasi RSPO dan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang keduanya berlaku sampai tahun 2028. Seluas 61% dari keseluruhan area perkebunan dan 71% dari total pabrik kelapa sawit telah memperoleh sertifikasi, dengan rincian 2 dari 7 pabrik kelapa sawit dan 15 ribu Ha luas area tanam Perseroan telah bersertifikasi RSPO. Selain itu, 5 dari 7 pabrik kelapa sawit dan 52 ribu Ha luas area tanam Perseroan telah bersertifikasi ISPO.

Guna memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, pabrik pengolahan kelapa sawit harus memahami dan memastikan tingkat ketetelusuran dalam rantai pasokan kelapa sawit.

Perseroan mendorong keterlibatan pemasok dalam menjunjung prinsip keberlanjutan melalui seleksi pemasok yang telah memenuhi kriteria sosial dan lingkungan, diantaranya petani mitra, pemasok ketenagakerjaan, pemasok barang, dan jasa kontraktor. Seluruh pemasok diwajibkan untuk menyetujui dan sepenuhnya berkomitmen terhadap kebijakan keberlanjutan Perseroan, untuk menerapkan persyaratan dan komitmen yang tercantum dalam kebijakan keberlanjutan Perseroan tersebut, dan setiap perubahan dikomunikasikan kepada semua pemasok.

Dalam menyeleksi kebutuhan pemasok, Perseroan juga memberlakukan peraturan agar pihak pemasok mengantongi izin ketenagakerjaan dari Disnaker setempat, yaitu Disnaker regional Kalimantan dan Papua.

Beberapa kriteria utama yang menjadi pertimbangan Perseroan dalam pemilihan pemasok diantaranya:
• Sumber TBS pemasok tidak berasal dari lahan yang berada di kawasan hutan;
• Sumber TBS pemasok berasal dari lahan yang legal dan bukan merupakan hasil pencurian;
• Pemasok tidak melakukan pembukaan hutan atau lahan gambut;
• Pemasok bersedia untuk mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan Perseroan.

Perseroan juga bekerja sama dengan mitra rantai pasok untuk memastikan ketertelusuran dan transparansi
lokasi lahan dalam praktik mereka untuk menciptakan rantai nilai yang lebih berkelanjutan. Perseroan tidak
menerima pengadaan bahan mentah dari sumber ilegal.

Proses Produksi

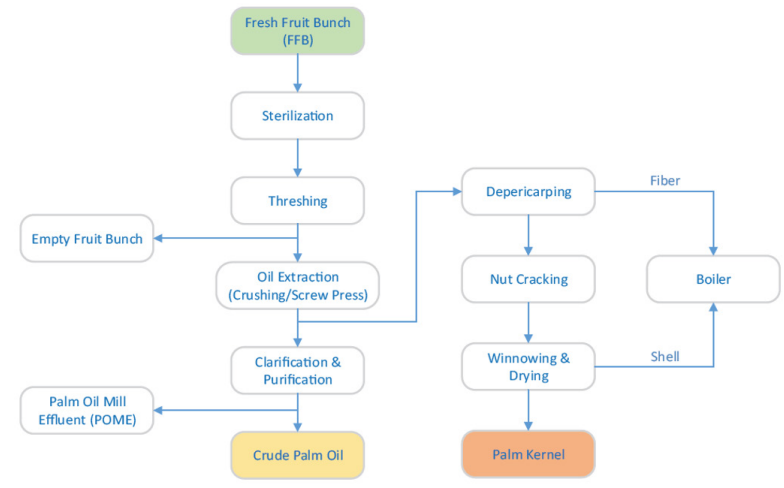

Proses produksi dimulai dengan pemanenan TBS yang sudah siap di panen. Setelah itu TBS dipindahkan ke pabrik pengolahan untuk disterilisasi menggunakan uap bertekanan tinggi agar TBS menjadi lunak dan longgar kelekatan buahnya dari tandan. TBS yang telah lunak kemudian diproses lebih lanjut untuk menjalani tahap pemisahan dalam drum baja yang berputar untuk memisahkan buah dari tandan.

Selanjutnya buah yang telah dipisahkan dari tandan diletakkan ke dalam bejana baja yang dikenal sebagai pengaduk buah. Uap dan tangan mekanik digunakan untuk melonggarkan serat dari biji buah. Ekstraksi minyak yang dihasilkan kemudian diproses lebih lanjut untuk pemurnian. Minyak yang diperoleh dari proses pengadukan buah dan pengepresan kemudian disaring untuk menghilangkan sisa-sisa serat dan serpihan biji sebelum dimasukkan ke dalam tangki.

Minyak yang bersih kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut dalam mesin pemutar sentrifugal berkecepatan tinggi untuk memisahkan kotoran yang mungkin masih terdapat dalam minyak. Setelah itu minyak disalurkan melalui pengering untuk mengurangi kadar kelembaban. Minyak murni yang diperoleh dari seluruh proses tersebut dikenal sebagai CPO, yang kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan minyak untuk dikirim kepada pelanggan.

2. KAPASITAS HASIL PRODUKSI

Kapasitas hasil produksi Perseroan sejak 31 Desember 2023 hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pabrik Kelapa Sawit	Lokasi	Kapasitas	Kapasitas per Tahun (MT)
PKS 1	Kalimantan Selatan	70 MT/ Jam	420.000
PKS 2	Kalimantan Selatan	45 MT/ Jam	270.000
PKS 3	Kalimantan Timur	60 MT/ Jam	360.000
PKS 4	Kalimantan Tengah	30 MT/ Jam	180.000
PKS 5	Kalimantan Tengah	60 MT/ Jam	360.000
PKS 6	Kalimantan Tengah	60 MT/ Jam	360.000
PKS 7	Papua	45 MT/ Jam	270.000
Total		**370 MT/ Jam**	**2.220.000**

Terhitung sejak 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas sebesar 2,2 juta MT per tahun. Dengan profil tanaman yang berada dalam usia prima dimana produksi diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, maka Perseroan juga memiliki rencana pengembangan untuk peningkatan kapasitas PKS hingga 75 MT/ Jam dalam rencana bisnis 5 tahun ke depan.

Saat ini Perseroan sedang dalam proses kontruksi untuk pengembangan kapasitas PKS sebesar 30 MT/ Jam untuk Pabrik yang berlokasi di Kalimantan Timur sehingga kapasitas PKS tersebut di tahun depan menjadi sebesar 90 MT/ Jam. Selanjutnya untuk tahun 2025, perseroan juga menargetkan untuk membangun PKS baru yang berlokasi di Kalimantan Timur dengan kapasitas sebesar 45 MT/ Jam.

Rencana pengembangan kapasitas PKS ini, merupakan salah satu strategi perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhan *double digit* pada periode di masa yang akan datang. Dengan bertambahnya kapasitas produksi, maka omset usaha Perseroan akan semakin meningkat sehingga berdampak pada penguatan kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

3. PERSAINGAN DALAM INDUSTRI

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memasok CPO terbesar di dunia. Pemain industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintah, perusahaan perkebunan swasta yang tergabung dalam grup besar yang sudah *go public* di pasar modal dan juga perusahaan independen dan petani kecil.

Berikut merupakan data perbandingan pendapatan dari perusahaan-perusahaan penghasil CPO di Indonesia:

(Dalam miliar Rupiah)

Nomor	Nama Perusahaan	Pendapatan per 31 Desember 2023
1	PT Astra Agro Lestari Tbk	20.745
2	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	9.498
3	PT Triputra Agro Persada Tbk	8.325
4	PT Sampoerna Agro Lestari Tbk	5.620
5	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	5.285
6	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk	4.189

Sumber: Laporan keuangan perusahaan

Dalam industri sawit saat ini, tingkat persaingan diantara para pemain CPO sangat rendah atau hampir tidak ada dikarenakan jumlah permintaan CPO terus meningkat sementara jumlah pasokan CPO diperkirakan stagnan sehingga terjadi defisit supply. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk negara-negara konsumen CPO (seperti India, Pakistan, Cina dan Indonesia) sehingga mendorong peningkatan pada kebutuhan bahan pangan, energi keberlanjutan dan kebutuhan harian.

Perseroan memandang bahwa persaingan yang ada saat ini adalah persaingan dari produsen minyak nabati lainnya (yang dapat digunakan sebagai produk substitusi dari CPO) seperti minyak kelapa, minyak kacang kedelai, minyak jagung, dan rapeseed oil yang tersedia di pasar sebagai produk substitusi dari minyak kelapa sawit.

Namun demikian, mengingat rapeseed oil dan minyak kacang kedelai banyak digunakan untuk memproduksi biodisel, pasokan rapeseed oil dan minyak kacang kedelai semakin berkurang untuk penggunaan di pasar makanan tradisional dan CPO adalah minyak nabati yang terbaik untuk mengisi kekurang pasokan untuk makanan tersebut.

4. KEGIATAN PEMASARAN

Kunci keberhasilan dalam pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah menjalin kerjasama jangka panjang dengan pelanggan. Perseroan memiliki kontrak kerjasama jangka panjang dengan pemain CPO ternama di Indonesia. Kerjasama tersebut terjalin karena kepuasan pelanggan atas kualitas produk dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi komitmen pasokan kepada sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Pengiriman CPO dan PK kepada pelanggan di Kalimantan dan Papua umumnya dilakukan melalui jalur laut. Perseroan selalu mencari upaya yang paling efektif dan efisien untuk moda pengiriman dan memastikan ketersediaan kapal sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dengan pelanggan.

Untuk memastikan kegiatan pemasaran berjalan dengan lancar, Perseroan didukung oleh tim pemasaran yang memiliki kompetensi dan professional di bidangnya serta kinerja mereka dievaluasi secara berkala agar target yang ditetapkan Perseroan dapat tercapai. Di samping itu, Perseroan terus mencari alternatif jalur distribusi yang efisien untuk berbagai produknya.

Perseroan memiliki tim khusus (*fleet management*) yang bertanggung jawab mengatur dan memastikan ketersediaan truk untuk menunjang proses pengiriman TBS dari kebun ke pabrik sehingga dapat menjamin ketersediaan produk yang akan dijual tepat waktu. Selain itu, Perseroan juga secara aktif melakukan pemeliharaan infrastruktur jalan, termasuk melakukan pengawasan terhadap level debit air di sekitar kebun dan pabrik.

Dalam rangka meningkatkan omset Perseroan juga memiliki tim khusus yang menangani aktivitas trading CPO. Kegiatan trading yang dimaksud bertujuan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia di pasar sehingga Perseroan mendapatkan keuntungan dari aktivitas trading tersebut.

5. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LLIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai kecenderungan yang signifikan dalam beban usaha sejak tahun buku berakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan serta kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

6. PROSPEK USAHA

Demand yang Terus Meningkat

Konsumsi minyak sawit menjadi peringkat pertama pada tahun 2023.

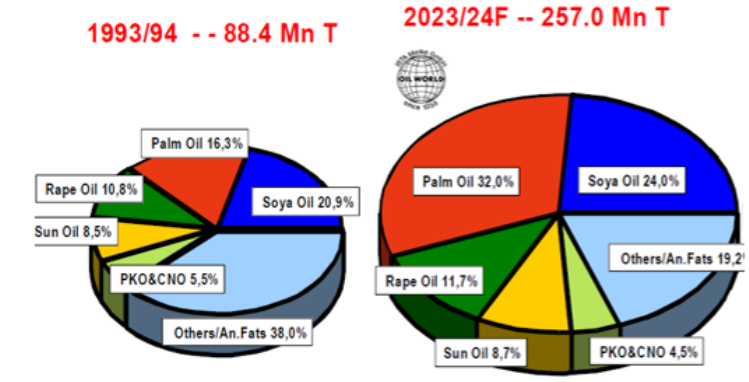

Sumber: Oil World

Disamping itu, terjadi pertumbuhan penduduk pada negara - negara konsumen terbesar CPO dunia, yaitu India, Cina, Pakistan dan Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan pada konsumsi bahan pangan, energi dan kebutuhan sehari-hari.

Grafik Pertumbuhan Penduduk Negara Konsumen Terbesar CPO

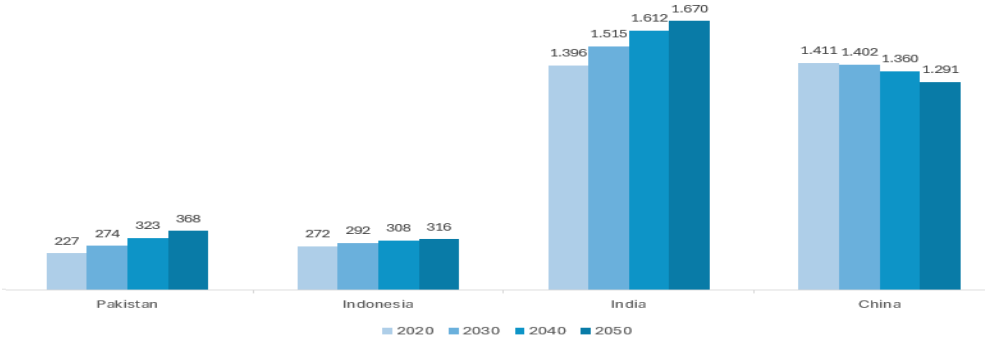

Sumber: World Bank

Dari sisi export minyak nabati pada grafik dibawah, dapat dilihat bahwa ekspor minyak sawit adalah yang tertinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Ekspor Minyak Nabati Dunia

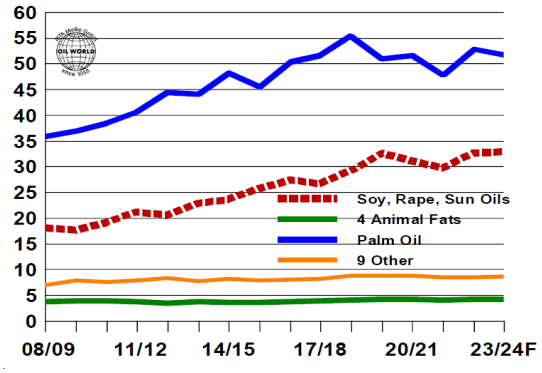

Sumber: Oil World

Konsumsi Biofuel Dunia

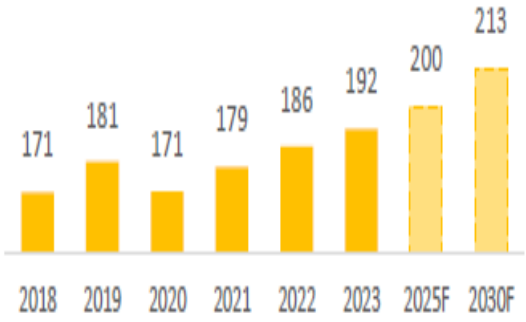

Sumber: Statista

Konsumsi biofuel dunia juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, konsumsi biofuel sebesar 192 juta liter dan diperkirakan mencapai 213 juta liter pada tahun 2030.

Sejak berakhirnya pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2021, dari tahun 2022 hingga saat ini prospek usaha sawit cukup baik dimana harga CPO stabil dan cukup tinggi. Konsumsi akan terus meningkat yang disebabkan peningkatan konsumsi biodiesel, oleochemical dan makanan.

Supply yang Terus Menurun

Terjadi penurunan supply minyak sawit yang dikarenakan turunnya produktivitas di Indonesia dan Malaysia sebagai 2 produsen CPO terbesar yang mendominasi 84% produksi CPO dunia. Hal ini dikarenakan: tidak berjalannya program replanting (30% perkebunan kelapa sawit di Malaysia telah berusia 19 tahun), penanaman baru sangat lambat, kekurangan tenaga kerja, peningkatan biaya produksi serta tantangan keberlanjutan dan sertifikasi.

Penurunan Produktivitas CPO yield/hektar

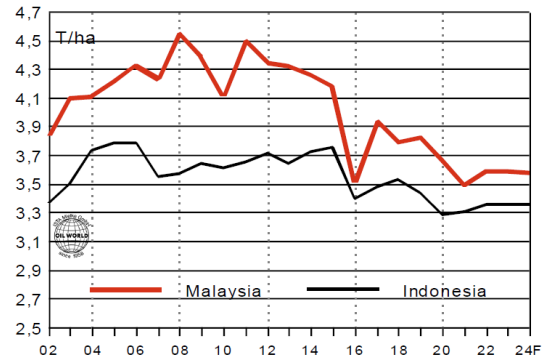

Sumber: Oil World

Produksi Negara Penghasil Sawit Stagnan

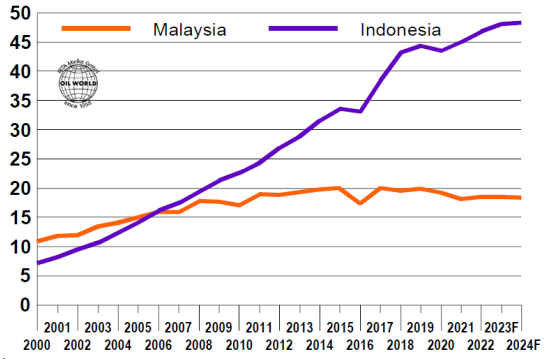

Sumber: Oil World

Produksi tahun 2023 meningkat hanya karena harga CPO yang tinggi mendorong industry untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini.

Produksi CPO Global

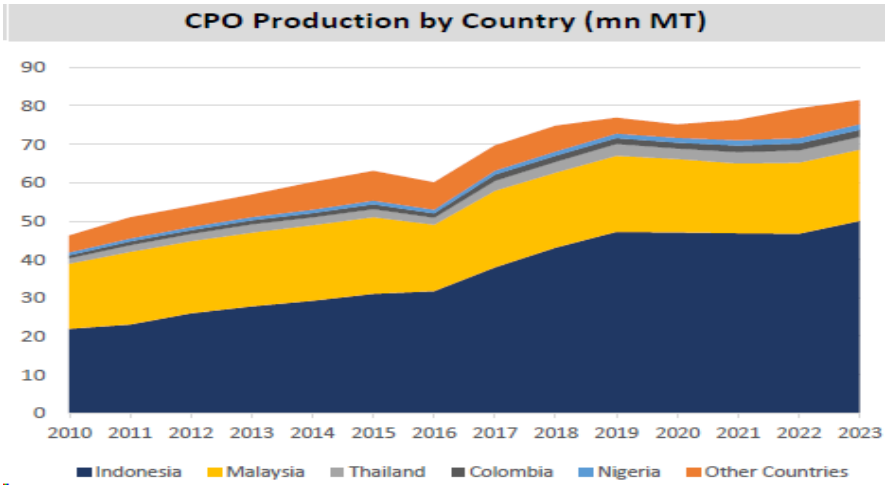

Sumber: Council of Palm Oil Producing Countries

Produksi sawit di Indonesia diperkirakan akan menurun setelah tahun 2023 dikarenakan usia tanaman sawit yang semakin tua dan Indonesia dihadapkan pada moratorium pembukaan lahan baru sawit dan peremajaan sawit rakyat yang tidak berjalan dengan lancar.

Kondisi Perkebunan di Indonesia

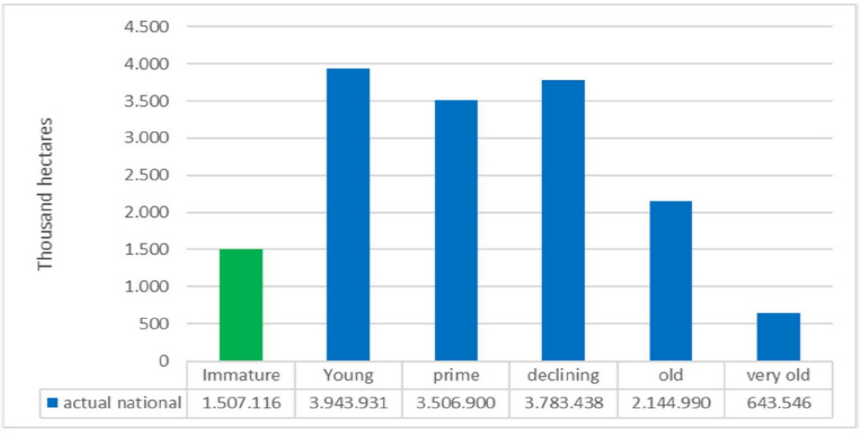

Sumber: GAPKI

Berdasarkan data GAPKI tahun 2023 bahwa 46% dari total tanaman kelapa sawit saat ini telah memasuki usia tidak produktif (*declining stage*), sementara program *smallholder's replanting* yang digiatkan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga terjadi defisit *supply*. Dengan permintaan produk CPO yang terus meningkat sedangkan supply yang terus menurun, maka perseroan cukup optimis bahwa prospek harga untuk produk CPO kedepannya akan stabil tinggi.

Program Replanting Sangat Lambat

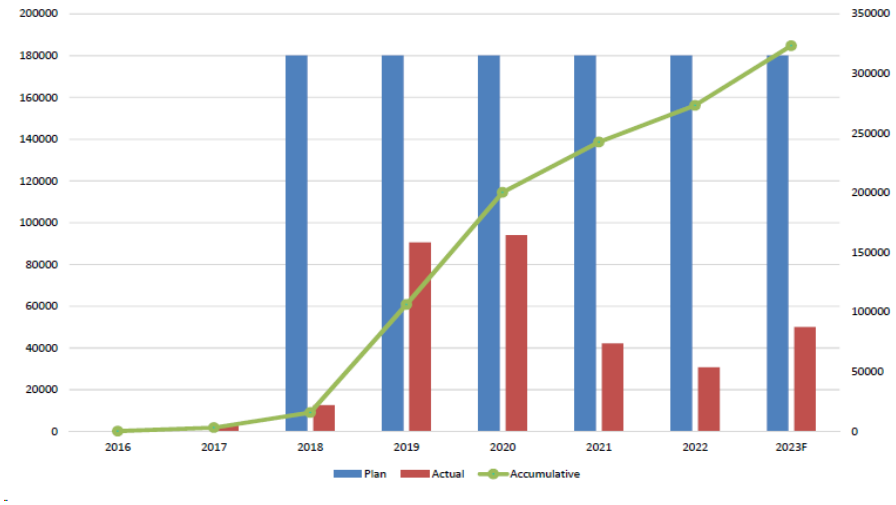

Sumber: GAPKI

Harga CPO pada tahun 2024 diperkirakan akan stabil pada kisaran USD 850/MT – USD 900/MT yang disebabkan beberapa faktor berikut:

5. Perkiraan penurunan hasil produksi FFB karena usia perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia sudah tua;
6. Dampak dari fenomena cuaca El-Nino Indonesia dan Malaysia;
7. Permintaan yang terus tumbuh untuk produksi biodiesel menyusul instruksi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi B35; dan
8. Potensi eskalasi harga minyak mentah akibat ketegangan geopolitik yang berkelanjutan di Eropa dan Timur Tengah.

Secara keseluruhan, jumlah produksi CPO Indonesia pada tahun 2023 mencapai 50 juta ton, atau meningkat sebesar 7,15% YoY dari 46,7 juta ton. Sementara produksi PK mencapai 4,8 juta ton, atau meningkat sebesar 5,7% YoY dari 4,5 juta ton. Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) memperkirakan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, kontributor utama pasar global, akan mencapai sekitar 70 juta ton mulai dari tahun 2024. Permintaan sektor hulu terhadap CPO diproyeksikan akan terus meningkat, didorong oleh permintaan konsumsi yang meningkat, minat yang meningkat dalam pengolahan CPO menjadi minyak goreng, biofuel, energi, dan aplikasi kosmetik. Pemanfaatan yang semakin luas dari biofuel sebagai pengganti yang layak untuk minyak bumi dianggap sebagai pendekatan yang bertanggung jawab secara lingkungan terhadap konsumsi bahan bakar. Pangsa pasar penggunaan minyak kelapa sawit utamanya digunakan untuk minyak goreng yang berkontribusi signifikan mencapai 69,5% dan kemudian diikuti oleh penggunaan untuk bahan biodiesel dan pelumas sebesar 14,5%, seiring dengan meningkatnya penerapan minyak kelapa sawit dalam program campuran untuk bahan bakar minyak kendaraan.

Penggunaan Minyak Sawit di Indonesia

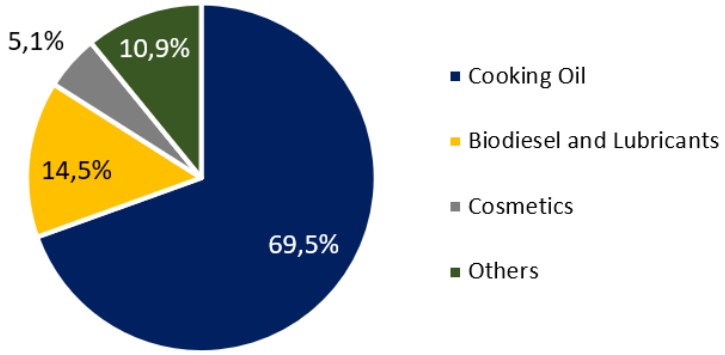

Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif di dalam industri, diantaranya sebagai berikut:

- Jumlah lahan tertanam mencapai 87.022 hektar dan seluruhnya merupakan tanaman menghasilkan.
- Tanaman kelapa sawit berada pada usia prima yaitu sekitar 16 tahun.
- Perkebunan terletak di lokasi yang strategis. Areal perkebunan di Kalimantan Timur terletak dekat dengan Sungai Mahakam dan Kutai Kartanegara, perkebunan di Kalimantan Tengah terletak dekat dengan Sungai Kumai, kota Pangkalan Bun dan Palangkaraya, perkebunan di Kalimantan Selatan terletak dekat dengan Sungai Tanah Merah dan kota Batulicin, sedangkan perkebunan di Papua terletak dekat dengan pelabuhan dan kota Jayapura. Hal ini memudahkan dalam hal distribusi produk kepada pelanggan dan memiliki potensi titik penjualan di bulking Perseroan.
- Sebagian besar kebun terletak pada satu hamparan luas sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya.
- Tingkat rendemen CPO mencapai 23 - 24% dan rendemen PK mencapai 4 - 5 %.
- Perseroan berkomitmen dalam hal keberlanjutan, perkebunan dan PKS Perseroan sudah memperoleh 3 sertifikat RSPO dan 8 sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
- Perseroan masih memiliki potensi lahan dalam HGU untuk memperluas areal perkebunan.
- Perseroan memiliki dukungan dan komitmen dari manajemen profesional dengan pengalaman yang luas di industri perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Riset dan pengembangan merupakan bagian penting dari kegiatan operasional Perseroan. Perseroan secara terus-menerus memperbaiki teknik pertanian, hasil panen, praktik agronomi yang baik serta mengimplementasikan mekanisasi dan digitalisasi yang terintegrasi pada seluruh kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan terus melakukan penelitian pada seluruh aktivitas perkebunan, termasuk optimalisasi penggunaan pupuk, teknik pemanenan, penggunaan herbisida serta upaya pengendalian hama dan penyakit. Tujuan penelitian adalah menjaga dan meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan sehingga Perseroan dapat memperoleh pasokan TBS yang berkualitas untuk pabrik pengolahannya secara rutin dan berkesinambungan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain memeriksa kecukupan nutrisi mineral tanaman, perlindungan tanaman, peningkatan pemanfaatan limbah hasil pemrosesan CPO (POME). Kecukupan nutrisi mineral hal yang sangat penting. Peneliti Perseroan melakukan program eksperimen untuk mempelajari dampak dari pemberian berbagai tingkat dosis pupuk pada hasil panen kelapa sawit. Tujuan dari eksperimen lapangan tersebut adalah untuk menilai jenis pupuk yang optimal dan efektif untuk setiap jenis tanah serta untuk meningkatkan penyerapan nutrisi.

Sedangkan untuk perlindungan tanaman, Perseroan melakukan penelitian untuk menemukan metode paling efektif dalam mengendalikan penyakit tanaman dan melakukan percobaan untuk mempelajari tindakan penyembuhan dan pencegahan tanaman muda, termasuk dampak dari teknik pemanenan terhadap perkembangan penyakit. Perseroan juga menggunakan pemangsa alami, seperti burung hantu, untuk mengendalikan hama.

Perseroan menggunakan kembali limbah produksi seperti POME dan janjang kosong yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan sebagai supplemen atas pupuk. Mengingat limbah tersebut merupakan sumber nutrisi yang baik untuk tanaman, Perseroan memanfaatkan keduanya sebagai pupuk organik pada lahan perkebunan.

Disamping itu Perseroan juga memiliki kerjasama *Build*, *Operate and Transfer* (BOT) dengan rekan berpengalaman di bidang energi untuk memanfaatkan POME menjadi energi terbarukan.

Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Komersial, atau Keuangan

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, ataupun keuangan.

7. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

8. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan yang menimbulkan adanya risiko khusus sehubungan dengan modal kerja.

IX. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari:

a. jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi, untuk bunga dari Obligasi dengan kupon;
b. selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari Obligasi dengan kupon;
c. selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari Obligasi tanpa bunga;
d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga Obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berbentuk:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:
1. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
2. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau
3. Kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima penjual Obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli Obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimanan dimaksud dalam butir 2.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP No. 9/2021”). Berdasarkan Pasal 3 PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT diturunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B. Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud termasuk bunga Obligasi dengan kupon, diskonto Obligasi dengan kupon dan diskonto Obligasi tanpa bunga.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan telah menyampaikan SPT tahunan untuk tahun pajak 2022 pada tanggal 27 April 2023 dan SPT tahunan untuk tahun pajak 2023 akan disampaikan dalam batas waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi:		
PT KB Valbury Sekuritas	15.000.000.000,-	28,5
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	37.665.000.000,-	71,5
Jumlah	**52.665.000.000,-**	**100,0**

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila dalam jumlah kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT KB Valbury Sekuritas.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Para Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat kupon Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasli penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo Obligasi serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Global Network Limited*)**
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220

Rekan yang ditunjuk	:	Maria Leckzinska
No. STTD	:	STTD.AP-108/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Nama & Nomor Asosiasi	:	Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia & No. Reg. IAPI AP.0155
Surat Penunjukan	:	017/BOD/EHP/IV/2024 Tanggal 1 April 2024

Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum : **Tumbuan & Partners**
Jl. Gandaria Tengah III/8
Kebayoran Baru
Jakarta 12130

Rekan yang ditunjuk	:	Jennifer B. Tumbuan
No. STTD	:	STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023
Pedoman Kerja	:	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Nomor Anggota Asosiasi	:	200211
Surat Penunjukan	:	013/BOD/EHP/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024

Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
Wali Amanat	:	**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk** T Tower Lt. 17 JL Gatot Subroto No. 93 Kel. Pancoran, Kec. Pancoran Jakarta Selatan 12780

No. STTD	:	1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016
Pedoman Kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat, Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
Surat Penunjukan	:	020/BOD/EHP/IV/2024 Tanggal 1 April 2024

Tugas Pokok	:	Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
Notaris	:	**Desty Haninditia S.H., M.Kn., Notaris pengganti Dini Lastari Siburian, S.H. berdasarkan SK MPW Notaris No. 05/MPDN.JAK-SEL/CT/III/2024** Jl. Margasatwa Raya, Komp. MA No. 60 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan - 12450

No. STTD	:	STTD.NP-7/PM.021/2024 tanggal 17 April 2024
Keanggotaan Asosiasi	:	ALB-2009172526
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	:	014/BOD/EHP/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024

Tugas Pokok	:	Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas: a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi. c. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.
Lembaga Pemeringkat	:	**PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)** Equity Tower 30th Floor Sudirman Central Business District Lot.9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Pedoman Kerja	:	POJK No.24/POJK.04/2024 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek
Surat Penunjukan	:	203/FIN-EHP/JKT/XII/2023 Tanggal 7 Desember 2023 dan revisi surat 135/FIN-EHP/JKT/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024
Tugas Pokok	:	Melakukan pemeringkatan efek dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TURUT SERTA DALAM PENAWARAN UMUM INI, MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK SEBAGAI WALIAMANAT.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank BJB") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank BJB dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan Bank BJB.

Bank BJB sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi No. 1676/TRE-KWA/2024 tanggal 04 April 2024, dan Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan POJK No. 19/2020 yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak mempunyai hubungan kredit No. 1677/TRE-KWA/2024 tanggal 04 April 2024.

Bank BJB sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 1862/TRE-KWA/2024 tanggal 18 April 2024, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1) Riwayat Singkat

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V. Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding) terkena ketentuan tersebut dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mendirikan Bank Karya Pembangunan, dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dikukuhkan sebagai Perusahaan Daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-40/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan "Bank Jabar" dan logo baru berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1995.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992, Bank memperoleh status sebagai bank devisa. Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 8 April 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M. Hum., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C27103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999. Pada tanggal 12 September 2007, nama Bank diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten berdasarkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. W8-02673 HT.01.04-TH.2007. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1065/SK/DIR - PPN/2007 tanggal 29 November 2007, Bank mengubah penyebutan nama menjadi "Bank Jabar Banten".

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank, serta Surat Keputusan Direksi No. 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama serta pemberlakuan Brand Identity Guidelines, maka pada tanggal 2 Agustus 2010 perubahan penyebutan nama “Bank Jabar Banten” secara resmi diubah menjadi “Bank BJB”.

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebagaimana tertuang di Akta Pendirian No. 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. 05 tanggal 04 April 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya nomor : AHU-0024508. AH.01.02.TAHUN 2023, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. 53 tanggal 19 September 2023 yang telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal 22 September 2023 nomor : AHU-AH.01.09-0166302.

2) Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. 05 tanggal 04 April 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya nomor : AHU-0024508.AH.01.02.TAHUN 2023, struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham bank bjb adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Seri A Nilai nominal Rp 250 per saham		Jenis Seri B Nilai nominal Rp 250 per saham		Jumlah Saham Kelas A & B	% Jumlah Saham
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)		
Modal Dasar	9.600.000.000	2.400.000	6.400.000.000	1.600.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.756.415.785	939.104	296.756.810	74.189	4.053.172.595	38,52
2. Pemerintah Kota & Kab. se-Jawa Barat						
Kota Bandung	116.000.006	29.000	8.048.569	2.012	124.048.575	1,18
Kota Cirebon	17.837.704	4.459	1.237.655	309	19.075.359	0,18
Kota Sukabumi	38.545.063	9.636	2.674.412	669	41.219.475	0,39
Kota Bekasi	62.493.022	15.623	4.336.029	1.084	66.829.051	0,64
Kota Bogor	46.737.809	11.684	3.242.866	811	49.980.675	0,48
Kota Cimahi	104.000.000	26.000	7.215.958	1.804	111.215.958	1,06
Kota Depok	93.777.672	23.444	-	-	93.777.672	0,89
Kota Tasikmalaya	62.810.189	15.703	4.428.044	1.107	67.238.233	0,64
Kota Banjar	41.000.000	10.250	2.878.228	720	43.878.228	0,42
Kabupaten Bandung	712.485.914	178.121	49.435.275	12.359	761.921.189	7,24
Kabupaten Cirebon	56.121.123	14.030	3.893.920	973	60.015.043	0,57
Kabupaten Karawang	56.863.937	14.216	9.841.711	2.460	66.705.648	0,63
Kabupaten Ciamis	32.721.097	8.180	4.059.040	1.015	36.780.137	0,35
Kabupaten Tasikmalaya	130.953.800	32.738	9.963.099	2.491	140.916.899	1,34
Kabupaten Sukabumi	86.889.260	21.722	6.028.743	1.507	92.918.003	0,88
Kabupaten Subang	44.937.610	11.234	-	-	44.937.610	0,43

Keterangan	Jenis Seri A Nilai nominal Rp 250 per saham		Jenis Seri B Nilai nominal Rp 250 per saham		Jumlah Saham Kelas A & B	% Jumlah Saham
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)		
Kabupaten Indramayu	87.986.270	21.997	7.380.073	1.845	95.366.343	0,91
Kabupaten Bekasi	73.550.504	18.388	5.103.243	1.276	78.653.747	0,75
Kabupaten Sumedang	46.052.684	11.513	3.195.329	799	49.248.013	0,47
Kabupaten Bogor	202.523.232	50.631	14.051.915	3.513	216.575.147	2,06
Kabupaten Cianjur	102.416.760	25.604	-	-	102.416.760	0,97
Kabupaten Kuningan	28.797.110	7.199	1.845.018	461	30.642.128	0,29
Kabupaten Majalengka	35.462.669	8.866	7.380.073	1.845	42.842.742	0,41
Kabupaten Garut	26.366.698	6.592	4.428.044	1.107	30.794.742	0,29
Kabupaten Purwakarta	51.219.171	12.805	5.904.059	1.476	57.123.230	0,54
Kabupaten Bandung Barat	5.263.157	1.316	7.380.073	1.845	12.643.230	0,12
Kabupaten Pangandaran	-	-	2.656.826	664	2.656.826	0,03
3. Pemerintah Provinsi Banten	520.589.856	130.147	-	-	520.589.856	4,95
4. Pemerintah Kota & Kab. se-Banten						
Kota Tangerang	125.117.942	31.279	8.681.210	2.170	133.799.152	1,27
Kota Cilegon	60.631.578	15.158	4.059.041	1.015	64.690.619	0,61
Kota Tangerang Selatan	-	-	7.380.073	1.845	7.380.073	0,07
Kota Serang	-	-	7.380.073	1.845	7.380.073	0,07
Kabupaten Serang	151.092.304	37.773	10.332.103	2.583	161.424.407	1,53
Kabupaten Tangerang	289.306.189	72.327	20.073.282	5.018	309.379.471	2,94
Kabupaten Lebak	37.586.022	9.397	2.607.876	652	40.193.898	0,38
Kabupaten Pandeglang	110.162.524	27.541	-	-	110.162.524	1,05
5. Publik	-	-	2.572.850.355	643.213	2.572.850.355	24,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.414.714.661	1.853.677	3.106.729.025	776.682	10.521.443.686	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.185.285.339	546.323	3.293.270.975	823.318	5.478.556.314	34,24

3) Pengurus Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 02 April 2024 yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0152342 tanggal 19 April 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	: Ventje Rahardjo Soedigno*
Komisaris	: Drs. Tomsi Tohir
Komisaris	: Rudie Kusmayadi
Komisaris Independen	: Diding Sakri

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Yuddy Renaldi
Direktur Kepatuhan	: Cecep Trisna
Direktur Keuangan	: Hana Dartiwan*
Direktur IT, Treasury dan International Banking	: Rio Lanasier
Direktur Konsumer dan Ritel	: Yusuf Saadudin*
Direktur Operasional	: Tedi Setiawan
Direktur Komersial dan UMKM	: Nancy Adistyasari

*berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test)* dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No 05 Tanggal 04 April 2023 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. Akta Anggaran Dasar Pasal 3 Anggaran Dasar, bank bjb didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang Aktivitas Keuangan (Perbankan). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bank bjb dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Konvesional yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabunga, giro, deposito berjangka, sertifikasi deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit.
3. Melakukan aktivitas di bidang system pembayaran.
4. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
5. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah.
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
7. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
8. Melakukan kegiatan pengalihan piutang.
9. Melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga.
10. Melakukan kegiatan penyertaan modal dan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industry Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
12. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
13. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa Keuangan kepada Nasabah, dan/atau
14. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank bjb, atau bank bjb sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR dimaksud.

Selain Penghimpunan dan Penyaluran dana, bank bjb melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti Reksa dana, Bancasurannce, Trade Finance & Services, Produk Treasury, Kiriman Uang dan Western Union, Inkaso, BPDnet Online, bjb DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Transfer Kliring Antar Wilayah (Intercity Clearing), Jaminan Bank (Bank Garansi), Fasilitas Safe Deposit Box (SDB), Mobile Banking (M-ATM Bersama), Layanan Nasabah bjb Precious, Jasa layanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan, Ibadah Haji (BPIH), Layanan Weekend Banking, Layanan Mobil Edukasi dan juga Jasa Pasar Modal (Jasa Kustodian dan Jasa Wali Amanat).

Sebagai Bank Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah go public, bank bjb telah memiliki imej yang kuat sebagai bank umum yang sedang berkembang dengan pesat dan menjadi bank nasional. Saat ini bank bjb telah memiliki jaringan kantor yang menyebar di 14 provinsi, terutama Jawa Barat serta Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia. Dari sisi produk, layanan electronic banking (bjb DIGI) telah medorong berkembangnya berbagai produk bank bjb. Untuk mengoptimalkan layanannya bagi seluruh nasabah, bank bjb telah memperluas jaringan layanan perbankan di Indonesia. Saat ini kantor-kantor cabang bank bjb juga dapat dijumpai di berbagai kota besar seperti Medan,

Pekanbaru, Batam, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Tegal, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Selain itu, bank bjb juga mengembangkan jaringan di bawahnya untuk membawa dirinya semakin dekat dengan nasabah. Hingga tangal 31 Juli 2023, bank bjb memiliki 2 kantor pusat, 5 kantor wilayah, 64 kantor cabang, 823 kantor cabang pembantu, 210 kantor cabang pembantu KCP tipe C, 1749 ATM bank bjb, 149 cash recycling machine, 18 layanan bjb prioritas, 6 sentra UMKM, 11 weekend banking.

Pada 4 Januari 2016 bank bjb telah mendapatkan izin Wali Amanat sebagai pelaku penunjang Pasar Modal. bank bjb adalah bank pembangunan daerah pertama yang telah mendapat izin tanda terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5) Tugas Utama Wali Amanat

Sesuai Peraturan No. 19/POJK.04/2020 pasal 10 tentang Kewajiban Wali Amanat, maka tugas pokok Wali Amanat adalah:
Bank umum yang melakukan kegiatan Wali Amanat wajib melakukan tugas pokok dan tanggung jawabnya meliputi:

a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimanan dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Emiten;
c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan ; dan
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi mulai berlaku efektif pada saat obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi.

6) Penunjukkan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan POJK No. 20/2020, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

i. penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan
ii. penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan:
    - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    - izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
    - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
    - Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
    - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
    - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
    - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
    - timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
    - atas permintaan para Pemegang Obligasi
iii. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat berakhir pada saat:
    - Obligasi telah dilunasi baik jumlah pokok atau nilai pokok, bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa termasuk denda, jika terdapat denda, dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Emiten, jika Emiten tidak menggunakan Agen Pembayaran;

- Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
- tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo jumlah pokok Obligasi; atau
- setelah diangkatnya Wali Amanat baru

7) Ikhtisar Data Keuangan Penting[

Berikut ini adalah laporan posisi kuangan konsolidasian bank bjb pada tanggal laporan posisi kuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET		
Kas	3.530.074	3.300.031
Giro pada Bank Indonesia	14.879.767	13.032.593
Giro pada bank lain - pihak ketiga	1.196.787	1.243.695
Cadangan kerugian penurunan nilai	(57)	(68)
	1.196.730	1.243.627
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - pihak ketiga	3.886.989	7.153.807
Cadangan kerugian penurunan nilai	(296)	(2.133)
	3.886.693	7.154.674
Tagihan derivatif	1.289	17.388
Surat berharga - pihak ketiga	30.976.967	27.387.574
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.357)	(5.256)
	30.965.610	27.382.318
Tagihan Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	5.468.915
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - pihak ketiga	689.623	843.826
Kredit yang diberikan		
- Pihak berelasi	710.248	466.150
- Pihak ketiga	115.589.821	107.873.542
	116.300.069	108.339.692
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.913.951)	(1.631.811)
	114.386.118	106.707.881
Pembiayaan dan piutang syariah - setelah dikurangi margin ditangguh-kan - pihak ketiga	10.881	-
	8.767.233	7.415.908
Cadangan kerugian penurunan nilai	(216.946)	(159.875)
	8.561.168	7.256.033
Tagihan akseptasi	288.944	227.970
Cadangan kerugian penurunan nilai	(519)	(2.374)
	288.425	225.596
Penyertaan saham	190.089	142.093
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.303)	(1.303)
	188.786	140.790
Aset tetap		
Harga perolehan	7.225.400	6.683.040
Akumulasi penyusutan	(2.429.907)	(2.119.791)
Nilai buku	4.795.493	4.563.249

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset pajak tangguhan - neto	62.046	189.749
Bunga yang masih akan diterima	1.367.656	1.169.105
Aset lain-lain - neto	3.496.010	2.545.516
TOTAL ASET	188.295.488	181.241.291
LIABILITAS, DANA SYIRKAH		
TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.212.830	2.403.981
Simpanan nasabah		
- Pihak berelasi	6.401.344	9.884.589
- Pihak ketiga	120.077.043	112.134.754
	126.478.387	122.019.343
Simpanan nasabah - Syariah		
- Pihak berelasi	480	274
- Pihak ketiga	947.836	795.705
	948.316	795.979
Simpanan dari bank lain		
- Pihak berelasi	86.755	96.339
- Pihak ketiga	2.454.785	4.365.451
	2.541.540	4.461.790
Liabilitas derivatif	23	2.207
Liabilitas akseptasi	288.944	227.970
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.244.805	3.081.103
Efek utang yang diterbitkan	957.991	1.871.461
Pinjaman yang diterima - pihak ketiga	20.323.823	17.533.761
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	13.131	10.747
Utang pajak	82.159	139.347
Bunga yang masih harus dibayar dan bagi hasil	285.191	254.160
Liabilitas imbalan kerja pasti	293.605	291.904
Liabilitas lain-lain	1.229.508	1.347.965
Obligasi subordinasi	3.678.849	3.679.163
TOTAL LIABILITAS	163.579.102	158.120.881
Dana syirkah temporer		
Bukan bank		
- Pihak berelasi	9.316	7.148
- Pihak ketiga	9.172.780	8.316.448
	9.182.096	8.323.596
Bank		
- Pihak ketiga	85.272	50.828
Total dana syirkah temporer	9.267.368	8.374.424
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk		
Modal saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.630.361	2.630.361
Tambahan modal disetor	1.812.876	1.812.876

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus dari revaluasi aset tetap	2.164.733	2.169.577
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(289.695)	(420.813)
Pengukuran kembali program imbalan pasti		
- Setelah pajak tangguhan	(167.121)	(166.272)
Saldo laba		
-Telah ditentukan penggunaannya	4.786.067	4.785.382
- Belum ditentukan penggunaannya	4.622.656	3.947.964
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	15.559.877	14.759.075
Kepentingan non-pengendali	(110.859)	(13.089)
TOTAL EKUITAS	15.449.018	14.745.986
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	188.295.488	181.241.291

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH		
Pendapatan bunga	13.287.106	12.816.082
Pendapatan syariah	916.628	772.467
Pedapatan provisi dan komisi	34.001	35.228
Pendapatan provisi dan komisi syariah	20.474	12.197
	14.258.209	13.635.974
BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH	(7.194.587)	(5.227.996)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH NETO	7.063.622	8.407.978
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	1.196.432	1.051.115
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku	335.778	365.404
Keuntungan transaksi valuta asing - neto	14.095	23.826
Keuntungan dari penjualan surat berharga yang diperdagangkan – neto	86.529	49.315
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - neto	40.041	-
Lain-lain	249.380	150.028
	1.922.255	1.639.688
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Beban umum dan administrasi	(2.725.498)	(2.744.760)
Beban tenaga kerja dan tunjangan	(2.580.668)	(3.242.167)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - neto Kerugian	(746.262)	(223.976)
Kerugian dari penjala surat berharga – neto	(23.164)	(92.808)
–Penyisihan kerugian komitmen dan kontijensi	631	13.192
Lain-lain	(762.191)	(908.289)
	(6.837.152)	(7.198.808)
LABA OPERASIONAL	2.148.725	2.848.858
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	(22.358)	(13.240)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LABA SEBELUM PAJAK	2.126.367	2.835.618
BEBAN PAJAK	(445.190)	(590.336)
LABA TAHUN BERJALAN	1.681.177	2.245.282
Akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(39.442)	(24.657)
Revaluasi aset tetap	(4.844)	(31.191)
Pajak penghasilan	.38.593	4.824
Akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Keuntungan (Kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	131.107	(412.236)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan – setelah pajak penghasilan	125.414	(463.260)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.806.591	1.782.022
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.778.395	2.304.376
Kepentingan non-pengendali	(97.218)	(59.094)
TOTAL	1.681.177	2.245.282
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.903.820	1.840.482
Kepentingan non pengendali	(97.229)	(58.460)
TOTAL	1.806.591	1m782m022
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (NILAI PENUH)	169.03	219.02

8) PENGALAMAN SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pada 4 Januari 2016 bank bjb telah mendapatkan izin Wali Amanat sebagai pelaku penunjang Pasar Modal. Bank bjb adalah bank pembangunan daerah pertama yang telah mendapat izin tanda terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank bjb berperan aktif sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau sejak Tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

I. Obligasi / Sukuk
   - Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020
   - Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri A
   - Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri B
   - Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri A
   - Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri B
   - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A
   - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri B
   - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022
   - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A
   - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B
   - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C
   - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D
   - Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A
   - Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B

- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Energi Mitra Investama I Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Energi Mitra Investama I Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 202 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap III Tahun 2023Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019

- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri A
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Dengan Opsi Konvesi Wika Realty Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri A
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri C
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri A
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri C
- Obligasi Dengan Opsi Konversi Wika Realty Tahun 2019

II. MTN

- Perum PNRI MTN I Tahun 2018
- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri A
- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri B
- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri A
- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri B
- MTN IV Perum Perumnas Tahun 2019
- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN VIII Perum Perumnas Tahun 2019
- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN IX Perum Perumnas Tahun 2019
- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri A
- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri B
- MTN I Gratama Finance Tahun 2022
- MTN Asian Bulk Logistics I Tahun 2022
- LTN Subordinasi I Bank Artha Graha Internasional Tahap I Tahun 2020
- MTN Bhakti Multi Artha I Tahun 2022
- MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021
- MTN Capital Financial Indonesia I Tahun 2021
- MTN Capital Strategic Invesco I Tahun 2022
- MTN Capital Strategic Invesco II Tahun 2022
- MTN City Retail Developments I Tahun 2021
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri A
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri B
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri C
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri A
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri B
- MTN V Hotel Indonesia Natour Tahun 2019
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri A
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri B
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri A

- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri B
- MTN III LEN Industri Tahun 2016
- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri A
- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri B
- MTN II Len Industri Tahun 2019 Seri A
- MTN Metro Healthcare Indonesia I Tahun 2021
- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri A
- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri B
- MTN II MNC Leasing Tahun 2018
- MTN Syariah Ijarah I MNC Pictures Tahun 2018
- MTN Pacific Strategic Financial I Tahun 2021
- MTN Pan Pacific Investama I Tahun 2022
- MTN Pan Pacific Investama II Tahun 2022
- MTN II PTPN V Tahun 2021
- MTN IV PTPN XIII Tahun 2016
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri C
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri E
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVII Tahun 2018
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVIII Tahun 2018 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri C
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri E
- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri A
- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap I Seri A
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri A
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri D
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri B
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri C
- Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 Seri B
- MTN II PT PNM Venture Capital tahun 2020
- Sukuk Mudharabah I PT PNM Ventura Syariah Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Jangka Menengah II PT PNM Ventura Syariah Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Jangka Menengah II PT PNM Ventura Syariah Tahun 2022 Tahap II
- MTN XIV PP Properti Tbk.
- MTN XV PP Properti Tahun 2022
- MTN XVI PP Properti Tahun 2022
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri A
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri B
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri C
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri A
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri B
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri C
- MTN I SKL Tahun 2017 Terkait KIK DRPT Seri A
- MTN II Tunas Baru Lampung Tahun 2017
- MTN III Tunas Baru Lampung Tahun 2018

- MTN Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap I
- MTN PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2023 Tahap II
- MTN Waskita Toll Road Tahun 2019
- MTN II Waskita Toll Road Tahun 2019
- MTN PT Waskita Karya Realty Tahun 2021
- MTN III Waskita Karya Realty Tahun 2022 Tahap I
- MTN III Waskita Karya Realty Tahun 2022 Tahap II
- MTN III Waskita Karya Realty Tahun 2022 Tahap III
- MTN III Waskita Karya Realty Tahun 2022 Tahap IV
- MTN IV Waskita Karya Realty Tahun 2022
- MTN PT Waskita Fim Perkasa Realti Tahun 2021
- MTN II Waskita Fim Perkasa Realti Tahun 2022
- MTN IX Wika Realty Tahun 2019
- MTN Pintar Nusantara Sejahtera I Tahun 2017

9) INFORMASI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Divisi Treasury
Grup Kustodian dan Wali Amanat
Gedung T Tower Lantai 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Tel: (021) 26966553,
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal Obligasi dimulai pada tanggal 14 Juni 2024 dan ditutup pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi dimulai pada tanggal 1 Juli 2024 dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.

6. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-040/OBL/KSEI/0424 tanggal 19 April 2024 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 10 Juli 2024.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

7. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

8. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

9. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 8 Juli 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, jika Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut.
b. Dalam hal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan pada hari kerja ke-3 (tiga) tiga sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan pembatalan tersebut.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri. Apabila uang pemesanan telah diterima Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Emiten/ Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

11. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening sebagai berikut:

PT KB Valbury Sekuritas	**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**
PT Bank Central Asia Tbk	Bank Mandiri
Cabang Kuningan, Jakarta	Cabang BEI
No. 217 308 0077	No. 104.00.00800.875
Atas nama: PT KB Valbury Sekuritas	Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2024 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 14.00. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Eagle High Plantations Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang The East
No. 180 387 727
Atas nama: PT Eagle High Plantations Tbk

12. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

13. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perserxoan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

   1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
      i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2 lampiran 11; dan

   2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

   i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   ii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   iii. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 2024 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi melalui *e-mail* berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Centre Lantai 41, Unit AC,
Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10220
Telepon: (021) 2509 8300
Faksimili: (021) 2509 8400
Website: kbvalbury.com
Email: dcm.ib@kbvalbury.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
Website: trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 139/T&P/VI/24

Jakarta, 27 Juni 2024

Kepada:

1. **Ketua Dewan Komisioner**
   Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   Gedung Sumitro Djojohadikusumo
   Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
   Jakarta 10710
   u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

2. **PT Eagle High Plantations Tbk**
   Gedung Rajawali Place Lantai 28
   Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
   Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi
   Kota Administrasi Jakarta Selatan
   DKI Jakarta
   Jakarta 12910
   u.p.: **Direktur Utama**

Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPM**"), **PT Eagle High Plantations Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I "Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I EHP**") dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I Tahun 2024** dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Jl. Gandaria Tengah III No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, Indonesia
T : +62 21 722 7736, 722 7737, 720 8172, 720 2516
F : +62 21 724 4579, 725 7403
E : general@tumbuanpartners.com | www.tumbuanpartners.com

2. Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan di kemudian hari.

(selanjutnya Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I EHP dan Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I secara bersama-sama disebut "**PUB I**").

Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I ini tidak dijamin secara khusus dengan hak agunan atas kebendaan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Perseroan, tetapi hanya dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yang mengatur bahwa seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

PUB I ini telah (i) memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 001/BOC/INT/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dan PT Radana Bhaskara Finance Tbk selaku kreditur sebagaimana termaktub dalam Surat No. 159/SRT-MKT-HO/RBF/IV/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Surat Tanggapan Permohonan *Waiver* an/ PT Eagle High Plantations Tbk (PT EHP); (ii) menyampaikan pemberitahuan rencana PUB I kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagaimana termuat dalam Surat Perseroan No. 126/Fin-EHP/JKT/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Pemberitahuan dan Persetujuan Penerbitan Obligasi Perseroan.

Dana hasil Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk:

1. Sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman dari fasilitas kredit di lembaga keuangan bukan bank dan biaya-biaya terkait yang timbul dari pelunasan fasilitas tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kreditur	PT Chandra Sakti Utama Leasing
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	Tidak Terafiliasi
Jumlah Fasilitas Kredit (**untuk Perseroan dan 6 Entitas Anak Perseroan**)[1)]	Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah)
Posisi Jumlah Pinjaman (per 31 Desember 2023)	Rp216.703.450.000,- (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)
Posisi Jumlah Pinjaman (per 31 Desember 2023)	Rp209.777.000.000,- (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)
Jumlah Pembayaran Pinjaman **(khusus bagian Perseroan)**	Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah)
Sisa Jumlah Pinjaman Setelah Pembayaran Pinjaman	Rp164.777.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)
Tingkat Bunga	15% (lima belas persen) per tahun
Jangka Waktu Pinjaman	1 Tahun
Jatuh Tempo	31 Juli 2024
Penggunaan Pinjaman	Modal kerja
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pelunasan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau pelunasan dipercepat (tidak terdapat sanksi apabila pelunasan dipercepat).

Sumber dana untuk pembayaran bunga/ denda	Kas internal Perseroan
Nomor dan tanggal perjanjian	Akta Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang Dengan Jaminan (*Factoring With Recourse*) No. 01 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dihadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum IX Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Anjak Piutang (*Factoring With Recourse*) No. 87 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta

[1] ***Jumlah fasilitas kredit merupakan fasilitas revolving dan dapat diperpanjang***

2. Sisanya akan digunakan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian CPO dan FFB dari pihak ketiga pada kuartal III dan IV tahun 2024.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya guna membiayai rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I ("**Prospektus**").

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"); dan
2. memperoleh persetujuan RUPO;

serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Dalam hal terdapat dana hasil Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana hasil Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**PEFINDO**") dengan peringkat "**$_{id}$A-**" sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RC-501/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahun 2024 Periode 16 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I ini akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku penjamin pelaksana emisi obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) oleh PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku penjamin emisi obligasi ("**Penjamin Emisi**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi obligasi sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Eagle High**

Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 21 tanggal 19 April 2024 yang dibuat di hadapan Desty Haninditia Puti S.H., M.Kn., selaku notaris pengganti dari Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 29** tanggal 17 Mei 2024, **Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 36** tanggal 11 Juni 2024 dan **Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 101** tanggal 27 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 20** tanggal 19 April 2024 dibuat di hadapan Desty Haninditia Puti S.H., M.Kn., selaku notaris pengganti dari Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan *junctis* **Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 28** tanggal 17 Mei 2024, **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 35** tanggal 11 Juni 2024 dan **Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 100** tanggal 27 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**").

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi, Wali Amanat dan PEFINDO tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Profesi Penunjang No. 013/BOD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 Perihal Penunjukan Konsultan Hukum - Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan PT Eagle High Plantations Tbk. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka PUB I ini adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan entitas anak Perseroan yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia (yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih) yaitu:

i. PT Bumilanggeng Perdanatrada ("**BLP**");
ii. PT Bumihutani Lestari ("**BHL**");
iii. PT Adhyaksa Dharmasatya ("**ADS**");
iv. PT Satria Manunggal Sejahtera ("**SMS**")
v. PT Pesonalintas Surasejati ("**PLS**");
vi. PT Karyapratama Agrisejahtera ("**KAPAG**");
vii. PT Singaland Asetama ("**SGA**");
viii. PT Jaya Mandiri Sukses ("**JMS**");
ix. PT Manunggal Adi Jaya ("**MAJ**");
x. PT Suryabumi Tunggal Perkasa ("**STP**");

xi. PT Saka Kencana Sejahtera (“**SKS**”);
xii. PT Tandan Sawit Papua(“**TSP**”);
xiii. PT Multikarya Sawit Prima ("**MSP**");
xiv. PT Varia Mitra Andalan ("**VMA**");
xv. PT Papua Sawita Raya ("**PSR**");
xvi. PT Sukses Hijau Mandiri ("**SHM**");
xvii. PT Seguri Serasau Sejahtera ("**SGSS**");
xviii. PT Palm Agro Katulistiwa ("**PAK**");
xix. PT Hamparan Unggul Mandiri ("**HUM**");
xx. PT Indah Permai Sawita ("**IPS**");
xxi. PT Sawita Perdana Nusantara ("**SPN**");
xxii. PT Intaran Suraya Agri ("**ISA**")

(selanjutnya (i) BLP; (ii) BHL; (iii) ADS; (iv) SMS; (v) PLS; (vi) KAPAG; (vii) SGA; (viii) JMS; (ix) MAJ; (x) STP; (xi) SKS; (xii) TSP; (xiii) MSP; secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas Anak Aktif**" serta (xiv) VMA; (xv) PSR; (xvi) SHM; (xvii) SGSS; (xviii) PAK; (xix) HUM; (xx) IPS; (xxi) SPN; dan (xxii) ISA; yang tidak aktif, secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas Anak Non Aktif**" (selanjutnya Entitas Anak Aktif dan Entitas Anak Non-Aktif secara bersama-sama disebut sebagai “**Entitas Anak Indonesia**”) serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan Entitas Anak Indonesia dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM dan entitas anak Perseroan yang tunduk pada hukum asing yakni:

i. Green Eagle Holdings Pte. Ltd. (“**GEH**”); dan
ii. Green Eagle Singapore Pte. Ltd. (“**GES**”)

yang didasarkan pada pendapat hukum dari konsultan hukum asing (selanjutnya (i) GEH dan (ii) GES secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas Anak Asing**")

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak Indonesia sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 27 Juni 2024 (“**LPSH**”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”).

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan/penyesuaian informasi, bersama ini kami sampaikan revisi terhadap pendapat hukum yang telah kami sampaikan dengan No. 130/T&P/VI/24 tanggal 11 Juni 2024. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum No. 130/T&P/VI/24 tanggal 11 Juni 2024 tersebut dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran

dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan dan Entitas Anak Indonesia maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak Indonesia dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;

2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka PUB I adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;

3. semua pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh anggota direksi dan dewan komisaris, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Entitas Anak Indonesia serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak Indonesia adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;

4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;

5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan

7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Entitas Anak Indonesia dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak Indonesia mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

8. dalam melakukan Pemeriksaan Hukum terhadap perjanjian-perjanjian, dimana Perseroan merupakan suatu pihak di dalamnya yang diatur bukan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, kami hanya dapat melakukan pengungkapan secara umum serta tidak dapat memberikan pendapat hukum apapun terkait dengan ketentuan dari perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk namun tidak terbatas kepada pelaksanaan dan keberlakuannya; dan

9. Pendapat Hukum kami yang berkenaan dengan Entitas Anak Asing yang didirikan di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia didasarkan pada pendapat hukum dari konsultan hukum yang berwenang sesuai dengan yurisdiksi dari Entitas Anak Asing.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Konsultan Hukum Independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I yakni sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum Mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Eagle High Plantations Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantations Tbk. No. 2 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0062468 tanggal 11 Mei 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 ("**Akta No. 2/2023**").

   Anggaran dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk No. 61 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0444896 tanggal 3 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0150428.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 September 2021 *juncto* Akta No. 2/2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk: (i) UUPT; (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik; (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iv) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka kecuali terkait belum dicantumkannya pengungkapan atas kegiatan usaha penunjang Perseroan pada anggaran dasar Perseroan.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   Kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**"). Lebih lanjut, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai

sanksi yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan dalam hal belum melakukan penyesuaian kegiatan usaha dengan KBLI 2020.

Perseroan telah memohonkan persetujuan untuk menyesuaikan kegiatan usaha dengan KBLI 2020 pada RUPS Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (Pertama) tanggal 16 Mei 2024 dan RUPSLB Perseroan (Kedua) tanggal 27 Mei 2024 namun kuorum kehadiran pada pelaksanaan kedua RUPSLB tersebut tidak terpenuhi. Adapun sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 038/BWPT/Corsec/VI/24 tanggal 3 Juni 2024, Perseroan telah menyampaikan permohonan kepada OJK sehubungan dengan penetapan kuorum untuk RUPSLB Perseroan (Ketiga).

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan untuk 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BW Plantation Tbk No. 33 tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-13633.40.20.2016 tanggal 29 Desember 2014 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-10292.40.21.2014 tanggal 24 Desember 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136184.40.80.2014 tanggal 29 Desember 2014 *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham tertanggal 31 Mei 2024, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**5.000.000.000.000**	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600	37,7
2. FIC Properties Sdn Bhd	11.664.357.670	1.166.435.767.000	37
3. Henderi (Direktur Utama)	8.000.000	800.000.000	0,03
4. Yeoh Lean Khai (Direktur)	2.683.300	268.330.000	0,01
5. Masyarakat < 5%	7.561.205.714	756.120.571.400	23,98
6. Perseroan (saham tresuri)	402.922.800	40.292.280.000	1,28
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	**31.525.291.000**	**3.152.529.100.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**18.474.709.000**	**1.847.470.900.000**	**-**

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 13 November 2023, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Peter Sondakh.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Abed Nego
Komisaris	:	Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen	:	Yohanes Wahyu Saronto

Direksi

Direktur Utama	:	Henderi
Direktur	:	Andrew Haryono
Direktur	:	Yeoh Lean Khai

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2023 telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Perseroan juga telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

Perseroan telah membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"). Perseroan juga telah memiliki piagam komite audit yang telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan mempunyai piagam Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut masih berlaku kecuali untuk: (i) Izin Operasi Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang sedang dalam proses perpanjangan dan akan menjadi Izin Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS); (ii) Izin Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang sedang dalam proses perpanjangan pada instansi terkait; (iii) Izin Pembuangan Limbah Cair yang sedang dalam proses perpanjangan dan pengintegrasian dengan persetujuan lingkungan yang sedang dimohonkan oleh Perseroan kepada instansi terkait; dan (iv) Surat Izin Pemakaian Air Permukaan yang sedang dalam proses perpanjangan pada instansi terkait.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 39 *juncto* Pasal 103 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan ("**Permen ESDM No. 11/2021**"), apabila perusahaan tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan berupa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri atau menyampaikan laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sehubungan dengan instalasi dengan total kapasitas mencapai 500 kilowatt akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 339 *juncto* Pasal 297 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan terminal khusus untuk kepentingan sendiri tanpa memenuhi perizinan berusaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

   Berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf c Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa perizinan berusaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun

4

dan pidana denda paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha Usaha serta telah melakukan sebagian pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha yaitu untuk 3 (tiga) periode.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku di tempat dimana karyawan Perseroan dipekerjakan.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan: (i) tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan; (ii) telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UUWLK**"); (iii) telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan masih berlaku; dan (iv) telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**").

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa penyertaan saham pada Entitas Anak Indonesia, hak-hak atas tanah dan bangunan khususnya tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan, dan hak atas kekayaan intelektual setelah diteliti bukti kepemilikannya adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan telah diperoleh sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sebagian aset/harta kekayaan material tersebut telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal pendapat hukum ini diterbitkan, polis asuransi atas sebagian aset/harta kekayaan material tersebut masih berlaku serta telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta kekayaan material Perseroan dalam bentuk: (i) hak guna bangunan sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (ii) deposito berjangka (*time deposit*) sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan (iii) gadai saham JMS dan MAJ milik Perseroan untuk kepentingan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

dimana penjaminan terhadap aset/harta kekayaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksekusi terhadap seluruh aset Perseroan yang sedang dijaminkan sebagaimana disebutkan di atas untuk kepentingan masing-masing perusahaan akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan serta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen dan didukung dengan konfirmasi dari Perseroan, perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Perseroan, perjanjian-perjanjian material yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak terafiliasi tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang sekiranya dapat menghalangi pelaksanaan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi dan/atau pemegang saham publik.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:

    a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
    b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
    c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

11. Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I ini tidak dijamin secara khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, hak pemegang obligasi adalah *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

12. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB I. Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I ini telah memenuhi persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Prospektus.

    Pelaksanaan rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I untuk modal kerja berupa pembelian CPO dan FFB tidak akan melibatkan pihak terafiliasi Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

    Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I kepada OJK dan Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan diserahkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I telah direalisasikan dan apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I, maka Perseroan wajib meminta persetujuan RUPO terlebih dahulu serta melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/2015.

14. Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I ini, Perseroan telah menandatangani:

    a. **Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 22** tanggal 19 April 2024, yang dibuat di hadapan Desty Haninditia Puti S.H., M.Kn., selaku pengganti Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta

Selatan *junctis* **Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 30** tanggal 17 Mei 2024, **Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 37** tanggal 11 Juni 2024 dan **Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 No. 102** tanggal 27 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**;**
c. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
d. **Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 19** tanggal 19 April 2024, yang dibuat di hadapan Desty Haninditia Puti S.H., M.Kn., selaku pengganti Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
e. **Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-040/OBL/KSEI/0424** tanggal 19 April 2024, yang dibuat di bawah tangan bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang mana Perseroan setuju untuk mendaftarkan Obligasi di KSEI dan KSEI setuju untuk mendaftarkan Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini.
f. **Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantation Tahap I Tahun 2024 No. 103** tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi maupun hubungan kredit dengan Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat serta tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

15. Aspek hukum Perseroan yang terdapat dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.

B. Pendapat Hukum Mengenai Entitas Anak Indonesia

1. Masing-masing Entitas Anak Indonesia adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak berkedudukan di Jakarta Selatan kecuali SGA dan KAPAG yang berkedudukan di Kalimantan Selatan.

Anggaran dasar yang berlaku dari masing-masing Entitas Anak Indonesia telah dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

PLS

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pesonalintas Surasejati No. 08 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Linda Hermawati, S.H., Notaris di Jakarta;

KAPAG

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Karyapratama Agrisejahtera No. 22 tanggal 12 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Linda Hermawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Karyapratama Agrisejahtera No. 17 tanggal 12 November 2009 yang dibuat di hadapan Linda Hermawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Karyapratama Agrisejahtera No. 04 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

MAJ

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Manunggal Adi Jaya No. 66 tanggal 26 April 2011 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LLM, Notaris di Jakarta;

STP

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 07 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Linda Hermawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 21 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

MSP

- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT Multikarya Sawit Prima No. 3 tanggal 4 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Haryanti, S.H., Notaris di Padang;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Biasa PT Multikarya Sawit Prima No. 04 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Fitrilia Novia Djamili, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Biasa PT Multikarya Sawit Prima No. 13 tanggal 22 April 2014 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta;

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multikarya Sawit Prima No. 03 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multikarya Sawit Prima No. 06 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

PSR

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 5 April 2007 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Papua Sawita Raya No. 06 tanggal 30 November 2007, yang keduanya dibuat di hadapan Siti Rachmawati S.H., Notaris di Jakarta;

SHM

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sukses Hijau Mandiri No. 70 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat oleh Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Sukses Hijau Mandiri No 17 tanggal 22 April 2014, yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian, Notaris di Jakarta;

SGSS

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Seguri Serasau Sejahtera No. 03 tanggal 7 Januari 2008 *juncto* Akta Perbaikan No. 126 tanggal 29 Maret 2008, yang keduanya dibuat oleh Yustina Pratini S.H., Notaris di Sanggau;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Seguri Serasau Sejahtera No. 237 tanggal 13 Juni 2014, yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta;

PAK

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Palm Agro Katulistiwa No. 21 tanggal 27 Desember 2006 yang dibuat oleh Dian Imelda pengganti dari Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Palm Agro Katulistiwa No. 2 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Palm Agro Katulistiwa No. 14 tanggal 22 April 2014, yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Palm Agro Katulistiwa No. 236 tanggal 13 Juni 2014, yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta;

HUM

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Hamparan Unggul Mandiri No. 10 tanggal 22 April 2014, yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta;

IPS

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indah Permai Sawita No. 11 tanggal 22 April 2014, yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta;

SPN

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Sawita Persada Nusantara No. 18 yang dibuat oleh Dini Lastari Siburian S.H, Notaris di Jakarta;

ISA

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 31 tanggal 19 Januari 2009 yang dibuat oleh Josef Sunar Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Intaran Surya Agri No. 5684 tanggal 29 November 2013 yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Intaran Surya Agri No. 53 tanggal 25 April 2016 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta;

belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

Selama pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Entitas Anak Indonesia telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali Entitas Non-Aktif yang belum menjalankan/melakukan kegiatan usahanya secara komersial.

   Kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Entitas Anak Indonesia telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana termaktub Peraturan KBLI 2020.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham dalam masing-masing Entitas Anak Indonesia telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham masing-masing Entitas Anak Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak Indonesia.

4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak Indonesia telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak Indonesia dan telah diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak Indonesia, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak Indonesia: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak Indonesia, masing-masing Entitas Anak Indonesia telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan izin-izin material tersebut masih berlaku kecuali: (i) ADS yang sedang dalam proses perpanjangan atas izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; (ii) BHL dan MAJ yang sedang dalam proses perpanjangan atas izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; (iii) PLS yang sedang dalam proses pendaftaran ulang Izin Usaha Perkebunan dan sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan Izin Operasi Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri menjadi IUPTLS; (iv) TSP sedang dalam proses perolehan Sertifikat Laik Operasi; dan (v) SKS saat ini belum perlu melakukan proses pendaftaran ulang Izin Usaha Perkebunan kecuali terdapat perubahan luas lahan perkebunan pada saat diterbitkannya Hak Guna Usaha atas nama SKS untuk lahan perkebunan kelapa sawit di atas lahan Kawasan Hutan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan SKS tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi yang masih berlaku.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**PP No. 22/2021**"), untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("**Limbah B3**"), setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:

   a. standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau
   b. rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi: (i) penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan (ii) instansi pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 510 PP No. 22/2021, sanksi administratif berupa teguran tertulis diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 *juncto* Pasal 103 Permen ESDM No. 11/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, apabila perusahaan tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan berupa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri atau menyampaikan laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sehubungan dengan instalasi dengan total kapasitas mencapai 500 kilowatt akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (4) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, setiap Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Dalam hal Instalasi Pengadaan Tenaga Listrik beroperasi tidak memiliki sertifikat laik operasi, maka pihak tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, denda dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak Indonesia telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha untuk 3 periode.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak Non Aktif tidak mempunyai tenaga kerja.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak Aktif: (i) tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan; (ii) telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan UUWLK; (iii) telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan masih berlaku; dan (iv) telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Entitas Anak Indonesia antara lain berupa saham-saham perusahaan, hak-hak atas tanah dan kendaraan roda empat setelah diteliti bukti kepemilikanya adalah benar terdaftar atas nama Entitas Anak Indonesia dan karenanya memberi hak kepada Entitas Anak Indonesia sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material Entitas Anak Indonesia tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Entitas Anak Indonesia tidak memiliki aset/harta kekayaan berupa hak atas kekayaan intelektual.

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta kekayaan (i) ADS, BHL, BLP, SMS, KAPAG, SGA, STP, PLS dan MSP sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, (ii) JMS sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (iii) TSP sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Radana Bhaskara Finance Tbk, (iv) ADS, BHL, JMS, TSP, STP dan PLS sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Chandra Sakti Utama Leasing dan (v) BHL sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Globalindo Multifinance.

Penjaminan terhadap aset ADS, BHL, BLP, SMS, KAPAG, SGA, STP, PLS, MSP, JMS dan TSP tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing ADS, BHL, BLP, SMS, KAPAG, SGA, STP, PLS, MSP, JMS dan TSP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap seluruh aset ADS, BHL, BLP, SMS, KAPAG, SGA, STP, PLS, MSP, JMS dan TSP dalam bentuk hak guna bangunan dan hak guna usaha yang sedang dijaminkan sebagaimana disebutkan di atas untuk kepentingan masing-masing perusahaan akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha ADS, BHL, BLP, SMS, KAPAG, SGA, STP, PLS, MSP, JMS dan TSP.

10. Perjanjian-perjanjian material yang dibuat antara Entitas Anak Indonesia dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing Entitas Anak Indonesia dan karenanya sah dan mengikat Entitas Anak Indonesia yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Entitas Anak Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

    Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Entitas Anak Indonesia yang dapat menghalangi dan/atau merugikan hak pemegang pemegang saham publik Perseroan, kecuali adanya pembatasan sehubungan dengan kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari para kreditur atas pembagian dividen pada perjanjian kredit MAJ dan STP yang sekiranya dapat merugikan kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham publik.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Entitas Anak Indonesia, masing-masing Entitas Anak Indonesia sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:

    a. Entitas Anak Indonesia tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
    b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Entitas Anak Indonesia di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
    c. Entitas Anak Indonesia tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Entitas Anak Indonesia merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu

peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Entitas Anak Indonesia terhadap pihak manapun

C. Pendapat Hukum tentang Entitas Anak Asing

Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana termaktub dalam *Legal Opinion* No. 2024-00081 tanggal 19 April 204 yang diterbitkan oleh Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Quadrant Law LLC yang berwenang untuk memeriksa serta memberikan pendapat hukum berdasarkan hukum negara Singapura:

A. <u>GEH</u>

1. GEH adalah perusahaan swasta yang secara sah dan didirikan dengan modal saham yang telah dibayar penuh dan dengan pertanggung jawaban secara terbatas berdasarkan hukum negara Singapura;

2. Para Direktur dari GEH, sampai dengan tanggal 15 April 2024 adalah Andrew Haryono dan Juanda;

3. Sekretaris dari GEH sampai dengan tanggal 15 April 2024 adalah Loh Li Ping (NRIC No. S7625605E);

4. Modal disetor dan ditempatkan GEH adalah USD 184.578.314 yang terdiri 184.578.314 saham biasa dan pemegang saham tunggal yang berhak atas seluruh saham GEH per tanggal 15 April 2024 adalah Perseroan.

5. Anggaran dasar GEH menyebutkan maksud dan tujuan kegiatan usaha. Adapun GEH memiliki kapasitas dan kekuatan hukum yang secara penuh berdasarkan *Singapore Companies Act 1967* untuk melakukan seluruh kegiatan-kegiatan bisnis dengan batasan maksud dan tujuan pada anggaran dasar, dengan tunduk pada perolehan izin berdasarkan peraturan yang relevan. Tercatat bahwa salah satu maksud dan tujuan dari GEH adalah melakukan bisnis atau aktivitas sehubungan dengan perkebunan kelapa sawit dan instrustri minya sawit dimanapun di dunia.

6. Berdasarkan hasil penelusuran elektronik terhadap litigasi GEH, (i) tidak terdapat keputusan yang diambil untuk membubarkan atau mengajukan likuidasi atau pengakhiran atau masuknya pengurus atau pengakhirkan kegiatan usaha, (ii) tidak terdapat pengajuan insolvensi di pengadilan Singapura manapun oleh atau terhadap GEH, (iii) tidak terdapat dokumen pembubaran yang disampaikan pada ACRA oleh GEH dan (iv) tidak terdapat pengajuan insolvensi yang dibuat terhadap atau oleh direktur yang menjabat di Singapura.

7. Berdasarkan hasil penelusuran elektronik terhadap GEH, saat ini tidak ada tindakan hukum, perkara dengan pihak pemerintah dalam bentuk perdata atau pidana yang sedang berlangsung, berpotensi atau tertunda terhadap GEH, dan tidak terdapat keputusan yang diterbitkan terhadap GEH atau direktur yang menjabat, sejak pendirian GEH.

B. GES

1. GES adalah perusahaan swasta yang secara sah dan didirikan dengan modal saham yang telah dibayar penuh dan dengan pertanggung jawaban secara terbatas berdasarkan hukum negara Singapura;

2. Para Direktur dari GES, sampai dengan tanggal 15 April 2024 adalah Andrew Haryono dan Juanda;
3. Sekretaris dari GES sampai dengan tanggal 15 April 2024 adalah Loh Li Ping (NRIC No. S7625605E);

4. Modal disetor dan ditempatkan GES adalah SGD 19.316.913 yang terdiri 19.316.913 saham biasa dan pemegang saham tunggal yang berhak atas seluruh saham GES per tanggal 15 April 2024 adalah GEH.

5. Anggaran dasar GES tidak menjelaskan objek dan bisnis utama dan aktivitas bisnis utama dari GES. Oleh karenanya GES memiliki kapasitas dan kekuatan hukum yang secara penuh berdasarkan *Singapore Companies Act 1967* untuk melakukan seluruh kegiatan-kegiatan bisnis dengan selalu tunduk pada perolehan dari setiap izin-izin yang relevan berdasarkan setiap peraturan yang relevan;

6. Berdasarkan hasil penelusuran elektronik terhadap litigasi GES, (i) tidak terdapat keputusan yang diambil untuk membubarkan atau mengajukan likuidasi atau pengakhiran atau masuknya pengurus atau pengakhirkan kegiatan usaha, (ii) tidak terdapat pengajuan insolvensi di pengadilan Singapura manapun oleh atau terhadap GES, (iii) tidak terdapat dokumen pembubaran yang disampaikan pada ACRA oleh GES dan (iv) tidak terdapat pengajuan insolvensi yang dibuat terhadap atau oleh direktur yang menjabat di Singapura.

7. Berdasarkan hasil penelusuran elektronik terhadap GES, saat ini tidak ada tindakan hukum, perkara dengan pihak pemerintah dalam bentuk perdata atau pidana yang sedang berlangsung, berpotensi atau tertunda terhadap GEH, dan tidak terdapat keputusan yang diterbitkan terhadap GES atau direktur yang menjabat, sejak pendirian GES.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I EHP berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap I tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

IV. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan OJK dan Perseroan.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS

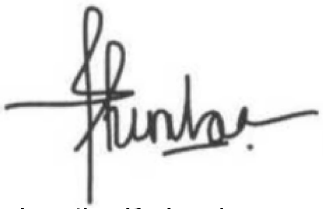

Jennifer B. Tumbuan
Senior Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

PT Eagle High Plantations Tbk
dan Entitas Anak/*and its Subsidiaries*

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022/
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*
DAFTAR ISI/*TABLE OF CONTENTS*

	Halaman/ *Page*
Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Eagle High Plantations Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022/ *The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Eagle High Plantations Tbk and Its Subsidiaries for the Years Ended December 31, 2023 and 2022*	
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022/ ***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*** *– For the Years Ended December 31, 2023 and 2022*	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/*Consolidated Statements of Financial Position*	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/*Consolidated Statements of Changes in Equity*	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/*Consolidated Statements of Cash Flows*	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/*Notes to Consolidated Financial Statements*	6

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Business License No. 1353/KM.1/2016
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T +62-21-570 8111
F +62-21-572 2737

MOORE

Laporan Auditor Independen

No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/VI/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Eagle High Plantations Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Eagle High Plantations Tbk dan entitas anaknya (Grup), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/VI/2024

The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors
PT Eagle High Plantations Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Eagle High Plantations Tbk and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2023 and 2022, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023 and 2022 and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

An independent member of Moore Global Network Limited - members in principal cities throughout the world

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengujian Penurunan Nilai Aset Tetap

Mengacu pada Catatan 3s dan 3w (Informasi Kebijakan Akuntansi Material atas Aset Tetap dan Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan), Catatan 4d (Penggunaan Estimasi dan Asumsi Manajemen – Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan) dan Catatan 16 (Aset Tetap) atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Grup memiliki aset tetap dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp 3.198.863 juta pada tanggal 31 Desember 2023, yang mewakili 31% dari jumlah aset Grup. Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai untuk aset tetap yang dimiliki oleh Grup yang berdasarkan analisis indikator penurunan nilai yang diidentifikasi oleh manajemen untuk Grup.

Kami fokus pada area ini karena signifikannya nilai tercatat aset tetap dan menetapkan pengujian penurunan nilai merupakan hal audit utama karena proses penilaian memerlukan pertimbangan signifikan manajemen dan perhitungan jumlah terpulihkan aset tetap menggunakan asumsi dengan estimasi tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Prosedur kami sehubungan dengan pengujian penurunan nilai aset tetap meliputi:

- Menilai indikator penurunan nilai aset tetap yang diidentifikasi oleh manajemen untuk Grup.

- Memeroleh laporan penilaian eksternal dan mengevaluasi ruang lingkup kerja, kualifikasi, kompetensi, dan independensi dari penilai eksternal tersebut. Melakukan diskusi dengan penilai eksternal, memahami metodologi dan dasar penilaian serta melakukan verifikasi atas dasar penilaian dan kewajaran asumsi yang digunakan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Impairment Testing of Property, Plant and Equipment

Refer to Notes 3s and 3w (Material Accounting Policy Information on Property, Plant and Equipment and Impairment of Non-Financial Assets), Note 4d (Management Use of Estimates and Assumptions – Impairment of Non-Financial Assets) and Note 16 (Property, Plant and Equipment) to the consolidated financial statements.

The Group has property, plant and equipment with net carrying amount of Rp 3,198,863 million as of December 31, 2023 representing about 31% of the Group's total assets. The Group has performed impairment testing for property, plant and equipment held by the Group based on the analysis of indicators for impairment identified by management for the Group.

We focused on this area due to significant amount of property, plant and equipment and consider the impairment testing as a key audit matter because the assessment process requires significant management judgment and the calculation of the recoverable amount of property, plant and equipment is based on assumptions that are subject to higher level of estimation uncertainty.

How our audit addressed the key audit matter

Our procedures in relation to impairment testing of property, plant and equipment follows:

- Assessed the indicators of impairment of property, plant and equipment identified by management for the Group.

- Obtained the external valuation report and evaluated the work scope, qualifications, competency, and independence of the external valuer. Performed discussion with external valuer, understand the methodologies and the used basis of assessment and also verified the basis of the assessment and the reasonableness of the assumptions used.

- Mereviu kecukupan pengungkapan yang dibuat atas penilaian penurunan nilai ini, termasuk asumsi-asumsi yang paling sensitif terhadap hasil pengujian penurunan nilai, khususnya asumsi yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap penentuan jumlah terpulihkan untuk aset tetap.

- Reviewed the adequacy of the disclosures made on these impairment assessments, including those assumptions to which the outcome of the impairment test is most sensitive, specifically, those that have the most significant effect on the determination of the recoverable amount of property, plant and equipment.

Pengujian Penurunan Nilai Goodwill

Mengacu pada Catatan 3t dan 3l (Informasi Kebijakan Akuntansi Material atas Aset Tidak Berwujud dan Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan), Catatan 4c (Penggunaan Estimasi dan Asumsi Manajemen – Penurunan Nilai Goodwill) dan Catatan 17 (Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya - Bersih) atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Grup memiliki Goodwill dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp 960.285 juta pada tanggal 31 Desember 2023, sekitar 9% dari jumlah aset Grup dan terdiri dari jumlah tercatat bruto Rp 1.154.759 juta dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 194.474 juta. Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai untuk goodwill yang muncul dari akuisisi entitas anak. Uji penurunan nilai atas goodwill wajib dilakukan sedikitnya satu tahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai Goodwill membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Kami menganggap penilaian penurunan nilai Goodwill menjadi hal audit utama karena penilaian penurunan nilai yang disiapkan oleh Grup berisi tingkat pertimbangan tertentu dan melibatkan asumsi peristiwa masa depan yang secara inheren tidak pasti. Hal ini mengharuskan kami untuk menggunakan tingkat pertimbangan yang signifikan dalam mengevaluasi penilaian penurunan nilai Grup.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

- Mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian atas penyusunan model penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas;

- Melakukan tinjauan retrospektif dengan membandingkan hasil aktual selama tahun berjalan dengan proyeksi tahun lalu untuk menilai kewajaran proses penganggaran Grup;

Impairment Testing of Goodwill

Refer to Notes 3t and 3l (Material Accounting Policy on Intangible Assets - Goodwill and Impairment of Non-Financial Assets), Note 4c (Management use of Estimates and Assumptions – Impairment of Goodwill) and Note 17 (Goodwill and Other Intangible Assets - Net) to the consolidated financial statements.

The Group has Goodwill with net carrying amount of Rp 960,285 million as of December 31, 2023 representing about 9% of the Group's total assets and comprise of gross carrying amount of Rp 1,154,759 million net of allowance for impairment losses of Rp 194,474 million. The Group has performed impairment testing for goodwill arising from acquisitions of subsidiaries. Impairment testing of goodwill is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indications of impairment. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

We consider the impairment assessment of goodwill to be a key audit matter due to the impairment assessment prepared by the Group contained certain degree of judgment and involved assumptions of future events that are inherently uncertain. It required us to exercise a significant level of judgment in evaluating the Group's impairment assessment.

How our audit addressed the key audit matter

- We evaluated the design and implementation of the controls over the preparation of the valuation model used to determined recoverable amount of the cash generating units;

- We performed a retrospective review by comparing the actual result during the current year with those included in the prior year's forecasts in order to assess the reasonableness of the Group's budgeting process;

- Mengevaluasi asumsi yang digunakan dalam penyusunan prakiraan arus kas yang didiskontokan, termasuk proyeksi tingkat pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran di masa depan dan tingkat diskonto dengan mengacu pada pemahaman kami tentang bisnis, tren historis dan informasi industri yang tersedia serta data pasar; dan

- We evaluated the assumptions used in the preparation of the discounted cash flow forecast, including projected future growth rates for income and expenses and discount rate with reference to our understanding of the business, historical trends and available industry information and market data; and

- Melakukan analisa sensitivitas atas asumsi utama, termasuk proyeksi profitabilitas dan tingkat diskonto yang digunakan dalam perkiraan arus kas yang didiskontokan dan menilai apakah ada indikator bias manajemen dalam pemilihan asumsi ini

- We performed sensitivity analyses on the key assumption, including projected profitability and the discount rate, adopted in the discounted cash flow forecast and assessing whether there were any indicators of management bias in the selection of these assumptions.

Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00048/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan No. 00619/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian.

Other Matter

Prior this report, we have issued the Independent Auditor's Report No. 00048/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/III/2024 dated March 1, 2024 and No. 00619/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/V/2024 dated May 20, 2024 on the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2023 and 2022, on which we express an unmodified opinion. In connection with the Company's plan to conduct the Continuing Public Offering of Shelf-Registered Bonds I of Eagle High Plantations Phase I Year 2024, the Group has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2023 and 2022, accompanied by some changes in and additional disclosures to the consolidated financial statements as described in Note 49 to the consolidated financial statements.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.
Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information consists of information contained in the Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS

Maria Leckzinska
Izin Akuntan Publik No. AP.0155/
Certified Public Accountant License No. AP.0155

12 Juni 2024/*June 12, 2024*

EAGLE HIGH
PLANTATIONS

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/*Name*	:	Henderi Djunaidi
Alamat Kantor/*Office address*	:	Gedung Rajawali Place Lantai 28 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4 Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu identitas lain/*Residential Address/in accordance with Personal Identity Card*	:	Jl. Pulo Genteng VI Blok Q1 No. 1 RT.004 RW.011 Kel. Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat
Nomor Telepon/*Telephone number*	:	(021) 86658828
Jabatan/*Title*	:	Direktur Utama/ *President Director*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES

I, the undersigned:

declare that:

1. Responsible for the preparation and presentation of the Company's and its Subsidiaries' consolidated financial statements for the years ended December 31, 2023 and 2022.

2. The Company's and its Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's and its Subsidiaries' consolidated financial statements, and

   b. The Company's and its Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.

4. Responsible for the Company's and its Subsidiaries' internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 12 Juni 2024 / *June 12, 2024*

Henderi Djunaidi
Direktur Utama/ *President Director*

PT Eagle High Plantations Tbk
Gedung Rajawali Place Lantai 28,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12910
T. +62 21 86658828
www.eaglehighplantations.com

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
ASET				**ASSETS**
ASET LANCAR				**CURRENT ASSETS**
Kas dan bank	27.378	3g, 6	108.876	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 9.669 dan Rp 13.037 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	32.137	3h, 3k, 4b, 7	41.005	Trade accounts receivable - third parties - net of allowance for impairment of Rp 9,669 and Rp 13,037 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Piutang plasma	334.925	3o, 8	314.222	Plasma receivables
Piutang lain-lain	10.008	10	13.553	Other receivables
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.144 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	214.132	3m, 12	484.150	Inventories - net of allowance for decline in value of Rp 3,144 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Pajak dibayar dimuka	64.951	9	86.849	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	119.427	3n, 11	129.240	Prepaid expenses
Uang muka kepada pemasok - pihak ketiga	126.236		165.711	Advances paid to suppliers - third parties
Aset biologis	286.700	3q, 13	292.957	Biological assets
Aset lancar lain-lain	84.115	3p, 14	247.206	Other current assets
Jumlah Aset Lancar	1.300.009		1.883.769	**Total Current Assets**
ASET TIDAK LANCAR				**NON CURRENT ASSETS**
Tanaman produktif		3r, 15		Bearer Plants
Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 3.107.548 dan Rp 3.193.542 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	2.942.089		3.944.232	Mature plantations - net of accumulated amortization of Rp 3,107,548 and Rp 3,193,542 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Tanaman belum menghasilkan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 13.345 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	18.923		16.815	Immature plantations - net of allowance for impairment of Rp 13,345 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Pembibitan	75.137		66.585	Nurseries
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.366.464 dan Rp 1.383.500 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	3.198.863	3s, 3u, 16	3.487.975	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 1,366,464 and Rp 1,383,500 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Goodwill dan aset takberwujud lainnya - bersih	960.589	3t, 4c, 17	981.327	Goodwill and other intangible assets - net
Aset pajak tangguhan	1.432.193	3bb, 4f, 36	1.378.197	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	255.707	3p, 18	464.668	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.883.501		10.339.799	**Total Non current Assets**
JUMLAH ASET	10.183.510		12.223.568	**TOTAL ASSETS**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				**LIABILITIES AND EQUITY**
LIABILITAS JANGKA PENDEK				**CURRENT LIABILITIES**
Utang bank jangka pendek	393.718	3h, 19	442.100	Short-term bank loans
Utang usaha		3h, 20		Trade accounts payable
Pihak berelasi	6.962		3.531	Related parties
Pihak ketiga	697.933		711.759	Third parties
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	261.657	3h, 24	400.934	Short-term loan from non-bank financial institutions
Uang muka diterima - pihak ketiga	124.242	21	241.040	Advances received - third parties
Utang pajak	242.754	23	238.135	Taxes payable
Beban akrual	103.110	22	225.311	Accrued expenses
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current portion of long-term liabilities:
Utang bank	1.122.593	3h, 19	641.300	Bank loans
Liabilitas sewa	58.725	3u, 4d, 25	42.535	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan bukan bank	6.469	3h, 24	4.893	Loans from non-bank financial institutions
Liabilitas jangka pendek lain-lain	494.922	38c	442.754	Other current liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.513.085		3.394.292	**Total Current Liabilities**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				**NON CURRENT LIABILITIES**
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	20.859	3aa, 4e, 35	32.034	Long-term employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank	3.019.033	3h, 19	5.446.485	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	196.853	24	4.598	Loans from non-bank financial institutions
Liabilitas sewa	48.950	3u, 4d, 25	76.286	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	711.730	3bb,36	711.730	Deferred tax liabilities
Uang muka setoran modal	220.000	26	220.000	Deposit for future stock subscription
Liabilitas jangka panjang lain-lain	261.450	38d, 38e	288.500	Other non-current liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.478.875		6.779.633	**Total Non current Liabilities**
Jumlah Liabilitas	7.991.960		10.173.925	**Total Liabilities**
EKUITAS				**EQUITY**
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				**Equity Attributable to Owners of the Company**
Modal saham				Capital stock
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 50.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 31.525.291.000 saham	3.152.529	27	3.152.529	Capital stock - Rp 100 (in full Rupiah) par value per share Authorized - 50,000,000,000 shares Issued and paid up - 31,525,291,000 shares
Saham treasuri - 402.922.800 saham dan 223.631.400 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	(40.292)	3v, 28	(22.363)	Treasury stocks - 402,922,800 shares and 223,631,400 shares as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Tambahan modal disetor	4.015.083	29	4.007.764	Additional paid-in capital
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(241.141)		(241.141)	Difference in value arising from transactions with non-controlling interests
Rugi komprehensif lain	(373.981)	35	(366.528)	Other equity component
Defisit	(4.329.883)		(4.506.908)	Deficit
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.182.315		2.023.353	**Total Equity Attributable to Owners of the Company**
Kepentingan Nonpengendali	9.235	30	26.290	**Non-controlling interests**
Jumlah Ekuitas	2.191.550		2.049.643	**Total Equity**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	10.183.510		12.223.568	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
PENDAPATAN USAHA	4.204.612	3y, 31	4.574.124	**NET SALES**
BEBAN POKOK PENJUALAN	3.147.466	32	3.542.668	**COST OF GOODS SOLD**
LABA KOTOR	1.057.146		1.031.456	**GROSS PROFIT**
BEBAN USAHA				**OPERATING EXPENSES**
Umum dan administrasi	220.961	33	212.449	General and administrative
Penjualan	132.719	34	157.900	Selling
Jumlah Beban Usaha	353.680		370.349	Total operating expenses
LABA USAHA	703.466		661.107	**OPERATING INCOME**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				**OTHER INCOME (EXPENSES)**
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	13.771	3q, 13	35.486	Gain from changes in fair value of biological assets
Pendapatan bunga	6.936		6.708	Interest income
Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing - net	252		(38)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Rugi penjualan entitas anak	(214.468)	44	(220.272)	Loss on subsidiaries divestment
Beban bunga dan keuangan	(564.138)	19, 24, 25	(581.611)	Interest and financial expenses
Rugi penjualan aset tetap	(3.961)	16	-	Loss on disposal of fixed assets
Lain-lain - bersih	(66.011)		(16.310)	Others - net
Beban Lain-lain - Bersih	(827.619)		(776.037)	Other Expenses - Net
RUGI SEBELUM PAJAK	(124.153)		(114.930)	**LOSS BEFORE TAX**
MANFAAT PAJAK - Bersih	284.123	3bb, 36	127.565	**TAX BENEFIT - Net**
LABA TAHUN BERJALAN	159.970		12.635	**PROFIT FOR THE YEAR**
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				**OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)**
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas program imbalan pasti	2.328	3aa, 35	4.870	Remeasurement of defined benefits obligation
Beban pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi	(512)	3bb, 36	(1.071)	Expense tax benefit relating to item that will not be reclassified subsequently
	1.816		3.799	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified subsequently to profit and loss
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri	(9.269)		(9.269)	Exchange difference on translating foreign operations
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	(7.453)		(5.470)	**OTHER COMPREHENSIVE LOSS - NET OF TAX**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	152.517		7.165	**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME**
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				**TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:**
Pemilik entitas induk	177.025		17.478	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	(17.055)	30	(4.843)	Non-controlling interests
	159.970		12.635	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:**
Pemilik entitas induk	169.572		12.008	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	(17.055)	30	(4.843)	Non-controlling interests
	152.517		7.165	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor/ *Paid up capital stock*	Saham treasuri/ *Treasury shares*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali/ *Difference in value of equity transaction with non-controlling interests*	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ *Other comprehensive income (loss)*		Defisit/ *Deficit*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the company*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Pengukuran kembali atas manfaat pensiun karyawan/ *Remeasurement of post-employment benefits obligation*	Selisih penjabaran laporan keuangan/ *Cumulative translation adjustment*					
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022		**3.152.529**	**-**	**4.000.747**	**(241.141)**	**8.787**	**(369.845)**	**(4.524.386)**	**2.026.691**	**31.133**	**2.057.824**	**Balance as of January 1, 2022**
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	17.478	17.478	(4.843)	12.635	Profit for the year
Rugi komprehensif lain		-	-	-	-	3.799	(9.269)	-	(5.470)	-	(5.470)	Other comprehensive loss
Transaksi dengan pemilik												**Transactions with owners**
Saham treasuri	3v, 28	-	(22.363)	7.017	-	-	-	-	(15.346)	-	(15.346)	Treasury shares
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		**3.152.529**	**(22.363)**	**4.007.764**	**(241.141)**	**12.586**	**(379.114)**	**(4.506.908)**	**2.023.353**	**26.290**	**2.049.643**	**Balance as of December 31, 2022**
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	177.025	177.025	(17.055)	159.970	Profit for the year
Rugi komprehensif lain		-	-	-	-	1.816	(9.269)	-	(7.453)		(7.453)	Other comprehensive loss
Transaksi dengan pemilik												**Transactions with owners**
Saham treasuri	3v, 28	-	(17.929)	7.319	-	-	-	-	(10.610)	-	(10.610)	Treasury shares
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**3.152.529**	**(40.292)**	**4.015.083**	**(241.141)**	**14.402**	**(388.383)**	**(4.329.883)**	**2.182.315**	**9.235**	**2.191.550**	**Balance as of December 31, 2023**

	2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan dari pelanggan	4.100.050	7, 21, 31	4.684.262	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada :				Cash paid to :
Pemasok	(2.166.528)	20	(2.911.279)	Suppliers
Direksi, staf dan bukan staf	(679.527)		(667.239)	Directors, staff and non staff employees
Kas bersih dihasilkan dari operasi	1.253.995		1.105.744	Net cash generated from operations
Pembayaran beban bunga	(620.933)	19, 22, 24, 25	(591.449)	Payment of interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	633.062		514.295	**Net Cash Provided by Operating Activities**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Penerimaan dari divestasi anak perusahaan - bersih dari kas anak perusahaan	9.843	44	14.504	Proceeds from divestment of subsidiaries- net of cash of subsidiary
Penerimaan bunga	6.936	11	6.708	Interest received
Penjualan aset tetap	2.500	16	-	Proceeds from disposal of fixed asset
Pembayaran atas biaya pengembangan tanaman produktif dan pembibitan	(22.444)	15	(42.315)	Payments for additional development costs of bearer plants and nurseries
Perolehan aset tetap	(279.043)	16	(178.709)	Acquisitions of property, plant and equipment
Penempatan (pencairan) ke kas dibatasi penggunaannya	150.000	14	(651)	Placements (release) in restricted cash
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(132.208)		(200.463)	**Net Cash Used in Investing Activities**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan utang lembaga keuangan bukan bank	1.086.188	24	6.833	Proceeds from loan from non-bank financial institutions
Penerimaan utang bank jangka pendek	443.797	19	50.000	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang	40.000	19	50.000	Proceeds from long-term bank loans
Pembelian saham treasuri	(10.610)	28	(15.346)	Purchase of treasury stocks
Pembayaran liabilitas sewa	(48.431)	25	(24.338)	Payment of lease liabilities
Pembayaran utang bank jangka pendek	(492.179)	19	(50.000)	Payment of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	(653.133)	19	(372.144)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank	(948.007)	24	(3.568)	Payment of loan from non-bank financial institutions
Uang muka setoran modal	-	25	50.000	Deposits for future stock subscriptions
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(582.375)		(308.563)	**Net Cash Used in Financing Activities**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(81.521)		5.269	**NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS**
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	108.876		103.577	**CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	23		30	Effect on foreign exchange rate changes
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	27.378		108.876	**CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT BW Plantation berdasarkan Akta No. 13 tanggal 6 November 2000 dari Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-25665.HT.01.01.Th.2000 tanggal 22 Desember 2000 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, diaktakan pada Akta No. 2 tanggal 8 Mei 2023 dari Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116320 tanggal 11 Mei 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang industri dan pertanian.

Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya dinyatakan sebagai “Grup”) didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia dan Singapura. Ruang lingkup kegiatan usaha Grup meliputi pengembangan perkebunan, pengolahan hasil perkebunan, perdagangan dan lain-lain. Bidang usaha Grup meliputi perkebunan kelapa sawit dan hasil olahan kelapa sawit antara lain produk perkebunan. Produk tersebut mencakup produk hasil kelapa sawit antara lain minyak kelapa sawit (*crude palm oil*) dan inti sawit (*palm kernel*).

1. General

a. Establishment and General Information

PT Eagle High Plantations Tbk (the Company) was established in South Jakarta, as PT BW Plantation based on Notarial Deed No. 13 dated November 6, 2000 of Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-25665.HT.01.01.Th.2000 dated December 22, 2000 and was published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 68 Supplement No. 7449 dated August 26, 2003.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently regarding changes to several provisions in the Articles of Association to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, notarized in Deed No. 2 dated May 8, 2023, of Novita Puspitarini, S.H., Notary in Jakarta and had been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Notice of Acceptance of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.09-0116320 dated May 11, 2023.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in manufacturing and agricultural businesses.

The Company and its subsidiaries (collectively referred to hereinafter as the “Group”) are incorporated and conducted their operations in Indonesia and Singapore. The scope of the activities of the Group mainly comprises of plantation development, processing and trading of plantation products. The Group currently engages in palm plantation and its products consisting of palm products such as crude palm oil and palm kernel.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

Pabrik pengolahan kelapa sawit Grup berada di Kalimantan dan Papua and perkebunan entitas anak berlokasi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah luas lahan yang ditanami adalah masing-masing seluas 74.339 hektar dan 94.666 hektar.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Rajawali Capital International dan pemegang saham pengendali induk Perusahaan adalah PT Rajawali Corpora.

The Company started its commercial operations in 2004.

The palm oil mills of the Group are located in Kalimantan and Papua and the subsidiaries' plantations are located in Kalimantan, Sumatera, Sulawesi and Papua.

As of December 31, 2023 and 2022, the total planted area is approximately 74,339 hectares and 94,666 hectares, respectively.

The parent entity of the Company is PT Rajawali Capital International and the ultimate controlling parent of the Company is PT Rajawali Corpora.

b. Penawaran Umum Efek

Pada tanggal 19 Oktober 2009, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan – OJK) melalui surat No. S-9236/BL/2009 untuk penawaran umum perdana atas 1.211.009.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dan dengan harga penawaran Rp 550 (dalam Rupiah penuh) per saham. Saham-saham Perusahaan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2009.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 November 2013 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk menerbitkan 405.100.000 lembar saham pada harga Rp 850 (dalam Rupiah penuh) per saham melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Pada tanggal 15 November 2013 dan 23 Desember 2013, Perusahaan melaksanakan PMTHMETD tahap 1 dan 2 masing-masing sebanyak 270.100.000 dan 135.000.000 lembar saham dengan harga pelaksanaan masing-masing sebesar Rp 850 (dalam Rupiah penuh) per saham. Jumlah dana yang diperoleh dari pemegang saham dalam pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar Rp 344.335.

b. Public Offering of Shares

On October 19, 2009, the Company obtained Effectivity Notification from the Chairman of the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam – LK) (currently Financial Services Authority - OJK) in his letter No. S-9236/BL/2009 regarding the Initial Public Offering of 1,211,009,000 shares with a par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share and offering price of Rp 550 (in full Rupiah) per share. On October 27, 2009, the Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

Based on Notarial Deed No. 2 dated November 6, 2013 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, concerning the Extraordinary Stockholders' Meeting wherein the Company's stockholders approved the issuance of 405,100,000 shares at a price of Rp 850 (in full Rupiah) per share to the existing stockholders ("Rights Issue Without Pre-Emptive Rights"). On November 15, 2013 and December 23, 2013, the Company issued 270,100,000 and 135,000,000 shares on Rights Issue without Pre-Emptive Rights phase 1 and 2, respectively, at a price of Rp 850 (in full Rupiah) per share. The total funds received from the stockholders in relation to this "Rights Issue Without Pre-Emptive Rights" amounted to Rp 344,335.

Pada tanggal 27 November 2014, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-491/D.04/2014 untuk Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas 27.021.678.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 400 (dalam Rupiah penuh) per saham.

On November 27, 2014, the Company obtained the Effectivity Notification from the Chairman of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in his letter No. S-491/D.04/2014 for the Limited Public Offering I with Pre-Emptive Rights to Stockholders for 27,021,678,000 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share at exercise price of Rp 400 (in full Rupiah) per share.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh saham Perusahaan atau sejumlah 31.525.291.000 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

As of December 31, 2023 and 2022, all of the Company's shares totaling to 31,525,291,000 shares are listed in the Indonesia Stock Exchange.

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

c. Consolidated Subsidiaries

Entitas anak yang dimiliki oleh Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

The Company's directly or indirectly owned subsidiaries, are as follows:

Entitas Anak/*Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Tahun Beroperasi/ *Year of Operation*	% Pemilikan/*% of Ownership* 31 Desember /*December 31,* 2023	2022	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ *Total Assets (Before Elimination)* 2023	2022
PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	1997	100,00	100,00	919.629	947.551
PT Bumihutani Lestari (BHL)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit dan *bulking*/ *Palm plantation and palm oil mill and bulking*	1998	100,00	100,00	1.317.259	1.408.088
PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit/ *Palm plantation and palm oil mill*	2006	100,00	100,00	648.002	973.914
PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2010	100,00	100,00	437.651	484.378
PT Manunggal Adi Jaya (MAJ)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2006	95,00	95,00	308.433	323.627
PT Singaland Asetama (SGA)	Batu Licin	Perkebunan kelapa sawit dan bulking/ *Palm plantation and bulking*	1997	95,00	95,00	646.012	858.287
PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit dan *bulking*/ *Palm plantation and palm oil mill and bulking*	2005	95,00	95,00	1.430.909	1.813.061
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit/ *Palm plantation and palm oil mill*	2005	95,00	95,00	776.288	784.509
PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)	Kotabaru	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	1997	95,00	95,00	109.548	96.321
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit/ *Palm plantation and palm oil mill*	2005	95,00	95,00	1.254.381	1.599.636
PT Saka Kencana Sejahtera (SKS)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2006	95,00	95,00	39.327	53.781
PT Tandan Sawita Papua (TSP)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit/ *Palm plantation and palm oil mill*	2011	95,00	95,00	1.150.408	1.242.558
PT Varia Mitra Andalan (VMA)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2015	95,00	95,00	656.311	381.153

Entitas Anak/*Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Tahun Beroperasi/ *Year of Operation*	% Pemilikan/*% of Ownership* 31 Desember /*December 31,*		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ *Total Assets (Before Elimination)*	
				2023	2022	2023	2022
PT Papua Sawita Raya (PSR)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2007	95,00	95,00	465.601	191.858
PT Multikarya Sawit Prima (MSP)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2009	95,00	95,00	236.926	515.682
PT Sukses Hijau Mandiri (SHM)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	-	95,00	99,99	11.373	11.379
PT Seguri Serasau Sejahtera (SGSS)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2015	95,00	95,00	3.190	20.954
PT Palm Agro Katulistiwa (PAK)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	-	95,00	95,00	15.201	15.127
PT Hamparan Unggul Mandiri (HUM)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	-	95,00	95,00	41.436	41.460
PT Indah Permai Sawita (IPS)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	-	95,00	95,00	26.546	26.596
PT Sawita Persada Nusantara (SPN)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	-	95,00	95,00	30.355	30.368
PT Intaran Surya Agri (ISA)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	-	95,00	95,00	61.310	61.387
Green Eagle Holdings Pte. Ltd. (GEH)	Singapura/ *Singapore*	Perusahaan investasi/ *Investment holding company*	-	100,00	100,00	2.825.142	2.882.869
Green Eagle Singapore Pte. Ltd. (GES)	Singapura/ *Singapore*	Perusahaan investasi/ *Investment holding company*	-	100,00	100,00	248.806	253.890
PT Mandiri Kapital Jaya (MKJ)*	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2009	-	99,00	-	297.491
PT Arrtu Plantation (APN)*	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit/ *Palm plantation and palm oil mill*	2009	-	95,00	-	875.790
PT Arrtu Energie Resources (AER)*	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2017	-	95,00	-	181.320
PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP)*	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2011	-	95,00	-	230.483
PT Arrtu Agro Nusantara (AAN)*	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ *Palm plantation*	2016	-	95,00	-	345.783

**) Entitas anak yang dijual pada tahun 2023 (Catatan 44)*

**) Subsidiaries disposed in 2023 (Note 44)*

PT Bumihutani Lestari (BHL)

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 9 Juni 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui:

    a. Menyetujui peningkatan modal dasar BHL dari Rp 300.000 yang terbagi atas 300.000.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam rupiah penuh) per saham menjadi 325.300.062 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) atau sebesar Rp 325.300.

PT Bumihutani Lestari (BHL)

1. Based on Notarial Deed No. 07 dated June 9, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

    a. Approved the increase in the BHL's authorized capital from Rp 300,000 which was divided into 300,000,000 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1,000 (in full Rupiah) per share to 325,300,062 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1,000 (in full Rupiah) per shares or the amount of Rp 325,300.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor BHL dari Rp 300.000 yang terbagi atas 300.000.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi 325.300.062 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) atau sebesar Rp 325.300 dimana sebesar Rp 200.000 diambil bagian dan disetor penuh melalui konversi uang muka modal menjadi setoran modal oleh Perusahaan.

2. Berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 21 November 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, BHL menyetujui penjualan seluruh saham dalam Perusahaan milik Perusahaan sebanyak 200.000.000 (dalam satuan penuh) saham kepada BLP.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

1. Berdasarkan akta Notaris No. 04 Tanggal 25 Mei 2023, dari Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, Pemegang saham menyetujui:

   a. Peningkatan modal dasar SMS dari Rp 400.000 yang terbagi atas 400.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 1 rmenjadi Rp 800.000 yang terbagi atas 800.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 1.

   b. Menyetujui peningkatan modal disetor SMS dari Rp 239.435 yang terbagi atas 239.435 (dalam satuan penuh) lembar saham menjadi Rp 530.261 yang terbagi atas 530.261 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan cara konversi uang muka setoran modal menjadi setoran modal sebagai berikut:

      - Rp 208.358 diambil bagian oleh BHL.
      - Rp 60.419 diambil bagian oleh ADS.
      - Rp 22.049 diambil bagian oleh BLP.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of BHL from Rp 300,000 which was divided into 300,000,000 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1,000 (in full Rupiah) per share to 325,300,062 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1,000 (in full Rupiah) per shares or the amount of Rp 325,300 which was subscribed and fully paid through the conversion of advance for capital subscription into paid-up capital by the Company.

2. Based on Notarial Deed No. 08 dated November 21, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved the sell of all shares in the BHL owned by the Company amounting to 200,000,000 (in full amount) shares to BLP.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

1. Based on Notarial Deed No. 04 dated May 25, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

   a. Increase in authorized capital of SMS from Rp 400,000 divided into 400,000 (in full amount) shares with a nominal value Rp 1 to Rp 800,000 divided into 800,000 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1.

   b. Authorized the increase of SMS's capital stock from Rp 239,435 which is divided by 239,435 (in full amount) shares and Rp 530,261 which is divided by 530,261 (in full amount) shares by converting the advances for capital stock subscriptions to capital stock as follows:

      - Rp 208,358 is subscribed by BHL.
      - Rp 60,419 is subscribed by ADS.
      - Rp 22,049 is subscribed by BLP.

2. Berdasarkan akta Notaris No. 06 Tanggal 17 November 2023, dari Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, Pemegang saham menyetujui:

   a. Peningkatan modal dasar SMS dari Rp 800.000 yang terbagi atas 800.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 1 menjadi Rp 1.000.000 yang terbagi atas 1.000.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 1.

   b. Menyetujui peningkatan modal disetor SMS dari Rp 530.261 yang terbagi atas 530.261 (dalam satuan penuh) lembar saham menjadi Rp 577.045 yang terbagi atas 577.045 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan cara konversi uang muka setoran modal menjadi setoran modal sebagai berikut:

      - Rp 10.000 diambil bagian oleh BHL.

      - Rp 36.784 diambil bagian oleh ADS.

2. Based on Notarial Deed No. 06 dated November 17, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

   a. Increase in authorized capital of SMS from Rp 800,000 divided into 800,000 (in full amount) shares with a nominal value Rp 1 to Rp 1,000,000 divided into 1,000,000 (dalam satuan penuh) shares with a nominal value of Rp 1.

   b. Authorized the increase of SMS's capital stock from Rp 530,261 which is divided by 530,261 (in full amount) shares to Rp 577,045 which is divided by 577,045 (in full amount) shares by converting the advances for capital stock subscriptions to capital stock as follows:

      - Rp 10,000 is subscribed by BHL.

      - Rp 36,784 is subscribed by ADS.

PT Manunggal Adi Jaya (MAJ)

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 25 Mei 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, MAJ menyetujui:

   a. Menyetujui peningkatan modal dasar MAJ dari Rp 300.000 yang terbagi atas 600.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 380.969 yang terbagi atas 761.938 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh).

PT Manunggal Adi Jaya (MAJ)

1. Based on Notarial Deed No. 02 dated May 25, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

   a. Approved the increase in the authorized capital of MAJ from Rp 300,000 divided into 600,000 (in full amount) shares with par value pershare amounting to Rp 500,000 (in full Rupiah) to Rp 380,969 divided into 761,938 (in full amount) shares amounting to Rp 500,000 (in full Rupiah).

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor MAJ dari Rp 141.000 yang terbagi atas 282.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam satuan penuh) menjadi Rp 380.696 yang terbagi atas 761.938 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) dimana:

- Sebesar Rp 227.971 atau setara dengan 455.941 (dalam satuan penuh) saham diambil bagian melalui konversi uang muka modal menjadi setoran modal oleh Perusahaan.

- Sebesar Rp 227.971 atau setara dengan 455.941 (dalam satuan penuh) saham diambil bagian melalui konversi uang muka modal menjadi setoran modal oleh Perusahaan.

- Sebesar Rp 11.999 atau setara dengan 23.997 (dalam satuan penuh) saham diambil bagian dan disetor penuh secara tunai menjadi setoran modal oleh PT Rajawali Corpora dalam Perusahaan.

2. Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 24 November 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, MAJ menyetujui:

a. Menyetujui peningkatan modal dasar MAJ dari Rp 380.969 yang terbagi atas 799.841 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 500.000 yang terbagi atas 1.000.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh).

b. Approved the increase in MAJ's issued and paid-up capital from Rp 141,000 divided into 282,000 (in full amount) shares with par value per share amounting to Rp 500,000 (in full Rupiah) to Rp 380,696 divided into 761,938 (in full amount) shares with par value per share amounting to Rp 500,000 (in full Rupiah) whereas:

- A total of Rp 227,971 or equivalent to 455,941 (in full amount) shares were subscribed through the conversion of advance for capital deposit by the Company.

- A total of Rp 227,971 or equivalent to 455,941 (in full amount) shares were subscribed through the conversion of advance for capital deposit by the Company.

- A total of Rp 11,999 or equivalent to 23,997 (in full amount) shares were subscribed and fully paid in cash as capital deposit by PT Rajawali Corpora in the Company.

2. Based on Notarial Deed No. 10 dated November 24, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the increase in MAJ's authorized capital from Rp 380,969 which was divided into 799,841 (in full amount) shares with nominal value of Rp 500,000 (in full Rupiah) per shares to Rp 500,000 which was divided into 1,000,000 (in full amount) shares with nominal value of Rp 500,000 (in full Rupiah).

b. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor MAJ dari Rp 380.969 yang terbagi atas 761.938 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 430.969 yang terbagi atas 861.938 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) dimana:

- Sebesar Rp 47.500 dengan cara setoran uang tunai menjadi setoran modal oleh Perusahaan.

- Sebesar Rp 2.500 dengan cara setoran uang tunai menjadi setoran modal oleh PT Rajawali Corpora.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of MAJ from Rp 380,969 divided into 761,938 (in full amount) shares with par value per share amounting to Rp 500,000 (in full Rupiah) to Rp 430,969 divided into 861,938 (in full amount) shares with par value per share amounting to Rp 500,000 (in full Rupiah) whereas:

- A total of Rp 47,500 through cash receipt into capital deposit by the Company.

- A total of Rp 2,500 through cash receipt into capital deposit by PT Rajawali Corpora

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan para Pemegang Saham No. 03 tanggal 25 Mei 2023 oleh Hayati Nufus, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham PLS menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

a. Menyetujui peningkatan modal dasar PLS dari Rp 135.000 yang terbagi atas 135.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 1, menjadi Rp 336.000 yang terbagi atas 336.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 1.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor PLS dari Rp 135.000 yang terbagi atas 135.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 1 menjadi Rp 336.000 yang terbagi atas 336.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 1 dimana sebesar Rp 190.950 atau setara dengan 190.950 (dalam satuan penuh) saham diambil bagian dan disetor penuh secara tunai menjadi setoran modal oleh Perusahaan dalam PLS dan sebesar Rp 10.050 atau setara dengan 10.050 (dalam satuan penuh) saham diambil bagian dan disetor penuh secara tunai menjadi setoran modal oleh PT Rajawali Corpora dalam PLS.

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Based on the Notarial Deed No. 03 dated May 25, 2023 by Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, PLS's shareholders approved the following matters:

a. Approved the increase in the authorized capital of PLS from Rp 135,000 divided into 135,000 (in full amount) shares with par value per share amounting to Rp 1 to Rp 336,000 divided into 336,000 (in full amount) shares with par value amounting to Rp 1.

b. Approved the increase in PLS's issued and paid-up capital from Rp 135,000 divided into 135,000 (in full amount) shares with par value per share amounting to Rp 1 to Rp 336,000 divided into 336,000 (in full amount) shares with par value per share amounting to Rp 1 of which Rp 190,950 or equivalent to 190,950 (in full amount) shares were subscribed and fully paid in cash as capital deposit by the Company in PLS and Rp 10,050 or equivalent to 10,050 (in full amount) shares were subscribed and fully paid in cash as capital deposit by PT Rajawali Corpora in PLS.

PT Saka Kencana Sejahtera (SKS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 12 Desember 2023 dari Hayati Nufus, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham SKS menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

a. Menyetujui peningkatan modal dasar SKS dari Rp 5.000 yang terbagi atas 10.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi 45.796 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam satuan penuh) atau sebesar Rp 17.898.

b. Menyutujui adanya peningkatan atas modal ditempatkan dan disetor pada SKS dari Rp 5.000 menjadi Rp 22.898, dimana Rp 17.893 diambil bagian dan disetor penuh oleh STP dengan cara setoran tunai ke PLS.

PT Saka Kencana Sejahtera (SKS

Based on the Notarial Deed No. 02 dated December 12 2023 of Hayati Nufus., S.H., a notary in Jakarta, SKS ‘s shareholders approved the following matters:

a. Approved the increase in SKS’s authorized capital from Rp 5.000 which was divided into 10,000 (in full amount) shares with nominal value of Rp 500,000 (in full Rupiah) per share to 45,796 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 500,000 (in full Rupiah) per shares or the amount of Rp 17,898.

b. pproved an increase in SKS's issued and paid-up capital Rp 5,000 to Rp 22,898 of which Rp 17,893 was taken and paid in full by STP by cash deposit to PLS.

PT Tandan Sawita Papua (TSP)

Berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 9 Juni 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, pemegang saham TSP menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

a. Menyetujui peningkatan modal dasar TSP dari Rp 200.000 yang terbagi atas 200.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 per saham menjadi 1.386.111 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 atau sebesar Rp 1.386.111.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor TSP dari Rp 105.000 yang terbagi atas 105.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 per saham menjadi 1.386.111 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 atau sebesar Rp 1.386.111 dimana:

   - Sebesar Rp 670.991 diambil bagian dengan cara konversi uang muka modal menjadi setoran modal oleh STP.

PT Tandan Sawita Papua (TSP)

Based on Notarial Deed No. 08 dated June 9, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, TSP‘s shareholders approved the following matters:

a. Approved the increase in TSP’s authorized capital from Rp 200,000 which was divided into 200,000 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1 per share to 1,386,111 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1 per shares or the amount of Rp 1,386,111.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of TSP from Rp 105,000 which was divided into 105,000 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1 per share to 1,386,111 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1 per shares or the amount of Rp 1,386,111 whereas:

   - A total of Rp 670,991 was subscribed and paid through the conversion of advance for capital subscription into paid-up capital by STP.

- Sebesar Rp 400.000 diambil bagian dengan cara konversi uang muka modal menjadi setoran modal oleh PLS.

- Sebesar Rp 210.120 diambil bagian dengan cara konversi uang muka modal menjadi setoran modal oleh JMS.

PT Varia Mitra Andalan (VMA)

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 25 Oktober 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, VMA menyetujui:

a. Menyetujui peningkatan modal dasar VMA dari Rp 31.250 yang terbagi atas 31.250 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 per saham menjadi 750.000.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam satuan penuh) atau sebesar Rp 750.000.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor VMA dari Rp 31.250 yang terbagi atas 31.250 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 per saham menjadi 700.078.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) atau sebesar Rp 700.078 dimana:

   - Sebesar Rp 233.580 diambil bagian dengan cara setoran tunai oleh Perusahaan.

   - Sebesar Rp 239.165 diambil bagian dengan cara setoran tunai oleh BHL.

   - Sebesar Rp 151.202 diambil bagian dengan cara setoran tunai oleh SGA.

   - Sebesar Rp 24.881 diambil bagian dengan cara setoran tunai oleh PT Rajawali Corpora

- A total of Rp 400,000 was subscribed and paid through the conversion of advance for capital subscription into paid-up capital by PLS.

- A total of Rp 210,120 was subscribed and paid through the conversion of advance for capital subscription into paid-up capital by JMS.

PT Varia Mitra Andalan (VMA)

Based on Notarial Deed No. 19 dated October 25, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the increase in VMA's authorized capital from Rp 31,250 which was divided into 31,250 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1 per share to 750,000,000 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1,000 (in full Rupiah) per shares or the amount of Rp 750,000.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of VMA from Rp 31,250 which was divided into 31,250 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1 per share to 700,079,000 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1,000 (in full Rupiah) per shares or the amount of Rp 700,078 whereas:

   - A total of Rp 233,580 was subscribed and paid through cash by the Company.

   - A total of Rp 239,165 was subscribed and paid through cash by BHL.

   - A total of Rp 151,202 was subscribed and paid through cash by SGA.

   - A total of Rp 24,881 was subscribed and paid through cash by PT Rajawali Corpora.

PT Papua Swita Raya (PSR)

31 Desember 2022

Berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 22 Agustus 2022 dari Hayati Nufus, S.H., notaris di Jakarta, PSR menyetujui:

a. Perubahan nilai nominal saham SGA dari sebesar Rp 1 per saham menjadi sebesar Rp 10 (dalam Rupiah penuh) per saham, sehingga susunan para pemegang saham dalam SGA menjadi:

   - VMA sebanyak 32.575.700.000 (dalam satuan penuh) lembar saham atau sebesar Rp 325.757.

   - PT Rajawali Corpora sebanyak 100.000 (dalam satuan penuh) lembar saham atau sebesar Rp 1.

b. Pengurangan modal dasar PSR dari semula sebesar Rp 500.000 yang terbagi atas 50.000.000.000 (dalam satuan penuh) saham menjadi Rp 255.000 yang terbagi atas 25.500.000.000 (dalam satuan penuh) saham.

c. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor PSR dari semula sebesar Rp 325.758 yang terbagi atas 32.575.800.000 (dalam satuan penuh) saham menjadi sebesar Rp 254.386 yang terbagi atas 25.438.561.780 (dalam satuan penuh) saham dengan cara penarikan kembali sebanyak 7.137.238.220 (dalam satuan penuh) saham atas nama VMA yang mengakibatkan penghapusan sebanyak 7.137.238.220 saham dari peredaran, sehingga susunan para pemegang saham dalam PSR menjadi:

   - VMA sebanyak 25.438.461.780 (dalam satuan penuh) lembar saham atau sebesar Rp 254.385.

   - PT Rajawali Corpora sebanyak 100.000 (dalam satuan penuh) lembar saham atau sebesar Rp 1.

PT Papua Sawita Raya (PSR)

31 December 2022

Based on Notarial Deed No. 04 dated August 22, 2022 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Changes in the nominal value of SGA's shares from Rp 1 per share to Rp 10 (in full amount) per share, so that the composition of the shareholders in SGA becomes:

   - VMA with 32,575,700,000 (in full amount) shares or Rp 325,757.

   - PT Rajawali Corpora of 100,000 (in full amount) shares or Rp 1.

b. Approved to reduce PSR's authorized capital from Rp 500,000 divided into 50,000,000,000 (in full amount) shares to Rp 255,000 divided into 25,500,000,000 (in full amount) shares.

c. The reduction in the issued and paid-up capital of PSR from the original Rp 325,758 divided into 32,575,800,000 (in full amount) shares to Rp 254,386 which was divided into 25,438,561,780 (in full amount) shares by withdrawal of 7,137,238,220 (in full amount) shares on behalf of VMA which resulted disposal of 7,137,238,220 (in full amount) shares from issued and paid-up capital, so that the composition of the shareholders in PSR becomes:

   - VMA with 25,438,461,780 (in full amount) shares or Rp 254,385.

   - PT Rajawali Corpora of 100,000 (in full amount) shares or Rp 1.

31 Desember 2023

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 25 Oktober 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, PSR menyetujui:

a. Menyetujui peningkatan modal dasar PSR dari Rp 255.000 yang terbagi atas 25.500.000.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 10 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi 55.000.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 10 (dalam satuan penuh) atau sebesar Rp 550.000.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor PSR dari Rp 254.386 yang terbagi atas 25.438.561.780 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 10 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi 53.284.661.780 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 10 (dalam Rupiah penuh) atau sebesar Rp 532.847 dimana sebesar Rp 278.461 diambil dan disetor secara tunai menjadi setoran modal oleh VMA.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

Berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 16 Oktober 2023 dari Hayati Nufus, S.H., notaris di Jakarta, Pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor MSP dari Rp 145.028 yang terbagi atas 1.450.276 (dalam satuan penuh) saham dengan nominal Rp 100.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 240.298 yang terbagi atas 2.402.976 (dalam satuan penuh) saham dengan nominal Rp 100.000 (dalam Rupiah penuh), dimana:

a. Sebesar Rp 75.270 diambil bagian dan disetor secara tunai menjadi setoran modal oleh SGA.

b. Sebesar Rp 20.000 diambil bagian dan disetor secara tunai menjadi setoran modal oleh KAPAG.

31 December 2023

Based on Notarial Deed No. 19 dated October 25, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the increase in PSR's authorized capital from Rp 255,000 which was divided into 25,500,000,000 (in full amount) shares with nominal value of Rp 10 (in full Rupiah) per share to 55,000,000 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 10 (in full Rupiah) per shares or the amount of Rp 550,000.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of PSR from Rp 254,386 which was divided into 25,438,561,780 (in full amount) shares with nominal value of Rp 10 per share to 53,284,661,780 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 10 (in full Rupiah) per shares or the amount of Rp 532,847 whereas amounted Rp 278,461 subscribed and paid in cash as capital stock by VMA.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

Based on Notarial Deed No. 17 dated October 16, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, the Shareholders agree to increase subscribed and paid-up capital of MSP from Rp 145,028 divided into 1,450,276 (in full amount) shares with nominal value of Rp 100,000 (in full Rupiah) into Rp 240,298 divided into 2,402,976 (in full amount) shares with nominal value of Rp 100,000 (in full Rupiah), as follows:

a. A total of Rp 75.270 subscribed and paid in cash as capital stock by SGA.

b. A total of Rp 20.000 subscribed and paid in cash as capital stock by KAPAG.

PT Sukses Hijau Mandiri (SHM)

Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 16 Oktober 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, SHM menyetujui:

a. Menyetujui penjualan seluruh saham-saham dalam SHM milik MSP, yaitu sebanyak 10.984 (dalam satuan penuh) saham kepada PSR.

b. Menyetujui peningkatan modal SHM sebesar Rp 2.729 diambil bagian dan disetor penuh oleh PSR dengan setoran uang muka modal menjadi setoran modal dalam SHM, sehingga modal ditempatkan dan disetor SHM menjadi 13.714 saham (dalam satuan penuh) dengan nilai nominal Rp 1.

PT Seguri Serasau Sejahtera (SGSS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 12 Oktober 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, SGSS menyetujui:

a. Menyetujui penjualan seluruh saham-saham dalam SGSS milik MSP, yaitu sebanyak 2.967 (dalam satuan penuh) saham kepada PSR.

b. Menyetujui peningkatan modal SGSS sebesar Rp 10.600 yang terbagi atas 10.600 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 menjadi 25.230 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 atau sebesar Rp 25.230.

c. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor SGSS dari Rp 2.980 yang terbagi atas 2.980 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 per saham menjadi 25.230 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 atau sebesar Rp 25.230 dimana sebesar Rp 22.250 diambil dan disetor secara konversi uang muka setoran modal menjadi setoran modal oleh PSR.

PT Sukses Hijau Mandiri (SHM)

Based on Notarial Deed No. 15 dated October 16, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the sale of all shares in SHM owned by MSP, totaling 10,984 (in full amount) shares to PSR.

b. Approved an increase in SHM's capital of Rp 2,729 participated and fully paid by PSR with the deposit of capital advance into paid-up capital in SHM, so that SHM's issued and paid-up capital became 13,714 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1.

PT Seguri Serasau Sejahtera (SGSS)

Based on Notarial Deed No. 11 dated October 12, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the sale of all shares in SGSS owned by MSP, totaling 2,967 (in full amount) shares to PSR.

b. Approved the increase in SGSS's authorized capital from Rp 10,600 which was divided into 10,600 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1 per share to 25,230 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1 per shares or the amount of Rp 25,230.

c. Approved the increase in the issued and paid-up capital of SGSS from Rp 2,980 which was divided into 2,980 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1 per share to 25,230 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1 per shares or the amount of Rp 25,230 whereas amounted Rp 22,250 subscribed and paid through converting the advances for capital stock subscriptions to capital stock by PSR.

PT Palm Agro Katulistiwa (PAK)

Berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, PAK menyetujui:

a. Menyetujui penjualan seluruh saham-saham dalam perusahaan milik MSP, yaitu sebanyak 28.583 (dalam satuan penuh) saham kepada PSR.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor PAK dari Rp 14.304 yang terbagi atas 28.608 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi 38.571 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) atau sebesar Rp 19.286 dimana sebesar Rp 4.982 diambil dan disetor secara konversi uang muka setoran modal menjadi setoran modal oleh PSR.

PT Hamparan Unggul Mandiri (HUM)

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 12 Oktober 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, HUM menyetujui:

a. Menyetujui penjualan seluruh saham-saham dalam perusahaan milik MSP, yaitu sebanyak 38.967 (dalam satuan penuh) saham kepada PSR.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor HUM dari Rp 38.970 yang terbagi atas 38.970 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 per saham menjadi 43.765 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 atau sebesar Rp 43.765 dimana sebesar Rp 4.795 diambil dan disetor secara konversi uang muka setoran modal menjadi setoran modal oleh PSR.

PT Palm Agro Katulistiwa (PAK)

Based on Notarial Deed No. 7 dated October 12, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the sale of all shares in PAK owned by MSP, amounted 28,583 (in full amount) shares to PSR.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of PAK from Rp 14,304 which was divided into 28,608 (in full amount) shares with nominal value of Rp 500,000 (in full Rupiah) per share to 35,571 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 500,000 (in full amount) per shares or the amount of Rp 19,286 whereas amounted Rp 4,982 subscribed and paid through converting the advances for capital stock subscriptions to capital stock by PSR.

PT Hamparan Unggul Mandiri (HUM)

Based on Notarial Deed No. 1 dated October 12, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the sale of all shares in HUM owned by MSP, amounted 38,967 (in full amount) shares to PSR.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of HUM from Rp 38,970 which was divided into 38,970 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1 per share to 43,765 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1 per shares or the amount of Rp 43,765 whereas amounted Rp 4,765 subscribed and paid through converting the advances for capital stock subscriptions to capital stock by PSR.

PT Indah Permai Sawita (IPS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 12 Oktober 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, IPS menyetujui:

a. Menyetujui penjualan seluruh saham-saham dalam IPS milik MSP, yaitu sebanyak 26.400 (dalam satuan penuh) saham kepada PSR.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor IPS dari Rp 26.403 yang terbagi atas 26.403 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 per saham menjadi 27.122 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 atau sebesar Rp 27.122 dimana sebesar Rp 719 diambil dan disetor secara konversi uang muka setoran modal menjadi setoran modal oleh PSR.

PT Sawita Persada Nusantara (SPN)

Berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 12 Oktober 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, SPN menyetujui:

a. Menyetujui penjualan seluruh saham-saham dalam SPN milik MSP, yaitu sebanyak 30.370 (dalam satuan penuh) saham kepada PSR.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor SPN dari Rp 30.373 yang terbagi atas 30.373 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 per saham menjadi 30.837 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 atau sebesar Rp 30.837 dimana sebesar Rp 464 diambil dan disetor secara konversi uang muka setoran modal menjadi setoran modal oleh PSR.

PT Indah Permai Sawita (IPS)

Based on Notarial Deed No. 3 dated October 12, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the sale of all shares in IPS owned by MSP, amounted 26,400 (in full amounts) shares to PSR.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of IPS from Rp 26,403 which was divided into 26,403 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1 per share to 27,122 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1 per shares or the amount of Rp 27,122 whereas amounted Rp 719 subscribed and paid through converting the advances for capital stock subscriptions to capital stock by PSR.

PT Sawita Persada Nusantara (SPN)

Based on Notarial Deed No. 9 dated October 12, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the sale of all shares in SPN owned by MSP, amounted 30,370 (in full amount) shares to PSR.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of SPN from Rp 30,373 which was divided into 30,373 (in full amount) shares with nominal value of Rp 1 per share to 30,837 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 1 per shares or the amount of Rp 30,837 whereas amounted Rp 464 subscribed and paid through converting the advances for capital stock subscriptions to capital stock by PSR.

PT Intaran Surya Agri (ISA)

31 Desember 2022

Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 22 Agustus 2022 dari Hayati Nufus, S.H notaris di Jakarta, yang menyetujui modal dalam ISA sebesar Rp 26.959 ekuivalen dengan 107.835 (dalam satuan penuh) lembar saham oleh STP melalui konversi uang muka penyertaan modal. Saldo modal pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp 62.584 ekuivalen dengan 250.335 (dalam satuan penuh) lembar saham.

31 Desember 2023

Berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 12 Juni 2023 dari Hayati Nufus, SH., notaris di Jakarta, ISA menyetujui:

a. Menyetujui penjualan seluruh saham-saham dalam ISA milik MSP kepada PSR, yaitu sebanyak 141.075 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 250.000 (dalam Rupiah penuh) atau sebesar Rp 35.269.

b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor ISA dari Rp 62.584 yang terbagi atas 250.335 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 250.000 (dalam Rupiah penuh) per saham menjadi 251.001 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 250.000 (dalam Rupiah penuh) atau sebesar Rp 62.750 dimana sebesar Rp 167 diambil bagian dan disetor penuh melalui setoran uang muka modal menjadi setoran modal oleh PSR.

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri Grup (GEH dan GES) dari mata uang fungsional mereka (USD) ke mata uang penyajian Grup (Rupiah) diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam selisih penjabaran laporan keuangan.

PT Intaran Surya Agri (ISA)

31 Desember 2022

Based on Notarial Deed No. 03 dated August 22, 2022 of Hayati Nufus., S.H, a notary in Jakarta, approved the capital stock in ISA amounting to Rp 26,959 equivalent to 107,835 (in full amount) shares by STP through advances for capital stock subscriptions conversion. The balance of capital stock as of December 31, 2022 become Rp 62,584 equivalent to 250,335 (in full amount) shares.

31 December 2023

Based on Notarial Deed No. 05 dated June 12, 2023 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, approved:

a. Approved the sell of all shares in ISA owned by MSP to PSR, which consist of 141,075 (in full amount) shares with nominal value of Rp 250,000 (in full Rupiah) or the amount of Rp 35,269.

b. Approved the increase in the issued and paid-up capital of ISA from Rp 62,584 which was divided into 250,335 (in full amount) shares with nominal value of Rp 250,000 (in full Rupiah) per share to 251,001 (in full amount) shares with a nominal value of Rp 250,000 (in full Rupiah) per shares or the amount of Rp 62,750 which amounting Rp 167 was subscribed and fully paid through the conversion of advance for capital subscription into paid-up capital by PSR.

Exchange differences on translating foreign operation of the Group (GEH and GES) from its functional currency (USD) to the Group's presentation currency (Indonesian Rupiah) are recognized directly in other comprehensive income and accumulated in the cumulative translation adjustment.

Pada tahun 2017, Grup melakukan restrukturisasi entitas anak dengan memindahkan kepemilikan saham entitas anak yang sebelumnya dimiliki secara tidak langsung melalui GEH dan GES menjadi dimiliki langsung oleh Perusahaan. Tidak terdapat dampak pada laporan keuangan konsolidasian karena merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang telah dieliminasi pada level konsolidasian.

In 2017, the Group restructured its subsidiaries by transferring indirect ownership of subsidiaries share through GEH and GES into a direct ownership by the Company. There is no impact on the consolidated financial statements as they are restructuring transactions of entities under common control that have been eliminated at the consolidated level.

d. Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi

d. Employees, Board of Commissioners and Directors

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan Akta No. 2 tanggal 8 Mei 2023 dari Novita Puspitarini, S.H., notaris di Jakarta, dan Akta No. 17 tanggal 18 Mei 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, based Notarial Deed No. 2 dated May 8, 2023 of Novita Puspitarini, S.H., a public notary in Jakarta and Notarial Deed No. 17 dated May 18, 2022 of Muhammad Hanafi, S.H., a public notary in Jakarta, the Company's management consists of the following:

	2023	2022	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	Abed Nego	Abed Nego	President Commissioner
Komisaris	Mohammad Prianto Madelar	Deddy Setiadi	Commissioner
Komisaris Independen	Yohanes Wahyu Saronto	Yohanes Wahyu Saronto	Independent Commissioner
Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	Henderi Djunaidi	Henderi Djunaidi	President Director
Direktur	Andrew Haryono	Andrew Haryono	Directors
	Yeoh Lean Khai	Yeoh Lean Khai	

Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The Company's Audit Committee as of December 31, 2023 and 2022 consists of the following:

	2023 dan/*and* 2022	
Ketua	Yohanes Wahyu Saronto	Chairman
Anggota	Riniek Winarsih	Members
	Patia Mamontang Simatupang	

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Direksi.

Key management personnel of the Company consists of Commissioners and Directors.

Jumlah karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 16 karyawan tahun 2023 dan 15 karyawan tahun 2022. Jumlah karyawan Grup (tidak diaudit) adalah 760 karyawan tahun 2023 dan 789 karyawan tahun 2022.

The Company had a total number of employees (unaudited) of 16 in 2023, and 15 in 2022. Total consolidated number of employees of the Group (unaudited) is 760 in 2023 and 789 in 2022.

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Eagle High Plantations Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 12 Juni 2024 oleh Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

e. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of PT Eagle High Plantations Tbk and Its Subsidiaries for the year ended December 31, 2023 were completed and authorized for issuance on June 12, 2024 by the Group's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

2. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2023

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
- PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan; dan
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal".

Penerapan dari amandemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2. New Financial Accounting Standards

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Adopted during 2023

The Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following amendments and interpretations which were effective on or after 1 January 2023 as follows:

- Amendments of PSAK 1 "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies.
- PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Amendments of PSAK 16 "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use; and
- Amendments of PSAK 46 "Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".

The adoption of these amendments and interpretations of the above standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current period or prior financial years.

Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang; dan

- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"; dan

- Amandemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh DSAK-IAI.

Accounting Standard Issued But Not Yet Effective

The Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments, and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2023 as follows:

- Amendments of PSAK 1 "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current;

- Amendments of PSAK 73 "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.

The above standards will be effective on January 1, 2024 and early adoption is permitted.

- Amendments of SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant;

- SFAS 74 "Insurance Contract"; and

- Amendments of SFAS 74 "Insurance Contracts on Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 – Comparative Information".

The above standards will be effective on January 1, 2025.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact from the implementation of these new standards and the effect on the Group's consolidated financial statements.

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAK and ISAK will be changed as published by DSAK-IAI.

3. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan Regulator Pasar Modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

3. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and Regulation of The Capital Market Regulator, namely Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements". Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah) which is also the functional currency of the Company.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup**.**

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

b. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- Power over the investee
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group losses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are fully eliminated in the consolidated financial statements.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

NCI are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Akuntansi Kombinasi Bisnis

c. Accounting for Business Combination

Entitas Sepengendali

Among Entities Under Common Control

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Business combination transaction of entities under common control in form of business transfer with regard to reorganization of entities within the same group of companies does not result in a change of the economic substance of the ownership, thus, the transaction is recognized at carrying value based on pooling of interest method.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Any difference between amount of consideration transferred and the carrying value of each business combination of entities under common control is recognized as additional paid-in capital as part of equity section in the consolidated statement of financial position.

Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

An entity which is disposing a business unit in connection with the disposal of a business unit of an entity under common control recognizes the difference between the consideration received and carrying amount of the disposed business unit as additional paid-in capital as part of equity section in the consolidated statement of financial position.

Akuisisi Terbalik

Reverse Acquisition

Akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek (pihak pengakuisisi secara hukum) diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Entitas yang kepentingan ekuitasnya diperoleh (pihak yang diakuisisi secara hukum) dianggap sebagai pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi dalam transaksi akuisisi terbalik.

Reverse acquisitions occur when the entity that issues securities (the legal acquirer) is identified as the acquiree for accounting purpose. The entity whose equity interests are acquired (the legal acquiree) is considered the acquirer for accounting purposes for a reverse acquisition transaction.

Kondisi berikut dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, termasuk:

The following circumstances are considered in identifying the acquirer in a business combination, including:

- Bagian hak suara dalam entitas hasil penggabungan setelah kombinasi bisnis;
- Keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas hasil kombinasi jika tidak ada pemilik lain yang mempunyai kepentingan suara signifikan;
- Komposisi organ pengatur entitas hasil kombinasi;
- Kombinasi manajemen senior entitas hasil kombinasi;
- Ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas.

Nilai wajar tanggal akuisisi dari imbalan yang secara efektif dialihkan oleh pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk kepentingannya pada pihak yang diakuisisi secara akuntansi didasarkan pada ukuran yang paling andal antara nilai wajar saham entitas induk secara hukum dengan nilai wajar saham entitas anak secara hukum.

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun mengikuti akuisisi terbalik disajikan dengan menggunakan nama entitas induk secara hukum, tetapi sebagai pemberlanjutan laporan keuangan entitas anak secara hukum, dengan satu penyesuaian untuk disesuaikan secara retroaktif atas modal menurut hukum dari pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk merepresentasikan modal dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi. Penyesuaian tersebut disyaratkan untuk merepresentasikan modal dari entitas induk secara hukum. Informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut juga merepresentasikan modal menurut hukum dari entitas induk secara hukum.

Jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan dalam laporan keuangan konsolidasian ditentukan dengan menambahkan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas anak secara hukum sesaat sebelum kombinasi bisnis dan nilai wajar dari imbalan yang secara efektif dialihkan. Struktur ekuitas yang muncul dalam laporan keuangan konsolidasian (jumlah dan jenis saham ekuitas diterbitkan) mencerminkan kepentingan ekuitas dari entitas induk secara hukum, termasuk kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas induk secara hukum dalam rangka kombinasi bisnis.

- The relative voting rights in the combined entity after the business combination;
- The existence of a large minority voting interest in the combined entity if no other owner has a significant voting interest;
- The composition of the governing body of the combined entity;
- The composition of the senior management of the combined entity;
- The terms of the exchange of equity interests.

The acquisition date fair value of the consideration transferred by the accounting acquirer for its interest in the accounting acquiree is based on the most reliable measure between the fair value of the legal parent's shares with the fair value of the legal subsidiary's shares.

Consolidated financial statements prepared following a reverse acquisition is issued under the name of the legal parent but as a continuation of the financial statements of the legal subsidiary, with one adjustment, which is to adjust retroactively the accounting acquirer's legal capital to reflect the legal capital of the accounting acquiree. That adjustment is required to reflect the capital of the legal parent. Comparative information presented in the consolidated financial statements is retroactively adjusted to reflect the legal capital of the legal parent.

The amount recognised as issued equity interests in the consolidated financial statements is determined by adding the issued equity of the legal subsidiary immediately before the business combination and the fair value of the consideration effectively transferred. The equity structure appearing in the consolidated financial statements (the number and type of equity shares issued) reflects the equity structure of the legal parent, including the equity interests issued by the legal parent to effect the combination.

KNP merupakan reklasifikasi bagian KNP atas saldo laba pihak pengakuisisi secara akuntansi sesaat sebelum akuisisi dan atas ekuitas yang diterbitkan pihak pengakuisisi secara akuntansi.

Pengaruh akuisisi terbalik terhadap pelaporan keuangan Perusahaan dan pengungkapan seperti dijelaskan di Catatan 5.

The NCI is the reclassification of NCI share on retained earnings of the accounting acquirer immediately before the acquisition and the accounting acquirer's issued equity shares.

The impact of reverse acqusition on the financial reporting and disclosures of the Company as disclosed in Note 5.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

d. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of each of the Group's companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and the Group's presentation currency.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss. Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2023 and 2022, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

2023		2022	
(dalam Rupiah penuh)/ *(in full Rupiah)*		(dalam Rupiah penuh)/ *(in full Rupiah)*	
1 Dolar Amerika Serikat	15.416	15.731	1 United States (U.S.) Dollar

e. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

f. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

1. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
2. untuk diperdagangkan, atau
3. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

1. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
2. untuk diperdagangkan
3. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

e. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

1. expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
2. held primarily for the purpose of trading, or
3. expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

1. expected to be settled in the normal operating cycle,
2. held primarily to the purpose of trading
3. due to be settled within 12 months after the reporting period, or
4. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

g. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas, bank dan kas pada lembaga pembiayaan bukan bank, yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

h. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, dan penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup memiliki instrument keuangan berupa aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

1. Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
2. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

g. Cash on hand and in banks

Cash consists of cash on hand, in banks and cash in non-bank financial institutions, which are not used as collateral and are not restricted.

h. Financial Instruments

The Group has applied PSAK No. 71, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, and impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2023 and 2022, the Group has financial instruments under financial assets as subsequently measured at amortized cost and financial liabilities as subsequently measured at amortized cost. Thus, accounting policies related to financial instruments under financial assets measured at fair value through other comprehensive income, financial assets measured at fair value through profit or loss, and financial liabilities measured at fair value through profit or loss were not disclosed.

Financial Assets

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

1. The Group's business model for managing the financial assets; and
2. The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

1) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan métode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga, piutang lain-lain, aset lancar lain-lain dan tidak lancar lainnya yang dimiliki oleh Grup.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

2) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2023 and 2022, the Group's cash on hand and in banks, trade accounts receivable third parties, other receivables, other current and non-current assets are included in this category.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost (FVPL), or (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPTL). The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Financial Liabilities at Amortized Cost

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mengklasifikasikan utang bank jangka pendek dan jangka panjang, utang usaha, utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek dan jangka panjang, beban akrual dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang lain-lain dalam kategori ini.

As of December 31, 2023 and 2022, the Group's short-term bank loans and long-term bank loans, trade accounts payable, short-term and long-term loans from non-bank financial institutions, accrued expenses and other current and non-current liabilities are included in this category.

i. Saling Hapus Instrumen Keuangan

i. Offseting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

j. Reklasifikasi Aset Keuangan

j. Reclassification of Financial Assets

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Group reclassifies its financial assets when, and only when, the Group changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup selalu mengakui kerugian kredit ekspetasian (KKE) sepanjang umur untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspetasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan pendekatan tingkat kerugian berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan kondisi ekonomi umum dan penilaian baik atas kondisi kini maupun perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui KKE sepanjang umur jika terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Namun, sebaliknya, risiko kredit pada atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian atas instrumen keuangan sebesar KKE 12 bulan. Penilaian apakah KKE sepanjang umur harus diakui berdasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya. KKE sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspetasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan.

Sebaliknya, KKE 12 bulan mewakili porsi KKE sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

   Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

   a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

k. Impairment of Financial Assets

The Group always recognizes lifetime expected credit losses (ECL) for trade accounts receivable. The expected credit losses on these financial assets are estimated using loss rate approach based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring. Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1. Financial Assets

   Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

   a. the rights to receive cash flows from the asset have expired;

b. Grup tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau

c. Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

I. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

b. the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; or

c. the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

I. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, maka Grup memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

m. Persediaan

m. Inventories

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method.

Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

Allowance for inventory obsolescence and decline in value of the inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable values.

n. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

o. Piutang (utang) Plasma

Piutang (utang) plasma disajikan dalam jumlah neto setelah dikurangi pembiayaan yang diterima dari bank dan cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai diestimasi berdasarkan evaluasi manajemen secara berkala terhadap kolektibilitas dari selisih antara jumlah biaya pengembangan yang dikeluarkan dengan jumlah pembiayaan bank yang dijanjikan.

o. Due From (to) Plasma Projects

Due from (to) plasma projects is presented net of funding received from the banks and allowance for impairment. The allowance for impairment is estimated based on management's periodic evaluation of the collectibility of the differences between development cost and amount financed by the bank.

p. Investasi Plasma

Investasi plasma terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang sementara dibiayai oleh entitas anak termasuk pinjaman pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya kepada petani. Biaya-biaya ini akan ditagihkan kembali ke petani plasma dan disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi jumlah yang disetujui yang telah diterima dari petani plasma dan cadangan penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung dari kelebihan jumlah biaya pengembangan dan jumlah yang disetujui oleh petani plasma.

p. Plasma Investments

Plasma investment consists of costs incurred for developing plasma plantations which are temporarily funded by the subsidiaries and include advances to farmers for fertilizing and other agricultural production costs. These costs are billed to plasma farmers and are presented net of the agreed amount of the receivables from plasma farmers and allowance for impairment.

The allowance for impairment is estimated based on the excess of accumulated developments costs and the amounts agreed by the plasma farmers.

q. Aset Biologis

Aset biologis terkait dengan hasil pertanian yang tumbuh pada tanaman produktif, yakni Tandan Buah Segar (TBS) dan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

NIlai wajar TBS diperkirakan dengan mengacu pada perkiraan jumlah yang dipanen dan estimasi harga jual TBS pada tanggal pelaporan, setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar dikurangi dengan taksiran biaya untuk menjual TBS pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi untuk periode saat terjadinya.

q. Biological Asset

Biological asset relates to agricultural produce growing on bearer plants, which is referred to as Fresh Fruit Bunches (FFB) and are stated at fair value less costs to sell.

The fair value of FFB is estimated by reference to the projected harvest quantities and estimated selling price of FFB as of the reporting date, less cost to sell.

Gain or losses arising from the changes in fair value less estimated costs to sell of FFB at each reporting date are included in profit or loss for the period in which they arise.

r. Tanaman Produktif

Tanaman produktif dikelompokkan menjadi tanaman menghasilkan, tanaman belum menghasilkan dan pembibitan.

Tanaman menghasilkan

Tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan setelah 4 tahun masa tanam. Jangka waktu untuk menjadi tanaman menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian manajemen.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi.

Tanaman menghasilkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa produktif tanaman yaitu 20 tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai.

Tanaman belum menghasilkan

Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum menghasilkan dan biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam. Pada saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasi harga perolehan tersebut akan direklasifikasi ke tanaman menghasilkan.

Pembibitan

Biaya-biaya yang terjadi untuk pembibitan, pembelian bibit dan pemeliharaannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tanaman belum menghasilkan" pada saat siap ditanam.

r. Bearer Plants

Bearer plants are classified as mature plantations, immature plantations and nurseries.

Mature Plantations

Palm oil plantations are considered mature in 4 years after planting. Actual time to maturity is dependent upon vegetative growth and assessment by management.

Mature plantations are stated at cost, less accumulated amortization.

Mature plantations are amortised using the straight line method over the estimated productive life of 20 years starting from the commencement of commercial production.

Immature plantations

Immature plantations are stated at acquisition cost which includes costs incurred for field preparation, planting, fertilizing and maintenance, including capitalization of borrowing costs incurred on loans used to finance the development of immature plantations and an allocation of other indirect costs based on planted hectares. When the plantations are mature, the accumulated costs are reclassified to mature plantations.

Nurseries

Costs incurred in the preparation of the nurseries, purchase of seedlings and their maintenance are stated at cost. The accumulated costs are transferred to "Immature plantations" account at the time of planting.

s. Aset Tetap

Pemilikan Langsung

Aset tetap pemilikan langsung, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

s. Property, Plant and Equipment

Direct Acquisition

Direct acquisitions of property, plant and equipment, except for land, are stated at cost, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is stated at cost less any impairment in value and is not depreciated.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

The initial cost of property, plant and equipment consists of its purchase price, including import duties and non-refundable taxes and any directly attributable costs in bringing the property, plant and equipment to its working condition and location for its intended use.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated.

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Costs related to extension or renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus *(straight-line method)* selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Expenditures incurred after the property, plant and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to profit or loss in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property, plant and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalised as additional costs of property, plant and equipment. Depreciation is computed on a straight-line basis over the property, plant and equipment's useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan dan prasarana	10-25	Buildings and land improvements
Mesin	4-20	Machineries
Kendaraan dan alat berat	5-8	Vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	4-8	Furniture, fixtures and equipment

Nilai tercatat aset tetap direviu kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan.

The carrying amounts of property, plant and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya *(derecognised)* pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan. berikutnya.

The carrying amounts of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of property, plant and equipment calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The asset's residual values, useful life and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriated, at each financial year end.

Aset Dalam Konstruksi

Construction in Progress

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

Construction in progress represents property, plant and equipment under construction which is stated at cost and is not depreciated. The accumulated costs will be reclassified to the respective property and equipment account and will be depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

t. Aset Tidak Berwujud

t. Intangible assets

Goodwill

Goodwill

Goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill tidak dapat dipulihkan. Keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat pelepasan entitas anak harus memperhitungkan nilai tercatat goodwill dari entitas anak yang dijual tersebut.

Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on the disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill dialokasikan ke UPK untuk tujuan uji penurunan nilai. Alokasi dilakukan ke UPK atau kelompok UPK yang diharapkan akan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis yang menimbulkan goodwill tersebut.

Goodwill is allocated to CGU for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those CGU or groups of CGU that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose.

Lisensi

Lisensi yang diperoleh secara terpisah disajikan pada biaya perolehan. Lisensi yang diperoleh dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lisensi memiliki umur manfaat terbatas dan disajikan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus yang mengalokasikan biaya perolehan lisensi tersebut sepanjang estimasi umur manfaat.

Perangkat Lunak

Biaya yang dibayarkan atas layanan piranti lunak komputer ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode perjanjian.

Licenses

Separately acquired licenses are shown at historical cost. Licenses acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Licenses have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of licenses over their estimated useful lives.

Software

Costs incurred from the acquisition of computer software and software service fee are deferred and are amortized using the straight-line method over the term of the agreement.

u. Transaksi Sewa

Grup menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai ‘sewa operasi’.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
    1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;

u. Lease Transactions

The Group has applied PSAK No. 73, which sets the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as operating lease.

As lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
    1. The Group has the right to operate the asset;

2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relative dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Sewa jangka pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Short-term lease

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

As lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

Transaksi jual dan sewa balik

Pencatatan transaksi jual dan sewa balik bergantung kepada apakah pengalihan aset memenuhi syarat sebagai penjualan. Grup menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSAK No. 72 telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan.

Pengalihan aset merupakan penjualan

Jika pengalihan aset oleh Grup sebagai penjual-penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 72 untuk dicatat sebagai penjualan, maka Grup mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak-guna yang dipertahankan oleh Grup. Dengan demikian Grup mengakui hanya jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli-pesewa.

Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka Grup melakukan penyesuaian sebagai berikut:

- jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran diterima di muka; dan
- jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli-pesewa kepada Grup.

Grup mengukur kemungkinan penyesuaian yang disyaratkan di atas berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari:

- selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset; dan
- selisih antara nilai pembayaran kontraktual sewa dan nilaI kini pembayaran sewa pada harga pasar.

Sale and leaseback transactions

The accounting for sale and leaseback transaction depends on whether the transfer of the asset qualifies as sale. The Group applies the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in PSAK No. 72 to determine whether the transfer of an asset is accounted for as a sale.

Transfer of the asset is a sale

If the transfer of an asset by the Group as the seller-lessee satisfies the requirements of PSAK No. 72 to be accounted for as a sale, then the Group measures the right-of-use assets arising from the leaseback at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right-of-use retained by the Group. Accordingly, the Group recognizes only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred to the buyer-lessor.

If the fair value of the consideration for the sale of an asset does not equal the fair value of the asset, or if the payments for the lease are not at market rates, the Group makes the following adjustments to measure the sale proceeds at fair value:

- any below-market terms shall be accounted for as a prepayment of lease payments; and
- any above-market terms shall be accounted for as additional financing provided by the buyer-lessor to the Group.

The Group measures any potential adjustment required above on the basis of the more readily determinable of:

- the difference between the fair value of the consideration for the sale and the fair value of the asset; and
- the difference between the present value of the contractual payments for the lease and the present value of payments for the lease at market rates.

v. Saham Treasuri

Pada saat Perusahaan membeli kembali saham Perusahaan (saham treasuri), maka imbalan yang dibayarkan, termasuk biaya-biaya transaksi inkremental yang teratribusikan langsung (bersih setelah pajak penghasilan), dikurangkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan sampai dengan saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Jika saham tersebut kemudian diterbitkan kembali, maka setiap imbalan yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya-biaya transaksi inkremental yang teratribusikan langsung dan dampak pajak penghasilan, dibukukan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan.

v. Treasury Stocks

Where the Group purchases the Group's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental transaction costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Group's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary share are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Group's equity holders.

w. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

w. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

x. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

x. Shares Issuance Costs

Shares issuance costs are deducted from the additional paid in capital portion of the related proceeds from issuance of shares and are not amortised.

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Grup menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

y. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

The Group has applied PSAK No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand- alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods to a customer (which is when the customer obtains control on that goods) which is at point in time.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau

b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Uang muka diterima".

Biaya penambahan yang secara langsung berhubungan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan, biaya tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK No. 72 dan diakui sebagai “Aset takberwujud”. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

A performance obligation may be satisfied at the following:

a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade accounts receivables" and contract liabilities are presented under "Advances received”.

The incremental costs that directly relate to obtaining a contract (“cost to obtain”) and are expected to be recovered are eligible for capitalization under PSAK No. 72 and recognized as “Intangible assets”. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Interest income and interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

z. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

z. Borrowing Costs

Borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets are capitalised as part of the acquisition cost of the qualifying assets. Other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Grup menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara subtansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

To the extent that the Group borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the Group determines the amount of borrowing costs eligible for capitalization as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the year less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

If there is suspension development on qualifying assets, the Group suspends capitalization of borrowing costs during extended periods.

The Group ceases capitalizing borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.

aa. Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari rugi komprehensif lain. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

aa. Employee Benefits

Short-term employee benefits liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term employee benefits liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in other equity component. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

bb. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan disajikan dengan menggunakan metode liabilitas, untuk semua perbedaan temporer yang muncul akibat perbedaan perhitungan tarif dasar pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam rangka kebutuhan laporan keuangan per tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

cc. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

bb. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

cc. Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing net income attributable to owners of the Parent Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

dd. Segmen Operasi

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

ee. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

dd. Operations Segment

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

ee. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

4. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. Management Use of Estimates, Judgments and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Mata Uang Fungsional

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional entitas anak luar negeri.

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Functional Currency

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency of the foreign subsidiaries.

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 3.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Group assesses whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Group shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as of the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah KKE 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

The Group measures the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Nilai tercatat aset keuangan Grup dalam kategori Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The carrying values of the Group's financial instruments categorized as financial assets at amortized cost as of December 31, 2023 and 2022 follows:

	2023	2022	
Kas dan bank	27.378	108.876	Cash on hand and in banks
Piutang usaha pihak ketiga	32.137	41.005	Trade accounts receivable - third parties
Piutang lain-lain	10.008	13.553	Other accounts receivable
Aset lancar lain-lain	80.000	230.000	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	29.575	43.972	Other non - current assets
Jumlah	179.098	437.406	Total

d. Komitmen Sewa

Komitmen Sewa - Grup Sebagai Penyewa

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan serta perjanjian sewa sejumlah mesin dan peralatan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

Komitmen Sewa Operasi - Grup Sebagai Pesewa

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa *bulking*. Grup menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Grup menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

d. Lease Commitments

Operating Lease Commitments - Group as Lessee

The Group has entered into various lease agreements for commercial spaces and commercial machineries and equipment. The Group has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases.

Operating Lease Commitments - Group as Lessor

The Group has entered into various commercial lease agreements. The Group has determined that it is an operating lease since the Group bears substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian.

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 45 to the consolidated financial statements.

b. Estimasi Masa Manfaat Tanaman Produktif dan Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing tanaman produktif dan aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktorfaktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap tanaman produktif dan aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan tanaman produktif.

Nilai tercatat tanaman produktif dan aset tetap masing-masing diungkapkan pada Catatan 15 dan 16.

b. Estimated Useful Lives of Bearer Plants and Property, Plant and Equipments

The useful life of each of the item of the Group's bearer plants and property, plant and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of bearer plants and property, plant and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of bearer plants and property, plant and equipment are set out in Notes 15 and 16, respectively.

c. Penurunan Nilai Goodwill

Uji penurunan nilai goodwill wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

c. Impairment of Goodwill

Impairment testing for goodwill is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indications of impairment. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (CGU) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumption may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of the Group's operations.

Berdasarkan penelaahan manajemen, jumlah kerugian penurunan nilai goodwill sebesar Rp 20.000 diakui pada tahun 2023. Nilai tercatat aset tak berwujud, dimana telah diuji penurunan nilai, disajikan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan konsolidasian.

Based on the assessment of management, an impairment loss on goodwill of Rp 20,000 was recognized in 2023. The carrying values of assets, on which impairment analysis are applied, were described in Note 17 to the consolidated financial statements.

d. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset non-keuangan yang berupa tanaman produktif dan aset tetap diungkapkan masing-masing pada Catatan 15 dan 16 atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Impairment of Non-financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying values of these assets which comprise of bearer plant and property, plant and equipment are disclosed in Notes 15 dan 16 to the consolidated financial statements, respectively.

e. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 35 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e. Long-term Employee Benefits Liability

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 35 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang diungkapkan pada Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian.

The carrying value of long-term employee benefits liability is disclosed in Note 35 to the consolidated financial statements.

f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Nilai tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan di Catatan 36 pada laporan keuangan konsolidasi.

f. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. The carrying value of deferred tax assets is disclosed in Note 36 to the consolidated financial statement.

g. Aset Biologis

Perhitungan nilai wajar aset biologis dipengaruhi oleh asumsi harga jual dan proyeksi hasil panen Tandan Buah Segar. Peningkatan (penurunan) harga dan proyeksi hasil panen akan berbanding lurus dengan peningkatan (penurunan) nilai wajar aset biologis. Nilai wajar aset biologis diungkapkan pada Catatan 13 atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Biological Asset

The calculation of biological asset fair value depends on the assumptions of selling price and projected quantity of the harvested Fresh Fruit Bunches. An increase (decrease) in price and projected harvesting will proportionally increase (decrease) the fair value of biological asset. The fair value less cost to sell of biological asset is disclosed in Note 13 to the consolidated financial statements.

5. Kombinasi Bisnis

Akuisisi Terbalik

Tanggal 24 Desember 2014, Perusahaan mengakuisisi 37.145.707 saham (100% kepemilikan) Green Eagle Holding Pte. Ltd., (GEH), Perusahaan yang berkedudukan di Singapura dengan menerbitkan saham melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sebesar 27.021.678.000 saham atau sejumlah Rp 10.808.671 yang sebagian besar diambil oleh PT Rajawali Capital International (RCI). Setelah PUT I, RCI menguasai 65,54% kepemilikan saham Perusahaan, sehingga RCI memperoleh pengendalian atas Perusahaan. GEH dan RCI memiliki pemegang saham utama yang sama.

Akuisisi ini diperlakukan sebagai akuisisi terbalik dimana GEH diidentifikasi sebagai pengakuisisi untuk tujuan akuntansi dan Perusahaan diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi.

5. Business Combination

Reverse Acquisition

On December 24, 2014, the Company acquired 37,145,707 shares (100% ownership) of Green Eagle Holding Pte. Ltd (GEH)., a company based in Singapore by issuing 27,021,678,000 shares or Rp 10,808,671 through Limited Public Offering I (PUT I) part of which was acquired by PT Rajawali Capital International (RCI). After PUT I, RCI owned 65.54% of the Company's shares so that RCI obtained control over the Company. GEH and RCI have the same ultimate shareholder.

This acquisition is accounted for as a reverse acquisition with GEH being identified as the acquirer for accounting purposes and the Company being identified as the acquiree for accounting purposes.

Mengingat bahwa Perusahaan dianggap sebagai yang diakuisisi, *goodwill* atas kombinasi bisnis yang terjadi dihitung sebagai selisih antara nilai wajar aset teridentifikasi neto Perusahaan dan nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan, sehubungan dengan transaksi akuisisi ini adalah sebagai berikut:

Given that the Company is the deemed acquiree, goodwill on business combination is computed as the difference between the fair value of the net identifiable assets of the Company and the fair value of the consideration effectively transferred as follows:

Imbalan yang secara efektif dialihkan	6.214.981	Consideration effectively transferred
Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi Perusahaan yang diakui	(5.296.819)	Fair value of the Company's identifiable assets and liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	212.067	Deferred tax liability
Goodwill	1.130.229	Goodwill

Struktur modal dalam jumlah saham yang disajikan adalah jumlah saham Perusahaan, tetapi jumlah dalam nilai dari saham yang diterbitkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah jumlah saham GEH sesaat sebelum akuisisi, ditambah imbalan yang secara efektif dialihkan dari GEH dan nilai saham yang diterbitkan oleh Perusahaan untuk mengakuisisi GEH, ditambah setiap penerbitan saham Perusahaan setelah transaksi akuisisi ini. Atas jumlah modal yang diterbitkan tersebut, dilakukan satu penyesuaian untuk menyesuaikan secara retroaktif atas modal menurut hukum, dari pihak pengakuisisi secara akuntansi, yaitu GEH, untuk mencerminkan modal dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi, yaitu Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

The capital structure in terms of the number of shares are the shares of the Company, but the amount of the issued share capital in the consolidated statements of financial position immediately prior to the acquisition is that of GEH, plus the consideration effectively transferred by GEH and the value of shares issued by the Company to acquire GEH, plus any share issued by the Company subsequent to the transaction. For the amount of the issued share capital, an adjustment was made to reflect retroactively the accounting acquirer's statutory capital, being GEH, to reflect the statutory capital of the accounting acquiree, being the Company, with detail as follows:

Jumlah saham yang diterbitkan / Number of shares issued

	31 Desember/ *December 31,* 2014	
Modal saham GEH sesaat sebelum kombinasi bisnis	321.533	Existing share capital of GEH immediately prior to business combination
Imbalan yang secara efektif dialihkan	6.214.981	The consideration effectively trasferred
Penyesuaian ke modal saham Perusahaan	(3.383.985)	Adjustment to the Company's share capital
Jumlah	3.152.529	Total

Penyesuaian ke modal saham Perusahaan dicatat sebagai tambahan modal disetor pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014.

Adjustment to the Company's share capital was recorded as additional paid-in capital in the consolidated statement financial position of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2014.

Saldo penyesuaian ke modal saham Perusahaan tanggal 1 Januari 2014	125.585	Total adjustments to the Company's share capital as of January 1, 2014
Peningkatan modal saham sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham	3.243	Additional paid-in capital from stock option exercised
Penawaran Umum Terbatas I	2.702.168	Limited Public Offering I
Imbalan yang secara efektif dialihkan	(6.214.981)	The consideration effectively transferred
Saldo penyesuaian ke modal saham Perusahaan tanggal 31 Desember 2014	(3.383.985)	Total adjustments to the Company's share capital as of December 31, 2014

Pada tahun 2014 saat terjadinya akuisisi, laporan keuangan konsolidasian yang disusun mengikuti akuisisi terbalik disajikan dengan menggunakan nama entitas induk secara hukum, yaitu Perusahaan, tetapi sebagai pemberlanjutan laporan keuangan GEH, sebagai entitas anak secara hukum.

Since 2014 at the acquisition date, the consolidated financial statements prepared following the reverse acquisition were issued under the name of the legal parent, being the Company, but as a continuation of the financial statements of the GEH, being the legal subsidiary.

6. Kas dan Bank / 6. Cash on Hand and in Banks

	2023	2022	
Kas	1.096	1.968	Cash on hand
Bank - pihak ketiga			Cash in banks - third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Raya Indonesia Tbk	10.312	227	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.280	49.940	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	2.584	6.490	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.638	15.896	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.579	17.262	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.028	5.008	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia	992	992	PT Bank Muamalat Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	211	241	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank IBK Indonesia Tbk	181	179	PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	105	3.160	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	92	6.031	PT Bank DBS Indonesia
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100)	8	68	Others (each less than Rp 100)
Subjumlah	25.010	105.494	Subtotal
Dolar Amerika Serikat (Catatan 39)			U.S. Dollar (Note 39)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	283	111	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	95	100	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100)	94	115	Others (each less than Rp 100)
Subjumlah	472	326	Subtotal
Jumlah - Bank	25.482	105.820	Total - Cash in banks
Lainnya - Rupiah			Others - Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	800	1.088	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Jumlah	27.378	108.876	Total

Bunga atas penempatan bank dan lainnya sebesar 0 % - 2,5 % masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

Interest rate on placements of bank and others amounted 0% - 2.5% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

7. Piutang Usaha – Pihak Ketiga

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
a. Berdasarkan Pelanggan			**a. By Customers**
Rupiah			Rupiah
PT Sari Dumai Sejati	18.383	1.887	PT Sari Dumai Sejati
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	5.384	15.192	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	5.048	5.048	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
PT Megasurya Mas	4.865	-	PT Megasurya Mas
PT Tunas Prima Sejahtera	3.015	4.820	PT Tunas Prima Sejahtera
PT Arjuna Utama Sawit	2.051	6.683	PT Arjuna Utama Sawit
PT Wilmar Nabati Indonesia	100	2.937	PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Limpah Sejahtera	-	4.525	PT Limpah Sejahtera
PT Bukit Palem	-	2.928	PT Bukit Palem
PT Bina Karya Prima	-	2.071	PT Bina Karya Prima
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 2.000)	2.960	7.951	Others (each less than Rp 2,000)
Jumlah	41.806	54.042	Total
Cadangan penurunan nilai	(9.669)	(13.037)	Allowance for impairment
Jumlah bersih	32.137	41.005	Total - net
b. Berdasarkan Umur			**b. By Age**
Belum jatuh tempo	25.641	21.239	Not past due
Jatuh tempo:			Past due:
dibawah 30 hari	2.953	4.232	Less than 30 days
31-60 hari	462	4.930	31 - 60 days
61 - 90 hari	1.501	1.811	61 - 90 days
Diatas 90 hari	11.249	21.830	More than 90 days
Jumlah	41.806	54.042	Total
Cadangan penurunan nilai	(9.669)	(13.037)	Allowance for impairment
Jumlah bersih	32.137	41.005	Total - Net

Periode normal atas penerimaan hasil penjualan adalah dalam waktu 30 hari.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

7. Trade Accounts Receivable – Third Parties

The details of trade accounts receivable are as follows:

The normal collection period of sales proceeds is within 30 days.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade accounts receivable from third parties.

The changes in allowance for impairment of trade accounts receivables are detailed as follows:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	13.037	12.581	Balance at the beginning of the year
Penambahan (pemulihan) tahun berjalan	(3.368)	456	Provisions (reversal) during the year
Saldo akhir tahun	9.669	13.037	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment losses of trade accounts receivables as of December 31, 2023 and 2022 is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 125.771 (dijaminkan secara fidusia maksimal sebesar Rp 339.718) dan Rp 134.186 (dijaminkan secara fidusia maksimal sebesar Rp 348.134) digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank entitas anak (Catatan 19 dan 24).

Trade accounts receivables as of December 31, 2023 and 2022 of Rp 125,771 (out of fiduciary agreement with maximum amount of Rp 339,718) and Rp 134,186 (out of fiduciary agreement with maximum amount of Rp 348,134) are used as collateral for certain subsidiaries' bank loans and loan from non-bank financial institution (Notes 19 and 24).

8. Piutang Plasma / 8. Plasma Receivables

Rincian piutang plasma adalah sebagai berikut:

The details of plasma receivables are as follows:

	2023	2022	
Berdasarkan perkebunan plasma			**By plasma plantation**
Koperasi Tani Sawita Susjetkri	138.038	106.782	Koperasi Tani Sawita Susjetkri
Koperasi Bedaun Maju Bersama	61.579	38.787	Koperasi Bedaun Maju Bersama
Koperasi Bina Masyarakat	29.997	22.638	Koperasi Bina Masyarakat
Koperasi Jasa Bukit Menuah	26.749	13.008	Koperasi Jasa Bukit Menuah
Koperasi Kelumpang Bersama	17.471	152	Koperasi Kelumpang Bersama
Koperasi Mitra Koling	13.647	11.235	Koperasi Mitra Koling
Koperasi Agri Bisnis Mitra Sejahtera	12.748	197	Koperasi Agri Bisnis Mitra Sejahtera
Koperasi Mitra Usaha	12.325	15.574	Koperasi Mitra Usaha
Koperasi Sawit Sejati	10.632	12.771	Koperasi Sawit Sejati
Koperasi Pesaguan Cita Sejahtera*	-	59.776	Koperasi Pesaguan Cita Sejahtera*
Koperasi Kayong Raya*	-	12.024	Koperasi Kayong Raya*
Koperasi Andai Kasih Sejahtera*	-	8.740	Koperasi Andai Kasih Sejahtera*
Lain - Lain (masing-masing kurang dari Rp 7.000)	11.739	12.538	Others (each less than Rp 7,000)
Jumlah	334.925	314.222	Total

*) *Koperasi milik entitas anak yang dijual pada tahun 2023 (Catatan 44)*

*) *Farmers Group owned by subsidiaries are sold in 2023 (Note 44).*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang plasma merupakan beban untuk perkebunan plasma yang termasuk pemupukan, pemeliharaan tanaman dan aktivitas agrikultur lainnya.

As of December 31, 2023 and 2022, plasma receivable represents expenses incurred for plasma plantations which include fertilizing, upkeeping and other agricultural activities.

Manajemen berpendapat bahwa piutang plasma dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that plasma receivable is fully collectible, thus, no allowance for impairment losses was provided.

9. Pajak Dibayar Dimuka / 9. Prepaid Taxes

	2023	2022	
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	64.951	82.173	Value Added Tax - net
Pajak Penghasilan Pasal 22	-	4.676	Income Tax of Article 22
Jumlah	64.951	86.849	Total

10. Piutang Lain-Lain / 10. Other Receivables

	2023	2022	
Piutang proyek kebun	7.346	11.802	Estate project receivables
Piutang karyawan	2.101	1.172	Receivables from employees
Piutang klaim asuransi	561	579	Insurance claims receivables
Jumlah	10.008	13.553	Total

Manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain dan piutang karyawan dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that other receivables and receivables from employee are fully collectible, thus, no allowance for impairment losses was provided.

11. Biaya Dibayar Dimuka / 11. Prepaid Expenses

	2023	2022	
Progam kepemilikan kendaraan bermotor	38.559	44.223	Motor vehicle ownership program
Perbaikan dan perawatan	38.274	31.495	Service and maintenance
Proyek dan plasma	20.111	23.317	Project and plasma
Perlengkapan kantor	7.387	7.804	Office supplies
Asuransi	6.895	5.755	Insurance
Pembelian kendaraan dan alat berat	3.635	3.992	Deposit of vehicle and heavy equipment
Sewa kantor dan kendaraan	2.294	8.740	Office and vehicle rent
Perjalanan dinas	2.116	3.183	Travelling
Langganan	154	732	Membership
Jumlah	119.425	129.241	Total

12. Persediaan / 12. Inventories

	2023	2022	
Barang jadi	79.357	268.653	Finished goods
Pupuk dan pestisida	59.755	136.706	Fertilizer and pesticides
Suku cadang	38.242	36.117	Spareparts
Bahan bakar dan pelumas	9.944	11.976	Gasoline and lubricants
Pestisida	7.221	6.965	Pesticides
Bahan kontruksi	6.638	7.590	Construction Materials
Bibit	3.982	4.334	Seedling
Bahan pembantu	3.046	5.551	Supporting materials
Bahan listrik	2.846	2.616	Elecrical materials
Peralatan perkebunan	2.503	2.968	Plantation Tools
Bahan reparasi	1.182	1.088	Workshop tools
Perlengkapan kantor	983	1.011	Office Supplies
Persediaan Medis	852	763	Medical supplies
Laboratorium	539	735	Laboratorium supplies
Perlengkapan damkar	186	221	Firefighter supplies
Jumlah	217.276	487.294	Total
Cadangan penurunan nilai	(3.144)	(3.144)	Allowance for decline in value
Jumlah bersih	214.132	484.150	Total - net

Barang jadi terdiri dari minyak kelapa sawit (*crude palm oil*) dan inti sawit *(palm kernel*).

Finished goods consist of crude palm oil and palm kernel.

Persediaan telah diasuransikan kepada pihak ketiga dengan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT MSIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Lippo General Insurance, PT Assurance ETIQA Internasional Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Avrist General Insurance, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, PT Asurnasi Bina Dana Artha untuk 31 Desember 2023, dan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT MSIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Lippo General Insurance, PT Assurance ETIQA Internasional Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta untuk 31 Desember 2022 terhadap kerugian atas kebakaran, kehilangan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 180.286 dan Rp 244.253.

Inventories are insured with third parties, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT MSIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Lippo General Insurance, PT Assurance ETIQA Internasional Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta as of December 31, 2023 and PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT MSIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Lippo General Insurance, PT Assurance ETIQA Internasional Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta as of December 31, 2022, against losses from fire, theft and other inventories risks amounting to Rp 180,286 and Rp 244,253, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that might arise from such risks on the inventories insured.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai realisasi bersihnya.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed the net realizable value.

Persediaan sebesar Rp 65.142 dan Rp 76.565 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank (Catatan 19 dan 24).

As of December 31, 2023 and 2022, inventories amounting to Rp 65,142 and Rp 76,565, respectively, are used as collateral on certain bank loans and loan from non bank financial institution (Notes 19 and 24).

13. Aset Biologis / Biological Assets

Aset biologis merujuk pada hasil perkebunan yang tumbuh pada tanaman produktif, yakni produk agrikultur berupa Tandan Buah Segar (TBS), dan dicatat pada nilai wajar aset biologis yang ditentukan berdasarkan estimasi harga jual dan perkiraan jumlah panen TBS, dikurangi dengan biaya untuk menjual.

Biological assets refer to the agricultural produce growing on mature plantations, in form of Fresh Fruit Bunches (FFB), and the fair values of biological assets are recorded and determined based on the estimated selling price and projected harvest quantity of FFB, less cost to sell.

Berikut merupakan rekonsiliasi nilai wajar aset biologis:

The following is the reconciliation in the biological asset's fair values:

	2023	2022	
Saldo awal	292.957	257.471	Beginning balance
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	13.771	35.486	Gain arising from changes in fair value of biological assets
Jumlah	306.728	292.957	Total
Penjualan entitas anak (Catatan 44)	(20.028)	-	Disposal of subsidiaries (Note 44)
Saldo akhir	286.700	292.957	Ending balance

Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Gain arising from changes in fair value of biological asset is recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai pengukuran nilai wajar menggunakan masukan yang tidak dapat diamati (level 3):

The following table shows the information about fair value measurements using unobservable input (level 3):

	31 Des 2023/ *Dec 31, 2023*	31 Des 2022/ *Dec 31, 2022*	Pendekatan penilaian/ *Valuation techniques*	Masukan yang tidak teramati/ *Unobservable inputs*	
Nilai wajar TBS sebagai aset biologis (Rp)	286.700	292.957	Pendekatan pendapatan/ *Income approach*	Estimasi harga jual dikurangi biaya untuk menjual dan perkiraan jumlah yang dipanen/ *Estimated selling price less cost to sell and projected harvest quantities*	Fair value FFB as biological assets (Rp)
Hasil panen TBS (ton)	975.251	935.523	-	-	The quantity of harvested FFB (tonnes)

Penilaian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, ditetapkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan, penilai independen dalam laporan masing-masing tertanggal 15 Februari 2024 dan 27 Februari 2023.

As of December 31, 2023 and 2022, the valuation was arrived at on the basis of valuation carried out by KJPP Iskandar dan Rekan, an independent valuer, in their reports dated February 15, 2024 and February 27, 2023, respectively.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset biologis adalah:

- Estimasi harga jual dikurangi biaya untuk menjual
  Peningkatan (penurunan) harga jual dikurangi biaya untuk menjual akan meningkatkan (menurunkan) nilai wajar aset biologis.
- Perkiraan jumlah yang dipanen
  Peningkatan (penurunan) perkiraan jumlah yang dipanen akan meningkatkan (menurunkan) nilai wajar aset biologis.

Assumptions used in determining the fair value of biological asset are:

- Estimated selling price less cost to sell
  Increase (decrease) in estimated selling price less cost to sell would increase (decrease) the fair value of biological asset.
- Projected harvest quantities
  Increase (decrease) in projected harvest quantities would increase (decrease) the fair value of biological asset.

14. Aset Lancar Lain – lain / 14. Other Current Assets

	2023	2022	
Kas dibatasi penggunaannya	80.000	230.000	Restricted cash
Investasi plasma	4.115	17.206	Plasma investment
Jumlah	84.115	247.206	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023, kas dibatasi penggunaannya sebesar Rp 80.000 digunakan sebagai jaminan atas utang bank Perusahaan dan STP. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022, kas dibatasi penggunaannya sebesar Rp 230.000 digunakan sebagai jaminan atas utang bank Perusahaan serta JMS dan STP (Catatan 19).

As of December 31, 2023, restricted cash amounting to Rp 80,000 is used as collateral for the Company and STP bank loans. As of December 31, 2022, restricted cash amounting to Rp 230,000 is used as collateral for the Company, JMS and STP bank loans (Note 19).

Investasi plasma

Entitas anak sebagai perkebunan inti diwajibkan oleh peraturan Pemerintah untuk mengembangkan perkebunan plasma. Akun ini merupakan biaya yang terjadi untuk pengembangan plasma dalam tahap pengembangan atau tahap menghasilkan, yang akan atau telah dikonversi menjadi perkebunan plasma. Investasi plasma yang akan mendapatkan kredit fasilitas dari bank dalam jangka waktu satu tahun diklasifikasikan sebagai aset lancar lain-lain.

Plasma investment

The subsidiaries as nucleas are obliged under Government regulations to develop the plasma plantations. This account represents the development cost incurred in developing plasma either at development stage or mature stage, which will be and have been converted to plasma plantations. The plasma investment which will receive credit facility from bank in less than one year is classified as other current assets.

Jumlah konversi termasuk biaya pengembangan dan biaya bunga selama masa pengembangan hingga konversi perkebunan plasma. Dalam hal kelebihan biaya melebihi jumlah yang disepakati di awal, akan ditanggung oleh entitas anak.

The conversion amount includes development cost and interest during development up to conversion of plasma plantations. In case of cost overruns, excess cost over the agreed amount at the inception will be borne by the subsidiaries.

Jumlah konversi tersebut disepakati di awal perjanjian dengan petani plasma dan akan didanai oleh perusahaan inti, jika tidak didanai oleh bank.

Such total conversion amount is agreed with the plasma farmers from the outset in the agreement and will be funded by the nucleas should it not be funded by bank.

Ikhtisar perkebunan plasma sebagai berikut:

Summary of plasma plantations is as follows:

Perusahaan Inti/*Nucleus*	Lokasi/*Location*	Kelompok Tani/*Farmers Group*
PT Jaya Mandiri Sukses	Kalimantan Timur / *East Kalimantan*	Koperasi Leka Mandiri, Keham Lestari, Agung Baya, Leka Transmigrasi dan/and Keham Transmigrasi
	Kalimantan Selatan / *South Kalimantan*	Koperasi Mufakat Bersama dan/*and* Marga Mulya
PT Manunggal Adi Jaya	Kalimantan Timur / *East Kalimantan*	Koperasi Jaya Guna Mekar Sejahtera, dan/and Serba Usaha Agribisnis Mitra Sejahtera
	Kalimantan Selatan / *South Kalimantan*	Koperasi Kelumpang Bersama
PT Suryabumi Tunggal Perkasa	Kalimantan Timur / *East Kalimantan*	Koperasi Agung Baya
	Kalimantan Selatan / *South Kalimantan*	Koperasi Trihampang Bersatu
PT Saka Kencana Sejahtera	Kalimantan Selatan / *South Kalimantan*	Koperasi Mitra Usaha
PT Singaland Asetama	Kalimantan Selatan / *South Kalimantan*	Koperasi Madani
PT Pesonalintas Surasejati	Kalimantan Timur / *East Kalimantan*	Koperasi Sawit Bersatu
PT Bumilanggeng Perdanatrada	Kalimantan Tengah / *Central Kalimantan*	Koperasi Bedaun Maju Bersama dan/*and* Kumai Hulu Seberang
PT Bumihutani Lestari	Kalimantan Tengah / *Central Kalimantan*	Koperasi Petak Sembelum dan/*and* Mitra Koling
PT Tandan Sawit Papua	Papua	Koperasi Tani Sawita Susjetkri
PT Arrtu Plantation*	Kalimantan Barat / *West Kalimantan*	Koperasi Pesaguan Cita Sejahtera
PT Arrtu Borneo Perkebunan*	Kalimantan Barat / *West Kalimantan*	Koperasi Perkebunan Kayong Raya

**) Koperasi milik entitas anak yang dijual pada tahun 2023 (Catatan 44)*

**) Farmers Group owned by a subsidiaries are disposed in 2023 (Note 44)*

15. Tanaman Produktif

15. Bearer Plants

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	Perubahan selama tahun 2023/ *Changes during 2023*			31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
		Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Penjualan entitas anak/ *Disposal of subsidiaries*		
Biaya perolehan:						At cost:
Tanaman menghasilkan	7.137.774	-	(11.690)	(1.076.447)	6.049.637	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	30.160	2.108	-	-	32.268	Immature plantations
Pembibitan	66.585	20.336	(1.070)	(10.714)	75.137	Nurseries
Jumlah	7.234.519	22.444	(12.760)	(1.087.161)	6.157.042	Total
Akumulasi amortisasi	3.193.542	291.981	(1.900)	(376.075)	3.107.548	Accumulated amortization
Cadangan kerugian penurunan nilai-tanaman belum menghasilkan	(13.345)				(13.345)	Allowance for impairment losses - immature plantations
Nilai tercatat	4.027.632				3.036.149	Net book value

	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	Perubahan selama tahun 2022/ *Changes during 2022* Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Biaya perolehan:					At cost:
Tanaman menghasilkan	7.137.774	-	-	7.137.774	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	28.983	1.177	-	30.160	Immature plantations
Pembibitan	53.336	41.138	(27.889)	66.585	Nurseries
Jumlah	7.220.093	42.315	(27.889)	7.234.519	Total
Akumulasi amortisasi	2.876.114	317.428	-	3.193.542	Accumulated amortization
Cadangan kerugian penurunan nilai-tanaman belum mengahasilkan	(13.345)			(13.345)	Allowance for impairment losses - immature plantations
Nilai tercatat	4.330.634			4.027.632	Net book value

Beban amortisasi tanaman telah menghasilkan dibebankan pada beban pokok penjualan sebesar Rp 291.981 dan Rp 317.428 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 32).

Amortization of mature plantations charged to cost of goods sold for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 291,981 and Rp 317,428, respectively (Note 32).

Termasuk dalam akumulasi amortisasi adalah amortisasi alokasi harga beli ketika Grup mengakuisisi entitas anak sebesar Rp 578.932 dan Rp 508.741 masing-masing pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Included in the accumulated amortization is amortization of purchase price allocation when Group acquired its subsidiaries, amounting to Rp 578,932 and Rp 508,741 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Rincian luas lahan yang ditanami atas tanaman telah menghasilkan menurut lokasi operasi Grup adalah sebagai berikut:

The details of planted area of mature plantations based on the Group's operational locations are as follows:

Lokasi	2023 (dalam hektar)/ *(in hectares)*	2022 (dalam hektar)/ *(in hectares)*	Location
Kalimantan	63.682	84.009	Kalimantan
Papua	9.039	9.039	Papua
Sumatera	1.347	1.347	Sumatera
Jumlah	74.068	94.395	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, luas lahan yang ditanami atas tanaman belum menghasilkan ada seluas 271 hektar yang berlokasi di Papua.

As of December 31, 2023 and 2022, the details of planted area of immature plantations are 271 hectares which are located in Papua.

Tanaman produktif dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 3.955.237 dan Rp 5.560.603 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank dan utang lembaga keuangan bukan bank (Catatan 19 dan 24).

Bearer plants with carrying amount of Rp 3,955,237 and Rp 5,560,603 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, are used as collateral for bank loans and loan from non-bank financial institutions (Notes 19 and 24).

Nilai wajar tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.312.359 dan Rp 4.861.993, berdasarkan penilaian oleh KJPP Iskandar dan Rekan, penilai independen dalam laporan tertanggal 15 Februari 2024 dan 27 Februari 2023. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan.

The fair values of the mature plantations and immature plantations as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 3,312,359 and Rp 4,861,993, respectively, based on the valuation performed by KJPP Iskandar dan Rekan, independent valuers, in its report dated February 15, 2024 and February 27, 2023, respectively. The valuations were carried out using cost approach and income approach.

16. Aset Tetap / 16. Property, Plant and Equipment

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	Perubahan selama tahun 2023/ *Changes during 2023*: Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Penjualan entitas anak/ *Disposal of subsidiaries*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Biaya perolehan							At cost
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	1.441.915	-	(3.483)	-	(105.760)	1.332.672	Land
Bangunan dan prasarana	1.334.495	4.607	(500)	62.205	(162.187)	1.238.620	Buildings and land improvements
Mesin, kendaraan dan alat berat	1.487.580	13.676	(4.094)	4.356	(211.982)	1.289.536	Machineries, vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	147.230	1.635	(252)	129	(10.482)	138.260	Furniture, fixtures and equipment
Subjumlah	4.411.220	19.918	(8.329)	66.690	(490.411)	3.999.088	Subtotal
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Mesin, kendaraan dan alat berat	134.230	55.605	-	(977)	(267)	188.591	Machineries, vehicles and heavy equipment
Ruang kantor	42.755	-	-	-	-	42.755	Office space
Subjumlah	176.985	55.605	-	(977)	(267)	231.346	Subtotal
Aset dalam konstruksi	283.270	259.125	(39)	(65.713)	(141.750)	334.893	Constructions in progress
Jumlah	4.871.475	334.648	(8.368)	-	(632.428)	4.565.327	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Bangunan dan prasarana	483.335	47.685	(382)	-	(41.144)	489.494	Buildings and land improvements
Mesin, kendaraan dan alat berat	744.180	48.869	(3.641)	-	(86.151)	703.257	Machineries, vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	118.272	2.065	(252)	-	(9.937)	110.148	Furniture, fixtures and equipment
Subjumlah	1.345.787	98.619	(4.275)	-	(137.232)	1.302.899	Subtotal
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Mesin, kendaraan dan alat berat	20.371	21.295	-	-	(1.015)	40.651	Machineries, vehicles and heavy equipment
Ruang kantor	17.342	5.572	-	-	-	22.914	Office space
Subjumlah	37.713	26.867	-	-	(1.015)	63.565	Subtotal
Jumlah	1.383.500	125.486	(4.275)	-	(138.247)	1.366.464	Total
Jumlah Tercatat	3.487.975				(494.181)	3.198.863	Net Carrying Amount

	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	Perubahan selama tahun 2022/ *Changes during 2022*: Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	1.441.915	-	-	-	1.441.915	Land
Bangunan dan prasarana	1.227.962	2.017	(309)	104.825	1.334.495	Buildings and land improvements
Mesin, kendaraan dan alat berat	1.309.254	23.107	(4.343)	159.562	1.487.580	Machineries, vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	146.040	1.256	(66)	-	147.230	Furniture, fixtures and equipment
Subjumlah	4.125.171	26.380	(4.718)	264.387	4.411.220	Subtotal
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Mesin, kendaraan dan alat berat	18.202	120.378	-	(4.350)	134.230	Machineries, vehicles and heavy equipment
Ruang kantor	25.861	27.225	(10.331)	-	42.755	Office space
Subjumlah	44.063	147.603	(10.331)	(4.350)	176.985	Subtotal
Aset dalam konstruksi	390.978	152.329	-	(260.037)	283.270	Constructions in progress
Jumlah	4.560.212	326.312	(15.049)	-	4.871.475	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan dan prasarana	433.821	49.823	(309)	-	483.335	Buildings and land improvements
Mesin, kendaraan dan alat berat	692.495	50.232	(2.576)	4.029	744.180	Machineries, vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	115.516	2.822	(66)	-	118.272	Furniture, fixtures and equipment
Subjumlah	1.241.832	102.877	(2.951)	4.029	1.345.787	Subtotal
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Mesin, kendaraan dan alat berat	12.361	12.039	-	(4.029)	20.371	Machineries, vehicles and heavy equipment
Ruang kantor	10.177	7.165	-	-	17.342	Office space
Subjumlah	22.538	19.204	-	(4.029)	37.713	Subtotal
Jumlah	1.264.370	122.081	(2.951)	-	1.383.500	Total
Jumlah Tercatat	3.295.842				3.487.975	Net Carrying Amount

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2023	2022	
Beban pokok penjualan (Catatan 32)	118.294	112.181	Cost of goods sold (Note 32)
Beban umum dan administrasi (Catatan 33)	7.192	9.900	General and administrative expenses (Note 33)
Jumlah	125.486	122.081	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara.

As of December 31, 2023 and 2022, there is no property, plant and equipment that are not temporarily used.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2023 and 2022, there is no property, plant and equipment discontinued from active use and not classified as available for sale.

Pengurangan selama tahun 2023 merupakan penjualan aset tetap dengan perincian sebagai berikut:

Deductions in 2023 pertain to the sale of certain property and equipment with details as follows:

	2023	
Harga jual	2.500	Selling price
Nilai tercatat	6.461	Net book value
Kerugian penjualan	(3.961)	Loss on sale

Sebagian aset tetap dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 2.748.027 dan Rp 3.335.780 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 19), utang lembaga keuangan bukan bank (Catatan 24) dan liabilitas sewa (Catatan 25).

Certain property, plant and equipment with carrying amount of Rp 2,748,027 and Rp 3,335,780 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, are used as collateral for bank loans (Note 19), loan from non bank financial institution (Note 24) and lease liabilities (Note 25).

Aset tetap telah diasuransikan kepada pihak ketiga Harta General Insurance, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Harta Aman Pratam Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asurance Etiqa Internasional Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT MSIG Insurance Indonesia, Asuransi Bina Dana Artha, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi FPG Indonesia, dan PT Asuransi Tri Pakarta untuk 31 Desember 2023, dan PT Asuransi MAG A Fairfax, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Avrist General Insurance, PT KSK Insurance Indonesia, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Adira Dinamika, PT AIG Insurance Indonesia, PT Ace Jaya Proteksi, PT Asuransi Bintang dan PT Asuransi FPG Indonesia untuk 31 Desember 2022 terhadap kerugian atas kebakaran, kehilangan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.097.361 dan Rp 1.976.786.

Property, plant, and equipment are insured with third parties Harta General Insurance, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk , PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Harta Aman Pratam Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asurance Etiqa Internasional Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT MSIG Insurance Indonesia, Asuransi Bina Dana Artha, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi FPG Indonesia, and PT Asuransi Tri Pakarta as of December 31, 2023, and PT Asuransi MAG A Fairfax, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Avrist General Insurance, PT KSK Insurance Indonesia, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Adira Dinamika, PT AIG Insurance Indonesia, PT Ace Jaya Proteksi, PT Asuransi Bintang and PT Asuransi FPG Indonesia as of December 31, 2022 againts losses from fire, theft and other property risks amounting to Rp 2,097,361 dan Rp 1,976,786, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that might arise from such risks on the property, plant and equipment insured.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that there is no impairment in value of the aforementioned property, plant and equipment as of December 31, 2023 and 2022.

Aset dalam konstruksi adalah biaya dalam rangka peningkatan kapasitas aset Grup. Pada tanggal 31 Desember 2023, tingkat penyelesaian aset dalam konstruksi adalah 95% dan diharapkan akan selesai pada tahun 2024.

Constructions in progress consist of costs in order to improve the capacity of the Group's assets. As of December 31, 2023, the constructions in progress is 95% completed and estimated to be completed in 2024.

Nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 3.285.444 dan Rp 3.523.731. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar dan pendekatan biaya yang ditetapkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan, penilai independen, tertanggal 15 Februari 2024 dan 27 Februari 2023.

The fair values of the land and buildings as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 3,285,444 and Rp 3,523,731, respectively. The valuations were performed based on market data approach and cost approach performed by KJPP Iskandar dan Rekan, independent valuers, dated February 15, 2024 and February 27, 2023.

Hak atas tanah termasuk Hak Guna Usaha yang berlaku hingga 2032 – 2049. Manajemen berkeyakinan bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui setelah kadaluarsa.

Land rights included *Hak Guna Usaha* titles will expire in 2032 – 2049. Management believes the land rights can be renewed upon their expiry.

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp 445.612 dan Rp 715.322 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The acquisition cost of property, plant and equipment which were fully depreciated and are still being used amounted to Rp 445,612 and Rp 715,322 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

17. Goodwill dan Aset Tidak Berwujud – Bersih / 17. Goodwill and Other Intangible Assets – Net

	2023	2022	
Goodwill	1.154.759	1.154.759	Goodwill
Cadangan kerugian penurunan nilai	(194.474)	(174.474)	Allowance for impairment losses
Jumlah tercatat - bersih	960.285	980.285	Net carrying amount
Software - bersih	304	1.042	Software - net
Lisensi			License
Nilai perolehan	77.052	77.052	Cost
Dikurangi:			Less:
Akumulasi amortisasi	21.238	21.238	Accumulated amortization
Subjumlah	55.814	55.814	Subtotal
Penjualan entitas anak	(52.301)	(52.301)	Disposal of subsidiaries
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.513)	(3.513)	Allowance for impairment losses
Jumlah tercatat - bersih	-	-	Net carrying amount
Jumlah	960.589	981.327	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk memadahi untuk menutup kerugian yang timbul dimasa mendatang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses in the future.

18. Aset Tidak Lancar Lainnya / 18. Other Non - Current Assets

	2023	2022	
Hak guna usaha dalam proses	155.809	264.786	Land rights under process
Investasi plasma	67.740	152.942	Plasma investment
Kas dibatasi penggunaannya	29.575	43.972	Restricted cash
Lain-lain	2.583	2.968	Others
Jumlah	255.707	464.668	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023, kas dibatasi penggunaannya merupakan penempatan deposito berjangka oleh JMS, SKS, MAJ, TSP, BLP, ADS dan SMS di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2022, penempatan deposito berjangka oleh JMS, SKS, MAJ, APN*), ABP*), AAN*), TSP, BLP, ADS dan SMS di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penempatan deposito berjangka tersebut yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit bank untuk koperasi plasma.

As of December 31, 2023, restricted cash represents time deposit placements by JMS, SKS, MAJ, TSP, BLP, ADS and SMS in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia, and PT Bank Syariah Indonesia Tbk. As of December 31, 2022, restricted cash represents time deposit placements by JMS, SKS, MAJ, APN*), ABP*), AAN*), TSP, BLP, ADS and SMS in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia, and PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Time deposit placement are used as guarantees for credit facilities obtained by plasma cooperative.

*) *Entitas anak yang dijual pada tahun 2023.*

*) *Subsidiaries disposed in 2023.*

Semua kas yang dibatasi penggunaannya merupakan penempatan kepada bank pihak ketiga dan dalam bentuk rupiah. Pada 31 desember 2023 dan 2022, besaran suku bunga kontraktual selama pelaporan adalah masing-masing sebesar 0% - 3%.

All restricted cash is held within third-party banks and in Rupiah. As of December 31, 2023 and 2022, the contractual interest rates during reporting period amount to 0% - 3%, respectively.

Lain-lain merupakan peralatan dan perlengkapan panen yang disediakan oleh Grup untuk karyawan panen.

Others represent harvesting tools and equipment provided by the group for harvesting employees.

19. Utang Bank / 19. Bank Loans

	2023	2022	
Utang bank jangka pendek			Short-term bank loans
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	181.618	80.000	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	142.100	142.100	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70.000	220.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	393.718	442.100	Total
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.953.918	3.554.754	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.104.357	1.242.357	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.072.821	1.245.421	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	52.639	203.039	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	26.666	-	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk	16.667	41.667	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Subjumlah	4.227.068	6.287.238	Subtotal

	2023	2022	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(85.442)	(199.453)	Unamortized transaction costs
Jumlah utang bank jangka panjang	4.141.626	6.087.785	Total long-term bank loans
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.122.593	641.300	Current portion of long-term bank loans
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.019.033	5.446.485	Long-term bank loans - net of current portion

Seluruh utang bank Grup diperoleh dari pihak ketiga. Berikut penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

All the Group's bank loans are obtained from third parties. Details of bank loans are as follows:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

	2023	2022	
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
PT Bumihutani Lestari (BHL)			PT Bumihutani Lestari (BHL)
Fasilitas Kredit Refinancing	591.405	627.005	Refinancing Facility
Fasilitas Kredit Modal Kerja	14.731	42.731	Credit Facility
PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)			PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)
Fasilitas Kredit Refinancing	526.968	562.568	Refinancing Facility
Fasilitas Kredit Modal Kerja	9.178	29.178	Credit Facility
PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)			PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)
Fasilitas Kredit Refinancing	391.120	407.720	Refinancing Facility
Fasilitas Kredit Modal Kerja	3.955	19.955	Credit Facility
PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)			PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)
Fasilitas Kredit Refinancing	248.034	248.134	Refinancing Facility
Fasilitas Kredit Modal Kerja	12.193	13.193	Credit Facility
PT Multikarya Sawit Prima (MSP)			PT Multikarya Sawit Prima (MSP)
Fasilitas Kredit Refinancing	149.600	149.800	Refinancing Facility
Fasilitas Kredit Modal Kerja	6.734	6.934	Credit Facility
PT Arrtu Plantation (APN)			PT Arrtu Plantation (APN)
Fasilitas Kredit Refinancing	-	609.595	Refinancing Facility
Fasilitas Kredit Modal Kerja	-	35.209	Credit Facility
PT Arrtu Agro Nusantara (AAN)			PT Arrtu Agro Nusantara (AAN)
Fasilitas Kredit Refinancing	-	320.026	Refinancing Facility
Fasilitas Kredit Modal Kerja	-	11.424	Credit Facility
PT Mandiri Kapital Jaya (MKJ)			PT Mandiri Kapital Jaya (MKJ)
Fasilitas Kredit Refinancing	-	255.421	Refinancing Facility
Fasilitas Kredit Modal Kerja	-	9.125	Credit Facility
PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP)			PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP)
Fasilitas Kredit Refinancing	-	194.507	Refinancing Facility
Fasilitas Kredit Modal Kerja	-	12.229	Credit Facility
Subjumlah	1.953.918	3.554.754	Subtotal

PT Bumihutani Lestari (BHL)

Pada tanggal 10 September 2015, BHL memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 650.475 dengan jatuh tempo pada 25 November 2028.

PT Bumihutani Lestari (BHL)

On September 10, 2015, BHL obtained loan facilities which consist of refinancing loan to palm oil plantations and mills. These facilities have been amanded several times, and the latest is valid until June 7, 2021 with maximum Rp 650,475 with maturity date November 25, 2028.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, BHL juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 43.431 dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

Interest rate of per annum on refinancing credit facility is bank reference interest.

On June 7, 2021, BHL obtained loan facilities which of consist of working capital loan with maximum Rp 43,431 with maturity date June 6, 2024.

Interest rate per annum on working capital loan facility is bank reference interest.

PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)

Pada tanggal 10 September 2015, BLP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 612.638 dengan jatuh tempo pada 25 November 2028.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, BLP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 9.178 dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)

On September 10, 2015, BLP obtained loan facilities which consist of refinancing loan to palm oil plantations and mills. These facilities have been amanded several times, and the latest is valid until June 7, 2021 with maximum Rp 612,638 with maturity date November 28, 2028.

Interest rate of per annum on refinancing credit facility is bank reference interest.

On June 7, 2021, BLP obtained loan facilities which of consist of working capital loan with maximum Rp 9,178 with maturity date June 6, 2024.

Interest rate per annum on working capital loan facility is bank reference interest.

PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)

Pada tanggal 10 September 2015, ADS memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 419.570 dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, ADS juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 28.554 dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)

On September 10, 2015, ADS obtained loan facilities which consist of refinancing loan to palm oil plantations and mills. These facilities have been amanded several times, and the latest is valid until June 7, 2021 with maximum Rp 419,570 with maturity date May 25, 2030.

Interest rate of per annum on refinancing credit facility is bank reference interest.

On June 7, 2021, BLP obtained loan facilities which of consist of working capital loan with maximum Rp 28,554 with maturity date June 6, 2024.

Interest rate per annum on working capital loan facility is bank reference interest.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

Pada tanggal 10 September 2015, SMS memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 248.984 dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, SMS juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 13.228 dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

On September 10, 2015, SMS obtained loan facilities which consist of refinancing loan to palm oil plantations and mills. These facilities have been amanded several times, and the latest is valid until June 7, 2021 with maximum Rp 248,984 with maturity date May 25, 2030.

Interest rate of per annum on refinancing credit facility is bank reference interest.

On June 7, 2021, SMS obtained loan facilities which of consist of working capital loan with maximum Rp 13,228 with maturity date June 6, 2025.

Interest rate per annum on working capital loan facility is bank reference interest.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

Pada tanggal 10 September 2015, MSP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 151.900 dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2031.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, MSP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 6.969 dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

On September 10, 2015, MSP obtained loan facilities which consist of refinancing loan to palm oil plantations and mills. These facilities have been amanded several times, and the latest is valid until June 7, 2021 with maximum Rp 151,900 with maturity date May 25, 2031.

Interest rate of per annum on refinancing credit facility is bank reference interest.

On June 7, 2021, MSP obtained loan facilities which of consist of working capital loan with maximum Rp 6,969 with maturity date June 6, 2025.

Interest rate per annum on working capital loan facility is bank reference interest.

PT Arrtu Plantation (APN)

Pada tanggal 7 September 2016, APN memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 612.695 dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2028.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Arrtu Plantation (APN)

On September 7, 2016, APN obtained loan facilities which consist of refinancing loan to palm oil plantations and mills. These facilities have been amanded several times, and the latest is valid until June 7, 2021 with maximum Rp 612,695 with maturity date May 25, 2028.

Interest rate of per annum on refinancing credit facility is bank reference interest.

Pada tanggal 7 Juni 2021, APN juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 35.244 dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Arrtu Agro Nusantara (AAN)

Pada tanggal 7 September 2016, AAN memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 321.726 dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2031.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, AAN juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 11.459 dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Mandiri Kapital Jaya (MKJ)

Pada tanggal 7 September 2016, MKJ memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 256.221 dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2031.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, MKJ juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 9.159 dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

On June 7, 2021, APN obtained loan facilities which of consist of working capital loan with maximum Rp 35,244 with maturity date June 6, 2024.

Interest rate per annum on working capital loan facility is bank reference interest.

PT Arrtu Agro Nusantara (AAN)

On September 7, 2016, AAN obtained loan facilities which consist of refinancing loan to palm oil plantations and mills. These facilities have been amanded several times, and the latest is valid until June 7, 2021 with maximum Rp 321,726 with maturity date May 25, 2031.

Interest rate of per annum on refinancing credit facility is bank reference interest.

On June 7, 2021, AAN obtained loan facilities which of consist of working capital loan with maximum Rp 11,459 with maturity date June 6, 2024.

Interest rate per annum on working capital loan facility is bank reference interest.

PT Mandiri Kapital Jaya (MKJ)

On September 7, 2016, MKJ obtained loan facilities which consist of refinancing loan to palm oil plantations and mills. These facilities have been amanded several times, and the latest is valid until June 7, 2021 with maximum Rp 256,221 with maturity date May 25, 2031.

Interest rate of per annum on refinancing credit facility is bank reference interest.

On June 7, 2021, MKJ obtained loan facilities which of consist of working capital loan with maximum Rp 9,159 with maturity date June 6, 2024.

Interest rate per annum on working capital loan facility is bank reference interest.

PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP)

Pada tanggal 7 September 2016, ABP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dengan jumlah maksimum Rp 195.057 dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2031.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit refinancing adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, ABP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp 12.444 dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa Persediaan berupa pupuk dan pestisida, suku cadang, bahan bakar dan oli, dan persediaan lainnya, Letter of Undertakin, jaminan pengganti sementara berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU), *Corporate Guarantee* and Cross Collateral.

Pinjaman dari BNI mencakup persyaratan yang membatasi hak peminjam tanpa persetujuan tertulis dari BNI, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya, menjadi penjamin, melakukan merger/akuisisi, mengubah status hukum, menjual/menjaminkan aset yang dibiayai BNI, menyatakan pailit, menggadaikan saham, menarik modal, melunasi utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi yang telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi kecuali apabila rasio keuangan telah terpenuhi. Disamping itu, peminjam diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* lebih dari 1x
- *Debt service coverage ratio lebih dari 100%*
- *Debt to Equity ratio maksimal 2,6x*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BLP, BHL, ADS dan MSP telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2023, Grup telah mendapatkan *waiver* dari BNI terkait pemenuhan rasio keuangan.

PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP)

On September 7, 2016, ABP obtained loan facilities which consist of refinancing loan to palm oil plantations and mills. These facilities have been amanded several times, and the latest is valid until June 7, 2021 with maximum Rp 195,057 with maturity date May 25, 2031.

Interest rate of per annum on refinancing credit facility is bank reference interest.

On June 7, 2021, ABP obtained loan facilities which of consist of working capital loan with maximum Rp 12,444 with maturity date June 6, 2024.

Interest rate per annum on working capital loan facility is bank reference interest.

The loan is secured by assets in the form of Inventory in the form of fertilizers and pesticides, spare parts, fuel and oil, and other inventories, Letter of Undertakin, temporary replacement collateral in the form of a plot of land Land Use Rights Certificate (SHGU), Corporate Guarantee and Cross Collateral.

The loans from BNI contain covenants which among others, restrict the borrowing without prior approval from BNI to obtain or grant loans except in the context of commercial transactions relating to its business, act as guarantor, conduct merger and acquisition, change the legal entity, sale/pledge the assets that are financed by BNI, declare bankruptcy, pledge the shares, withdraw the capital, payment of liabilities to shareholder of affiliated companies that have been placed as subordinated loan unless the financial ratio has been fulfilled. Besides, the borrowings is required to maintain certain financial ratios as follows:

- Current ratio more than 1x
- *Debt service coverage ratio more than 100%*
- *Debt to Equity ratio with a maximum of 2,6x*

As of December 31, 2023 and 2022, BLP, BHL, ADS and MSP has complied with most of the financial ratios required in the bank loan agreement except for certain ratios. As of December 31, 2023, the Gorup has obtained a waiver from BNI regarding the fulfillment of financial ratios.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

	2023	2022	
Utang bank jangka pendek			Short-term bank loans
PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)			PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)
Kredit agunan surat berharga non-revolving	70.000	70.000	Non-revolving securities Collateral Loan
PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)			PT PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)
Kredit agunan surat berharga non-revolving	-	150.000	Non-revolving securities Collateral Loan
Subjumlah	70.000	220.000	Subtotal
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)			PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)
Kredit investasi Kebun Non-Revolving	722.000	859.500	Non-revolving Plantation Investment Loan
PT Tandan Sawita Papua (TSP)			PT Tandan Sawita Papua (TSP)
Kredit investasi	382.357	382.857	Investment Loan
Subjumlah	1.104.357	1.242.357	Subtotal
Jumlah	1.174.357	1.462.357	Total

PT Tandan Sawita Papua (TSP)

Pada tanggal 4 Juni 2013, TSP memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi untuk perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 dengan jumlah maksimum Rp 316.575 untuk perkebunan kelapa sawit dan Rp 67.282 untuk pabrik kelapa sawit dengan jatuh tempo 30 September 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas investasi adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, infrastruktur (sarana & prasarana) & bangunan milik TSP yang terletak di Desa Yetti, Papua; aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit milik JMS yang terletak di Kutai, Kalimantan Timur; serta saham TSP yang dimiliki oleh Perusahaan.

TSP diwajibkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

- *Leverage ratio* kurang dari 300%
- *Self financing ratio* lebih dari 35%
- *Debt service coverage ratio* lebih dari 100%
- *Positive total networth*

PT Tandan Sawita Papua (TSP)

On June 4, 2013, TSP obtained loan facilities which consist of investment loan to palm oil plantations and palm oil mills. These facility has been amendment several times, and the latest is valid until Januari 20, 2021 with maximum Rp 316.575 for palm oil plantations and Rp 67.282 for palm oil mills with maturity date September 30, 2024.

Interest rate of per annum on investment loan facility is bank reference interest.

The loan is secured by assets in the form of land and all assets above it in the form of oil palm plantations, palm oil mills, infrastructure (facilities & infrastructure) & buildings owned by TSP located in Ds. Yetti, Papua; assets in the form of land and all assets above it in the form of oil palm plantations owned by JMS located in Kutai, East Kalimantan; and TSP shares owned by the Company.

TSP are required to maintain or improve financial performance with financial ratio indicators in accordance with the terms and conditions applicable in the bank as follows:

- Leverage ratio less than 300%
- Self financing ratio more than 35%
- Debt service coverage ratio more than 100%
- Positive total networth

TSP juga diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan TSP untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Lain, kecuali untuk transaksi yang wajar; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan TSP kepada pihak lain; membagi dividen dan menurunkan hutang pemegang saham kecuali *financial covenant* masih terpenuhi baik sebelum maupun setelah pembagian dividen, serta kewajiban finansial kepada Mandiri dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, TSP telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

TSP is also required to fulfill several conditions of the loan agreement, including restrictions on TSP to change the composition of the management and shareholders; transfer collateral; obtain credit facilities or other loans from other banks, except for reasonable transactions; bind itself as a guarantor of debt or pledge the TSP's assets to other parties; distribute dividends and reduce shareholder debt unless financial covenants are still met both before and after the dividend distribution, and financial obligations to Mandiri can be fulfilled properly. As of December 31, 2023 and 2022, TSP has complied with the existing covenants.

PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)

PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)

Pada tanggal 22 Maret 2019, JMS memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi untuk perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 dengan jumlah maksimum Rp 1.000.000 dengan jatuh tempo 9 Desember 2026.

On March 22, 2019, JMS obtained loan facilities which consist of investment loan to palm oil plantations and palm oil mills. These facility has been amendment several times, and the latest is valid until September 17, 2019 with maximum Rp 1,000,000 with maturity date December 9, 2026.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit investasi adalah tingkat bunga referensi bank.

Interest rate of per annum on investment loan facility is bank reference interest.

Atas fasilitas Kredit Investasi ini, JMS diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan JMS untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; membagi dividen kecuali *financial covenant* masih terpenuhi baik sebelum maupun setelah pembagian dividen; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Lain, kecuali untuk transaksi yang wajar; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Mandiri dapat dipenuhi dengan baik.

For this Investment Credit facility, JMS is required to fulfill several conditions of the loan agreement, including restrictions on JMS to change the composition of the management and shareholders; distribute dividends unless the financial covenants are still met both before and after the dividend distribution; transfer collateral; obtain credit facilities or other loans from other banks, except for reasonable transactions; bind itself as a guarantor of debt or pledge the company's assets to other parties, and financial obligations to Mandiri can be fulfilled properly.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Angunan Surat Berharga pada tanggal 27 Maret 2019, JMS memperoleh fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000 untuk pembangunan pabrik kelapa sawit. Fasilitas pinjaman telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Based on Collateralized Securities Credit Agreement on March 27, 2019, JMS obtained a Secured Securities Collateral Credit (KASB) facility with a maximum amount of Rp 150,000 for the construction of a palm oil mill. The loan facility has been extended several times, the latest until December 31, 2023.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit agunan surat berharga *non-revolving* adalah tingkat bunga referensi bank.

Interest rate of per annum on non-revolving securities collateral loan is bank reference interest.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa 9 (sembilan) lembar bilyet Deposito yang diterbitkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nilai nominal sebesar Rp 150.000 milik JMS.

The loan is secured by assets in the form of 9 (nine) certificates of deposit issued by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a nominal value of Rp 150,000 owned by JMS.

Atas fasilitas KASB ini, JMS diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan JMS untuk mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan JMS kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Bank Mandiri dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, JMS telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

For this KASB facility, JMS is required to fulfill several conditions of the loan agreement, including restrictions on JMS to bind itself as a guarantor of debt or pledge the JMS's assets to other parties, and financial obligations to Bank Mandiri can be fulfilled properly. As at December 31, 2023 and 2022, JMS has complied with the covenants.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas kredit ini telah dilunasi dengan deposito yang dijaminkan sebesar Rp 150.000.

As of December 31, 2023, this credit facility has been repaid with a pledged deposit amounting to Rp 150,000.

JMS diwajibkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

JMS are required to maintain or improve financial performance with financial ratio indicators in accordance with the terms and conditions applicable in the bank as follows:

- *Positive operating cash flow*
- *Debt to equity* kurang dari 300%
- *Debt service coverage ratio* lebih dari 100%
- *Positive total networth*

- Positive operating cash flow
- Debt to equity less than 300%
- Debt service coverage ratio more than 100%
- Positive total networth

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, JMS telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2023 perusahaan telah mendapatkan waiver dari Mandiri terkait pemenuhan rasio keuangan.

As of December 31, 2023 and 2022, the JMS has complied with most of the financial ratios required in the bank loan agreement except for certain ratios. On December 31, 2023, the Company has obtained a waiver from Mandiri regarding the fulfillment of financial ratios.

PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)

PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Angunan Surat Berharga tanggal 14 September 2021, perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000 untuk pembiayaan operasional perusahaan. Fasilitas pinjaman telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 9 Desember 2026.

Based on Collateralized Securities Credit Agreement on September 14, 2021, the Company obtained a Secured Securities Collateral Credit (KASB) facility with a maximum amount of Rp 150,000 for the construction of a palm oil mill. The loan facility has been extended several times, the latest until December 9, 2026.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit agunan surat berharga *non-revolving* adalah tingkat bunga referensi bank.

Interest rate of per annum on non-revolving securities collateral loan is bank reference interest.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa bilyet Deposito yang diterbitkan Mandiri dengan nilai nominal sebesar Rp70.000.

Atas fasilitas KASB ini, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan untuk mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Bank Mandiri dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, perusahaan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

The loan is secured by assets in the form certificates of deposit issued by Mandiri amounting to Rp 70,000.

For this KASB facility, the Company is required to fulfill several conditions of the loan agreement, including restrictions on JMS to bind itself as a guarantor of debt or pledge the company's assets to other parties, and financial obligations to Bank Mandiri can be fulfilled properly. As at December 31, 2023 and 2022, the Company has complied with the covenants.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

	2023	2022	
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
PT Singaland Asetama (SGA)			PT Singaland Asetama (SGA)
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	363.327	416.327	Special Transaction Loan Facility
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)			PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	434.671	508.671	Special Transaction Loan Facility
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)			PT Pesonalintas Surasejati (PLS)
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	255.143	297.143	Special Transaction Loan Facility
PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)			PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	19.680	23.280	Special Transaction Loan Facility
Subjumlah	1.072.821	1.245.421	Subtotal

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 Desember 2015, STP memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi STP. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 566.871 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, infrastruktur (sarana dan prasarana), dan bangunan milik STP yang terletak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama PLS, SGA, KAPAG, Perusahaan, dan BHL (Catatan 15 dan 16).

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

On December 22, 2015, STP received a special transactional credit facility intended to be used for development and investment. The facility has been amended severa times, most recently in November 30, 2020 which stated that the maximum credit amounted to Rp 566,871 with maturity date of December 31, 2027.

Interest rate of per annum on special transaction loan facility is bank reference interest.

The loan is guaranteed by assets in the form of land and all properties located above, including palm plantations, palm oil mills, infrastructure, and buildings owned by STP located in Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur and Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; and cross-collateralized with credit agreements on behalf of PLS, SGA, KAPAG, the Company, dan BHL (Notes 15 dan 16).

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Pada tanggal 22 Desember 2015, PLS memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi PLS. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 337.093 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, infrastruktur (sarana dan prasarana), dan bangunan milik PLS yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama, SGA, KAPAG, Perusahaan, BHL, dan STP (Catatan 15 dan 16).

PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)

Pada tanggal 22 Desember 2015, KAPAG memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi KAPAG. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 28.880 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada diatasnya berupa kebun kelapa sawit milik KAPAG yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama SGA, PLS, Perusahaan, BHL dan STP (Catatan 15 dan 16).

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

On December 22, 2015, PLS received a special transactional credit facility intended to be used for development and investment. The facility has been amended severa times, most recently in November 30, 2020 which stated that the maximum credit amounted to Rp 337,093 with maturity date of December 31, 2027.

Interest rate of per annum on special transaction loan facility is bank reference interest.

The loan is guaranteed by assets in the form of land and all properties located above, including palm plantations, palm oil mills, infrastructure, and buildings owned by PLS located in Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur and Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; and cross-collateralized with credit agreements on behalf of SGA, KAPAG, the Company, BHL and STP (Notes 15 dan 16).

PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)

On December 22, 2015, KAPAG received a special transactional credit facility intended to be used for development and investment. The facility has been amended severa times, most recently in November 30, 2020 which stated that the maximum credit amounted to Rp 28,880 with maturity date of December 31, 2027.

Interest rate of per annum on special transaction loan facility is bank reference interest.

The loan is guaranteed by assets in the form of land and all properties located above, including palm plantations, owned by KAPAG located in Kota Baru, Kalimantan Selatan; and cross-collateralized with credit agreements on behalf of SGA, PLS, the Company, BHL and STP (Notes 15 dan 16).

PT Singaland Asetama (SGA)

Pada tanggal 22 Desember 2015, SGA memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi SGA. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 479.027 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2029.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah, perkebunan kelapa sawit beserta bangunan, fasilitas, infrastrukturnya dan fasilitas CPO bulking milik SGA yang terletak di Batu Licin, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama PLS, STP, KAPAG, Perusahaan dan BHL (Catatan 15 dan 16).

Peminjam wajib mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

- *Debt equity ratio* kurang dari sama dengan 300%
- *Interest coverage ratio* lebih dari sama dengan 100%

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup telah mematuhi sebagian besar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank. Pada tanggal 31, Desember 2023, STP dan SGA telah menerima *Waiver* dari BRI terkait pemenuhan rasio keuangan Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup telah mematuhi sebagian besar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank. Pada tanggal 31 Desember 2022, PLS dan STP elah menerima *Waiver* dari BRI terkait pemenuhan rasio keuangan.

PT Singaland Asetama (SGA)

On December 22, 2015, SGA received a special transactional credit facility intended to be used for development and investment. The facility has been amended severa times, most recently in November 30, 2020 which stated that the maximum credit amounted to Rp 479,027 with maturity date of December 31, 2029.

Interest rate of per annum on special transaction loan facility is bank reference interest.

The loan is guaranteed by assets in the form of land and all properties located above, including palm plantations, buildings, facilities, infrastructure and CPO bulking facilities owned by SGA located in Batu Licin, South Kalimantan; and cross-collateralized with credit agreements on behalf of PLS, STP, KAPAG, the Company and BHL (Notes 15 and 16).

All companies are required to maintain or improve financial performance with financial ratio indicators in accordance with the terms and conditions applicable in the bank as follows:

- Debt equity ratio of less than or equal to 300%
- *Interest coverage ratio* of more than or equal to 100%

As of December 31, 2023, Group has complied with most of the financial ratios required under the bank loan agreement. As of December 31 2023, STP and SGA have received Waiver from BRI regarding the fulfillment of financial ratios. As of December 31, 2022, Group has complied with most of the financial ratios required in the bank loan agreement. As of December 31, 2022, PLS and STP have received Waiver from BRI regarding the fulfillment of financial ratios.

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

	2023	2022	
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)			PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)
Fasilitas term loan	52.639	111.054	Committed amortizing term loan
PT Bumihutani Lestari (BHL)			PT Bumihutani Lestari (BHL)
Fasilitas term loan	-	91.985	Committed amortizing term loan
Subjumlah	52.639	203.039	Subtotal

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 November 2017, STP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas fasilitas kredit dalam bentuk *uncommitted omnibus facility* (Fasilitas Omnibus). Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, dan terakhir pada tanggal 12 Januari 2021 dengan maksimum Rp 396.000 dengan jatuh tempo 30 Juni 2024.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

On November 22, 2017, STP obtained a credit facility in the form of uncommitted omnibus facility (Omnibus Facility). These facilities have been amendment several times, and last on January 12, 2021 with maximum Rp 396,000 and maturity date June 30, 2024.

PT Bumihutani Lestari (BHL)

Pada tanggal 22 November 2017, BHL memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas fasilitas kredit dalam bentuk *uncommitted omnibus facility* (Fasilitas Omnibus). Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, dan terakhir pada tanggal 12 Januari 2021 dengan maksimum Rp 396.000 dengan jatuh tempo 30 Juni 2024.

PT Bumihutani Lestari (BHL)

On November 22, 2017, BHL obtained a credit facility in the form of uncommitted omnibus facility (Omnibus Facility). These facilities have been amendment several times, and last on January 12, 2021 with maximum Rp 396,000 and maturity date June 30, 2024.

Atas fasilitas kredit ini, debitur diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya debitur tidak diperkenankan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian harta kepada pihak ketiga manapun; debitur dilarang mengubah jenis usaha secara material; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit; mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga; menyetujui suatu perjanjian yang menguntungkan Direksi, Komisaris debitur; menyetujui terjadinya pengeluaran modal.

For this credit facility, debitors is required to fulfill several conditions of the loan agreement, including debitors is not allowed to pledge all or part of its assets to any third party; debitors is prohibited from materially changing the type of business; filing for bankruptcy; binding itself as a guarantor to a third party; approving an agreement that benefits the Directors, Commissioners of debitors; approving capital expenditure.

Debitur wajib mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

Debtors are required to maintain or improve financial performance with financial ratio indicators in accordance with the terms and conditions applicable in the bank as follows:

- *Debt service coverage ratio* sekurang-kurangnya 1,0x pada setiap semester dengan periode pengujian mulai semester I tahun 2022.
- *Gearing ratio* sebesar-besarnya 400% pada setiap triwulan.
- Rajawali Grup sebagai pemegang kontrol manajemen dan sebagai pemegang saham mayoritas debitur baik secara langsung dan tidak langsung pada setiap saat.

- Debt service coverage ratio of at least 1.0x in each semester with a testing period starting from the first semester of 2022.
- Gearing ratio of up to 400% for each quarter.
- Rajawali Group as the management control holder and as the majority shareholder of debitors both directly and indirectly at all times.

Perjanjian ini dibuat tanpa pemberian jaminan atau agunan kepada Bank.

Berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut, debitur diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, debitur telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

This agreement is made without the provision of collateral or security to the Bank.

In relation to this credit facility, debitors is required to fulfill certain covenants, among others, to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2023 and 2022, debitors has complied with the required covenants.

PT Bank J Trust Indonesia Tbk

PT Bank J Trust Indonesia Tbk

	2023	2022	
Utang bank jangka pendek			Short-term bank loans
PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)			PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)
Fasilitas Non-Revolving	59.500	-	Demand Loan - Non Revolving
Fasilitas *Back to Back* - Revolving	50.000	50.000	Demand Loan Back to Back - On Revolving
Fasilitas Revolving Basis	42.118	-	Demand Loan - On Revolving
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)			PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)
Fasilitas on Revolving	30.000	30.000	Demand Loan Revolving
Subjumlah	181.618	80.000	Subtotal
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)			PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)
Fasilitas Revolving	26.666	-	Non-revolving Facility
Subjumlah	26.666	-	Subtotal
Jumlah	208.284	80.000	Total

PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)

Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari J Trust adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Februari 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan (KAP), dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 22 Februari 2023 dan akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2024.

   Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang)

2. Pada tanggal 7 Juni 2023, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Kredit Atas Permintaan 2 (KAP 2), dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 40.000 dan Rp 77.000. Fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2024.

   Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang)

PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)

The loan facilities received by the Company from J Trust consist of the following:

1. On February 17, 2022, the Company obtained credit facility in the form of Demand Loan, with a maximum loanable amount of Rp 50.000. This facility have been extended on February 22, 2023, and the latest is valid until February 23, 2024.

   Interest rate of per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

2. On June 7, 2023, the Company obtained additional credit facilities in the form of Term Loan and Demand Loan with maximum loanable amounts of Rp 40.000 and Rp 77.000. These facilities will valid until December 7, 2024.

   Interest rate of per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

3. Pada tanggal 22 September 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan (KAP), dengan jumlah maksimum sebesar Rp 60.000. Perjanjian pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 15 September 2024.

   Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang)

Seluruh pinjaman Perusahaan tersebut dijamin secara *cross collateral* dengan aset berupa tanah yang terletak di DKI Jakarta, deposito berjangka milik Perusahaan sebesar Rp 60.000 dan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan Perusahaan untuk mengubah anggaran dasar, termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Perusahaan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; melakukan pembagian dividen, melakukan pembubaran, penggabungan usaha, maupun peleburan dengan perusahaan lain, serta kewajiban finansial kepada J Trust dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

3. On September 22, 2023, the Company obtained credit facility in the form of Demand Loan, with a maximum loanable amount of Rp 60,000. This facility is valid until September 15, 2024.

   Interest rate of per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

All of the Company's loan are secured *cross-collateralized* with assets in the form of land located in DKI Jakarta, term deposits owned by the Company amounting to Rp 60.000 and palm oil plantations located in Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

The Company is required to fulfill several terms of the loan agreement, including restrictions on the Company to change its articles of association, including changes of the composition of management and shareholders, collateral transfer, obtaining credit facilities or other loans from other banks which may affect the Company ability to pay its obligations, binding the Company as a debt guarantor or pledging the Company assets to other parties, distribute dividends, carry out dissolution, business merger or consolidation with other companies, as well as financial obligations to J Trust can be fulfilled properly. As of December 31, 2023 and 2022, the Company has fulfilled the terms of the existing agreement.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 Oktober 2021, STP memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan *Back to Back* (KAP BTB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 25 Oktober 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang)

Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka milik STP sebesar Rp 30.000.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

On October 22, 2021, STP obtained credit facility in the form of Back to Back Demand Loan with a maximum loanable amount of Rp 30,000. This facility has been extended several times, and the latest is valid until February 25, 2024.

Interest rate of per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

This loan is secured with the STP's term deposit amounting to Rp 30,000.

STP diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan STP untuk mengubah anggaran dasar, termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban STP; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan STP kepada pihak lain; melakukan pembagian dividen, melakukan pembubaran, penggabungan usaha, maupun peleburan dengan perusahaan lain, serta kewajiban finansial kepada J Trust dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, STP telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

STP is required to fulfill several terms of the loan agreement, including restrictions on STP to change its articles of association, including changes of the composition of management and shareholders, collateral transfer, obtaining credit facilities or other loans from other banks which may affect STP's ability to pay its obligations, binding STP as a debt guarantor or pledging STP's assets to other parties, distribute dividends, carry out dissolution, business merger or consolidation with other companies, as well as financial obligations to J Trust can be fulfilled properly. As of December 31, 2023 and 2022, STP has fulfilled the terms of the existing agreement.

PT Bank Raya Indonesia Tbk

PT Bank Raya Indonesia Tbk

	2023	2022	
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)			PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)
Kredit Modal Kerja Non-revolving	9.667	24.167	Non-revolving Working Capital Loan
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)			PT Pesonalintas Surasejati (PLS)
Kredit Modal Kerja Non-revolving	7.000	17.500	Non-revolving Working Capital Loan
Subjumlah	16.667	41.667	Subtotal

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Pada tanggal 20 Juni 2017, PLS memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 21.000. Pada tanggal 17 Juni 2022, PLS memperoleh fasilitas yang semula adalah Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) diubah menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja – Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) dengan jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja *non-revolving* adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

On June 20, 2017, PLS obtained a credit facility in the form of Revolving Working Capital with a maximum value of Rp 21,000. On June 17, 2022, PLS obtained loan facility, which was initially a Revolving Working Capital Loan, was modified to a Non-Revolving Working Capital Loan facility with a 24-month term from June 20, 2022 to June 20, 2024.

Interest rate of per annum on non-revolving working capital loan is bank reference interest.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 20 Juni 2017, STP memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja - Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 29.000. Pada tanggal 17 Juni 2022, STP memperoleh fasilitas yang semula adalah Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) diubah menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja – Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) dengan jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja *non-revolving* adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik PLS. Agunan tersebut berlaku cross collateral untuk seluruh fasilitas kredit atas nama STP, PLS dan Koperasi Perkebunan Rukmana Sari.

Pinjaman dari bank mencakup persyaratan yang mewajibkan debitur untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

- Minimal *Debt Equity Ratio* (DER) kurang dari 400%
- *Minimal Interest Coverage Ratio* (ICR) 150%
- *Minimal Current Ratio* (CR) 150%
- Berkomiten untuk melakukan perbaikan kualitas produktivitas baik kebun kelapa sawit maupun pabrik minyak kelapa sawit.
- Apabila poin diatas tidak terpenuhi maka debitur menyetujui untuk dilakukan reviu suku bunga.

Debitur juga diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; melakukan merger, akuisisi, penjualan aktiva tetap yang telah dijaminkan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; mengajukan permohonan pernyataan pailit atau PKPU; menyewakan aset yang diagunkan pada Bank; membayar atau melunasi hutang pemegang saham sampai dengan kredit lunas. Debitur juga wajib melakukan sebagian besar transaksi keuangan melalui BRI.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

On June 20, 2017, STP obtained a credit facility in the form of Revolving Working Capital with maximum value of Rp 29,000. On June 17, 2022, STP obtained loan facility, which was initially a Revolving Working Capital Loan, was modified to a Non-Revolving Working Capital Loan facility with a 24-month term from June 20, 2022 to June 20, 2024.

Interest rate of per annum on non-revolving working capital loan is bank reference interest.

The loan is guaranteed by trade receivables and inventory owned by PLS which applies cross collaterally to all credit facilities on behalf of STP, PLS and Koperasi Perkebunan Rukmana Sari.

The loan from bank includes conditions that require the debtor to maintain and improve financial performance with financial ratio indicators in accordance with the terms and conditions applicable to the bank as follows:

- Minimum Debt Equity Ratio (DER) of less than 400%.
- Minimum Interest Coverage Ratio (ICR) of 150%.
- Minimum Current Ratio (CR) of 150%.
- Committed to improving the quality of productivity of both palm plantations and mills.
- The debtor consents to having the interest rate reviewed if the aforementioned conditions are not satisfied.

Debtors are also required to fulfill several conditions of the loan agreement, including restrictions on changing the composition of the management and shareholders; conducting mergers, acquisitions, sales of fixed assets that have been pledged; binding themselves as guarantors of debt or pledging the company's assets to other parties; applying for bankruptcy or PKPU statements; leasing assets pledged to the Bank; paying or paying off shareholder debt until the credit is paid off. Debtors are also required to conduct most of their financial transactions through BRI.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, PLS dan STP telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

As of December 31, 2023 and 2022, PLS and STP have fulfilled the terms of the existing agreements.

PT Bank Permata Tbk (Permata)

PT Bank Permata Tbk (Permata)

	2023	2022	
Utang bank jangka pendek			Short-term bank loans
PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)			PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)
Fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah	142.100	142.100	Working Capital Musyarakah Mutanaqisah

PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 196.000. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 19 Februari 2024. Tingkat bagi hasil adalah tingkat nisbah bagi hasil referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening giro deposito atas nama PT Rajawali Corpora sampai dengan Rp 200.000.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya untuk menyampaikan laporan keuangan internal kuartalan maksimal 90 hari dan laporan keuangan tahunan auditan maksimal 180 hari sejak pelaporan; menjadi penjamin terhadap hutang dagang pihak lain, kecuali hutang datang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga: yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva (“Pembatasan”) atau dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank . Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)

On February 19, 2017, the Company, obtained working capital Musyarakah Mutanaqisah facility with maximum loanable amounts of Rp 196,000, respectively. This facility have been extended several times, and the latest is valid until February 19, 2024. Profit sharing ratio is the bank's reference profit sharing ratio.

This loan is secured by a time deposit in the name of PT Rajawali Corpora up to Rp 200,000.

The Company is required to fulfill certain covenants, submitting quarterly internal financial reports no later than 90 days and audited annual financial reports no later than 180 days after the reporting period; guaranteeing the trade debts of other parties, except for trade debts incurred in the course of ordinary business operations; not obtaining any loan, financial facility, or leasing facility from any other party (except shareholders to the extent that such loans, financial facilities, or leasing facilities are subordinated to all of the Customer's obligations to the Bank) or incurring any other debt or obligation whatsoever: exceeds 10% (ten percent) of the value of the assets ("Covenant") or could adversely affect the company ability to pay its obligations to the Bank. As of December 31, 2023 and 2022, the Company has complied with the required covenants.

20. Utang Usaha

Akun ini terutama merupakan utang atas pembelian produk kelapa sawit, pupuk dan peralatan perkebunan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

20. Trade Accounts Payable

This account mainly consists of amounts due to suppliers for purchases of oil palm products, fertilizers and other plantation supplies, with details as follows:

	2023	2022	
a. Berdasarkan pemasok			**a. By supplier**
Pihak berelasi - Rupiah (Catatan 38)			Related parties - Rupiah (Note 38)
PT Netto Cyber Indonesia	3.535	1.983	PT Netto Cyber Indonesia
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	3.427	1.548	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara
Subjumlah	6.962	3.531	Subtotal
Pihak ketiga - Rupiah			Third parties - Rupiah
PT Agrimas Utama Indonesia	228.931	243.107	PT Agrimas Utama Indonesia
PT Goautama Sinarbatuah	65.615	49.673	PT Goautama Sinarbatuah
Koperasi Kumai Hulu Seberang	13.510	14.233	Koperasi Kumai Hulu Seberang
PT Indopalma Agro Persada	13.469	552	PT Indopalma Agro Persada
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	8.954	8.733	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
Koperasi Sawit Agung Baya (KLIA)	8.311	6.693	Koperasi Sawit Agung Baya (KLIA)
CV Sinar Cahaya Mulia	7.891	2.613	CV Sinar Cahaya Mulia
Regar	7.467	7.514	Regar
Koperasi Keham Lestari (GHRA)	7.360	4.481	Koperasi Keham Lestari (GHRA)
PT Arjuna Utama Sawit	6.132	6.132	PT Arjuna Utama Sawit
PT United Shipping Indonesia	5.556	13.659	PT United Shipping Indonesia
Koperasi Jaminan Masa Depan Sejahte	4.813	8.016	Koperasi Jaminan Masa Depan Sejahte
PT Wong Akeh Utama	2.208	7.087	PT Wong Akeh Utama
PT Sari Anjir Serapat	3.348	5.793	PT Sari Anjir Serapat
CV Janur	3.246	5.731	CV Janur
PT Delta Pawan Abadi	-	7.747	PT Delta Pawan Abadi
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 5.000)	310.409	319.266	Others (each less than Rp 5,000)
Subjumlah	697.220	711.030	Subtotal
Pihak ketiga - Dolar Amerika Serikat (Catatan 39)			Third parties - U.S. Dollar (Note 39)
Boilermech Sdn Bhd	713	728	Boilermech Sdn Bhd
PMT Industries Sdn Bhd	-	1	PMT Industries Sdn Bhd
Subjumlah	713	729	Subtotal
Subjumlah pihak ketiga	697.933	711.759	Subtotal third parties
Jumlah	704.895	715.290	Total
Belum jatuh tempo	211.469	214.587	Current
Jatuh tempo			Past due
Dibawah 30 hari	176.224	178.823	Below 30 days
31 - 60 hari	140.979	143.058	31 - 60 days
61 - 90 hari	105.734	107.294	61 - 90 days
Diatas 90 hari	70.489	71.528	Above days 90 days
Jumlah	704.895	715.290	Total

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

Purchases of raw and indirect materials, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 60 days.

21. Uang Muka Diterima – Pihak Ketiga / 21. Advances Received – Third Parties

	2023	2022	
PT Tapian Nadenggan	59.940	-	PT Tapian Nadenggan
PT Sinarmas Agro Resources dan Technology Tbk	40.375	135.671	PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk
PT Sari Dumai Sejati	18.680	6.140	PT Sari Dumai Sejati
PT Sinar Jaya Inti Mulia	964	2.201	PT Sinar Jaya Inti Mulia
PT Binasawit Abadi Pratama	598	2.077	PT Binasawit Abadi Pratama
PT Kutai Refinery Nusantara	316	8.248	PT Kutai Refinery Nusantara
PT Megasurya Mas	-	39.452	PT Megasurya Mas
PT Sumber Indah Perkasa	-	21.179	PT Sumber Indah Perkasa
PT Bina Karya Prima	-	20.779	PT Bina Karya Prima
PT Sinar Tayan Inti Mulya	-	4.684	PT Sinar Tayan Inti Mulya
Lain-lain (masing masing kurang dari Rp 2.000)	3.369	609	Others (each less than Rp 2,000)
Jumlah	124.242	241.040	Total

22. Beban Akrual / 22. Accrued Expenses

	2023	2022	
Gaji dan upah	55.328	97.242	Wages and fees
Bonus dan tunjangan	24.715	27.048	Bonus and Allowances
Beban bunga	9.420	66.215	Interest expense
Biaya jasa profesional	7.900	23.613	Professional fees
Jamsostek	5.747	11.193	Jamsostek
Jumlah	103.110	225.311	Total

23. Utang Pajak / 23. Taxes Payable

	2023	2022	
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pajak kini (Catatan 36)	17.201	45.008	Current tax (Note 36)
Pasal 21	56.773	40.575	Article 21
Pasal 22	7.914	3.521	Article 22
Pasal 23	20.465	17.352	Article 23
Pasal 25	-	332	Article 25
Pajak pertambahan nilai	79.627	77.011	Value added tax
Pajak bumi dan bangunan	38.514	30.739	Land and property taxes
Lain-lain	22.260	23.597	Others
Jumlah	242.754	238.135	Total

Pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022, Grup memeroleh Surat Ketetapan Pajak Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdiri dari Pajak Kini, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4(2), Pasal 25, Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dengan total masing-masing Rp 22.260 dan Rp 23.597.

As of December 31, 2023 and 2022, the Group received Tax Assessment Letters on Tax Underpayment (SKPKB) and Bill Payment Letters (STP) which consist of Current Tax, Article 21, Article 22, Article 23, Article 4(2), Article 25, Article 26, Value Added Tax and Land and Building Tax amounted Rp 22,260 and Rp 23,597.

24. Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank / 24. Loan From Non-Bank Financial Institutions

	2023	2022	
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek - Pihak ketiga			Short-term loan from non bank financial institution - Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Chandra Sakti Utama Leasing	216.704	120.134	PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	27.953	-	PT Radana Bhaskara Finance Tbk
PT Globalindo Multi Finance	17.000	-	PT Globalindo Multi Finance
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	280.800	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Subjumlah	261.657	400.934	Subtotal
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang - Pihak ketiga			Long-term loan from non bank financial institution - Third parties
Rupiah			Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	197.900	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Astra Credit Companies	2.134	4.569	PT Astra Credit Companies
PT Toyota Astra Finance	1.454	-	PT Toyota Astra Finance
PT Chandra Sakti Utama Leasing	1.050	3.112	PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Dipo Star Finance	605	2.456	PT Dipo Star Finance
PT Mandiri Tunas Finance	604	-	PT Mandiri Tunas Finance
Subjumlah	203.747	10.137	Subtotal
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(425)	(646)	Unamortized transaction costs
Jumlah utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	203.322	9.491	Total long-term loan from non bank financial institutions
Bagian utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	6.469	4.893	Current portion of long-term loan from non bank financial institutions
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	196.853	4.598	Long-term loan from non bank financial institutions - net of current portion

Penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Details of loans from non-bank financial institutions are as follows:

Entitas/ *Entity*	Saldo akhir/ *Outstanding balance* 2023	2022	Fasilitas/ *Facility*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Jaminan/ *Collateral*	Tingkat margin per tahun/ *Profit margin rate per annum*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)						
MAJ	197.900	197.925	Fasilitas pembiayaan syariah Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqisah dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp 203.000./*Syariah financial investment facility on Musyarakah Mutanaqisah principle with maximum loan amount of Rp 203,000.*	31/12/2028	Letter of undertaking dari Perusahaan; garansi Perusahaan; tanah, perkebunan kelapa sawit, dan saham (Catatan 15 dan16) /*Letter of undertaking from the Company, corporate guarantee, land, plantations, and Company shares (Notes 15 and 16).*	10,00%
AER	-	82.875	Fasilitas pembiayaan syariah Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqisah dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp 85.000. / *Syariah financial investment facility on Musyarakah Mutanaqisah principle with maximum loan amount of Rp 85,000.*	31/12/2023	Letter of undertaking dari Perusahaan, garansi Perusahaan, tanah, perkebunan kelapa sawit, dan saham (Catatan 15 dan 16), /*Letter of undertaking from the Company, corporate guarantee, land, plantations, and Company shares (Notes 15 and 16).*	10,00%
Jumlah/*Total*	197.900	280.800				

Entitas/ *Entity*	Saldo akhir/ *Outstanding balance* 2023	2022	Fasilitas/ *Facility*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Jaminan/ *Collateral*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*
PT Chandra Sakti Utama Leasing						
Perusahaan/ The Company	66.874	26.454	Fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dengan jaminan, maksimal sebesar Rp 220.000 dan Rp 150.000 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. / *Working capital of factoring with recource facility, maximum amounting to Rp 220,000 and Rp 150,000 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.*	31/07/2024	Piutang usaha (Catatan 7) dan persediaan (Catatan 12). /*Trade receivable (Note 7) and inventories (Note 12).*	15,00%
STP	61.888	-				
BHL	87.942	2.232				
SGA	-	91.448				
Jumlah/*Total*	216.704	120.134				
PT Radana Baskhara Finance						
Perusahaan/ The Company	27.953	-	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan, maksimal sebesar Rp 35.000./ *Working capital financing facility with maximum guarantee of Rp 35,000.*	23/06/2025	Tanah dan bangunan (Catatan 16)./*Land and buildings (Note 16).*	13,00%

Entitas/ *Entity*	Saldo akhir/ *Outstanding balance* 2023	2022	Fasilitas/ *Facility*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Jaminan/ *Collateral*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*
PT Globalindo Multi Finance						
ADS	17.000	-	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan maksimal sebesar Rp 17.000./ *Working capital financing facility with maximum guarantee of Rp 17.000.*	31/12/2024	Piutang usaha (Catatan 7)./ *Trade receivable (Note 7).*	16,00%
PT Astra Credit Companies						
JMS	755	1.678	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2.734. /*Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 2,734.*	01/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	9,90%
STP	1.379	2.891	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 4.524. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 4,524.*	22/10/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	9,90%
Jumlah/*Total*	2.134	4.569				
PT Toyota Astra Finance						
TSP	291	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 376. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 376.*	31/02/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	11,39%
BLP	198	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 205. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 205.*	13/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	8,57%
BHL	198	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 205. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 205.*	13/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	8,57%

Entitas/ *Entity*	Saldo akhir/ *Outstanding balance* 2023	2022	Fasilitas/ *Facility*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Jaminan/ *Collateral*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*
JMS	194	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 200. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 200.*	26/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	8,57%
PLS	191	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 197. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 197.*	27/12/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	8,57%
SGA	191	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 197. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 197.*	27/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	8,57%
STP	191	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 197. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 197.*	27/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	8,57%
Jumlah/*Total*	1.454	-				
PT Chandra Sakti Utama Leasing						
JMS	287	666	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.092. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 1,092.*	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	15,00%
SGA	94	219	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 359. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 359.*	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	15,00%
STP	188	436	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 715. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 715.*	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	15,00%

Entitas/ *Entity*	Saldo akhir/ *Outstanding balance* 2023	2022	Fasilitas/ *Facility*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Jaminan/ *Collateral*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*
MAJ	96	223	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 366. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 366.*	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	15,00%
BHL	385	896	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.469. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 1,469.*	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	15,00%
AAN	-	447	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 733. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 733.*	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	15,00%
AER	-	225	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 368. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 368.*	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	15,00%
Jumlah/*Total*	1.050	3.112				
PT Dipo Star Finance						
JMS	315	814	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2.734. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 2,734.*	01/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	10,50%
BLP	290	551	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 792. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 792.*	31/12/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	10,50%

Entitas/ *Entity*	Saldo akhir/ *Outstanding balance* 2023	2022	Fasilitas/ *Facility*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Jaminan/ *Collateral*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*
AAN	-	668	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 4.524. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 4,524.*	22/10/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	10,50%
ABP	-	423	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 567. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 567.*	28/02/2025	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	10,50%
Jumlah/*Total*	605	2.456				
PT Mandiri Tunas Finance						
JMS	604	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 623. / *Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 623.*	03/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / *Vehicle and heavy equipment (Note 16).*	7,28%

Fasilitas ini memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dan termasuk diantaranya rasio keuangan yang harus dipenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi fasilitas pembiayaan yang ditetapkan.

The facilities contain certain covenants and other financial ratios to be fulfilled. As of December 31, 2023 and 2022, the Group is in compliance with the terms and conditions of these facilities.

Marjin keuntungan dapat direviu setiap saat sesuai kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jumlah beban bagi hasil untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 atas fasilitas pembiayaan syariah ini masing-masing sebesar Rp 23.684 dan Rp 28.660.

The profit margin can be reviewed at any time by Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Total profit sharing for the years ended December 31, 2023 and 2022 on these syariah financing facilities is Rp 23,684 and Rp 28,660, respectively.

Jumlah beban bunga dan keuangan sebesar Rp 48.524 dan Rp 4.342 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 atas fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dan pembiayaan pembelian kendaraan.

Total interest and financial expenses is amounted Rp 48,524 and Rp 4,342 for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively on factoring facility and payable for vehicle purchase.

25. Liabilitas Sewa

Nilai tunai pembayaran sewa pembiayaan minimum masa datang (*future minimum lease payments*) dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

25. Lease Liabilities

Based on the lease agreements, the future minimum lease payments are as follows:

	2023	2022	
a. Analisa jatuh tempo:			a. Maturity analysis:
<= 1 tahun	66.294	50.374	<= 1 year
1-2 tahun	35.495	55.625	1-2 years
2-3 tahun	16.605	24.848	2-3 years
Jumlah	118.394	130.847	Total
Dikurangi bagian bunga	(10.719)	(12.026)	Less interest
Jumlah nilai tunai	107.675	118.821	Present value of minimum lease payments
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	58.725	42.535	Less current portion of lease liabilities
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun - bersih	48.950	76.286	Long-term portion - net
b. Berdasarkan pesewa			b. By lessor:
PT Shinhan Indo Finance	29.712	17.745	PT Shinhan Indo Finance
PT Surya Artha Nusantara Finance	21.496	24.603	PT Surya Artha Nusantara Finance
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	21.086	26.030	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara
PT Dipo Star Finance	16.661	27.860	PT Dipo Star Finance
PT ORIX Indonesia Finance	7.293	4.478	PT ORIX Indonesia Finance
PT Chandra Sakti Utama Leasing	6.637	12.070	PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Astra Sedaya Finance	3.228	5.265	PT Astra Sedaya Finance
PT BRI Multifinance Indonesia	1.562	615	PT BRI Multifinance Indonesia
PT Mandiri Tunas Finance	-	155	PT Mandiri Tunas Finance
Jumlah	107.675	118.821	Total

Pada tahun 2022, penambahan liabilitas sewa sebesar Rp 27.225 berasal dari transaksi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai standar akuntansi sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73.

In 2022, additional lease liabilities amounted to Rp 27,225 resulted from transactions that met certain criteria under applicable accounting standards in accordance with PSAK No. 73 in the respective year.

Tingkat suku bunga per tahun sewa pembiayaan ini untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 9 - 15%.

These facilities bear interest rates per annum of 9 – 15% in 2023 and 2022, respectively.

Beban bunga liabilitas sewa adalah sebesar Rp 11.115 dan Rp 9.226 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

Interest expense on lease liabilities amounted to Rp 11,115 and Rp 9,226 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

26. Uang Muka Setoran Modal

Akun ini merupakan uang muka setoran modal dari PT Rajawali Capital International (RCI). Berdasarkan perjanjian uang muka setoran modal tanggal 9 Juni 2021, antara Perusahaan dengan RCI, dimana RCI akan memberikan fasilitas uang muka setoran modal sebesar Rp 170.000.

26. Deposit for Future Stock Subscription

This account represent deposit from PT Rajawali Capital International (RCI). Based on the deposit for future stock subscription agreement dated on June 9, 2021, between the Company and RCI, wherein RCI will provide deposit for future stock subscription facility amounting Rp 170,000.

Pada tanggal 31 Desember 2022, PT Rajawali Capital International (RCI) menambah uang muka setoran modal sebesar Rp 50.000.

As of December 31, 2022, PT Rajawali Capital International (RCI) increased the deposit for future stock subscription amounting Rp 50,000.

27. Modal Saham / 27. Capital Stock

Susunan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT BSR Indonesia, biro administrasi efek, adalah sebagai berikut:

The stockholders of the Company based on the record of PT BSR Indonesia, share's registrar, are as follows:

	31 Desember 2023 dan 2022/ *December 31, 2023 and 2022*			
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital stock*	
PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	37,70	1.188.612	PT Rajawali Capital International
FIC Properties Sdn Bhd	11.664.357.670	37,00	1.166.436	FIC Properties Sdn Bhd
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	7.974.811.814	25,30	797.481	Public (below 5% each)
Jumlah	31.525.291.000	100,00	3.152.529	Total

Kepemilikan saham Perusahaan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The details of shares of the Company owned by members of the Board of Commissioners and Directors are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*			
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital stock*	
Henderi Djunaidi	3.322.500	0,01	332	Henderi Djunaidi
Yeoh Lean Khai	2.683.300	0,01	268	Yeoh Lean Khai
Jumlah	6.005.800	0,02	600	Total

	31 Desember/ *December 31, 2022*			
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital stock*	
Deddy Setiadi	1.335.500	0,00	134	Deddy Setiadi
Yeoh Lean Khai	2.683.300	0,01	268	Yeoh Lean Khai
Jumlah	4.018.800	0,01	402	Total

Manajemen Permodalan / Capital Management

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions.

Grup memantau modalnya dengan menggunakan analisa *gearing ratio* (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah ekuitas. Struktur modal Grup terdiri dari ekuitas dan utang bersih yang terdiri dari pinjaman berbunga dikurangi dengan kas dan bank.

The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by total equity. The Group's capital structure consists of equity and net debt consists of interest bearing borowings reduced by cash on hand and in banks.

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Jumlah pinjaman	5.107.998	7.059.131	Total borrowing
Dikurangi:			Less:
kas dan bank dan kas dibatasi penggunaannya	136.953	382.848	cash on hands and in banks and restricted cash
Pinjaman dan utang bersih	4.971.045	6.676.283	Net debt
Jumlah ekuitas	2.191.550	2.049.643	Total equity
Rasio pinjaman dan utang bersih terhadap ekuitas	226,83%	325,73%	Gearing ratio

28. Saham Treasuri / 28. Treasury Stocks

	Jumlah Lembar/ *Number of Shares*	Nilai Akuisisi Rata-rata per Lembar/ *Average Acquisition Cost Per Share* (dalam Rupiah penuh/ *in Rupiiah amount)*	Jumlah Nilai Akuisisi/ *Total Acquisition Cost*	Jumlah Nilai Nominal/ *Total Par Value*	
Pembelian selama tahun 2022					Acquired during 2022
Agustus	21.988.200	70	1.538	2.199	August
September	80.950.000	70	5.671	8.095	September
Oktober	47.211.300	67	3.161	4.721	October
November	46.853.700	69	3.212	4.685	November
Desember	26.628.200	66	1.764	2.663	December
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	223.631.400		15.346	22.363	Balance as of December 31, 2022
Pembelian selama tahun 2023					Acquired during 2023
Januari	26.041.600	65	1.684	2.604	January
Februari	16.584.500	66	1.101	1.658	February
Maret	17.107.400	63	1.071	1.711	March
April	18.649.900	58	1.083	1.865	April
Mei	29.212.200	57	1.658	2.921	May
Juni	22.276.600	55	1.229	2.228	June
Juli	23.203.700	56	1.299	2.320	July
Agustus	26.215.500	57	1.485	2.622	August
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	402.922.800		25.956	40.292	Balance as of December 31, 2023
% terhadap jumlah saham beredar:					% to number of outstanding shares
Tahun 2022		0,71%			Year 2022
Tahun 2023		1,28%			Year 2023

29. Tambahan Modal Disetor

Akun ini merupakan suatu penyesuaian ke modal saham menurut hukum dari entitas induk secara hukum (Perusahaan) sebagai akibat dari akuisisi terbalik dan selisih nilai transaksi restrukturisasi dari entitas sepengendali dan penyesuaian ke modal saham menurut hokum dari Perusahaan sebagai akibat dari akuisisi terbalik.

29. Additional Paid-In Capital

This account represents adjustments to reflect the statutory share capital of the legal parent (the Company) resulted from the reverse acquisition and difference in value arising from restructuring transactions under common control and excess of acquisition cost of treasury stock over par value.

	2023	2022	
Penyesuaian ke modal saham menurut hukum dari Perusahaan sebagai akibat dari akuisisi terbalik (Catatan 5)	4.000.747	4.000.747	Adjustment to the statutory share capital of the Company resulting from the reverse acquisition (Note 5)
Selisih antara harga pembelian kembali dengan nilai nominal saham treasuri (Catatan 28):			Excess of acquisition cost of treasury stocks over par value (Note 28):
Tahun 2022	7.017	7.017	2022
Tahun 2023	7.319	-	2023
Jumlah	4.015.083	4.007.764	Total

30. Kepentingan Nonpengendali

30. Noncontrolling Interests

	2023	2022	
a. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali			a. Distributable equity to noncontrolling interests
JMS	39.347	46.088	JMS
STP	20.780	27.695	STP
SGA	16.388	20.419	SGA
PLS	8.534	9.320	PLS
KAPAG	8.350	8.195	KAPAG
SKS	1.751	2.005	SKS
AAN*	-	(4.915)	AAN*
AER*	-	(4.345)	AER*
ABP*	-	(4.877)	ABP*
APN*	-	(7.299)	APN*
ISA	(15)	(13)	ISA
MSP	(43)	(34)	MSP
SGSS	(115)	(35)	SGSS
VMA	(591)	(388)	VMA
MAJ	(11.406)	(7.097)	MAJ
TSP	(33.047)	(25.216)	TSP
PSR	(40.698)	(33.213)	PSR
Jumlah	9.235	26.290	Total

	2023	2022	
b. Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali			b. Distributable income (loss) to non-controlling interests
APN*	7.299	(1.150)	APN*
AAN*	4.915	(1.626)	AAN*
ABP*	4.877	(1.010)	ABP*
AER*	4.345	(784)	AER*
KAPAG	155	72	KAPAG
ISA	(2)	(2)	ISA
MSP	(9)	(7)	MSP
SGSS	(80)	(8)	SGSS
VMA	(203)	(52)	VMA
SKS	(254)	(220)	SKS
PLS	(786)	(8)	PLS
SGA	(4.031)	1.017	SGA
MAJ	(4.309)	(1.843)	MAJ
JMS	(6.741)	6.115	JMS
STP	(6.915)	183	STP
PSR	(7.485)	(3.466)	PSR
TSP	(7.831)	(2.054)	TSP
Jumlah	(17.055)	(4.843)	Total

*Penjualan entitas anak

*Disposal of subsidiaries

31. Pendapatan Usaha / 31. Net Sales

	2023	2022	
a. Berdasarkan produk			**a. By product**
Minyak kelapa sawit	3.811.517	3.994.035	Crude palm oil
Inti kernel	322.805	446.514	Palm kernel
Tandan buah segar	70.290	133.575	Fresh fruit bunches
Jumlah	4.204.612	4.574.124	Total
b. Berdasarkan pelanggan			**b. By customer**
Pihak ketiga			Third parties
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	1.773.349	1.833.914	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
PT Sari Dumai Sejati	1.664.024	1.505.553	PT Sari Dumai Sejati
PT Mega Surya Mas	183.715	144.957	PT Mega Surya Mas
PT Bina Karya Prima	159.461	222.443	PT Bina Karya Prima
PT Sinar Jaya Inti Mulia	61.619	100.822	PT Sinar Jaya Inti Mulia
PT Kutai Refinary Nusantara	60.036	225.952	PT Kutai Refinary Nusantara
PT Wilmar Nabati Indonesia	48.274	192.296	PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Palm Mas Asri	40.634	-	PT Palm Mas Asri
PT Bukit Palem	24.051	57.827	PT Bukit Palem
PT Binasawit Abadi Pratama	20.493	48.793	PT Binasawit Abadi Pratama
PT Karyaindah Alam Sejahtera	-	58.684	PT Karyaindah Alam Sejahtera
Lain - lain (masing-masing kurang dari Rp 5.000)	168.956	182.883	Other (each less than 5,000)
Jumlah	4.204.612	4.574.124	Total

Rincian penjualan setelah diskon yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The above sales after sales discounts for the years ended December 31, 2023 and 2022 include sales to the following customers which represent more than 10% of the net sales of the respective period:

	2023		
	Jumlah/ Total	Persentase dari penjualan/ *Percentage of* sales	
		%	
Pihak ketiga			Third parties
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	1.773.349	42%	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
PT Sari Dumai Sejati	1.664.024	40%	PT Sari Dumai Sejati
Jumlah	3.437.373	82%	Total

	2022		
	Jumlah/ Total	Persentase dari penjualan/ *Percentage of* sales	
		%	
Pihak ketiga			Third parties
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	1.833.914	40%	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
PT Sari Dumai Sejati	1.505.553	33%	PT Sari Dumai Sejati
Jumlah	3.339.467	73%	Total

32. Beban Pokok Penjualan / 32. Cost of Goods Sold

	2023	2022	
Biaya pembelian persediaan:			Cost of inventories purchased:
Pembelian tandan buah segar	1.040.705	1.472.851	Purchases of fresh fruit bunches
Pembelian minyak kelapa sawit	151.685	202.587	Purchases of crude palm oil
Pembelian inti kernel	240	-	Purchase of palm kernel
Biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan	435.117	442.573	Mature upkeep expenses
Biaya amortisasi dan penyusutan (Catatan 15 dan 16)	410.275	429.609	Amortization and depreciation expenses (Notes 15 and 16)
Biaya overhead kebun dan pabrik	403.400	510.352	Estate and mill overhead
Biaya panen dan transportasi	350.381	353.470	Harvesting and transportation expenses
Biaya pabrik dan penampungan	182.692	177.138	Mill and bulking costs
Persediaan barang jadi			Finished goods
Saldo awal	268.653	214.125	Beginning balance
Saldo akhir	(79.357)	(268.653)	Ending balance
Penjualan entitas anak	(16.325)	8.616	Disposal of subsidiaries
Jumlah	3.147.466	3.542.668	Total

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pembelian dari pemasok tunggal yang jumlahnya melebihi 10% dari jumlah pembelian.

There are no purchases from an individual supplier which represent more than 10% of net sales for the years ended December 31, 2023 and 2022.

33. Beban Umum Dan Administrasi / 33. General and Administrative Expenses

	2023	2022	
Biaya karyawan	108.159	113.119	Staff costs
Biaya hukum dan profesi	50.350	30.446	Legal and professional expenses
Biaya perjalanan dinas dan entertain	10.733	11.093	Travelling and entertainment expenses
Biaya sewa	8.350	4.364	Rental expenses
Biaya penyusutan (Catatan 16)	7.192	9.900	Depreciation expenses (Note 16)
Biaya telekomunikasi	6.810	3.531	Telecommunication expenses
Biaya pengembangan karyawan	2.209	1.771	Employees' development expenses
Biaya perijinan dan pajak	1.316	2.047	Licences and tax expenses
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 2.000)	25.842	36.178	Other (each less than Rp 2,000)
Jumlah	220.961	212.449	Total

34. Beban Penjualan / 34. Selling Expenses

Beban penjualan terdiri dari biaya pengangkutan tandan buah segar, minyak kelapa sawit dan inti kernel.

Selling expenses represent expenses for transportation of fresh fruit bunches, crude palm oil and palm kernel.

	2023	2022	
Berdasarkan produk			By product
Minyak kelapa sawit	75.046	85.551	Crude palm oil
Tandan buah segar	39.717	53.123	Fresh fruit bunches
Inti kernel	17.956	19.226	Palm kernel
Jumlah	132.719	157.900	Total

35. Imbalan Kerja Jangka Panjang / 35. Long-Term Employee Benefits

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja 2/2022) pada tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan berlakunya Perppu ini, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perppu Cipta Kerja 2/2022 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh KKA Herman Budi Purwanto, aktuaris independen, tertanggal 29 Januari 2024.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law no. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja).

The President of the Republic of Indonesia has issued Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu Cipta Kerja 2/2022) on December 30, 2022 which is the implementation of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. With the enactment of this Perppu, Law no. 11/2020 concerning Job Creation is repealed and declared invalid. Perppu Cipta Kerja 2/2022 has been enacted into law on March 31, 2023, based on Law No.6 of 2023.

The latest actuarial valuation upon the long-term employee benefits liability was from KKA Herman Budi Purwanto, an independent actuary, dated January 29, 2024.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 688 dan 665 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Number of eligible employees is 688 and 665 employees as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait dengan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of the post employment benefit expense plan are as follows:

2023	2022	
Biaya jasa:		Service cost:
Biaya jasa lalu	(77)	- Previous service cost
Biaya jasa kini	2.077	3.203 Current service cost
Beban bunga neto	1.589	1.767 Net interest expense
Subtotal biaya manfaat pasti	3.589	4.970 Subtotal of defined benefit cost
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi	-	111 Adjustment due to changes in the attribution method
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	3.589	5.081 Component of defined benefit costs recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:		Remeasurement on defined benefits liability:
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	2.094	(3.052) Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(6.019)	(1.818) Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Penjualan anak perusahaan	1.597	- Disposal of subsidiaries
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(2.328)	(4.870) Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	1.261	211 Total

Pada tahun 2023 dan 2022, beban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam akun "Beban umum dan administrasi" dalam laba rugi.

In 2023 and 2022, long term employee benefits expense is presented as part of "General and administrative expenses" in profit or loss.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the long-term employee benefits liability were as follows:

2023	2022	
Saldo awal tahun	32.034	34.653 Balance at the beginning of the year
Biaya jasa lalu	(77)	- Previous service costs
Biaya jasa kini	2.077	3.203 Current service costs
Beban bunga neto	1.589	1.767 Net interest expense
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi	-	111 Adjustment due to changes in the attribution method
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:		Remeasurement on defined benefits obligation:
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	2.094	(3.052) Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(6.019)	(1.818) Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Entitas anak dijual	(3.334)	- Disposal of subsidiaries
Pembayaran manfaat	(7.505)	(2.830) Benefits paid
Saldo akhir tahun	20.859	32.034 Balance at the end of the year

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan berkurang sebesar Rp 1.349 (meningkat sebesar Rp 1.483).

- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan naik sebesar Rp 1.484 (turun sebesar Rp 1.374).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan kerja jangka panjang mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk menghitung imbalan kerja jangka panjang:

Significant actuarial assumptions for the determination of the long-term employee benefits liability are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1% higher (lower), the long-term employee benefit liability would decrease by Rp 1,349 (increase by Rp 1,483).

- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the long-term employee benefit liability would increase by Rp 1,484 (decrease by Rp 1,374).

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the long-term employee benefit liability as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the long-term employee benefit liability has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the long-term employee benefit liability recognised in the consolidated statement of financial position.

The principal actuarial assumptions used in the valuation of the long-term employee benefit liability:

Usia pensiun normal	:	60 tahun/ 60 *years old*	:	Normal pension age
Tingkat kenaikan gaji	:	5% per tahun/*per annum*	:	Salary increase rate
Tingkat bunga diskonto	:	7,20% - 7,44% dan 7,20% - 7,44% per tahun masing-masing untuk tahun 2023 dan 2022/ *7.20% - 7.44% and 7.20% - 7.44% per annum for 2023 and 2022, respectively*	:	Discount rate
Tingkat pengunduran diri	:	15% per tahun sampai dengan 54 tahun untuk 2023 dan 5% per tahun sampai dengan 39 tahun, 4% per tahun antara usia 40 sampai dengan 44 tahun, 1% per tahun antara usia 45 sampai dengan 49 tahun, 1% per tahun antara usia 50 sampai dengan 54 tahun, lalu menurun menjadi 0% per tahun diatas usia 55 tahun untuk 2022. / *15% per annum up to age 54 years old for 2023 and 5% per annum at age up to 39 years old, 4% per annum at age 40 up to 44 years old, 1% per annum at age 45 up to 49 years old, 1% per annum at age 50 up to 54 years old, then decrease to 0% per annum at age up to 55 years old for 2022.*	:	Withdrawal rate/resignation rate

36. Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

	2023	2022	
Perusahaan			The Company
Pajak tangguhan	19.480	177.727	Deferred tax
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak kini	(653)	(3.979)	Current tax
Pajak tangguhan	265.296	(46.183)	Deferred tax
Jumlah	264.643	(50.162)	Subtotal
Jumlah	284.123	127.565	Total

Pajak kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	(124.153)	(114.930)	Loss before tax per consolidated statements of income
Dikurangi:			Less:
Laba sebelum pajak entitas anak Perusahaan	1.177.260	320.875	Profit before tax of the Company's subsidiaries
Rugi sebelum pajak - Perusahaan	(1.301.413)	(435.805)	Loss before tax - the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Beban imbalan pasca kerja	8	623	Post-employment benefit expense
Liabilitas sewa	111	-	Lease liabilities
Penjualan anak perusahaan	29.213	(29.213)	Disposal of subsidiaries
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(422)	(583)	Allowance for impairment on receivables
Klaim mutu	(305)	-	Quality claim
Beban depresiasi	1.705	943	Depreciation expense
Jumlah	30.310	(28.230)	Total
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(2.866)	(3.077)	Income subject to final tax
Lain-lain	572.314	(409.603)	Others
Jumlah	569.448	(412.680)	Total
Rugi fiskal Perusahaan	(701.655)	(876.715)	The Company's taxable loss
Rugi fiskal tahun lalu:			Fiscal loss prior years:
2020	(30.792)	(30.792)	2020
2021	(2.345.293)	(2.345.293)	2021
2022	(876.715)	-	2022
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(3.954.455)	(3.252.800)	The Company's accumulated fiscal loss carryforward

36. Income Tax

Tax benefit (expense) of the Company and its subsidiaries consists of the following:

Current tax

A reconciliation between loss before tax per consolidated statements of comprehensive income and fiscal loss follows:

	2023	2022	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	(653)	(3.979)	Subsidiaries
Jumlah beban pajak kini	(653)	(3.979)	Total current tax expense
Utang pajak (Catatan 23)	(17.201)	(45.008)	Tax payable (Note 23)

Laba kena pajak dan beban pajak Grup tahun 2022 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Grup kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Selama tahun 2023 dan 2022, Grup memperoleh beberapa Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar Rp 22.260 dan Rp 23.597. Beban atas surat ketetapan dan tagihan pajak tersebut dicatat sebagai bagian dari beban lain-lain – bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

The taxable income and tax expense of the Group in 2022 are in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

In 2023 and 2022, Group have been obtained Tax Assessment Letters on Tax Underpayment total amounted Rp 22,260 and Rp 23,597. Tax penalty expenses have been recorded as others expenses net in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

Deferred tax

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for the year*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited (charged) to other comprehensive income for the year*	Penjualan Entitas Anak (Catatan 44)/ *Disposal of Subsidiaries (Note 44)*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Perusahaan						The Company
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						Deferred tax assets (liabilities)
Imbalan pasca kerja	3	2	(3)	-	2	Post-employment benefits
Klaim mutu	67	(67)	-	-	-	Quality claim
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.240	(93)	-	-	3.147	Allowance for Impairment losses
Rugi fiskal	716.167	12.811	-	-	728.978	Fiscal loss
Koreksi negatif penjualan anak	(6.427)	6.427	-	-	-	Negative correction divestment of subsidiaries
Liabilitas sewa	-	25	-	-	25	Lease liabilities
Penyusutan dan amortisasi	(4.964)	375	-	-	(4.589)	Depreciation and amortization
Jumlah	708.086	19.480	(3)	-	727.563	Total
Entitas anak						Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	670.111	265.296	(509)	(230.268)	704.630	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	-	-	-	(711.730)	Deferred tax liabilities
Jumlah	(41.619)	265.296	(509)	(230.268)	(7.100)	Total
Aset pajak tangguhan	1.378.197	284.776	(512)	(230.268)	1.432.193	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	-	-	-	(711.730)	Deferred tax liabilities

	1 Januari/ *January 1,* 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for the year*	Penjualan Entitas Anak/ *Disposal of subsidiaries*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited (charged) to other comprehensive income for the year*	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Perusahaan						The Company
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						Deferred tax assets (liabilities)
Imbalan pasca kerja	2	137	-	(136)	3	Post-employment benefits
Klaim mutu	67	-	-	-	67	Quality claim
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.368	(128)	-	-	3.240	Allowance for Impairment losses
Rugi fiskal	532.237	183.930	-	-	716.167	Fiscal loss
Koreksi negatif penjualan anak	-	(6.427)	-	-	(6.427)	Negative correction divestment of subsidiary
Penyusutan dan amortisasi	(5.179)	215	-	-	(4.964)	Depreciation and amortization
Jumlah	530.495	177.727	-	(136)	708.086	Total
Entitas anak						Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	669.448	706	-	(43)	670.111	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(729.254)	(46.889)	65.305	(892)	(711.730)	Deferred tax liabilities
Jumlah	(59.806)	(46.183)	65.305	(935)	(41.619)	Total
Aset pajak tangguhan	1.199.943	178.433	-	(179)	1.378.197	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(729.254)	(46.889)	65.305	(892)	(711.730)	Deferred tax liabilities

Rekonsiliasi antara jumlah manfaat pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rates to loss before tax per statements of comprehensive income of the Company is as follows:

	2023	2022	
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	(124.153)	(114.930)	Loss before tax per consolidated statements of income
Dikurang:			Less:
Laba sebelum pajak entitas anak - bersih	1.177.260	320.875	Profit before tax of the subsidiaries - net
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(1.301.413)	(435.805)	Loss before tax of the Company
Manfaat pajak dengan tarif pajak yang berlaku Perusahaan	286.311	95.878	Tax benefit at effective tax rates The Company
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(125.278)	90.789	Tax effects of non-deductible expenses
Penyesuaian pajak tangguhan	(141.553)	(8.940)	Adjustment on deferred tax
Manfaat pajak Perusahaan	19.480	177.727	Income tax of the Company
Manfaat (beban) pajak entitas anak	264.643	(50.162)	Tax benefit (expense) of the subsidiaries
Manfaat pajak	284.123	127.565	Total tax benefit

37. Laba Per Saham

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	177.025	17.478	Profit attributable to the owners of the Company
Rata-rata tertimbang jumlah saham untuk perhitungan laba per saham dasar*)	31.176.693.497	31.385.913.810	Weighted average number of shares outstanding for computation of basic earnings per share*)
Laba bersih per saham (dalam Rupiah penuh)			Earnings per share (in full Rupiah)
Dasar	5,68	0,56	Basic

*) Dalam satuan penuh

*) In full amount

37. Earnings Per Share

The calculation of earnings per share follows:

38. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

Rincian sifat pihak berelasi dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. PT Rajawali Capital International merupakan pemegang saham Perusahaan.

b. Personel manajemen kunci Perusahaan adalah Komisaris dan Direksi.

c. PT Rajawali Corpora merupakan pemegang saham PT Rajawali Capital International.

d. PT Nettocyber Indonesia merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT Rajawali Corpora.

e. PT Permadani Kathulistiwa Nusantara merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT Rajawali Corpora.

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

a. Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp 23.625 dan Rp 21.210 masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

38. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

The nature of relationship and significant transactions with related parties are as follows:

a. PT Rajawali Capital International is a shareholder of the Company.

b. Key management personel of the Company are the Commissioners and Directors.

c. PT Rajawali Corpora is a shareholder of PT Rajawali Capital International.

d. PT Nettocyber Indonesia is affiliate company to PT Rajawali Corpora.

e. PT Permadani Khatulistiwa Nusantara is affiliate company of PT Rajawali Corpora.

Transaction with Related Parties

In the normal course of business, the Group has entered into certain transactions with related parties involving the following:

a. Remuneration of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 23,625 and Rp 21,210, respectively.

b. Grup mempunyai perjanjian atas jasa pendukung infrastruktur teknologi informasi dengan PT Nettocyber Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, utang kepada PT Nettocyber Indonesia masing-masing sebesar Rp 3.535 dan Rp 1.983, dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 20).

b. The Group entered into information technology infrastructure support service agreement with PT Nettocyber Indonesia. As of December 31, 2023 and 2022 payable to PT Nettocyber Indonesia amounting to Rp 3,535 and Rp 1,983, respectively, is recorded as part of trade account payable (Note 20).

c. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh nilai liabilitas jangka pendek lain-lain merupakan utang Grup kepada PT Rajawali Corpora. Utang tersebut tidak memiliki jadwal pembayaran yang tetap, tidak memiliki jatuh tempo yang pasti dan tidak dikenakan bunga. Utang kepada PT Rajawali Corpora digunakan untuk kegiatan usaha dan operasional Grup.

c. As of December 31, 2023 and 2022, all other current liabilities amount represents Group's liabilities to PT Rajawali Corpora. These liabilities have no fixed payment schedule, no fixed maturity and interest. Liabilities to PT Rajawali Corpora are used for Group's business activities and operations.

d. Pada tanggal 30 Juni 2020, Grup memiliki perjanjian pinjaman dengan PT Rajawali Capital International dengan maksimum kredit sebesar Rp 200.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2025 dengan bunga tetap sebesar 4,75% per tahun yang digunakan untuk kegiatan usaha dan operasional. Nilai utang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 200.000.

d. In June 30, 2020, Group have a loan agreement with PT Rajawali Capital International with a maximum credit amount of Rp 200,000. This facility has a maturity date of June 30, 2025 with a fixed interest rate of 4.75% per annum which is used for business and operational activities. As of December 31, 2023 and 2022, outstanding of liability amounting to Rp 200,000, respectively.

e. Pada tanggal 28 Juni 2021, Grup memiliki perjanjian pinjaman dengan PT Rajawali Capital International dengan maksimum kredit sebesar Rp 500.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2026 dengan bunga tetap sebesar 4,75% per tahun yang digunakan untuk kegiatan usaha dan operasional. Nilai utang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 61.450 and Rp 88.500.

e. In June 28, 2021, Group have a loan agreement with PT Rajawali Capital International with a maximum credit amount of Rp 500,000. This facility has a maturity date of December 31, 2026 with a fixed interest rate of 4.75% per annum which is used for business and operational activities. As of December 31, 2023 and 2022, outstanding of liability amounting to Rp 61,450 and Rp 88,500, respectively.

f. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo uang muka setoran modal dari RCI adalah sebesar Rp 220.000 (Catatan 26).

f. As of December 31, 2023 and 2022, balance of deposit for future stock subscriptions from RCI amounted to Rp 220,000 (Note 26).

g. Grup mempunyai perjanjian atas jasa sewa gedung dengan PT Permadani Khatulistiwa Nusantara. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, utang kepada PT Permadani Khatulistiwa Nusantara sebesar Rp 3.427 dan Rp 1.548 dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 20).

g. The Group entered into building rent agreement with PT Permadani Khatulistiwa Nusantara. As of December 31, 2023 and 2022, accounts payable to PT Permadani Khatulistiwa Nusantara amounted Rp 3,427 and Rp 1,548 is recorded as part of trade account payable (Note 20).

h. Utang bank Grup dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT Rajawali Corpora (Catatan 19).

h. The Group's bank loans are secured by corporate guarantee from PT Rajawali Corpora (Note 19).

i. Tidak terdapat komitmen dengan pihak berelasi, termasuk jaminan dan garansi yang diberikan atau diterima.

i. There are no commitments with related parties, including guarantees and warranties given or received.

39. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

39. Monetary Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currency

As of December 31, 2023 and 2022, the Group's monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows:

		2023		2022		
		Mata uang asing (angka penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent*	Mata uang asing (angka penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent*	
Aset						Assets
Bank	USD	30.900	472	20.693	326	Cash in banks
Liabilitas						
Utang usaha	USD	46.277	713	46.277	728	Trade accounts payable
Liabilitas bersih			(241)		(402)	Net liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs nilai tukar yang digunakan Grup diungkapkan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian.

As of December 31, 2023 and 2022, the conversion rates used by the Group are disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements.

40. Perikatan dan Perjanjian Penting

Entitas anak sebagai perkebunan inti diwajibkan oleh peraturan Pemerintah untuk mengembangkan perkebunan plasma yang pada akhirnya akan dikonversi menjadi perkebunan plasma. Setelah konversi, petani plasma wajib menjual buah ke inti sebagai imbalannya (Catatan 8 dan 14).

40. Commitments and Agreements

The subsidiaries, as nucleus, are obliged under Government regulations to develop the plasma plantations, which will be eventually converted to plasma plantations. After the conversion, the plasma farmers are in turn obliged to sell the fruit to the nucleus (Notes 8 and 14).

41. Liabilitas Kontinjensi

Grup telah menerapkan beberapa program plasma, dimana biaya pengembangan perkebunan plasma dibiayai oleh fasilitas kredit yang diberikan oleh bank yang ditunjuk untuk petani melalui koperasi setempat sebagai perwakilan dari petani. Saldo pinjaman bank yang diberikan oleh bank untuk petani dan dijamin oleh masing-masing entitas anak pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

41. Contingent Liabilities

The Group has implemented several plasma program, under which the development cost of the plasma plantations is financed by credit facilities granted by designated banks to the farmers through local cooperatives as the representatives of the farmers. The outstanding bank loans granted by the banks to the farmers and guaranteed by one of the subsidiaries as at end of the reporting period are as follows:

2023	2022	
Jumlah fasilitas	709.560	954.024	Facility amounts
Jumlah utang dari petani plasma	448.702	806.986	Outstanding amount due by plasma farmers

42. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Grup memiliki dua (2) segmen yang dioperasikan, meliputi; perkebunan dan pabrikasi.

42. Operation Segment

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, who is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses their performance. The Group has two (2) operating segments, namely; plantations and manufacturing.

	2023					
	Perkebunan/ *Plantations*	Pabrikasi/ *Manufacturing*	Jumlah sebelum Eliminasi/ *Total Before Elimination*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
PENDAPATAN USAHA						NET SALES
Penjualan eksternal	70.290	4.134.322	4.204.612	-	4.204.612	External sales
Penjualan antar-segmen	-	165.742	165.742	(165.742)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	70.290	4.300.064	4.370.354	(165.742)	4.204.612	Total revenues
Beban pokok penjualan	(1.712.835)	(1.600.373)	(3.313.208)	165.742	(3.147.466)	Cost of goods sold
Laba kotor	(1.642.545)	2.699.691	1.057.146	-	1.057.146	Gross profit
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	13.771	-	13.771	-	13.771	Gain arising from changes in fair value of biological assets
Beban penjualan	(39.717)	(93.002)	(132.719)	-	(132.719)	Selling expenses
Laba kotor sebelum alokasi	(1.668.491)	2.606.689	938.198	-	938.198	Gross profit before allocation
Beban umum dan administrasi					(220.961)	General and administrative expenses
Pendapatan bunga					6.936	Interest income
Keuntungan selisih kurs - bersih					252	Gain on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan					(564.138)	Interest and financial expenses
Rugi penjualan entitas anak					(214.468)	Loss on subsidiaries divestment
Lain-lain - bersih					(69.972)	Others expense - net
Manfaat pajak					284.123	Tax benefit
Laba tahun berjalan	(1.668.491)	2.606.689	938.198	-	159.970	Profit for the year
Laporan posisi keuangan konsolidasian *						Consolidated statements of financial position *
Segmen aset	3.748.161	17.924.157	21.672.318	(12.985.952)	8.686.366	Segment assets
Segmen liabilitas	2.018.150	5.853.566	7.871.716	(834.240)	7.037.476	Segment liabilities

	2022					
	Perkebunan/ *Plantations*	Pabrikasi/ *Manufacturing*	Jumlah sebelum Eliminasi/ *Total Before Elimination*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
PENDAPATAN USAHA						NET SALES
Penjualan eksternal	133.574	4.440.550	4.574.124	-	4.574.124	External sales
Penjualan antar-segmen	-	264.845	264.845	(264.845)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	133.574	4.705.395	4.838.969	(264.845)	4.574.124	Total revenues
Beban pokok penjualan	(1.728.239)	(2.079.274)	(3.807.513)	264.845	(3.542.668)	Cost of goods sold
Laba kotor	(1.594.665)	2.626.121	1.031.456	-	1.031.456	Gross profit
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	35.486	-	35.486	-	35.486	Gain arising from changes in fair value of biological assets
Beban penjualan	(53.123)	(104.777)	(157.900)	-	(157.900)	Selling expenses
Laba kotor sebelum alokasi	(1.612.302)	2.521.344	909.042	-	909.042	Gross profit before allocation
Beban umum dan administrasi					(212.449)	General and administrative expenses
Pendapatan bunga					6.708	Interest income
Kerugian selisih kurs - bersih					(38)	Loss on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan					(581.611)	Interest and financial expenses
Rugi penjualan entitas anak					(220.272)	Loss on subsidiaries divestment
Lain-lain - bersih					(16.310)	Others expense - net
Manfaat pajak					127.565	Tax benefit
Laba tahun berjalan	(1.612.302)	2.521.344	909.042	-	12.635	Profit for the year
Laporan posisi keuangan konsolidasian *						Consolidated statements of financial position *
Segmen aset	7.238.626	14.457.495	21.696.121	(10.937.599)	10.758.522	Segment assets
Segmen liabilitas	4.070.272	6.023.069	10.093.341	(869.281)	9.224.060	Segment liabilities

* Aset segmen tidak termasuk aset pajak tangguhan dan pajak dibayar dimuka, sedangkan liabilitas segmen tidak termasuk utang pajak dan liabilitas pajak tangguhan.

Penjualan antar segmen didasari perjanjian dari kedua belah pihak.

* Segment assets exclude deferred tax assets and prepaid taxes while segment liabilities exclude taxes payable and deferred tax liabilities.

Inter-segment sales are based on the agreement of both parties.

Segmen Geografis

Geographical Segments

	2023				
	Sumatera	Kalimantan	Papua	Jumlah/ *Total*	
Penjualan/*Sales*					*Sales*
Lokal	23.981	4.049.095	297.278	4.370.354	Local
Eliminasi	-	(23.419)	(142.323)	(165.742)	Elimination
Jumlah setelah dieliminasi	23.981	4.025.676	154.955	4.204.612	Total after elimination

	2022				
	Sumatera	Kalimantan	Papua	Jumlah/ *Total*	
Penjualan/*Sales*					*Sales*
Lokal	1.721.983	4.665.026	225.515	6.612.524	Local
Eliminasi	-	(2.038.400)	-	(2.038.400)	Elimination
Jumlah setelah dieliminasi	1.721.983	2.626.626	225.515	4.574.124	Total after elimination

	2023					
	Sumatera dan Sulawesi	Singapore	Kalimantan	Papua	Jumlah/ *Total*	
Aset segmen *						Segment assets *
Jumlah sebelum dieliminasi	395.460	881	19.065.497	2.210.480	21.672.318	Total before elimination
Eliminasi	(86)	-	(12.913.420)	(72.446)	(12.985.952)	Elimination
Jumlah setelah dieliminasi	395.374	881	6.152.077	2.138.034	8.686.366	Total after elimination

* Tidak termasuk aset pajak tangguhan dan pajak dibayar dimuka

*Exclude deferred tax assets and prepaid taxes

	2022					
	Sumatera dan Sulawesi	Singapore	Kalimantan	Papua	Jumlah/ *Total*	
Aset segmen *						Segment assets *
Jumlah sebelum dieliminasi	682.201	897	19.438.525	1.574.499	21.696.122	Total before elimination
Eliminasi	(24.997)	-	(10.842.760)	(69.842)	(10.937.599)	Elimination
Jumlah setelah dieliminasi	657.204	897	8.595.765	1.504.657	10.758.523	Total after elimination

* Tidak termasuk aset pajak tangguhan dan pajak dibayar dimuka

*Exclude deferred tax assets and prepaid taxes

43. Tujuan Dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengawasan kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Departemen Manajemen Risiko melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Direksi Perusahaan secara berkala.

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Grup dalam menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang seharusnya, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajibannya.

Risiko Pasar

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Grup terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari aset dan liabilitas yang diakui.

Manajemen telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan entitas-entitas dalam Grup mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

43. Financial Risk Management Objectives And Policies

The Group activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

Establishing and monitoring risk management is the overall responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has identified the Risk Management Department to develop and oversee the risk management policies. The activities carried out by the Risk Management Department are regularly reported to the Board of Directors.

The Company's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Group which includes setting risk limits and controls, monitoring risks and adherence to limits that have been determined. Risk management policies and systems are evaluated periodically to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Company, through training and management standards and procedures, aims to develop the control environment, in which all employees understand the duties and obligations.

Market Risk

a. Foreign Exchange Risk

The Group is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the U.S. Dollar foreign exchange risk arising from recognised assets and liabilities.

Management has set up a policy to require Group companies to manage their foreign exchange risk against their functional currency. Foreign exchange risk arises when recognized assets or liabilities are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. The risk is measured using cash flow forecasts.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 39.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies as disclosed in Note 39.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 1% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, rugi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 akan lebih tinggi/rendah masing-masing sebesar Rp 2 dan Rp 3, terutama diakibatkan kerugian/keuntungan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

As of December 31, 2023 and 2022, if the Rupiah had weakened/strengthened by 1%, against the U.S. Dollar with all other variables held constant, loss for the years ended December 31, 2023 and 2022 would have been Rp 2 and Rp 3 higher/lower, respectively, mainly as a result of foreign exchange loss/gain on translation of U.S. Dollar denominated monetary assets and liabilities.

b. Risiko suku bunga

b. Interest Rate Risk

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group exposures to interest rate risk relate primarily to bank loans.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

To minimize interest rate risk, the Group manages interest cost through loans combination with fixed rate and variable rate, by evaluating market rate trends.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.

Management also conducts assessments of interest rates offered by banks to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter new loan agreement.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan konsolidasian Grup yang terkait risiko suku bunga:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Group's consolidated financial liabilities that are exposed to interest rate risk:

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan konsolidasian Grup yang terkait risiko suku bunga:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Group's consolidated financial liabilities that are exposed to interest rate risk:

		2023							
		Jatuh Tempo/*Maturity*							
	Suku Bunga/ *Interest rate*	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	3 - 5 tahun/ *3 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*	Jumlah/ *Total*	Biaya transaksi *Transaction cost*	Nilai tercatat *Carrying value*
	%								
Liabilitas/Liabilities									
Bunga Mengambang/*Floating Rate*									
Utang bank jangka pendek/ *Short-term bank loans*									
- Rupiah	8,5 - 10,5	393.718	-	-	-	-	393.718	-	393.718
Utang bank jangka panjang/ *Long-term bank loans*									
- Rupiah	8,5 - 10,5	1.122.593	697.427	1.027.100	976.068	403.880	4.227.068	(85.442)	4.141.626

		2022							
		Jatuh Tempo/*Maturity*							
	Suku Bunga/ *Interest rate*	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	3 - 5 tahun/ *3 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*	Jumlah/ *Total*	Biaya transaksi *Transaction cost*	Nilai tercatat *Carrying value*
	%								
Liabilitas/Liabilities									
Bunga Mengambang/*Floating Rate*									
Utang bank jangka pendek/ *Short-term bank loans*									
- Rupiah	9	442.100	-	-	-	-	442.100	-	442.100
Utang bank jangka panjang/ *Long-term bank loans*									
- Rupiah	8-10	641.300	1.183.903	763.414	1.952.795	1.745.826	6.287.238	(199.453)	6.087.785

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jika suku bunga atas pinjaman yang didenominasikan dalam Rupiah lebih tinggi/rendah 1% dan variabel lain dianggap tetap, rugi sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 51.943 dan Rp 72.586, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

As of December 31, 2023 and 2022, if interest rates on Rupiah-denominated borrowings had been 1% higher/lower with all other variables held constant, pre-tax loss for the years would have been Rp 51,943 and Rp 72,586 higher/lower, mainly as a result of higher/lower interest expense on floating rate borrowings.

c. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Eksposur Grup terkait risiko harga pasar terutama berasal dari harga komoditas pada tingkat yang minimum. Grup melakukan kontrak pembelian dan penjualan dengan harga yang telah disetujui dan dibayar dengan uang muka. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat eksposur risiko harga yang signifikan.

c. Price Risk

Price risk is the risk that the value of the financial instrument will fluctuate as a result of changes in market prices. The Group's exposure to price risk relates to its palm oil based product commodities. The Group monitors the market closely to ensure that the risk exposure to the volatility of the commodities is kept at minimum level. The Group entered into sale and purchase at the agreed market price and paid in advances. The management believes that price risk exposure is not significant.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk meminimalisasi jumlah piutang tak tertagih.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties due to failure to meet contractual obligations. The Group controls the credit risk by doing business relationships with parties who are credible, setting verification and authorization policies of credit, and monitor the collectibility of receivables on a regular basis to minimize the amount of bad debts.

The table below shows the maximum exposure to credit risk of the components of the consolidated statements of financial position as of December 31, 2023 and 2022:

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The table below shows the maximum exposure to credit risk of the components of the consolidated statements of financial position as of December 31, 2023 and 2022:

	2023	2022	
Kas dan bank	26.282	106.908	Cash on hands and in banks
Piutang usaha	32.137	41.005	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	10.008	13.553	Other receivables
Aset lancar lain-lain	84.115	247.206	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	97.315	196.914	Other non-current assets
Jumlah	249.857	605.586	**Total**

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Kebutuhan likuiditas Grup terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal untuk ekspansi lahan dan penanaman baru kelapa sawit.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan (tidak termasuk arus kas untuk pembayaran bunga):

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities as they become due.

Liquidity needs of the Group primarily arise from the need to finance investment and capital expenditures for expansion and new planting of new oil palm trees.

In the management of liquidity risk, management monitors and maintain a level of cash deemed adequate to finance the Group operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below analyses the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (excluding cash flows for interest payments):

	2023					
	<= 1 tahun/ *<= 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 years*	2-3 tahun/ *2-3 years*	3-5 tahun/ *3-5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*	Jumlah/ *Total*
Liabilitas yang diukur pada biaya amortisasi/						
Liabilities measured at amortized cost						
Utang bank jangka pendek/						
Short-term bank loans	393.718	-	-	-	-	393.718
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek/						
Short-term loan from non-bank financial institutions	261.657	-	-	-	-	261.657
Utang usaha/						
Trade accounts payable	704.895	-	-	-	-	704.895
Beban akrual/						
Accrued expenses	103.110	-	-	-	-	103.110
Liabilitas jangka pendek lain-lain/						
Other current liabilities	494.922	-	-	-	-	494.922
Utang bank jangka panjang/						
Long-term bank loans	1.122.593	697.427	1.027.100	976.068	403.880	4.227.068
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang						
Long-term loan from non-bank financial institutions	6.469	15.741	28.637	152.900	-	203.747
Liabilitas sewa/						
Lease liabilities	58.725	33.018	15.932	-	-	107.675
Uang muka setoran modal						
Deposit for future stock subscriptions	-	220.000	-	-	-	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain/						
Other non-currrent liabilities	-	200.000	61.450	-	-	261.450
Jumlah/*Total*	3.146.089	1.166.186	1.133.119	1.128.968	403.880	6.978.242

	2022					
	<= 1 tahun/ *<= 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 years*	2-3 tahun/ *2-3 years*	3-5 tahun/ *3-5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*	Jumlah/ *Total*
Liabilitas yang diukur pada biaya amortisasi/						
Liabilities measured at amortized cost						
Utang bank jangka pendek/						
Short-term bank loans	442.100	-	-	-	-	442.100
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek/						
Short-term loan from non-bank financial institutions	400.934	-	-	-	-	400.934
Utang usaha/						
Trade accounts payable	715.290	-	-	-	-	715.290
Beban akrual/						
Accrued expenses	225.311	-	-	-	-	225.311
Liabilitas jangka pendek lain-lain/						
Other current liabilities	442.754	-	-	-	-	442.754
Utang bank jangka panjang/						
Long-term bank loans	641.300	1.183.903	763.414	1.952.795	1.745.828	6.287.240
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang						
Long-term loan from non-bank financial institutions	4.893	2.952	2.292	-	-	10.137
Liabilitas sewa/						
Lease liabilities	42.535	51.832	24.454	-	-	118.821
Uang muka setoran modal						
Deposit for future stocl subscriptions	-	220.000	-	-	-	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain/						
Other non-currrent liabilities	-	-	200.000	88.500	-	288.500
Jumlah/*Total*	2.915.117	1.458.687	990.160	2.041.295	1.745.828	9.151.087

Risiko Lain-lain

Informasi berikut menjelaskan mengenai risiko-risiko material yang menurut Grup dapat berpengaruh terhadap hasil operasi dimasa depan, kondisi keuangan dan yang kemungkinan dapat menyebabkan perbedaan yang material dari ekspektasi saat ini dan berpotensi memiliki pengaruh yang kurang baik.

Other Risks

The following information describes the material risks which the Group believes could cause its future result of operations, financial conditions and prospects to differ materially from current expectations and could potentially have adverse impact.

Faktor eksternal:

Industri perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal diluar kendali dari Grup misalnya perubahan peraturan dan kerangka hukum, gerakan sosial dan lingkungan, cuaca dan perubahan iklim, termasuk juga kondisi bisnis dan ekonomi. Keadaan sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi secara signifikan harga komoditas dan terutama harga minyak sawit dari Grup. Meski manajemen memiliki harapan positif yang kuat terhadap masa depan dari industri kelapa sawit dengan kondisi yang kurang menentu, pengaruh dari penurunan performa ekonomi secara global dapat membawa dampak kurang baik terhadap operasi Grup, kondisi keuangan dan kesempatan, sebagai contoh potensi penurunan nilai, penurunan pendapatan dan biaya yang lebih tinggi. Untuk menanggapi situasi ini, Grup secara hati-hati menganalisa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kurang baik tersebut.

External factors:

Palm oil plantation industry is affected by external factors that is beyond the Group's controls such as changes in regulations and legal frameworks, social and environmental movements, weather and climate changes and also economic and business conditions. Such social and environmental movements could materially affect the price of commodities and ultimately the price of the Group's palm oil products. Although management maintain positive expectation strongly toward the future of the palm oil industry despite cyclical movements, the impact of downturn in global economic performance could lead to adverse impacts on the Group's operations, financial conditions and prospects, for example potential impairment, lower revenue and higher costs. In response to this, the Group carefully analyze any counter measures that could be implemented to reduce the negative impact.

Faktor internal:

Faktor internal yang dianggap oleh Grup memiliki pengaruh signifikan adalah efisiensi produksi dan pengembangan perkebunan Grup.

Internal factors:

Internal factors that the Group considers significant are efficiency of its production and development of its plantations.

Menanggapi resiko yang berkaitan dengan operasional, Grup telah melakukan langkah-langkah berikut:

In response to these risks related to the operations, the Group continously perform the following measures:

- Memperkuat pengendalian terhadap aktivitas penanaman, perawatan dan pemanenan di tiap kebun.
- Mengawasi perubahan faktor-faktor eksternal seperti cuaca, aktivitas sosial dan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap operasi Grup dan melakukan langkah-langkah yang tepat terhadap perubahan tersebut.
- Mengawasi dan mengendalikan secara berkelanjutan kebun-kebun baru dan yang telah ada dengan melakukan pemetaan secara rutin dan penilaian atas area tertanam.

- Strengthen control of activities related to planting, maintaining and harvesting in each plantation estate.
- Monitor any changes of external factors such as weather, social and environmental activities that affected group operation and take appropriate responses to such changes.
- Continuously monitor and control of new and existing estates by having regular mapping and assessment of planted area.

Berdasarkan pemetaan dan pengkajian yang sedang berlangsung dengan menggunakan teknologi terkini atas area tertanam dari setiap kebun, saat ini Grup mencatat area tertanam sebesar 74.339 hektar. Proses pemetaan dan pengkajian saat ini masih terus berlangsung atas seluruh area tertanam.

Based on ongoing mapping and assessment using the latest technology on planted area of each estate, the Group currently records planted area of 74,339 hectares. Mapping and assessing processes are still ongoing over the entire planted area.

44. Penjualan Entitas Anak

2023

PT Mandiri Kapital Jaya (MKJ)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Kapital Jaya No. 21 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham MKJ menyetujui pengalihan saham sebanyak 166.080 saham milik SGA kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 1.386.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Kapital Jaya No. 22 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham MKJ menyetujui pengalihan saham sebanyak 18.452 saham milik SGA kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 154.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Kapital Jaya No. 23 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham MKJ menyetujui pengalihan saham sebanyak 1 saham milik PT Mitra Hamparan Lestari kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 8.345 (dalam rupiah penuh)

PT Arrtu Plantation (APN)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 25 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 89.141.851 saham milik BLP kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 443.

44. Disposal of Subsidaries

2023

PT Mandiri Kapital Jaya (MKJ)

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Mandiri Kapital Jaya No. 21 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the MKJ's shareholders approved a transfer of 166,080 shares owned by SGA to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 1,386.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Mandiri Kapital Jaya No. 22 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the MKJ's shareholders approved transfer of 18,452 shares owned by SGA to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 154.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Mandiri Kapital Jaya No. 23 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the MKJ's shareholders approved transfer of 1 shares owned by PT Mitra Hamparan Lestari to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 8,345 (in full rupiah).

PT Arrtu Plantation (APN)

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 25 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 89,141,851 shares owned by BLP to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1.000 per share and total value amounting to Rp 443.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 26 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 91.190.749 saham milik BLP kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 453.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 26 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 91,190,749 shares owned by BLP to Jonathan Khans Gunawan with the nominal of Rp 1.000 per share and total value amounting to Rp 453.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 27 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 180.332.597 saham milik ADS kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 896.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 27 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 180,332,597 shares owned by ADS to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1.000 per share and total value amounting to Rp 896.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 28 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 62.845.944 saham milik STP kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 and total nilai jual beli sebesar Rp 312.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 28 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 62,845,944 shares owned by STP to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000 per share and total value amounting to Rp 312.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 29 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 386.625.749 saham milik JMS kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 1.921.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 29 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 386,625,749 shares owned by JMS to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000 per share and total value amounting to Rp 1,921.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 30 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 82.788.217 saham milik BHL kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 411.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No 30 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 82,788,217 shares owned by BHL to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000 per share and total value amounting to Rp 411.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 31 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 18.982.379 saham milik PT Rajawali Corpora kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 94.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 31 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 18,982,379 shares owned by Rajawali Corpora to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000 per share and total value amounting to Rp 94.

PT Arrtu Agro Nusantara (AAN)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Agro Nusantara No. 33 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AAN menyetujui pengalihan saham sebanyak 33.874 saham milik Perusahaan kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 687.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Agro Nusantara No. 34 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AAN menyetujui pengalihan saham sebanyak 8.876 saham milik Perusahaan kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 180.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Agro Nusantara No. 35 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AAN menyetujui pengalihan saham sebanyak 43.758 saham milik STP kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1,000,000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 887.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Agro Nusantara No. 36 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AAN menyetujui pengalihan saham sebanyak 2.250 saham milik PT Rajawali Corpora kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 46.

PT Arrtu Energie Resourses (AER)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 38 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 2.375 saham milik Perusahaan kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 11.

PT Arrtu Agro Nusantara (AAN)

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Agro Nusantara No. 33 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AAN's shareholders approved transfer of 33,874 shares owned by the Company to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 687.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Agro Nusantara No. 34 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AAN's shareholders approved transfer of 8,876 shares owned by the Company to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of Rp. 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 180.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Agro Nusantara No. 35 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AAN's shareholders approved transfer of 43,758 shares owned by STP to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 887.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Agro Nusantara No. 36 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AAN's shareholders approved transfer of 2,250 shares owned by PT Rajawali Corpora to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 46.

PT Arrtu Energie Resourses (AER)

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 38 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 2,375 shares owned by the Company to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 11.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 39 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 165.272 saham milik STP kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 795.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 39 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 165,272 shares owned by STP to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 795.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 40 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 19.530 saham milik STP kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 94.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 40 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 19,530 shares owned by STP to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 94.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 41 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 8.000 saham milik BHL kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 39.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 41 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 8,000 shares owned by BHL to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amouting to Rp 39.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 42 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 125 saham milik PT Rajawali Corpora kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 1.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 42 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 125 shares owned by PT Rajawali Corpora to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 1.

PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP)

PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 44 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham ABP menyetujui pengalihan saham sebanyak 36.172 saham milik Perusahaan kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli saham sebesar Rp 186.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 44 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the ABP's shareholders approved transfer of 36,172 shares owned by the Company to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 186.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 45 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham ABP menyetujui pengalihan saham sebanyak 23.203 saham milik Perusahaan kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli saham Rp 119.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 45 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the ABP's shareholders approved transfer of 23,203 shares owned by the Company to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 119.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 46 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham ABP menyetujui pengalihan saham sebanyak 169.534 saham milik ADS kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli saham sebesar Rp 869.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 46 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the ABP's shareholders approved transfer of 169,534 shares owned by ADS to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 869.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 47 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham ABP menyetujui pengalihan saham sebanyak 3.125 saham milik PT Rajawali Corpora kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli saham sebesar Rp 16.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 47 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the ABP's shareholders approved transfer of 3,125 shares owned by PT Rajawali Corpora to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 16.

Kerugian dari penjualan entitas anak adalah sebesar Rp 214.468.

The losses on disposal of subsidiaries amounted to Rp 214,468.

Pada tanggal penjualan, aset dan liabilitas atas hilangnya entitas anak yang dijual adalah sebagai berikut:

As of the date of disposal, the assets and liabilities of over which control was lost is as follows:

	AAN	ABP	AER	APN	MKJ	Jumlah/ Total	
Jumlah aset lancar	16.865	22.653	1.178	82.879	5.352	128.927	Total current assets
Jumlah aset tidak lancar	226.474	217.909	175.029	676.531	284.055	1.579.998	Total non-current assets
Jumlah liabilitas jangka pendek	(9.270)	(3.237)	(84.109)	(8.783)	(5.578)	(110.977)	Total current liabilities
Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(315.552)	(196.909)	(60)	(611.463)	(249.653)	(1.373.637)	Total long-term employee benefits liability
Aset bersih yang dijual	(81.483)	40.416	92.038	139.164	34.176	224.311	Net assets dispossed of

Arus kas bersih atas penjualan entitas anak adalah sebagai berikut:

The net cash inflow on disposal of the subsidiary is as follows:

	AAN	ABP	AER	APN	MKJ	Jumlah/ Total	
Imbalan yang diterima dalam bentuk kas - bersih	1.754	1.174	939	4.436	1.540	9.843	Consideration received in cash - net

31 Desember 2022

PT Wana Catur Jaya Utama (WJU)

Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan para Pemegang Saham No. 27 tanggal 22 Februari 2022 oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham WJU menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- Pengalihan saham sebanyak 159.134 saham milik Perusahaan kepada PT Mitra Agro Persada Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000.
- Pengalihan saham sebanyak 154.455 saham milik BLP kepada PT Mitra Agro Persada Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000.

31 December 2022

PT Wana Catur Jaya Utama (WJU)

Based on the Notarial Deed No. 27 dated February 22, 2022 of Liestiani Wang, S.H, M.Kn, notary in Jakarta, the WJU's shareholders approved the following matters:

- Transfer of 159,134 shares owned by the Company to PT Mitra Agro Persada Abadi with of nominal value of each share of Rp 1,000,000.
- Transfer of 154,455 shares owned by BLP to PT Mitra Agro Persada Abadi with of nominal value of each share of Rp 1,000,000.

Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan para Pemegang Saham No. 27 tanggal 22 Februari 2022 oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham WJU menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- Pengalihan saham sebanyak 159.134 saham milik Perusahaan kepada PT Mitra Agro Persada Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000.
- Pengalihan saham sebanyak 154.455 saham milik BLP kepada PT Mitra Agro Persada Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000.

Kerugian dari penjualan WJU adalah sebesar Rp 220.272.

Pada tanggal penjualan, aset dan liabilitas atas pengendalian entitas anak adalah sebagai berikut:

Based on the Notarial Deed No. 27 dated February 22, 2022 of Liestiani Wang, S.H, M.Kn, notary in Jakarta, the WJU's shareholders approved the following matters:

- Transfer of 159,134 shares owned by the Company to PT Mitra Agro Persada Abadi with of nominal value of each share of Rp 1,000,000.
- Transfer of 154,455 shares owned by BLP to PT Mitra Agro Persada Abadi with of nominal value of each share of Rp 1,000,000.

The losses on disposal of WJU amounted to Rp 220,272.

As of the date of disposal, assets and liabilities of the above subsidiaries disposed are as follows:

	WCJU	
Jumlah aset lancar	121.732	Total current assets
Jumlah aset tidak lancar	262.157	Total non-current assets
Jumlah liabilitas jangka pendek	(28.667)	Total current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	(119.950)	Total non-current liabilities
Aset bersih yang dijual	235.272	Net assets of dispossed

Arus kas bersih atas penjualan entitas anak adalah sebagai berikut:

The net cash inflow on disposal of subsidiaries follows:

	WJU	
Imbalan yang diterima dalam bentuk kas dan setara kas	15.000	Consideration received in cash and cash equivalents
Dikurangi:		Less:
Saldo kas dan setara kas yang djual	(496)	Cash and cash equivalent balances disposed of
Jumlah imbalan yang diterima	14.504	Total consideration received

45. Nilai Wajar Aset Dan Liabilitas Keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau memiliki tingkat suku bunga pasar.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Grup untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:

45. Fair Value of Financial Assets And Financial Liabilities

Management believes that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.

The following methods and assumptions were used by the Group to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Karena instrumen keuangan tersebut jatuh tempo dalam jangka pendek, maka nilai tercatat aset keuangan lancar dan liabilitas jangka pendek telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga variable

Merupakan utang jangka panjang berupa utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank dimana nilai wajarnya pada Level 2 yang ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga berlaku dari suku bunga pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Current financial assets and liabilities

Due to the short-term nature of the transactions, the carrying amounts of the current financial assets and liabilities approximate the estimated fair values.

Noncurrent financial liabilities with variable interest rate

Consist of long-term loans which bank loans and loan from non-bank fair value in level 2 is determined by discounting future cash flow using applicable rates from observable market rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

46. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

46. Reconciliation of Liabilities Arising From Financing Activities

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	1 Januari/ *January 1, 2023*	Arus kas aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows*	Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes*: Penjualan Entitas Anak/ *Disposal of Subsidiaries*	Amortisasi biaya transaksi/ *Amortised facility fee*	Perubahan lainnya/ *Other Changes*	Perolehan aset sewa pembiayaan/ *Acquisition of leased assets*	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Utang bank jangka pendek	442.100	(48.382)	-	-	-	-	393.718	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	6.087.785	(613.133)	(1.369.487)	36.461	-	-	4.141.626	Long-term bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	400.934	141.498	(82.875)	-	(197.900)	-	261.657	Short -term loan from non-bank financial institution
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	9.491	(3.317)	(818)	66	197.900	-	203.322	Long -term loan from non-bank financial institution
Liabilitas sewa	118.821	(48.431)	-	-	(18.320)	55.605	107.675	Lease liabilities
Jumlah	7.059.131	(571.765)	(1.453.180)	36.527	(18.320)	55.605	5.107.998	Total

	1 Januari/ *January 1, 2022*	Arus kas aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows*	Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes*: Selisih kurs mata uang asing/ *Difference on foreign exchange*	Amortisasi biaya transaksi/ *Amortised facility fee*	Perubahan lainnya/ *Other Changes*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Utang bank jangka pendek	292.100	-	-	-	150.000	442.100	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	6.515.751	(322.144)	-	44.178	(150.000)	6.087.785	Long-term bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	113.301	6.833	-	-	280.800	400.934	Short -term loan from non-bank financial institution
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	293.689	(3.568)	-	170	(280.800)	9.491	Long -term loan from non-bank financial institution
Liabilitas sewa	22.955	(24.338)	172	-	120.032	118.821	Lease liabilities
Jumlah	7.237.796	(343.217)	172	44.348	120.032	7.059.131	Total

47. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas Konsolidasian

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas:

	2023	2022	
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa (Catatan 25)	55.605	147.603	Acquisition of property and equipment through lease liabilities (Note 25)

47. Supplemental Disclosures on Consolidated Statements of Cash Flows

The following are the noncash investing and financing activities of the Group:

48. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Perubahan susunan Komite Audit

   Susunan Komite Audit Perusahaan per 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

48. Subsequent Event

1. The changes of Audit Committe

   The Audit Committee as of January 1, 2024 is as follows:

		2024		
Ketua	:	Yohanes Wahyu Saronto	:	Chairman
Anggota	:	Riniek Winarsih	:	Members
		Bastian Purnama		

   Susunan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Audit No. 002/BC/Int/XII/2023 pada tanggal 27 Desember 2023.

   The Audit Committeee is based on the Decree on the Establishment of the Audit Committee No. 002/BC/Int/XII/2023 on December 27, 2023.

2. Utang PT Bank Permata Tbk

   Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah No: 0036/KKS/AMD/II/2024/CG5 tanggal 15 Februari 2024, Perusahaan telah memperpanjang fasilitas pinjaman modal kerja musyarakah mutanaqisah dari PT Bank Permata Tbk menjadi jatuh tempo pada 19 Februari 2025.

2. PT Bank Permata Tbk's Loan

   Based on the Agreement of the Provision of Sharia Financing Facility No. 0036/KKS/AMD/II/2024/CG5 dated February 15, 2024, the Company has extended the period of Musyarakah Mutanaqisah Working Capital facility to February 19, 2025 from PT Bank Permata Tbk.

3. Utang PT Bank J Trust Indonesia Tbk

   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. 007/SPKK/JTRUST/CBOD/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, Perusahaan telah memperpanjang fasilitas pinjaman revolving dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk menjadi jatuh tempo 23 Februari 2025.

3. PT Bank J Trust Indonesia Tbk

   Based on Credit Decision Notification Letter No. 007/SPKK/JTRUST/CBOD/II/2024 dated February 22, 2024, the Company has extended the period of Revolving Loan facility to February 23, 2025 from PT Bank J Trust Indonesia Tbk.

4. Pencairan Fasilitas Pembiayaan

   a. Perusahaan

      Pada tahun 2024, Perusahaan memperoleh pembiayaan modal kerja dengan jaminan maksimal sebesar Rp 40.211 dari PT Radana Bhaskara Finance Tbk. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 23 September 2024.

4. Drawdown factoring

   a. The Company

      In 2024, the Company obtained working capital financing with maximum guarantee amounting to Rp 40,211 from PT Radana Bhaskara Finance Tbk. This facility has a maturity date of September 23, 2024.

b. BHL

Pada tahun 2024, BHL memperoleh pembiayaan modal kerja dengan jaminan maksimal sebesar Rp 10.000 dari PT Globalindo Multi Finance. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 31 Desember 2024.

b. BHL

In 2024, BHL obtained working capital financing with maximum guarantee amounting to Rp 10,000 from PT Globalindo Multi Finance. This facility has a maturity date of December 31, 2024.

49. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Sehubungan dengan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap 1 Tahun 2024, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya pada tanggal 31 Desember 2023, dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali. Berikut ini adalah informasi perubahan atas laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali:

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian: merevisi referensi catatan yang mengacu pada kebijakan akuntansi untuk seluruh akun.
2. Laporan arus kas konsolidasian: merevisi rincian arus kas pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
3. Catatan 1a: menambahkan pengungkapkan pemegang saham mayoritas disesuaikan menjadi nama entitas induk dan entitas induk terakhir (pengendali terakhir Perseroan).
4. Catatan 1c: merevisi tahun berdiri menjadi tahun operasi secara komersial dan menambahkan akta perubahan modal selama periode pelaporan untuk masing-masing entitas anak.
5. Catatan 1d: menambahkan pengungkapan mengenai cakupan manajemen kunci
6. Catatan 3a: merevisi pernyataan kesesuaian SAK disesuaikan menjadi "…peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang..."
7. Catatan 6: menambahkan pengungkapan besarnya bunga atas penempatan pada bank dan lainnya.

49. Reissue of the Consolidated Financial Satetements

In relation with the Company's plan to conduct the Continuing Public Offering of Shelf-Registered Bonds I of Eagle High Plantations Phase 1 Year 2024, the Company has reissued its consolidated financial statements as of December 31, 2023, accompanied by some changes and additional disclosures in the consolidated financial statements to the consolidated financial statements. There is no material difference between the previous consolidated financial statements and the reissued consolidated financial statements. The following is information on changes to the consolidated financial statements:

1. Consolidated statement of financial position: revision note references to accounting policies for all accounts.
2. Consolidated statement of cash flows: revision the breakdown of cash flows in operating, investing and financing activities.
3. Note 1a: additional disclosure of the majority shareholder to the name of the parent entity and the ultimate parent entity (ultimate controller of the Company).
4. Note 1c: revision the year of establishment to the year of commercial operation and added deeds of capital changes during the reporting period for each subsidiary.
5. Note 1d: additional disclosure on key management coverage
6. Note 3a: revision the SAK conformity statement to be adjusted to "...regulations of the capital market regulator, namely Regulation No. VIII.G.7 regarding..."
7. Note 6: additional disclosure of interest on placements with banks and others.

8. Catatan 9: merevisi untuk pengungkapan pos lain-lain.
9. Catatan 10: merevisi untuk pengungkapan pos lain-lain.
10. Catatan 11: merevisi untuk pengungkapan pos lain-lain.
11. Catatan 12 persediaan: merevisi untuk pengungkapan pos lain-lain.
12. Catatan 16 aset tetap: menambahkan pengungkapan jumlah aset tetap yang tidak dipakai sementara, jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan nilai buku, hasil penjuakan neto dan kerugian dari aset tetap yang dihentikan pengakuannya.
13. Catatan 18: merevisi pengungkapan pos lain-lain serta mengungkapkan kisaran suku bunga kontraktual atas kas yang dibatasi penggunaannya.
14. Catatan 19: menambahkan pengungkapan mengenai pembatasan atas masing-masing fasilitas pinjaman.
15. Catatan 22: merevisi pengungkapan pos lain-lain.
16. Catatan 23: menambahkan pengungkapan mengenai pemeriksaan atau sengketa pajak beserta ketetapannya.
17. Catatan 36: menambahkan pengungkapkan pernyataan bahwa laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan (2022).
18. Catatan 37: menambahkan asterik untuk jumlah tertimbang per saham dasar.
19. Catatan 38: menambahkan pengungkapan mengenai perjanjian yang mendasari utang pada RCI dan mengenai persyaratan dan ketentuan, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian; dan rincian garansi yang diberikan atau diterima
20. Catatan 38: menambahkan pengungkapan mengenai adanya penggunaan utang kepada PT Rajawali Corpora.
21. Catatan 42: merevisi judul pengungkapan menjadi segmen operasi.
22. Catatan 43: menambahkan mengenai risiko pasar

8. Note 9: revision for disclosure of other items.
9. Note 10: revision for disclosure of other items.
10. Note 11: revision for disclosure of other items.
11. Note 12: revision for disclosure of other items.
12. Note 16: additional disclosures of the amount of property, plant and equipment that are temporarily idle, the carrying amount of property, plant and equipment that are discontinued from active use and not classified as available-for-sale and the book value, net sales proceeds and losses of derecognized property, plant and equipment.
13. Note 18: revision the disclosure of other items and disclosed the range of contractual interest rates on restricted cash.
14. Note 19: addition disclosures regarding restrictions on each loan facility.
15. Note 22: revision the disclosure of other items.
16. Note 23: additional disclosures about tax audits or disputes and their determinations.
17. Note 36: additional a disclosure statement that the reconciled taxable profit is the basis for filing the Annual Tax Return (2022).
18. Note 37: additional an asterisk for basic weighted number of shares.
19. Note 38: additional disclosures regarding the underlying agreements payable to RCI and regarding the terms and conditions, including whether there are guarantees, and the nature of the consideration to be given, for settlement; and details of guarantees given or received.
20. Note 38: additional disclosures regarding the use of liabilities to PT Rajawali Corpora.
21. Note 42: revised the disclosure title to operating segments.
22. Note 43: additional disclosure of market risk.

****

Halaman ini sengaja dikosongkan